



**Dr. Nursapia Harahap, MA**

# **KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN AGAMA**

**Editor:**  
**Dr. Jamiluddin Marpaung, MA**

# KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN AGAMA

Penulis:  
**Dr. Nursapia Harahap, MA**



CV. Dalni Bintang

# Komunikasi Politik, Demokrasi, dan Agama

**Penulis** : Dr. Nursapia Harahap, MA

**ISBN** : xxx-xxx-xxx-x

**Editor** : Dr. Jamiluddin Marpaung, MA

Cetakan pertama, Agustus 2023

Penerbit CV. Dalni Bintang

Anggota IKAPI Nomor:013/RAU/2022

Alamat:

Jl. Cempaka Petakur Atas, Suka Damai

Kec. Ujung Batu, Kab. Rokan Hulu

Provinsi Riau, 28454

<https://penerbitdalnibintang.com/>

[dalnibintang20@gmail.com](mailto:dalnibintang20@gmail.com)

## **Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit. Isi di luar tanggung jawab percetakan. Ketentuan pidana Pasal 72 UU No. 19 tahun 2002

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas rahmat dan hidayahnya hingga penulisan buku Komunikasi Politik, Demokrasi Dan Agama ini dapat penulis selesaikan. Ucapan terimakasih kepada Ayahanda Alm. Haban Harahap dan Ibunda tercinta Hj. Nurhamida Siagian yang telah membesarkan dan memperjuangkan hingga menyelesaikan Pendidikan yang ditempuh. Disamping itu juga penulis berterimakasih kepada rekan-rekan yang memberi dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan buku terlebih kepada anak-anak penulis yang memberi dorongan yang luar biasa untuk kemajuan penulis di bidang akademisi.

Buku ini mengkaji tentang komunikasi politik dan relasi antara legislatif, eksekutif dan lembaga agama dalam peningkatan pembangunan keagamaan. Pembahasan dalam buku ini merupakan kajian praktis yang terjadi di kalangan eksekutif, legislative dalam menyikapi kebutuhan Lembaga agama. Disamping itu juga di bahas masalah komunikasi politik dalam pandangan Islam serta teori komunikasi yang berkaitan dengan relasi politik dan keagamaan serta hasil-hasil penelitian yang di kutip dari jurnal-jurnal bereputasi internasional dan nasional.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih banyak kekurangannya, karena itu penulis berharap kritik dan saran untuk kesempurnaan penulisan ini. Mudah-mudahan dapat dimanfaatkan oleh pembaca dalam memperkaya khazanah keilmuan.

Medan, 12 Agustus 2023

Penulis,

**Prof. Dr. Nurhayati, MA.**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. DEMOKRASI INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
<b>B. PEMAHAMAN DASAR KOMUNIKASI POLITIK .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>8</b>
<b>KOMUNIKASI POLITIK .....</b>	<b>8</b>
<b>A. Pengertian dan Ruang Lingkup Komunikasi .....</b>	<b>8</b>
1. Pengertian Komunikasi.....	8
2. Hakikat dan Tujuan Komunikasi .....	13
3. Fungsi dan Unsur Komunikasi.....	14
4. Prinsip-Prinsip Komunikasi.....	17
6. Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Islam .....	20
7. Komunikasi Islam Menurut Tinjauan Al-Quran .....	28
<b>B. Politik.....</b>	<b>41</b>
1. Pengertian Politik.....	41
2. Pengertian Komunikasi Politik .....	43
3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Politik Islam .....	64
<b>BAB III .....</b>	<b>67</b>
<b>TEORI KOMUNIKASI POLITIK .....</b>	<b>67</b>
<b>A. Teori Dialektika Relasional.....</b>	<b>67</b>

<b>B. Komunikasi Politik Eksekutif Dan Legislatif Dan .....</b>	<b>69</b>
<b>Lembaga Agama .....</b>	<b>69</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>88</b>
<b>CONTOH ARTIKEL KOMUNIKASI POLITIK.....</b>	<b>88</b>
<b>BEREPUTASI INTERNATIONAL DAN NASIONAL.....</b>	<b>88</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. DEMOKRASI INDONESIA

Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika yang menjadi *role model* bagi negara-negara di dunia dalam pelaksanaan demokrasi.<sup>1</sup> Sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah sistem demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai pemerintahan yang dari, oleh dan untuk rakyat dengan memposisikan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi. Sistem demokrasi ini memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat dan pikiran.<sup>2</sup>

Untuk menjalankan sistem demokrasi Pancasila ini bangsa Indonesia menjadikan UUD 1945 sebagai referensi utama yang secara tegas mengatur sistem pemerintahan yang demokrasi. Dalam UUD 1945 diakui adanya kebebasan dan persamaan hak bagi setiap warga Indonesia, yang kemudian menjadi seperangkat hak dan kewajiban warga negara.<sup>3</sup> Hak dan kewajiban warga negara ini dilindungi oleh undang-undang yang secara jelas mengatur tentang status dan kedudukan warga negara sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia mencerminkan suatu kesatuan demokrasi yang dijalankan atas kepentingan warga negaranya hingga saat ini lahirlah reformasi. Reformasi adalah jawaban atas kebebasan bangsa Indonesia untuk berkiprah dan menentukan perjalanan hidupnya.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 memberi otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk membangun struktur pemerintahan dan birokrasi daerah yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Karena itu undang-undang ini memberi kelonggaran kepada daerah

---

<sup>1</sup>Azyumardi Azra, *Addressing Challenges of Radical Islam: Some Indonesian Lesson to Learn*, Hans Kochler, ed., *The "Global War on Terror" and the Question of World Order*, (Vienna: International Progress Organization, 2008), h. 201.

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28.

<sup>3</sup> UUD 1945, pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan lainnya.

untuk memiliki struktur pemerintahan dan birokrasinya sendiri-sendiri. Pembentukan dan pengelolaan kelembagaan pemerintah daerah sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.

Undang-undang itu juga memberi kewenangan pada daerah untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi dan kepentingan daerah. Dengan demikian, diharapkan program dan kebijakan pembangunan daerah nantinya akan menjadi lebih responsif dan efektif. Undang-undang ini juga memberi daerah kewenangan untuk mengangkat, menempatkan, dan mengembangkan aparatur daerah. Daerah juga diberi kewenangan untuk menentukan sistem intensif dan kesejahteraan aparaturnya sesuai dengan kemampuan keuangannya. Namun pelaksanaan otonomi daerah itu bisa melahirkan potensial problem yang kalau tidak diantisipasi dengan baik bisa menciptakan persoalan-persoalan baru yang tidak diinginkan. Ketimpangan antara daerah merupakan salah satu persoalan yang akan muncul, kemudian juga kecenderungan munculnya pejabat politik aparatur daerah yang dalam hal ini kontrol pusat semakin terbatas dapat mengakibatkan lambannya pergerakan pembangunan di daerah.

Dalam konteks ini, peran elit lokal sangat diharapkan dapat memainkan peran pemberdayaan semua ini. Membangun komunikasi dengan para elit politik dan lembaga-lembaga yang dianggap berkompeten termasuk lembaga agama dalam peningkatan pembangunan kedaerahan harus dilakukan oleh pejabat politis. Agenda politik pada era reformasi ditandai dengan menguatnya demokratisasi dan transparansi dalam semua tataran penyelenggaraan negara dan pemerintahan daerah dengan menerapkan asas desentralisasi sebagai jawaban atas demokratisasi dan transparansi.

Lahirnya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang penyeimbangan keuangan daerah merupakan dasar lahirnya otonomi daerah, di mana kepala daerah berhak mengatur anggaran daerah melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kepentingan rakyat. Untuk menjalankan sistem otonomi daerah, gubernur dan DPRD harus membangun komunikasi politik yang baik agar apa yang diinginkan masyarakat dapat terwujud dengan sebaik-baiknya.

## **B. PEMAHAMAN DASAR KOMUNIKASI POLITIK**

Komunikasi politik pada dasarnya diartikan sebagai proses berjalannya hubungan antara lembaga-lembaga dalam sistem politik nasional dan hubungan lembaga-lembaga dengan masyarakat sehingga terjadi pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan.<sup>4</sup>

Komunikasi politik di beberapa daerah sudah berubah arah, dimana komunikasi politik dijadikan sebagai ajang saling menjatuhkan satu sama lainnya. Pada beberapa kasus anggota DPRD menjadi tersangka karena salah memanfaatkan kewenangannya, pada kasus lain kepala daerah diberhentikan oleh DPRD dan ironisnya lagi DPRD dan kepala daerah bersama-sama menyalahgunakan jabatannya. Inilah kenyataan betapa peliknya persoalan komunikasi politik antara eksekutif dan legislatif.

Struktur pemerintahan Indonesia yang didasarkan pada demokrasi Pancasila sebagaimana yang dimuat dalam UUD 1945 disebutkan bahwa struktur pemerintahan terdiri atas eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai pelaksana pemerintahan.<sup>5</sup> Ketiga struktur tersebut menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam upaya pencapaian dan mewujudkan kepentingan rakyat. Eksekutif dalam hal ini terdiri atas presiden, wakil presiden dan menteri yang bertugas menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan legislatif berfungsi sebagai pembuat undang-undang yang didasarkan pada kepentingan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam sistem demokrasi yang dalam hal ini diwakili Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), demikian juga yudikatif seperti Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga pelindung negara berfungsi untuk mempertahankan undang-undang supaya sesuai dengan tujuan

---

<sup>4</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 289.

<sup>5</sup>A.M. Fatwa, *Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2009), h. 9.

dibuatnya undang-undang tersebut.<sup>6</sup>

Dalam konteks yang lebih praktis di daerah, struktur pemerintahan juga mengacu pada apa yang dikemukakan bahwa eksekutif dan legislatif merupakan bagian dari pemerintah daerah untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagai pelaksana pemerintah. Struktur pemerintah yang sama juga berlaku berdasarkan status dan fungsi masing-masing, yaitu gubernur dan wakil gubernur merupakan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai legislatif yang memiliki tugas dan fungsi menetapkan rancangan pembangunan di daerah yang kita sebut dengan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Komunikasi antara eksekutif dengan legislatif dan lembaga agama dapat berlangsung baik jika didukung situasi dan suasana yang harmonis. Untuk menciptakan keharmonisan dalam sebuah komunikasi harus ada kepercayaan dan kejujuran serta keterbukaan yang tinggi. Sikap seperti ini harus terbangun di kalangan eksekutif, legislatif dan lembaga agama terutama dalam proses rencana pembangunan lima tahun ke depan. Menurut Nitin Bhatnagar dan Mamta Bhatnagar:

*“communication climate an organization’s or educational. They encourage openness and honesty, and their employees feel free to confess their mistakes, to disagree with the superiors, ethical people are generally trustworthy, fair and impartial, respecting the rights of others and concerned about the impact of their actions on society.”*<sup>7</sup> (Iklim komunikasi harus terbuka dalam sebuah organisasi atau pendidikan. Mereka mendorong keterbukaan dan kejujuran, dan karyawan mereka merasa bebas untuk mengakui kesalahan mereka, tidak setuju pada atasan jika perintahnya salah. Secara umum orang dapat dipercaya, adil dan tidak memihak, menghormati hak orang lain dan khawatir dampak dari tindakan mereka pada masyarakat).

Dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya gubernur

---

<sup>6</sup> Riri Nazriyah, *MPR RI: Kajian Terhadap Produk Hukum dan Prospek di Masa Depan*, (Yogyakarta: UII, 2007), h. 44.

<sup>7</sup> Nitin Bhatnagar dan Mamta Bhatnagar, *Effective Communication and Soft Skill Strategi for Succes*, (New Delhi: Dorling Kindersley, 2012), h. 364.

sebagai eksekutif dan DPRD sebagai legislatif merupakan dua struktur yang paling menentukan sebuah pembangunan di daerah, sebab gubernur sebagai pelaksana pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak dapat memisahkan diri dari DPRD sebagai lembaga yang berwenang menetapkan anggaran daerah. Oleh sebab itu, kedua struktur pemerintahan ini tentunya merupakan kelompok yang paling banyak berkomunikasi, baik dalam bentuk komunikasi internal ataupun eksternal, maka tentu kedua lembaga ini sangat menentukan bagaimana sebuah kebijakan dirumuskan dan dijalankan sepenuhnya.

Sebagai sebuah lembaga yang berbeda tentunya kecenderungan masing-masing sangat menentukan bagaimana sebuah produk kebijakan dilakukan. Oleh sebab itu, antara kedua lembaga ini harus selalu terjalin hubungan yang baik untuk mewujudkan terciptanya tujuan pembangunan yang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat. Secara khusus hubungan kedua lembaga ini tentu saja dipahami sebagai bentuk hubungan politik dalam upaya menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, sebab dalam hal ini tentu saja komunikasi politik yang terbangun antar kedua lembaga negara ini sangat menentukan bagaimana upaya perwujudan untuk memenuhi kepentingan rakyat.

Di samping komunikasi eksekutif dan legislatif, lembaga agama juga harus membangun komunikasi terhadap kedua lembaga di atas. Tugas lembaga agama adalah membentuk spritual manusia ke arah yang lebih baik, membimbing masyarakat untuk memiliki sikap dan etika yang baik di semua kehidupan, baik kehidupan beragama, bermasyarakat, berpolitik dan bernegara. Apalagi dilihat dari kondisi masyarakat hari ini di mana dekadensi moral telah terjadi, baik di kalangan aparaturnegara, tokoh politik bahkan di kalangan akademisi hal itupun terjadi.

Lembaga agama adalah mitra pemerintah dalam perbaikan umat. Sudah sepantasnya lembaga-lembaga agama mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam rangka membangun sikap beragama, membangun mental dan kepribadian umat supaya ikut bersama membangun, menjaga dan melestarikan pembangunan. Munculnya miskomunikasi antar umat beragama diawali oleh persepsi terhadap penilaian agama yang berbeda dalam masyarakat. Jika hubungan beragama tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman laten bagi sistem pemerintahan di

Indonesia.

Persoalan yang paling banyak dihadapi adalah sikap tidak peduli masyarakat atas pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah. Sikap tidak peduli adalah hal yang urgen yang perlu dicari solusinya. Dalam persoalan yang sangat urgen ini sudah seharusnya lembaga agama dilibatkan dalam perencanaan pembangunan keagamaan mulai dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kecamatan sampai di tingkat provinsi. Sampai penetapan RAPBN dan RAPBD hal ini belum terwujud sepenuhnya. Untuk itu, apabila komunikasi politik keduanya terjalin secara baik, maka tentu dapat dipastikan kinerja dari kedua lembaga ini juga akan berjalan secara baik pula. Demikian juga sebaliknya, apabila komunikasi politik keduanya tidak sesuai sebagaimana mestinya, tentu dapat dipastikan akan memberi inflikasi pada upaya pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Dari data di atas sudah seharusnya posisi kelembagaan Islam itu mendapat prioritas dalam pembangunan, khususnya pembangunan keagamaan apalagi ditopang oleh eksekutifnya mayoritas muslim, baik gubernur maupun sekretaris daerah. Ternyata identitas yang ada bukan ukuran bagi kita mendapat perhatian yang lebih. Lembaga agama dalam memperoleh bantuan pembangunan tidak sebanding angkanya dengan bantuan pembangunan kepada lembaga yang lainnya, tentu ini tidak terlepas dari komunikasi politik yang dibangun. Lantas bagaimana komunikasi politik yang dibangun lembaga keagamaan dengan eksekutif dan legislatif. Inilah yang perlu dikaji dalam penelitian ini secara mendalam sehingga pembangunan keagamaan ke depan menjadi prioritas utama, juga merupakan bagian penting dan integral dalam upaya pembangunan nasional, sebab agama tidak hanya menjadi hal yang menjadi urusan kepentingan masyarakat, tetapi juga negara yang merupakan bentuk refleksi atas pengamalan Pancasila, sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa”.

Sejauh ini ada kesan yang muncul di kalangan masyarakat bahwa pembangunan tidak merata dan tidak berkeadilan baik dari segi jumlah dana yang diberikan maupun jumlah lembaga penerima bantuan sangat berbeda terutama pada lembaga-lembaga agama, baik yang di tingkat kota maupun kabupaten di seluruh Indonesia. Standar operasional

pelaksanaan penyaluran bantuan yang tidak jelas, tidak adanya kriteria penerima bantuan yang ditetapkan serta tidak dilakukannya survey kepada lembaga-lembaga yang diusulkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, sehingga terkesan tercipta polarisasi di kalangan eksekutif dan legislatif dalam menetapkan rancangan pembangunan khususnya bantuan kepada lembaga agama. Tidak hanya itu, angka pengusulan yang ditawarkan cukup fantastis di antara lembaga yang ada, akan tetapi justru bantuan yang bermuatan pembangunan keagamaan yang banyak menghadapi masalah baik organisasi keagamaan, pendidikan dan khususnya rumah ibadah. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada komunikasi yang terputus antara eksekutif legislatif dan lembaga agama dalam rangka peningkatan pembangunan keagamaan.

## **BAB II**

# **KOMUNIKASI POLITIK**

### **A. Pengertian dan Ruang Lingkup Komunikasi**

#### **1. Pengertian Komunikasi**

Setiap manusia sangat membutuhkan komunikasi dalam rangka memenuhi seluruh aspek kebutuhan manusia, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani harus dilakukan dengan proses komunikasi. Untuk mengekspresikan diri, membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadian manusia selalu melakukan komunikasi dengan orang lain.

Sejak manusia diciptakan sebagai makhluk sosial maka dia mempunyai tujuan dan ambisi hidup. Dia mulai berhadapan dengan kebutuhan untuk berhubungan satu sama lain, dan di dalam tatanan hubungan itulah manusia selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan Tuhannya serta lingkungan dengan berbagai cara.

Komunikasi adalah kebutuhan yang urgen bagi manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang ingin selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Tangisan manusia sejak lahir merupakan awal komunikasi yang dibangun dengan lingkungan khususnya ibu. Jika bayi menangis ada pesan yang terkandung kalau bayi sudah lapar atau basah. Bayi dapat berbicara karena mendengar suara dari lingkungan sekitar. Manusia yang tidak pernah berinteraksi dengan manusia lainnya tidak akan mampu berbicara seperti bahasa manusia. Kisah nyata terjadi pada satu rumah tangga yang dikutip dalam buku psikologi komunikasi.

Pada tahun 1970, di California, seorang ibu berusia 50 tahun melarikan diri dari rumahnya setelah bertengkar dengan suaminya yang berusia 70 tahun. Ia membawa anak gadisnya yang berusia 13 tahun. Mereka datang meminta bantuan pada petugas kesejahteraan sosial. Tetapi petugas melihat hal aneh pada anak gadis yang dibawanya. Perilakunya tidak menunjukkan anak yang normal. Tubuhnya bungkuk, kurus kering, kotor, dan menyedihkan. Sepanjang saat ia tidak henti-hentinya meludah. Tidak satu saat pun terdengar bicara. Petugas mengira

gadis ini telah dianiaya ibunya. Polisi dipanggil, dan kedua orang tuanya harus berurusan dengan pengadilan. Pada hari sidang, ayah itu membunuh dirinya dengan pistol. Ia meninggalkan catatan, “Dunia tidak akan pernah mengerti”. Mungkin ia benar, dunia tidak akan mengerti bagaimana mungkin seorang ayah dapat membenci anaknya begitu sangat. Penyelidikan kemudian mengungkapkan bahwa Genie, demikian nama samaran gadis tersebut, melewati masa kecilnya di neraka yang dibuat ayahnya sendiri. Sejak kecil ayahnya mengikat Genie dalam sebuah tempat duduk yang ketat. Sepanjang hari ia tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Malam hari ia ditempatkan dalam semacam kurungan dari besi. Seringkali ia kelaparan. Kalau Genie menangis, ayahnya memukulinya. Si ayah tidak pernah bicara, si ibu terlalu tua untuk mengurusnya. Kakak laki-laki Genie-lah akhirnya yang berusaha memberi makan dan minum. Itupun sesuai dengan perintah ayahnya, harus dilakukan diam-diam, tanpa mengeluarkan suara. Genie tidak pernah mendengar orang bercakap-cakap. Kakak dan ibunya sering mengobrol dengan berbisik karena takut pada ayahnya.

Ketika Genie masuk rumah sakit, ia tidak diketahui apakah dapat berbicara atau mengerti pembicaraan orang. Ia membisu, kepandaianya tidak berbeda dengan anak yang berusia satu tahun. Dunia mungkin tidak akan pernah mengerti, tetapi ditemukannya Genie telah mengundang rasa ingin tahu psikolog, linguis, neurolog, dan mereka yang mempelajari perkembangan otak manusia. Genie adalah contoh yang langka tentang seorang anak manusia yang sejak kecil hampir tidak pernah memperoleh kesempatan berkomunikasi. Penemuan Genie menarik perhatian, Genie tidak dibekali keterampilan mengungkapkan pikirannya dalam bentuk lambang-lambang yang dipahami orang lain. Apakah kurangnya keterampilan ini menghambat perkembangan mental lainnya? Apakah sel otak mengalami keterlambatan pertumbuhan? Apakah seluruh sistem kognitifnya menjadi lumpuh? Inilah di antara sekian banyak pertanyaan yang menyebabkan Susan Curtis, profesor linguistik di University of California, mencurahkan waktu tujuh tahun untuk meneliti Genie.<sup>8</sup>

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa manusia sangat

---

<sup>8</sup>Pines. M. *The Cicilizing Of Genie, Pschology To Day*. Premack, A.J dan D. Premack, 1981. h. 28-34.

membutuhkan komunikasi, karena dengan adanya komunikasi menggunakan bahasa maupun lambang bahasa yang sering dipergunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi manusia tidak bisa mengungkapkan isi hatinya dengan bahasa yang dimengerti orang lain.

Allah menciptakan manusia berbeda-beda, baik dari suku, adat istiadat, bahasa, warna kulit dan juga agama. Fungsi keragaman ini agar manusia saling mengenali satu sama yang lain dari perbedaan yang ada. Jika kita lihat orang yang berkulit hitam dan berambut kriting kita mengatakan itu orang Negro. Kulit putih mata cipit asumsinya orang Cina. Ini merupakan rahmat Tuhan supaya manusia mampu berkomunikasi dengan orang lain sesuai dengan bahasa, adat dan kebiasaan orang yang dihadapinya.

Dalam perspektif Islam akhir dari proses komunikasi adalah menghantarkan manusia untuk merasakan kehidupan yang damai dan nyaman. Islam selalu melarang keras kepada umatnya untuk menceritakan aib orang lain, fitnah, mencela, mengumpat dan mengadu domba orang lain. Karena hal ini dapat merugikan dan membahayakan orang lain. Pesan yang disampaikan oleh lisan, tulisan yang digoreskan oleh pena, atau bahasa tubuh merupakan terjemahan dari hati dan sanubari pengirim pesan. Akan tetapi dalam kehidupan ini terjadi sebaliknya kadang lisan menyembunyikan suara hati meskipun dengan susah payah dan tidak jarang anggota tubuh harus bersandiwara melakukan pekerjaan yang tidak dikehendaki hati.

Beberapa hal yang lebih urgen ketika berkomunikasi dengan orang lain adalah komunikasi pada diri sendiri, mengekspresikan diri dan membiarkan orang lain tahu tentang kepribadian kita, terutama tentang pikiran dan pendapat kita tentang sesuatu hal tertentu tentang kehidupan bersama. Bagaimana menyampaikan perasaan dan pikiran serta gagasan kita pada orang lain disalurkan lewat komunikasi. Seandainya manusia dapat membeli sumber daya dan waktu berapapun harganya, maka setiap orang telah membayar harga mahal hal itu untuk mengulang komunikasi yang sudah dilewati dan berlalu. Maka setiap orang berani mengeluarkan biaya yang cukup mahal, tidak menghitung waktu dan tenaga baik melalui lisan, media maupun lobi-lobi yang

dibangun untuk mencapai tujuan komunikasi yang diinginkannya.

Para ahli komunikasi sepakat bahwa kegagalan komunikasi dapat berakibat fatal, baik secara individual maupun sosial. Secara individual kegagalan komunikasi menimbulkan kerugian yang besar, keinginan tidak tercapai mengakibatkan orang frustrasi, depresi dan penyakit penyakit kejiwaan lainnya. Secara sosial kegagalan komunikasi menimbulkan salah pengertian di antara komunikator dan komunikan, munculnya ketidakpercayaan, menghambat kerjasama, intoleransi dan merintangi pelaksanaan norma-norma sosial.<sup>9</sup>

Komunikasi politik sebagai suatu disiplin ilmu sosial yang dikaji dengan berbagai sudut pandang baik oleh ilmuwan komunikasi maupun ilmuwan politik maka tidak mengherankan jika terjadi pemahaman yang berbeda satu sama lainnya tentang pengertian komunikasi dan politik. Hal ini dikarenakan perkembangan ilmu sosial disatu sisi cenderung makin terspesialisasi, namun di sisi lain terdapat suatu keterpaduan karena ada persamaan antara obyek yang dibahasnya. Untuk mempermudah memahami konsep komunikasi politik maka terlebih dahulu dikemukakan apa makna komunikasi dan politik. Makna kata komunikasi yang kita terima sekarang yang dipelajari dan dipahami tampaknya merupakan satu “konvensi” di antara para ahli.

Kata komunikasi berasal dari dua kata *communio* dan *community* berasal dari bahasa latin *communicare* yang berarti *to make common* membuat sesuatu bersama-sama atau *to share*. Pengertian komunikasi menurut istilah adalah proses atau tindakan untuk mengalihkan pesan dari suatu sumber kepada penerima melalui saluran media yang juga dimaknakan sebagai pertukaran, mengirimkan, mengalihkan, berbicara isyarat menulis, mendayagunakan dan menghubungkan<sup>10</sup>.

Komunikasi juga diartikan sebagai pertukaran informasi, ide, sikap, emosi pendapat atau instruksi antara individu atau kelompok yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu, memahami dan

---

<sup>9</sup>Jalaluddin Rahmat, *Islam Aktual* (Bandung: Mizan, 1991), h. 76.

<sup>10</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba ada, Serba Makna* (Jakarta: Pranada Media Group, 2011), h.

mengkordinasikan suatu aktifitas.<sup>11</sup> Jika kita berasumsi bahwa komunikasi terjadi setelah penerima berhasil memahami pesan, maka telah terjadi kesalahan dalam pemaknaan komunikasi. Kesalahan dalam memaknai komunikasi akan berefek dengan kegagalan komunikasi. Jadi komunikasi tidak sama dengan memberikan informasi atau komunikasi berkaitan dengan penggunaan pengaruh, komunikasi lebih jauh dan lebih dalam. Oleh karena itu komunikasi dimaknakan sebagai sebuah proses merubah perilaku orang lain sehingga komunikan mau bertindak dan melaksanakan apa yang disampaikan komunikator.

Untuk memperjelas pemahaman tentang komunikasi dikemukakan pendapat salah seorang dari empat Bapak komunikasi yang mendapat sebutan *the founding fathers* komunikasi, yaitu Harold D. Laswell yang terkenal dengan konsepnya tentang model Laswell.<sup>12</sup> Menurut Laswell, persoalan komunikasi menyangkut lima pertanyaan sederhana sebagai berikut: (a) *who* (siapa)? (b) *Says what* (mengatakan apa)? (c) *in whic channel* (melalui saluran apa)? (d) *to whom* (kepada siapa)? (e) *with what effect* (dengan akibat)?<sup>13</sup> Model komunikasi dari Laswell ini menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan (komunikator) pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima (komunikan). Oleh karena itu komunikasi harus dipandang sebagai upaya persuasif.

Selanjutnya Barnlund mengemukakan ada beberapa sifat komunikasi:

a. Dinamis

Sesuatu proses perilaku yang dipikirkan bukan sesuatu yang tersendiri tanpa dipikirkan, ia digerakkan oleh mekanisme internal (aksi diri) atau hanya dipengaruhi kekuatan eksternal.

b. *Continuous* (Berkesinambungan)

Tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri komunikasi sebagai sesuatu yang berkelanjutan tanpa batas akhir.

---

<sup>11</sup>*Ibid*, h. 35.

<sup>12</sup>Liliwari, *Komunikasi Serba ada*, h. 34.

<sup>13</sup> Hendry Subiakto, *Komunikasi Politik, Media dan Demokrasi* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), h. 16.

c. *Circular* (Berputar)

Tidak ada urutan yang linear dalam arus makna dari seseorang kepada orang lain yang terlibat komunikasi secara simultan samping kiri, kanan, depan dan bahkan di belakang.

d. *Unreapeatable* (Tidak Dapat Diulang)

Penciptaan kembali pesan pertama akan berbeda maknanya jika pesan itu diulang kembali oleh komunikator pada waktu yang berbeda.

e. *Irreversible* (Tidak Dapat Dibalik)

Dalam sistem komunikasi apa yang sudah disampaikan pada orang lain tidak akan dapat ditarik kembali dari ingatan penerima pesan.

f. Kompleks atau General

Komunikasi yang dibangun pada semua tingkatan baik komunikasi intrapersonal, interpersonal, organisasional, sosial dan kultural.

Dari penjelasan pengertian komunikasi di atas dapat kita pahami bahwa komunikasi adalah pengiriman pesan dari komunikator kepada komunikan baik verbal maupun non verbal sehingga terjadi perubahan perilaku komunikan.

## **2. Hakikat dan Tujuan Komunikasi**

Komunikasi adalah proses di mana individu berhubungan dengan orang lain di dalam kelompok, organisasi dan masyarakat bahkan pada diri sendiri. Hubungan ini bertujuan menciptakan dan menggunakan informasi yang bersumber dari lingkungannya demi memahami kemanusiaan. Maka sesungguhnya hakikat komunikasi adalah:

a. Komunikasi Adalah Sebuah Proses

Komunikasi merupakan elemen yang sangat penting yang pertama dan utama untuk memahami manusia dari seluruh aspek kehidupannya, apakah dilakukan dengan komunikasi verbal maupun komunikasi non verbal. Proses yang dimaksudkan disini bahwa komunikasi yang dilakukan manusia mengalami tahapan-tahapan mulai dari manusia dilahirkan sampai manusia dewasa dan tua. Tahapan yang dimaksudkan adalah komunikasi yang dilakukan itu bisa dilakukan dengan tanda seperti bayi hingga kepercakapan sampai kepada pengiriman pesan dan

penafsiran pesan komunikasi yang dilakukan oleh orang dewasa.

b. Komunikasi Sangat Penting

Komunikasi merupakan kebutuhan manusia karena tanpa komunikasi manusia tidak akan mampu melakukan apa-apa. Apakah komunikasi yang dilakukan itu dengan lambang, tanda, atau dengan lisan dan perbuatan. Manusia dalam berinteraksi dengan individu, kelompok dan masyarakat dan juga dunia luar sangat membutuhkan komunikasi sebagai penyambung makna dengan orang lain supaya kita hidup damai dan bahagia.

c. Komunikasi Membutuhkan Komunikator dan Komunikan Serta Pesan yang Disampaikan.

d. Komunikasi Menciptakan Adaptasi.<sup>14</sup>

Komunikasi mampu menjembatani manusia melakukan adaptasi baik dengan kelompoknya, masyarakat dan lingkungannya. Dengan berkomunikasi manusia bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan orang lain dengan dirinya karena selalu berkaca dengan lingkungan sekitar.

### **3. Fungsi dan Unsur Komunikasi**

Komunikasi memainkan peranan penting yang integral dari banyak aspek dalam kehidupan manusia. Kita menghabiskan sebahagian besar waktu hidup kita untuk berkomunikasi. Komunikasi dapat memuaskan kehidupan kita manakala semua kebutuhan fisik, identitas diri, kebutuhan sosial dan praktis dapat tercapai. Ini semua merupakan rangkaian fungsi komunikasi. Untuk lebih jelasnya di bawah ini dikemukakan beberapa fungsi komunikasi. Di samping fungsi komunikasi secara umum ada beberapa perbedaan sedikit fungsi komunikasi menurut pandangan Islam. Fungsi-fungsi komunikasi menurut pandangan Islam:

a. Fungsi Informasi

b. Fungsi Meyakinkan

---

<sup>14</sup>Liliweri, *Komunikasi Serba Ada*, h. 124

- c. Fungsi Mengingat
- d. Fungsi Memotivasi
- e. Fungsi Sosialisasi
- f. Fungsi Bimbingan
- g. Fungsi Kepuasan Spritual
- h. Fungsi Hiburan<sup>15</sup>

Adapun unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut:

a) Sumber

Sumber adalah orang yang menyajikan pikiran dan pendapat tentang suatu peristiwa atau objek.<sup>16</sup> Pengirim menyampaikan pesan untuk mendapatkan respon dari penerima.

b) Penerima

Penerima adalah orang yang menafsirkan pesan yang diucapkan atau ditulis baik dengan verbal maupun non verbal. Ketika pesan diterima maka sipenerima akan menterjemahkan pesan sesuai dengan pemahaman dan pola pikirnya.

c) *Encoding dan Decoding*

*Encoding* adalah proses dimana pengirim menterjemahkan ide ke dalam simbol-simbol berupa kata-kata atau non verbal. Hasil penerjemahan ini akan disampaikan pada penerima. Akan tetapi pesan seperti ini tidak akan selalu diperantarai *gate keeper*.

d) Pesan

Pesan adalah materi yang disampaikan pengirim dan penerima dengan menggunakan media atau saluran, baik kata-kata, tulisan maupun simbol. Memaknai kata-kata atau tulisan lebih mudah daripada memaknai simbol.

e) Saluran

Saluran juga merupakan unsur-unsur komunikasi yang sangat penting, ini dibuktikan dengan teknologi komunikasi yang sangat canggih saat ini. Manusia sudah banyak menggunakan *account* untuk

---

<sup>15</sup> Harjani, *Komunikasi Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), h. 187.

<sup>16</sup> Liliweri, *Komunikasi Serba ada*, h.39.

menyampaikan pesan kepada penerima. Dalam hal ini pengirim dan penerima dituntut untuk sigap dalam memahami perkembangan teknologi. Hal ini dapat mengakibatkan ketertinggalan informasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Saluran komunikasi merupakan sarana untuk memindahkan pesan dari pengirim ke penerima apakah saluran digunakan tunggal maupun banyak.

#### f) Noise

Komunikasi yang dilakukan manusia tidaklah selamanya lancar, komunikasi sering mengalami hambatan, gangguan atau distorsi. Menurut Shannon dan Weaver yang dikutip oleh Alo Leliweri mengartikan konsep *noise* sebagai kebisingan. Misalnya ketika anda bertelepon sedang berada di atas mopen umum maka akan ada gangguan dengan suara-suara penumpang lainnya, sehingga pesan yang diterima tidak dapat dimaknai dengan sempurna. Noise dapat berbentuk fisik, fisiologis dan semantik. Ada beberapa jenis hambatan komunikasi:

##### 1. Hambatan Fisik

Meliputi hambatan yang bersumber dari suara-suara bising seperti suara kendaraan, angin, ombak, mesin mobil, bau badan dan bau mulut.

##### 2. Jarak

Jarak yang berjauhan membuat kita susah melakukan komunikasi. Di samping gangguan sinyal juga gangguan jarak antara penerima dengan pengirim pada komunikasi langsung.

##### 3. Psikologis

Gangguan yang bersumber dari faktor-faktor kejiwaan misalnya *self-awareness*, *self-persepsion*, hambatan mental yang mengganggu kelancaran komunikasi.

##### 4. Sosiologis

Hambatan ini adalah hambatan komunikasi karena perbedaan status sosial antara pengirim dengan penerima. Faktor ini mengurangi keluwesan dan kebebasan dalam berkomunikasi.

##### 5. Antropologi

Perbedaan budaya juga dapat menghambat terjadinya komunikasi

terutama kemampuan berbahasa yang dimiliki penerima dengan pengirim tidak sama, kebiasaan yang berbeda dan juga adat istiadat. Hal ini dapat juga menimbulkan *miss understanding* antara pengirim dan penerima sehingga terhambatnya pencapaian tujuan komunikasi.

#### **4. Prinsip-Prinsip Komunikasi**

Ada beberapa prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli komunikasi. Joseph A. Devito menyebutkan prinsip-prinsip komunikasi yaitu:

##### **a. Komunikasi Adalah Paket Isyarat**

Manusia melakukan komunikasi bukan hanya bentuk lisan atau tulisan, tetapi manusia melakukan komunikasi secara *includ*. Apakah komunikasi verbal maupun non verbal atau komunikasi dari keduanya. Apakah menggunakan isyarat tubuh benda atau lainnya yang dapat menimbulkan pemahaman yang sama antara komunikator dengan komunikan.

Dalam segala bentuk komunikasi yang dilakukan apakah antar pribadi, kelompok kecil, pidato di muka umum atau tampil di media massa atau berjabat tangan tidak hangat, gerak-gerik yang gugup, pandangan yang tajam dan sebagainya, itu semua memiliki makna.

##### **b. Komunikasi Adalah Proses Penyesuain**

Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh manusia mengalami proses yang panjang untuk mengenali isyarat-isyarat yang muncul dalam proses komunikasi sehingga kita benar-benar bisa mengerti dan memahami keinginan orang lain.

##### **c. Komunikasi Mencakup Dimensi Isi Dan Hubungan**

Komunikasi dilakukan pada dunia nyata di mana satu dengan yang lainnya saling mengisi. Komunikasi berlangsung karena hubungan antara komunikator dan komunikan merasa dekat. Misalnya dalam sebuah perusahaan pimpinan menyuruh anggotanya untuk datang ke ruangan, ini bermakna bahwa pesan yang disampaikan itu ada isinya dan karena ada hubungan antara keduanya begitu juga antara anak dan orang tua,

guru dengan mahasiswanya, pembeli dengan penjual semua tidak terlepas dari dimensi isi dan hubungan.

d. Komunikasi Melibatkan Transaksi Simetris Dan Komplementer

Cara memandang pada tatatan komunikasi yang bersifat simetris pada pengaruh dan kompetitif. Masing-masing pihak akan mempertahankan kehebatan dan kelebihan yang dimiliki, Pada satu sisi hubungan simetris juga melihat pengaruh. Misalnya dalam sebuah pertemuan jika seseorang menyampaikan pesan baik orasi ilmiah, ceramah maupun acara lainnya, maka komunikasi akan memberikan respon. Jika satu orang memberikan tepuk tangan maka yang lainnya akan bertepuk tangan.

e. Komunikasi Adalah Proses Transaksional.

Komunikasi transaksional dimaksudkan di sini adalah setiap proses komunikasi yang dilakukan selalu memiliki umpan balik. Orang menyampaikan pesan, kita memberikan respon. Setiap orang yang terlibat dalam komunikasi beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Aksi dan reaksi bukan hanya ditentukan dengan apa yang disampaikan tetapi dipengaruhi oleh bagaimana cara kita menyampaikan.

f. Komunikasi Bersifat Tak *Reversibel*<sup>17</sup>

Pemahaman tentang tak *reversibel* dicontohkan pada gula pasir. Gula pasir dipanaskan bisa jadi air gula, air gula dimasak bisa jadi gula kembali. Ini maknanya *reversibel* tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Komunikasi ibarat mengubah anggur menjadi minuman sari anggur, akan tetapi sari anggur tidak akan bisa dikembalikan menjadi buah Anggur. Dalam proses komunikasi apa yang sudah disampaikan tidak akan dapat ditarik kembali.

Ketika menyampaikan pesan komunikasi pada orang lain dan sudah diterima dan direspon dengan baik, buruk baiknya pesan komunikasi itu tidak dapat ditarik kembali walaupun itu memberikan pengaruh buruk pada orang lain. Misalnya kasus Ahok yang dianggap melecehkan umat Islam ketika berkunjung ke pulau seribu.

---

<sup>17</sup>Joseph. A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia, Profesional Books* (Jakarta: 1997), h. 39.

Dalam pertemuan itu saudara Ahok menyampaikan bahwa jika ulama menggunakan Surah Al-Maidah ayat 51 itu membodoh-bodohi masyarakat. Statemen itu menggemparkan seluruh umat Islam Indonesia bahkan dunia sehingga meresahkan masyarakat yang pada akhirnya timbul aksi damai besar-besaran di Jakarta sebagai jawaban dari ketidak cepatan proses hukum. Makna kalimat yang disampaikan saudara Ahok tidak akan dapat ditarik kembali dalam tinjauan prinsip komunikasi yang *reversibel*.

g. Komunikasi Bukan Panasea Untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah

Di samping komunikasi mampu menyelesaikan masalah, komunikasi juga dapat menimbulkan masalah baru jika dalam berkomunikasi terjadi *misunderstanding* antara komunikator dengan komunikan.<sup>18</sup>

Di samping prinsip komunikasi di atas ada juga prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Deddy Mulyana yaitu;

1. Komunikasi adalah proses simbolik yaitu proses penyampaian simbol-simbol kepada sesama manusia baik simbol verbal maupun juga simbol non verbal.
2. Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi, sebab setiap perilaku manusia punya potensi untuk ditafsirkan.
3. Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan.
4. Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan.
5. Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.
6. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.
7. Komunikasi bersifat sistemik.
8. Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi.
9. Komunikasi bersifat nonsekuensial.
10. Komunikasi bersifat prosesual, dinamis dan transaksional.
11. Komunikasi bersifat *irreversible* atau peristiwa dan perilaku yang berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali.

---

<sup>18</sup>Marhaeni Fajar, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 81.

12. Komunikasi bukan panacea (obat mujarab) untuk menyelesaikan berbagai masalah.<sup>19</sup>

Dari penjelasan prinsip komunikasi di atas nampaknya antara prinsip komunikasi Devito dengan prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh Mulyana tidak jauh berbeda. Ada persamaan prinsip yang dikemukakan keduanya bahwa komunikasi bersifat transaksional dan *irreversibel*. Bila dikaitkan dengan komunikasi, ada dua pendekatan atau pola komunikasi yang sering muncul dalam sebuah proses komunikasi yaitu dialog dan transaksional.

## 6. Prinsip-Prinsip Komunikasi Dalam Islam

Islam sebagai agama yang lengkap telah menetapkan Prinsip-prinsip atau Kaidah-kaidah yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan suatu perbuatan, termasuk juga dalam berkomunikasi baik berkomunikasi dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun juga berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya.

Terkait dengan berkomunikasi dengan sesama manusia, Saodah Wok, Narimah Ismail, dan Mohd Yusop Hussain, mengungkapkan beberapa prinsip atau kaidah berkomunikasi yang dapat dijadikan pedoman bagi umat Islam terutama dalam kegiatan berkomunikasi sehari-hari. Prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah berkomunikasi tersebut di antaranya:

- a. Memulai pembicaraan dengan salam.
- b. Bicara dengan lemah lembut.
- c. Menggunakan perkataan yang baik.
- d. Menyebutkan hal-hal yang baik tentang diri komunikan.
- e. Menggunakan hikmah dan nasehat yang baik.
- f. Berkata yang benar.
- g. Menyesuaikan bahasa dan isi pembicaraan dengan tingkat kecerdasan komunikan.
- h. Berdiskusi dengan cara yang baik.
- i. Menyebut hal yang penting berulang kali.

---

<sup>19</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 92.

- j. Lebih dahulu melakukan apa yang dikomunikasikan.
- k. Mempertimbangkan pandangan dan pikiran orang lain.
- l. Berdo'a kepada Allah ketika melakukan kegiatan komunikasi yang berat.<sup>20</sup>

Di samping prinsip di atas Harjani<sup>21</sup> juga mengemukakan prinsip-prinsip komunikasi Islam sebagai berikut:

#### 1) Prinsip Ikhlas

Suatu pesan tidak akan berdampak positif kepada komunikan jika diterima dengan hati yang tidak ikhlas. Ikhlas adalah kerja hati. Ikhlas menurut istilah adalah kerja yang dilakukan oleh hati untuk mensucikan dirinya dari berbagi motif yang tidak benar. Tidak ikhlas menyampaikan atau menerima pesan artinya tidak sucinya keinginan untuk menyampaikan atau menerima pesan.

Prinsip ikhlas ini adalah prinsip yang paling mendasar dalam komunikasi Islam. Kehilangan prinsip ini dari komunikator maupun komunikan akan membuat tujuan utama komunikasi yaitu ibadah menjadi hilang dan kekuatan pesan yang disampaikan memudar. Kehilangan prinsip ini dari salah satu pihak akan membuat proses komunikasi terhambat apalagi bertemu antara ketidak ikhlasan komunikator dengan komunikan. Selain faktor penerima pesan, kekuatan pesan juga dipengaruhi oleh keikhlasan pengirim pesan. Ikhlas dalam komunikasi adalah pilar utama untuk mendapatkan komunikasi yang berkualitas, mendapatkan pahala, selektif dan produktif.

#### 2) Prinsip Pahala dan Dosa

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap pesan atau pernyataan yang keluar itu mengandung konsekuensi pahala atau dosa. Lisan memiliki peran kunci dalam berkomunikasi, apakah mengantarkan kepada kesuksesan atau kehancuran. Agar lisan tidak menjadi alat pengumpul dosa tetapi selalu memproduksi pahala, maka Islam membimbing manusia terutama umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik, Islam melarang berkata kotor dan kasar dan selalu memotivasi orang lain untuk berbuat

---

<sup>20</sup> Saodah Wok, et.al, *Teori Komunikasi* (PTS Publication & Distributors SDN BHD, 2003), h. 217-219.

<sup>21</sup> Harjani, *Komunikasi*, h. 187.

kebajikan.

### 3) Prinsip Kejujuran

Lisan bisa membunuh karakter seseorang, bisa merusak hubungan suami istri, kaum kerabat, bahkan bisa menyebabkan pertumpahan darah.

Di antara bentuk kejujuran dalam berkomunikasi adalah :

- a. Tidak memutarbalikkan fakta
- b. Tidak berdusta<sup>22</sup>

### 4) Prinsip Kebersihan

Islam sangat menekankan prinsip kebersihan dalam segala hal. Seorang komunikator harus memiliki penampilan yang bersih dan berwibawa agar menimbulkan simpati bagi komunikan. Secara psikologis orang lain menyukai lawan bicaranya jika harum dan bersih.

### 5) Prinsip Berkata Positif

Pesan positif sangat berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang dalam kondisi apapun dia berada. seorang komunikator yang sering mengirim pesan positif kepada komunikan akan mendatangkan kebaikan dan kesejukan pada orang lain.

### 6) Prinsip Paket ( Hati, Lisan dan Perbuatan )

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam satu paket lengkap. Ada unsur jiwa dan raga. Gerak raga dalam konsep Islam dipengaruhi secara kuat oleh hati atau jiwa. Artinya, lisan akan berbicara yang baik manakala hatinya baik, dan lisan tidak akan mampu berbicara dengan baik dan lancar tanpa kendali dari jiwanya, yang diucapkannya akan terasa hambar. Konsistensi antara hati kata dan perbuatan adalah ciri manusia sukses. Allah tidak menyukai inkonsistensi. Tidak hanya Allah, manusia secara umum juga memandang bahwa inkonsistensi adalah cacat yang membuat nilai seseorang menjadi kurang.

### 7) Prinsip Dua Telinga Satu Mulut

Menceritakan kembali semua yang didengar adalah tanda

---

<sup>22</sup> Harjani, *Komunikasi*, h. 187.

kecerobohan seseorang. Tidak semua informasi yang sampai kepada seseorang dipahami secara benar. Seorang komunikator atau komunikasikan harus menyimpan benar-benar informasi yang diterimanya dari orang lain secara benar. Kalau memang informasi perlu disampaikan kepada halayak maka harus disampaikan. Akan tetapi jika informasi itu tidak pantas untuk diketajui orang lain maka informasi rahasia itu harus disimpan dengan baik agar tidak menimbulkan keburukan pada orang lain. atau dipahami secara benar tapi beritanya tidak benar, atau beritanya benar tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat. isyarat agar kita berhati-hati dalam berbicara dan banyak mendengar adalah pada struktur fisik kita yang diciptakan dengan dua telinga dan satu mulut.

#### 8) Prinsip Pengawasan

Prinsip pengawasan muncul dari kepercayaan mukmin yang meyakini bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Melihat dan Maha Mengetahui. Prinsip pengawasan ini akan membuat orang lain selalu merasa diperhatikan dan dipantau. Orang yang selalu merasa dipantau biasanya lebih berhati-hati dalam mengeluarkan statement.

#### 9) Prinsip Selektifitas dan Validitas

Prinsip selektifitas dan validitas dalam komunikasi Islam bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi komunikasikan di dunia ini, tetapi tujuan utama mereka adalah agar bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat diminta pertanggungjawaban di akhirat.<sup>23</sup>

#### 10) Prinsip Saling Mempengaruhi

Komunikasi antar manusia merupakan aktivitas menyampaikan dan menerima pesan dari dan kepada orang lain. Saat berlangsung komunikasi, proses pengaruh mempengaruhi terjadi, karena muara semua tujuan komunikasi adalah saling mempengaruhi, maka membangun komunikasi yang bertujuan untuk menciptakan suasana yang sehat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Islam.

#### 11) Prinsip Keseimbangan

---

<sup>23</sup> Harjani, *Komunikasi*, h. 187.

Informasi yang seimbang akan membuat keputusan menjadi akurat. Prinsip keseimbangan dalam menyerap informasi sebelum memberikan sikap adalah keharusan. Dengan prinsip ini, informasi yang kita terima akan lebih akurat, karena pihak yang sedang berselisih kadang-kadang memeberikan informasi secara emosional dan berlebihan.

## 12) Prinsip Privasi

Setiap orang memiliki ruang privasi yang tidak boleh diungkap di pentas publik, begitu juga dengan organisasi, lembaga dan seterusnya. Allah melarang orang beriman untuk mencari-cari informasi tentang masalah-masalah yang masuk dalam ruang privasi. Di antara indikator sebuah informasi tidak untuk dikonsumsi publik adalah bahasa tubuh dari orang yang menyampaikan pesan. Melanggar masalah privasi seperti ini di dalam Islam masuk dalam status pelanggaran hak-hak asasi manusia yaitu melakukan pencemaran nama baik.<sup>24\</sup>

Dari beberapa prinsip komunikasi dalam Islam sebagaimana diungkapkan di atas, ternyata sangat jauh berbeda dengan prinsip-prinsip komunikasi secara umum. Sebab menurut Deddy Mulyana, prinsip-prinsip komunikasi secara umum itu yaitu:

- a) Komunikasi adalah proses simbolik yaitu proses penyampaian simbol-simbol kepada sesama manusia baik simbol verbal maupun juga simbol non-verbal.
- b) Setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi sebab setiap perilaku manusia punya potensi untuk ditafsirkan.
- c) Komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan.
- d) Komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan.
- e) Komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu.
- f) Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.
- g) Komunikasi bersifat sistemik.
- h) Semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi.
- i) Komunikasi bersifat nonsekuensial.

---

<sup>24</sup>*ibid.*

- j) Komunikasi bersifat prosedural, dinamis dan transaksional.
- k) Komunikasi bersifat *irreversible* atau peristiwa dan perilaku yang berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali.
- l) Komunikasi bukan panasehat (obat mujarab) untuk menyelesaikan berbagai masalah.<sup>25</sup>

Ada beberapa prinsip komunikasi yang dikemukakan oleh. Joseph

A. Devito yaitu:

- 1) Komunikasi Adalah Paket Isyarat

Manusia melakukan komunikasi bukan hanya bentuk lisan atau tulisan, tetapi manusia melakukan komunikasi secara *includ*. Apakah komunikasi verbal maupun non verbal atau komunikasi dari keduanya. Apakah menggunakan isyarat tubuh benda atau lainnya yang dapat menimbulkan pemahaman yang sama antara komunikator dengan komunikan.

Dalam segala bentuk komunikasi yang dilakukan apakah antar pribadi, kelompok kecil, pidato di muka umum atau tampil di media massa atau berjabat tangan dengan tidak hangat, gerak-gerik yang gugup, pandangan yang tajam dan sebagainya itu semua memiliki makna.

- 2) Komunikasi Adalah Proses Penyesuaian

Hubungan komunikasi yang dilakukan oleh manusia mengalami proses yang panjang untuk mengenali isyarat-isyarat yang muncul dalam proses komunikasi sehingga kita benar-benar bisa mengerti dan memahami keinginan orang lain.

- 3) Komunikasi Mencakup Dimensi Isi Dan Hubungan

Komunikasi dilakukan pada dunia nyata di mana satu dengan yang lainnya saling mengisi. Komunikasi berlangsung karena hubungan antara komunikator dan komunikan merasa dekat. Misalnya dalam sebuah perusahaan pimpinan menyuruh anggotanya untuk datang ke ruangan, ini bermakna bahwa pesan yang disampaikan itu ada isinya dan karena ada hubungan antara keduanya. Begitu juga antara anak dan orang tua, guru dengan mahasiswanya, pembeli dengan penjual, semua tidak

---

<sup>25</sup> Mulyana, *Ilmu Komunikasi*, h. 91.

terlepas dari dimensi isi dan hubungan.

4) Komunikasi Melibatkan Transaksi Simetris Dan Komplementer

Cara memandang pada tatatanan komunikasi yang bersifat simetris pada pengaruh dan kompetitif. Masing-masing pihak akan mempertahankan kehebatan dan kelebihan yang dimiliki, Pada satu sisi hubungan simetris juga melihat pengaruh. Misalnya dalam sebuah pertemuan jika seseorang menyampaikan pesan baik orasi ilmiah, ceramah maupun acara lainnya, maka komunikasi akan memberikan respon. Jika satu orang memberikan tepuk tangan maka yang lainnya akan bertepuk tangan .

5) Komunikasi Adalah Proses Transaksional.

Komunikasi transaksional dimaksudkan di sini adalah setiap proses komunikasi yang dilakukan selalu memiliki umpan balik. Orang menyampaikan pesan, kita memberikan respon. Setiap orang yang terlibat dalam komunikasi beraksi dan bereaksi sebagai suatu kesatuan yang utuh. Aksi dan reaksi bukan hanya ditentukan dengan apa yang disampaikan tetapi dipengaruhi oleh bagaimana cara kita menyampaikan.

6) Komunikasi Bersifat Tak *Reversibel* <sup>26</sup>

Pemahaman tentang tak *reversibel* dicontohkan pada gula pasir. Gula pasir dipanaskan bisa jadi air gula, air gula dimasak bisa jadi gula kembali. Ini maknanya *reversibel* dapat dikembalikan ke bentuk semula. Komunikasi ibarat mengubah anggur menjadi minuman sari anggur, akan tetapi sari anggur tidak akan bisa dikembalikan menjadi buah anggur lagi. Demikian pemaknaan komunikasi yang tak *reversibel*. Apa yang sudah disampaikan tidak akan dapat ditarik kembali.

Ketika menyampaikan pesan komunikasi pada orang lain dan sudah diterima dan direspon dengan baik, buruk baiknya pesan komunikasi itu tidak dapat ditarik kembali walaupun itu memberikan pengaruh buruk pada orang lain. Misalnya kasus Ahok yang dianggap melecehkan umat Islam ketika berkunjung ke Pulau Seribu. Dalam pertemuan itu Saudara Ahok menyampaikan bahwa jika ulama menggunakan Surah Al-Maidah

---

<sup>26</sup>Joseph. A. Devito, *Komunikasi Antar Manusia, Profesional Books* (Jakarta: 1997), h. 39.

ayat 51 itu membodoh-bodohi masyarakat. Statement itu menggemparkan seluruh umat Islam Indonesia bahkan dunia, sehingga meresahkan masyarakat yang pada akhirnya timbul aksi damai besar-besaran di Jakarta sebagai jawaban dari ketidak cepatan proses hukum. Makna kalimat yang disampaikan Saudara Ahok tidak akan dapat ditarik kembali dalam tinjauan prinsip komunikasi yang *reversibel*.

7) Komunikasi Bukan Panasehat Untuk Menyelesaikan Berbagai Masalah<sup>27</sup>

Di samping komunikasi mampu menyelesaikan masalah, komunikasi juga dapat menimbulkan masalah baru jika dalam berkomunikasi terjadi *misunderstanding* antara komunikator dengan komunikan.

Berdasarkan prinsip komunikasi Islam dan prinsip komunikasi secara umum sebagaimana yang diungkapkan di atas, menurut Syukur Kholil bahwa dalam beberapa aspek nampak adanya perbedaan yang prinsipil antara komunikasi Islam dengan komunikasi umum. Komunikasi umum memandang bahwa komunikasi dan informasi merupakan barang komoditi yang dapat diperjual belikan. Dalam setiap aktivitas komunikasi, keuntungan yang paling besar diperoleh oleh pihak komunikator utama yang menguasai informasi. Setiap orang bebas mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan tanpa adanya hambatan dan pertimbangan pada nilai-nilai yang dianut oleh pihak lain. Dalam hal ini ideologi yang dianut adalah *free flow of ideas by word and image*, yang berarti bebas menyampaikan apa saja yang menarik tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang berlaku pada masyarakat lain. Sedangkan menurut perspektif komunikasi Islam, keuntungan paling besar penyampaian informasi berada pada pihak komunikan (sasaran informasi) bukan pada pihak komunikator. Penyampaian sesuatu informasi pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kemaslahatan individu atau masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Di samping itu, kebebasan berkomunikasi harus dibarengi dengan rasa tanggung jawab serta dibatasi oleh nilai-nilai yang dianut

---

<sup>27</sup> Fajar, *Ilmu Komunikasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h. 28.

oleh masyarakat, bangsa dan negara.<sup>28</sup>

Apa yang disampaikan Syukur Kholil di atas memang benar bahwa saat ini komunikasi dan media dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa mempertimbangkan kerugian yang diakibatkan oleh komunikasi dan pemberitaan media. Media yang tugasnya sebagai alat untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat, sekarang sudah berubah fungsi. Media sudah dikuasai oleh elit politik dan pejabat negara untuk dijadikan sebagai sumber informasi untuk kepentingan golongan tertentu. Para pemimpin di negara ini sudah membayar media untuk melanggengkan kekuasaan tanpa memperdulikan kepentingan orang lain. Para pemilik media juga sudah menjadikan mediana sebagai sumber pencetak uang tanpa mengindahkan etika penyiaran dan periklanan. Ini sudah seperti buah simalakama bagi bangsa Indonesia. Satu sisi harus mempertahankan media, di sisi lain media dapat menjadikan generasi bangsa menjadi generasi penguasa yang mendominasi tanpa memikirkan kepentingan orang lain. Ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip komunikasi yang dibangun Islam.

## 7. Komunikasi Islam Menurut Tinjauan Al-Quran

Sebagaiman diuraikan di atas, bahwa komunikasi Islam memiliki prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berbeda dengan prinsip komunikasi secara umum. Sebab dalam komunikasi Islam prinsip atau kaidah tersebut harus sesuai dengan konsep ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Landasan dasar komunikasi Islam dalam Al-Quran yaitu:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah*

---

<sup>28</sup> IAIN Pasca Sarjana, *Jurnal Analitica Islamica* Vol.2, (Medan: 2012), h. 167.

mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.(QS. An-Nisa : 9 ).

Menurut *Tafsir Al-Misbah* makna katanya adalah meruntuhkan sesuatu lalu memperbaikinya, ini juga dimaknakan istiqomah atau konsistensi. Kata ini dipakai juga untuk menunjuk sasaran orang yang menyampaikan sesuatu ucapan yang benar mengenai tepat sasaran. Kata *sadidun* di atas tidak diartikan sekedar kata yang benar. Dalam hal anak yatim dalam ayat ini karena mereka bukan anak kandung maka harus cukup hati-hati menyampaikan sesuatu kepada mereka karena dikhawatirkan mereka tersinggung atau sakit hati karena tidak memiliki orang tua.<sup>29</sup>

Ibnu Katsir menyampaikan perumpamaan bahwa ayat ini berkenaan dengan seorang laki-laki yang sedang sakit lalu mewariskan hartanya dan mengucapkan kata yang membuat mudarat bagi ahli warisnya, maka datang perintah Tuhan, orang mendengar harus membimbing orang sakit serta meluruskan pola pikirannya ke jalan yang benar.<sup>30</sup> Berkata yang benar dalam tafsir ini bukan hanya ucapan tapi bimbingan dan arahan agar orang yang menerima pesan tidak mendapat mudarat.

Dalam *Tafsir Al-Maraghi* dijelaskan bahwa pembicaraan dalam ayat ini masih berkisar tentang para wali dan orang-orang yang diwasiat, mereka yang dititipi anak yatim juga perintah terhadap mereka memperlakukan anak-anak yatim dengan baik, berbicara kepada mereka seperti berbicara pada anak-anaknya yaitu dengan halus, baik dan sopan lalu memanggil mereka dengan sebutan anakku, sayangku dan sebagainya.<sup>31</sup>

Dalam *Tafsir Inspirasi* dijelaskan makna ayat ini, anak cucu kita adalah harapan kita, didiklah dia dengan iman dan takut pada Allah.<sup>32</sup> Dari pemaknaan yang dibuat oleh ahli tafsir di atas bahwa sebagai orang tua

---

<sup>29</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Almisbah* v. 7 (Jakarta: Lentera Hati), h. 426.

<sup>30</sup>Abul Fida al-Hafiz Ibnu Katsir, *Tafsir Alquran al-Azhim* Juz. 4 (Beirut: Dar Alfikr, Jilid 2, 2006), h. 239.

<sup>31</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (juz 4 ,5, 6.bab 4), h. 347.

<sup>32</sup> Zainal Aripin, *Tafsir Inspirasi* (Medan: Duta Azhar, 2012), h. 88.

harus mendidik anaknya, apakah itu anak saudaranya yang yatim atau anak kandungnya. Biasakan dalam menyampaikan sesuatu itu dengan kata-kata yang lembut, baik, santun dan bermanfaat.

#### a. Bersikap Dewasa

Bersikap dewasa tercermin dalam QS. An-Nahl: 125

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Hikmah ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang batil. Bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Muhammad, serulah yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua yang engkau sanggup seru kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran Islam, dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka, yakni siapa pun yang menolak atau meragukan ajaran Islam, dengan cara yang terbaik.

Itulah tiga cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya, jangan hiraukan cemoohan, atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, dan serahkan urusanmu dan urusan mereka kepada Allah karena sesungguhnya tuhanmu yang selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu. Dia sendiri-lah yang lebih mengetahui dari siapa pun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya sehingga tersesat dari jalannya dan hanya Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat

petunjuk. Menurut beliau (KH. M. Quraish Shihab), memahami bahwa ayat ini menjelaskan tiga macam metode dakwah yang harus disesuaikan dengan sasaran dakwah terhadap cendekiawan yang memiliki intelektual tinggi diperintahkan menyampaikan dakwah dengan hikmah, yakni berdialog dengan kata-kata bijak sesuai dengan tingkat kepandaian mereka. Terhadap kaum awam diperintahkan untuk menerapkan *mau'izhah*, yakni memberikan nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan tarap pengetahuan mereka yang sederhana. Terhadap Ahlu al-Kitab dan penganut agama-agama lain diperintahkan menggunakan *jidat ahsan*/perdebatan dengan cara yang terbaik, yaitu dengan logika dan retorika yang halus, lepas dari kekerasan dan umpatan.

Selanjutnya beliau menjabarkan kata *al-hikmah* dalam ayat tersebut, berikut ini penjabarannya. Kata hikmah (حكمة) antara lain berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Ia adalah pengetahuan atau tindakan yang bebas dari kesalahan atau kekeliruan. Hikmah juga diartikan sebagai sesuatu yang bila digunakan/diperhatikan akan mendatangkan kemaslahatan dan kemudahan yang besar atau lebih besar serta menghalangi terjadinya mudharat atau kesulitan yang besar atau lebih besar. Makna ini ditarik dari kata *hakamah*, yang berarti kendali, karena kendali menghalangi hewan/kendaraan mengarah ke arah yang tidak diinginkan atau menjadi liar. Memilih perbuatan yang terbaik dan sesuai adalah perwujudan dari hikmah. Memilih yang terbaik dan sesuai dari dua hal yang buruk pun dinamai hikmah dan pelakunya dinamai hakim (bijaksana). Siapa yang tepat dalam penilaiannya dan dalam pengaturannya, dialah yang wajar menyandang sifat ini atau dengan kata lain dia yang hakim. Kemudian lebih lanjut beliau menjelaskan *al-mau'izhah*, berikut ini penjelasannya, kata *al-mau'izhah* (الموعظة) terambil dari kata *wa'azha* (وعظ) yang berarti nasihat. *Mau'izhah* adalah uraian yang menyentuh hati yang mengantar kebaikan. Demikian dikemukakan oleh banyak ulama. Kata *jadilhum* (جادلهم) terambil dari kata *jidat* (جدال) yang bermakna diskusi atau bukti-bukti yang mematahkan alasan atau dalih mitra diskusi dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara.

Menurut M. Quraish Shihab, *mau'izhah* baru dapat mengenai hati sasaran bila apa yang disampaikan itu disertai dengan pengamalan dan keteladanan dari yang menyampaikannya. Inilah yang bersifat *hasanah*, kalau tidak demikian maka sebaliknya, yakni yang bersifat buruk dan ini yang seharusnya dihindari. Mengenai *jidal*, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa *jidal* terdiri dari tiga macam. *Pertama*, *jidal* buruk yakni yang disampaikan dengan kasar yang mengundang kemarahan lawan, serta yang menggunakan dalih-dalih yang tidak benar.” *Kedua*, *jidal* baik yakni yang disampaikan dengan sopan serta menggunakan dalil-dalil atau dalih walau hanya yang diakui oleh lawan.” *Ketiga*, *jidal* terbaik yakni yang disampaikan dengan baik dan dengan argumen yang benar lagi membungkam lawan.”.<sup>33</sup> Dalam *Tafsir Inspirasi*, hikmah adalah perbuatan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dan batil, mukmin mencintai manusia dan mencintai Allah, bukan manusia yang melihat hasilnya, karena yang mengetahui isi hati manusia adalah Allah.<sup>34</sup>.

*Tafsir Al-Misbah* memaknai bahwa *mau'izah* disampaikan dengan *hasanah*, hampir sama makna antara kedua kata itu yaitu yang terbaik, akan tetapi kalau *mau'izah* ada yang baik dan tidak baik, sedangkan *jidal* ada yang baik, yang terbaik dan buruk. *Mau'izah* akan mengenai kesasaran jika didampingi dengan sikap keteladanan dari yang menyampaikannya. Ibnu Katsir menafsirkan bahwa (”y) yakni barangsiapa yang membutuhkan dialog dan tukar pikiran, maka hendaklah dilakukan dengan cara yang baik, lemah lembut, serta tutur kata yang baik.

## b. Berlapang Dada

Berlapang dada tercermin dalam QS. Al-Mujaadilah: 11

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

<sup>33</sup> Al-Maraghi, *Tafsir*, h. 283.

<sup>34</sup> Aripin, *Tafsir*, h.344.

Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Quraish Shihab mengartikan kata “*tafassahu*” dan *‘ifsahu*” terambil dari kata *fasaha* artinya lapang dan tempat yang tinggi. Perintah tersebut mulanya beralih ketempat yang tinggi, maknanya dalam ayat ini adalah pindah ke tempat lain untuk memberi kesempatan kepada yang lebih wajar duduk atau berada di tempat yang wajar atau bangkit melakukan satu aktivitas positif. Dalam Tafsir Ibnu Katsir, Qatadah berkata ayat ini turun berkenaan dengan majelis zikir atau pengajian agama yang biasanya mereka telah duduk terlebih dahulu, kemudian ada kawannya yang datang terlambat mereka enggan memberi tempat, maka Rasulullah menganjurkan supaya diperluas dan memberi tempat duduk pada kawannya, niscaya Allah akan memberikan kelapangan dalam segala-galanya. Dalam Tafsir Inspirasi makna ayat itu bahwa kehormatan di sana tergantung pada amal bukan untuk diperebutkan.

Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini turun berkenaan dengan majelis zikir atau pengajian Al-Quran, sebab biasanya mereka yang telah duduk kemudian ada kawan yang datang terlambat mereka enggan memberi tempat, maka Rasulullah menganjurkan supaya diperluas dan memberi tempat duduk, niscaya Allah memperluas baginya segala urusan.

Dalam *Tafsir Al- Misbah*, artinya yang diberi pengetahuan penjelasannya; mereka yang beriman dan diberi ilmu, dan dalam hal ini ada dua kelompok orang beriman. Pertama, beriman dan beramal saleh. Kedua, beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan yang sederhana, serta mengajarkannya kepada orang lain baik dengan lisan maupun keteladanan. *Tafsir Al- Manar* memaknai bahwa Allah tidak akan menyalahkan bahkan orang berilmu diberi balasan pahala di dunia dan akhirat. Dan Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.

Dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas intinya adalah harus berusaha melapangkan orang lain supaya kita dilapangkan

oleh Allah. Tandanya orang beriman dan berilmu harus memberikan kelapangan kepada orang lain agar derajat kita bertambah.

Sebagaimana yang terdapat pada Q.S an-Nur: 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada, apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah maha pengampun, maha penyayang.

Ayat ini berhubungan dengan sumpah Abu Bakar R.A. bahwa dia tidak akan memberi apa-apa kepada kerabatnya ataupun orang lain yang terlibat dalam menyiarkan berita bohong tentang diri bunda 'Aisyah. Maka turunlah ayat ini melarang beliau melaksanakan sumpahnya itu dan menyuruh mema'afkan dan berlapang dada terhadap mereka sesudah mendapat hukuman atas perbuatan mereka itu.

c. Tidak Emosi dan Emosional

Sikap tidak emosi dan emosional tercermin dalam QS. Ali Imran: 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّهُمْ إِذَا عَزَمْتَ فِي الْأَمْرِ فَأَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Al-Maraghi menerjemahkan “*Linta Lahum*” bersikap lemah lembut dalam muamalah, artinya penjual tidak boleh berkata kasar dan mengurangi timbangan atau menambah melebihi harga yang telah ditentukan.<sup>35</sup> Dr. Zainal mensyarahkan ayat itu, pemimpin yang karismatik adalah pemimpin yang bersifat: kasih sayang, sabar, pemaaf, gemar bermusyawarah dan dekat dengan Allah.<sup>36</sup> Quraish Shihab di dalam Tafsirnya *al-Misbah* menyatakan bahwa Surat Ali Imran ayat 159 ini diberikan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menuntun dan membimbingnya, sambil menyebutkan sikap lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin, khususnya mereka yang telah melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam perang Uhud itu. Sebenarnya cukup banyak hal dalam peristiwa perang Uhud yang dapat mengandung emosi manusia untuk marah, namun demikian, cukup banyak pula bukti yang menunjukkan kelemahan lembut Nabi Muhammad. Beliau bermusyawarah dengan mereka sebelum memutuskan perang, beliau menerima usulan pendapat mereka, walau beliau kurang berkenan, beliau tidak memaki dan mempersalahkan para pemanah yang meninggalkan markas mereka, tetapi hanya menegurnya dengan halus.

Menurut Ibn Katsir di dalam tafsirnya *Al-Quran Al-Azhim*, sikap lemah lembut yang dimiliki oleh Nabi Muhammad S.A.W. itu tiada lain disebabkan karena rahmat Allah yang dianugerahkan kepadanya, sehingga beliau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Demikian juga Al-Hasan Al-Bashri mengatakan bahwa begitulah akhlak Nabi Muhammad S.A.W. yang diutus oleh Allah. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan: “*Dan jikalau kamu bersikap keras dan berhati kasar tentulah mereka akan menjauh darimu*”. Artinya adalah sekiranya kamu kasar dalam berbicara dan berkeras hati dalam menghadapi mereka, niscaya mereka bubar darimu dan meninggalkanmu. Akan tetapi, Allah menghimpun mereka di sekelilingmu dan membuat hatimu lemah lembut terhadap mereka sehingga mereka menyukaimu. Kemudian di sini Rasulullah selalu bermusyawarah dengan mereka apabila menghadapi suatu masalah untuk mengenakan hati mereka, agar menjadi pendorong bagi mereka

---

<sup>35</sup> Al-Maraghi, *Tafsir*, h.191

<sup>36</sup> Aripin, *Tafsir*, h. 80.

untuk melakukannya. Terutama dalam hal peperangan baik itu perang Badar, Uhud, Khandak dan perang lainnya, yang mana beliau selalu bermusyawarah ketika hendak mulai peperangan seperti mengatur strategi perang dan lain sebagainya. sehingga apabila kamu telah mendapatkan hasil yang bulat maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya.<sup>37</sup>

#### d. Menggunakan Panggilan Yang Baik dan Jangan Mengolok-olok.

Sikap menggunakan panggilan yang baik dan jangan mengolok-olok tercermin dalam QS: Al-Hujarat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri”.

Kata *yaskhar* adalah memperolok-olok yaitu menyebutkan kekurangan pihak lain dengan tujuan menertawakan yang bersangkutan baik dengan ucapan perbuatan dan tingkah laku.<sup>38</sup> Dalam *Tafsir Al-Maraghi* dimaknakan: mengolok olok, menyebut-nyebut aib dan kekurangan-kekurangan orang lain dengan cara yang menimbulkan tawa.<sup>39</sup>

#### e. Pesan yang Disampaikan Efektif

Pesan yang disampaikan secara efektif tercermin dalam QS. An-Nisa: 63:

<sup>37</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-quran*, h.245.

<sup>38</sup> Shihab, *Tafsir*, h. 432.

<sup>39</sup> Al-Maraghi, *Tafsir*, h. 223

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan Katakanlah kepada mereka Perkataan yang berbekas pada jiwa mereka”. (QS. Annisa: 63)

Dalam *Tafsir Al-Mizan* disebutkan, sesungguhnya apabila pada hati mereka tidak dapat kerusakan maka perkataan mereka benar dan jujur dan mereka mengingkarinya dan membenarkan apa-apa yang dikatakan Allah.<sup>40</sup> Kata *Baligha* dalam *Tafsir Al-Misbah* dimaknakan sampainya sesuatu ke sesuatu yang lain, ia juga bermakna cukup, karena makna cukup sampainya sesuatu kepada batas yang dibutuhkan orang lain, seseorang yang pandai menyusun kata sehingga mampu menyampaikan pesannya dengan baik lagi cukup.<sup>41</sup> Dalam *Tafsir Inspirasi* dijelaskan orang yang saleh akan menjauhi segala tipu muslihat orang munafik. Ia tidak akan ragu menunjukkan kepada mereka cara hidup yang baik dan berusaha menyampaikan dengan kata-kata yang dapat menembus jantung mereka dan mengajak mereka ke jalan Allah.<sup>42</sup>

#### f. Berbahasa yang Baik

Berbahasa yang baik tercermin dalam QS. Al Isra: 28

وَأَمَّا تُعْرَضْنَ عَنْهُمْ ابْتَغَاءَ رَحْمَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا

Artinya: “Dan jika kamu berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan, Maka Katakanlah kepada mereka ucapan yang pantas”.

*Qaulan Maisura* terdiri dari rangkaian dua kata yakni “*qaulan*” dan “*maisura*”. Secara bahasa *qaulan* berasal dari kata “*qawala*” yang

---

<sup>40</sup> Al- Mizan h. 396

<sup>41</sup> Shihab, *Tafsir*, h. 595.

<sup>42</sup> Aripin, *Tafsir*, h.100.

jamaknya “*aqwal*” artinya perkataan, lafadz, omongan, pendapat dan keyakinan.<sup>43</sup> Hal ini juga sejalan dengan pendapat al-Ashfahani<sup>44</sup> bahwa kata “*qaulan*” bermakna pembicaraan, perkataan, keyakinan dan pendapat. Sedangkan *maisura* secara bahasa berasal dari kata “*yasara*” yang berarti mudah.<sup>45</sup> Akan tetapi kata *maisura* merupakan bentuk dari kata “*yasiru, maisura*” yang berarti “*as-sahlu*” yang berarti mudah.<sup>46</sup> Di dalam Al-Quran kata “*al-qaul*” disebutkan sebanyak 52 kali, 35 kali merupakan bagian dari Surah al-Makkiyah dan 17 kali merupakan bagian al-Madaniyah.<sup>47</sup> Sedangkan kata “*qaulan*” sendiri dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 19 kali dengan rincian 10 kali merupakan bagian dari Surah *al-Makkiyah* dan 9 kali merupakan bagian dari Surah *al-Madaniyah*.<sup>48</sup> Dengan begitu diperoleh keterangan bahwa kata “*qaulan*” dapat berarti perkataan, jawaban, perintah, dan pembicaraan. Namun lebih banyak bermakna perkataan. Dari 19 ayat di atas 13 kata “*qaulan*” diartikan dengan perkataan dan kata-kata, 3 kata diartikan sebagai ucapan, satu kata diartikan sebagai jawaban, satu kata diartikan sebagai perintah, satu kata diartikan sebagai pembicaraan.

Kata *yasara* dengan kata bantukannya, di dalam Al-Quran diungkapkan sebanyak 44 kali. Dengan kata *yassarana* = 4 kali, *yassarnahu* = 2 kali, *yassarohu* = 1 kali, *nuyassiruka* = 1 kali, *fasanuyassiruhu* = 2 kali, *istaisara* = 2 kali, *al-yusra* = 2 kali, *yusra* = 6 kali, *yasiir* = 8 kali, *yasiiro* = 7 kali, *lil yusra* = 2 kali, *maisura* = 1 kali, *maisarah* = 1 kali dan *al-maisir* = 3 kali.<sup>49</sup> Dengan begitu, diperoleh keterangan bahwa kata “*yasara*” dan kata bantukannya lebih banyak, berarti mudah atau kemudahan. Akan tetapi bisa berarti taufik, lapang, waktu yang singkat, pantas bahkan berarti judi. Dengan demikian “*qaulan maisura*” dapat diberi pengertian yang mudah dan pantas.

---

<sup>43</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, cet. 25, 2002), h. 661.

<sup>44</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradat al-Lafzu al-qur'an*, tahqiq Shafwan Adnan

<sup>45</sup> *Almunjid al-Lughat wa al'I'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1994), h. 420.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 892

<sup>47</sup> Muhammad Fuad al-Baqy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfazh Alquran'nil Karim* h.732-733.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 938-939.

Ayat 28 dari Surah Al-Isra' di atas merupakan bagian dari ayat *Makkiyah* yakni ayat yang diturunkan sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah ke Madinah. Dalam menafsirkan ayat di atas, para mufassirin walaupun sedikit berbeda akan tetapi intinya tetap sama juga.

Dr. Zainal<sup>50</sup> menjelaskan, tafsir ayat di atas apabila kamu tidak dapat melaksanakan perintah Allah, seperti yang tertera dalam ayat 28 maka katakanlah kepada mereka perkataan yang baik agar mereka tidak kecewa karena mereka belum mendapat bantuan dari kamu. Dalam pada itu kamu berusaha mendapat rizki dari Allah sehingga kamu dapat memberi hak-hak mereka. Membantu adalah hal yang membahagiakan, jika tidak dapat membantu maka minimal jangan mencaci.

Menurut Fakhurrrazi membahas makna ayat 28 dari surah Al-Isra' di atas yakni jika ada kaum kerabat, atau orang miskin atau juga *Ibnu Sabil* yang meminta pertolongan atau bantuan kepada seseorang dan orang tersebut sebenarnya ingin membantunya, akan tetapi ia sendiri mengalami kekurangan dan kemiskinan pada saat itu, sementara ia malu untuk mengungkapkan keadaannya yang sesungguhnya, maka dalam kondisi tersebut hendaklah orang tersebut mengatakan dengan perkataan yang *maisura* yakni perkataan yang lembut dan mudah, dan ayat tersebut merupakan kinayah terhadap seseorang yang dalam kondisi kekurangan, maka katakanlah kepada orang-orang yang meminta bantuan dengan perkataan yang bagus dan berbicaralah secara baik yakni dengan mengungkapkan bahwa pada saat ini ia dalam kondisi kekurangan dan ketiadaan dan supaya orang yang meminta bantuan tersebut tidak berhampa tangan, maka berikanlah janji kepada mereka jika ia memiliki harta ia akan memberikan pertolongan atau paling tidak katakanlah kepada mereka bahwa Allah Maha Mempermudah. Dengan demikian makna "*qaulan maisura*" yakni: (1) menolak dengan cara yang baik, (2) lemah lembut dan mudah (3) mar'uf. Hal ini sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa "*qaulan maisura*" seperti pernyataan Allah. Perkataan yang ma'ruf atau baik dan memberi maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima) (QS. al-Baqarah (2) : 263. Sebab perkataan yang ma'ruf adalah

---

<sup>50</sup> Aripin, *Tafsir*, h. 349.

perkataan yang tidak membebani.

Sedangkan Muhammad Husain At-Thabathaba'i menjelaskan bahwa orang yang dimaksud dalam ayat 28 surah Al-Isra' di atas, bukan orang yang sekedar berharap atau berangan-angan berbuat baik untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya, akan tetapi adalah orang-orang yang selama ini telah membantu kerabatnya, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*, namun pada saat itu ia tidak memiliki harta. Oleh karena itu katakanlah kepada mereka dengan "*qaulan maisura*" yakni perkataan yang mudah dan lemah lembut yaitu 'jangan kuatkan suara dan jangan pula menolaknya dengan kasar tetapi dengan penolakan yang pantas dan lembut'.

Zamahsyari menjelaskan bahwasanya seseorang yang diminta bantuan baik oleh kerabatnya, orang-orang miskin maupun *ibnu sabil*, akan tetapi ia tidak memiliki harta untuk membantunya, sementara itu ia merasa malu untuk menolaknya, maka katakanlah kepada mereka (kerabat, orang-orang miskin dan *ibnu sabil*) tersebut dengan *qaulan maisuro* yaitu perkataan yang mudah dipahami dan lemah lembut. Dalam pengertian ini katakanlah kepada mereka dengan perkataan mudah dimengerti, lembut dan janjikanlah kepada mereka dengan janji yang bagus dalam arti apabila ada rahmat Allah ia akan membantunya. Begitu juga senantiasa mendoakan agar Allah memberikan kemudahan kepada mereka untuk mendapatkan rahmat Allah.

Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa pada saat kaum kerabat dan orang-orang yang diperintahkan Allah untuk membantunya, namun pada saat itu ia juga sedang tidak mempunyai sesuatu pun, lalu ia berpaling dari mereka karena tidak ada yang dapat dinafkahkan, maka katakanlah kepada mereka perkataan yang pantas. Artinya janjikan kepada mereka dengan janji yang pantas dan lemah lembut, jika rezeki Allah datang niscaya kami akan menghubungi kalian.<sup>51</sup>

Sejalan dengan itu Quraish Shihab menjelaskan bahwa seseorang tidak selalu memiliki harta atau sesuatu untuk dipersembahkan kepada keluarga mereka yang membutuhkan. Namun paling tidak sikap kekerabatan dan persahabatan dan keinginan membantu harus selalu

---

<sup>51</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir*, h. 1090.

menghiasi manusia. Oleh karena itu jika manusia tidak bisa membantu yang lain paling tidak ucapkan kata yang pantas dan tidak menyakiti hati orang lain.<sup>52</sup> Begitu juga Al-Maraghi mengungkapkan jika kita tidak bisa membantu orang miskin, musafir sedang ia malu untuk menolaknya maka sambil menunggu kelapangan dari Allah katakanlah kepada mereka perkataan yang lunak dan baik serta janjikanlah kepada mereka janji yang tidak mengecewakan hati. Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa komunikasi Islam memiliki prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah yang berbeda dengan prinsip komunikasi secara umum. Sebab dalam komunikasi Islam prinsip atau kaidah tersebut harus sesuai dengan konsep ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Rasul.

Makna yang diambil dari ayat di atas dalam kajian komunikasi adalah:

- 1) Dalam proses komunikasi seseorang harus menyampaikan pesan dengan kata yang pantas.
- 2) Pesan yang akan disampaikan harus sesuai dengan kadar kemampuan komunikan.
- 3) Pesan yang disampaikan harus dengan lemah lembut.
- 4) Pesan yang akan disampaikan harus disesuaikan dengan karakter komunikan.

## **B. Politik**

### **1. Pengertian Politik**

Dalam konteks politik peranan komunikasi sangat penting. Berbicara masalah politik tidak bisa lepas dari keberadaan komunikasi. Jika secara sederhana komunikasi diartikan sebagai proses pengiriman pesan, maka keberadaan komunikasi merupakan bagian yang semestinya ada dalam setiap proses politik. Ada perbedaan-perbedaan dalam memahami definisi ilmu politik disebabkan karena setiap sarjana meninjau hanya satu aspek unsur dari politik itu saja. Unsur itu diperlakukan sebagai konsep pokok dalam memaknai politik itu sendiri. Unsur yang harus ada dalam politik adalah: (a) Negara (*state*), (b) kekuasaan (*power*), (c) pengambilan keputusan (*decisionmaking*), (d)

---

<sup>51</sup> Shihab, *Tafsir*, h.460.

kebijaksanaan (*policy*), dan (e) pembagian (*distributeon*).<sup>53</sup>

Bertitik tolak dari 5 unsur tersebut di atas, Miriam Budiardjo merumuskan pengertian politik yang mencakup kelima pokok sebagai berikut: bahwa politik (*politics*) adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.<sup>54</sup> Pengambilan keputusan (*decision making*) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan ini perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum (*public policies*) yang menyangkut pengaturan dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*) dari sumber-sumber (*resources*) yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu dimiliki kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*aulthority*), yang akan dipakai untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini.

Aristoteles seorang filosof Yunani terkemuka mengatakan bahwa politik merupakan ilmu yang paling tinggi kedudukannya karena tujuan dan target politik adalah bagaimanapun menyelenggarakan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang sehat sehingga semua warga negara merasa dilindungi dan dibela hak-haknya untuk mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Dengan demikian politik harus dipandang sebagai seni dan ilmu sangat terhormat, maka idealisme politik akan terkikis, jika politik dipahami hanya sekedar urusan merebut dan mempertahankan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Maka seharusnya seorang politikus harus memiliki moral dan intelektual agar bisa membangun bangsa ini bersama pemerintah sebagai mitra kerja.

Di samping makna di atas, Deddy Mulyana memaknai politik: *Pertama*, politik ialah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan. *Kedua*, politik sebagai segala kegiatan

---

<sup>53</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar*, h.150.

<sup>54</sup>*Ibid*, h.151.

kekuasaan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. *Ketiga*, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum. *Keempat*, politik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.<sup>55</sup> Katimin juga menambahkan bahwa politik adalah segala urusan dan tindakan yang berkaitan dengan pemerintahan dan juga masyarakat.<sup>56</sup>

Idealisme politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan orang banyak atau untuk kebaikan bersama itulah sesungguhnya tuntutan akhir dari sebuah komunikasi politik. Namun pada kenyatannya politik berkaitan erat dengan kekuasaan “penggunaan kekuasaan secara paksa”, sementara kekuasaan ada dimana-mana. Ketika kekuasaan bertemu kekuasaan maka akan terjadi desak desakan kekuasaan sehingga terjadi negosiasi dan kesepakatan.

## 2. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi bila dihubungkan dengan politik maka disebut komunikasi politik. Komunikasi politik adalah proses *liniare* yang berimplikasi bahwa proses komunikasi lebih penting dari cara berkomunikasi. Komunikasi politik di Indonesia bernuansa konteks tinggi, lebih banyak pesan yang tersirat dari pada yang tersurat, termasuk pesan melalui bahasa tubuh, suara, wajah dan busana.

Komunikasi politik diartikan sebagai pertukaran makna di antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan distribusi dan pengelolaan kekuasaan.<sup>57</sup> Komunikasi politik boleh saja terjadi tanpa sengaja apalagi pada tradisi dan budaya yang berbeda. Ketidaksengajaan ini sering muncul dari ekspresi wajah, senyuman, isyarat tangan, pakaian dan bahasa yang digunakan. Salah satu fenomena menarik dalam komunikasi politik adalah penggunaan bahasa. Bahasa tidak bersifat netral dan objektif, tetapi dimaknakan sesuai dengan orang yang memahaminya.

---

<sup>55</sup> Mulyana, *Komunikasi Politik*, h.15.

Katimin, *Membumikan Nilai-Nilai Politik Islam yang Damai* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h.101.

<sup>57</sup>*Ibid*, h.10.

Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai hasil dari kesepakatan (negosiasi) antara pemerintah yang berkuasa dengan rakyat atau sebaliknya. Jika komunikasi politik tidak berjalan dengan baik maka sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan sehingga berakibat lambatnya percepatan pembangunan di daerah.

Salah satu pendekatan yang seringkali digunakan dalam memahami fenomena komunikasi politik yaitu pendekatan proses. Politik pada dasarnya juga merupakan hasil proses suatu komunikasi yang berkaitan dengan interaksi antara elit politik dengan elit birokrasi yang bisa berubah dari waktu ke waktu.

Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh K.H. Abdullah Gymnastiar:

Sebenarnya yang harus kita nikmati dalam hidup adalah proses. Mengapa?. Karena yang bernilai dalam hidup ini adalah proses dan bukan hasil. Kalau hasil itu Allah yang menetapkan tapi bagi kita punya kewajiban untuk menikmati dua perkara yang dalam aktivitas sehari-hari harus kita jaga yaitu selalu menjaga setiap niat dari apapun yang kita lakukan dan selalu berusaha menyerupakan ikhtiar yang dilakukan selebihnya terserah Allah. Seperti para mujahidin yang berjuang membela bangsa dan agama sebetulnya bukan kemenangan yang terpenting bagi mereka karena menang dan kalah selalu dipergilirkan. Tapi yang penting baginya adalah bagaimana selama berjuang niatnya benar karena Allah dan selama berjuang akhlaknya selalu terjaga. Tidak akan rugi orang yang mampu seperti ini, sebab ketika dapat mengalahkan lawan berarti dapat pahala kalupun mati dalam perjuangan bisa jadi syuhada.

Ketika jualan dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga, maka masalah yang terpenting bagi kita bukanlah uang dari jualan itu karena uang ada jalurnya, tapi proses dari dari jual beli yang kita lakukan dengan orang lain. Misalnya selama dalam berjualan itu kita selalu menjaga niat agar tidak pernah satu milligrampun hak orang lain yang terambil. bagaimana yang jualan itu kita tampil dengan keramahan dan penuh dengan kemuliaan akhlak, harus benar-benar dijaga kejujuran kita, tepat waktu, dan janji-janji kita penuhi. Jika untung yang selalu kita pikirkan maka jika Tuhan menghendaki untung yang sudah kita peroleh bertahun-tahun akan sirna dalam sekejap.

Kita sama sekali tidak terangkat dengan untung yang kita peroleh, tetapi kemuliaan kita akan terangkat oleh proses mulia yang kita lakukan. ini perlu dicamkan bagi seluruh ummat manusia apapun profesinya terutama mereka yang terjun dalam bidang bisnis. Bahwa yang termahal dari kita adalah nilai-nilai yang selalu kita jaga dalam proses melakukan sesuatu apapun namanya. Termasuk ketika kita kuliah, kalau kuliah hanya ingin gelar sarjana, bagaimana kalau kita meninggal sebelum sarjana, maka yang terpenting dari kuliah tanya diri kita apa tujuan kita kuliah.

Seperti saat seorang ibu membuat kue lebaran, ternyata kue lebaran yang hasilnya begitu enak telah melewati proses yang begitu panjang dan lama, mulai dari mencari bahannya, menyediakan peralatan, hingga memadukannya pada takaran yang pas dan menunggunya berjam-jam, itu sebetulnya yang nikmat bagi ibu-ibu bukan kue yang sudah dihidangkan.

Begitu pula ketika ibu punya anak, lihatlah prosesnya mulai dari hamil sembilan bulan, sungguh begitu berat, tidur susah, berdiri payah, jalan juga limbung, masya Allah kemudiaan saat melahirkan pun berat dan sakitnya juga setengah mati. Setelah anak lahir seorang ibu sudah lupa susahny hamil dan melahirkan, sudah kepingin punya momongan lagi. Itu semua dilakukan dengan keikhlasan dalam menjalani proses maka tanpa dirasakan sakitnya lagi.

Berjuanglah untuk menjadi orang yang gemar menikmati proses agar hari-hari yang kita lalui menjadi ladang perjuangan untuk menjadi ahli sabar, mampu mengendalikan hawa nafsu, sehingga hawa nafsu yang kita miliki adalah hawa yang dirahmati Allah.<sup>58</sup>

Pemaparan Di Atas Merupakan Gambaran Bagi Umat Manusia Khususnya Komunikator Dan Komunikan. Bahwa Untuk Memperoleh Keberhasilan Butuh Proses, Yang Di Dalam Proses Itu Harus Dibumbui Dengan Niat Yang Ikhlas Dan Jujur Serta Sabar. Dalam Berkomunikasi Juga Komunikator Dituntut Untuk Sabar Dan Ikhlas Jujur Apalagi Bagi Pelaksana Pemerintah Dan Wakil Rakyat Dalam Memperjuangkan Aspirasi Masyarakat Menuju Kebaikan, Jangan Bermuka Dua Dalam Arti Harus Melaksanakan Apa Yang Sudah Disampaikan Dan Dijanjikan Kepada Masyarakat. Dengan Kebaikan Yang Ditanam Akan Berbuah

---

<sup>58</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada*, h. 61.

Keberuntungan Baik Bagi Diri Komunikator Maupun Bagi Komunikan Khususnya Masyarakat.

Ini Sejalan Dengan Apa Yang Disampaikan Oleh Ahli Komunikasi. Yaitu Pemikiran Yang Menarik Dari Pendekatan Proses Inilah Teori Dramatik Yang Dikemukakan Oleh Erving Goffman. Menurut Teori Ini Keseluruhan Yang Terjadi Dalam Realitas Sosial Adalah Panggung Sandiwara.<sup>59</sup> Ada Panggung Depan, Ada Panggung Belakang. Orang Yang Berkomunikasi Di Media Adalah Mereka Yang Sedang Bermain Drama Di Panggung Depan Dengan Peran, Aturan Dan Skenario Tertentu. Berbeda Dengan Yang Di Panggung Belakang Orang Akan Tampil Sesuai Dengan Aslinya. Orang Melakukan Hubungan Diplomatik, Lobi Politik, Negosiasi Dan Lain Sebagainya Dapat Dilihat Sebagai Drama Komunikasi Untuk Mendapatkan Tujuan Yang Diinginkan. Dalam Berbicara Orang Selalu Mengungkapkan Sesuatu Yang Manis Supaya Terkesan Baik Walaupun Di Belakangnya Tidak Baik. Tingkah Laku Yang Dimunculkan Selalu Dipoles Seolah-Olah Itulah Yang Sebenarnya Sehingga Orang Terkesan Dan Terpesona.

Komunikasi Politik Saat Ini Banyak Dibicarakan Oleh Tokoh-Tokoh Politik. Tokoh-Tokoh Yang Mengembangkan Tema Itu, Antara Lain: David V.J. Bell, Mark Roelofs, Dan Peter M. Hall. Sistem Demokrasi Indonesia Yang Langsung Bebas Dan Rahasia Menambah Hangatnya Tentang Pembicaraan Politik. Banyak Persoalan Yang Muncul Di Panggung Politik Baik Persoalan Anggaran Maupun Persoalan Yang Berkaitan Dengan Fungsi Pengawasan.

Dengan Tema Itu, Muncul Suatu Anggapan Bahwa Komunikasi Mencakup Politik. Banyak Aspek Kehidupan Politik Dapat Dilukiskan Sebagai Komunikasi. Namun, Sebaliknya Para Ilmuan Politik Memandang Bahwa Sesungguhnya Politik Meliputi Komunikasi Karena Banyak Definisi Komunikasi Yang Telah Bercampur Dengan Politik.

Banyak Ahli Yang Menunjukkan Kedekatan Komunikasi Dan Politik. Tanpa Komunikasi, Tidak Akan Ada Usaha Bersama, Dan Dengan Demikian Tidak Ada Politik. Juga Menegaskan Bahwa Tanpa Suatu Jaringan Komunikasi Yang Mampu Memperbesar Dan Melipat Gandakan

---

<sup>59</sup> Ardianto, *Metode Penelitian*, h. 74.

Ucapan-Ucapan Serta Pilihan-Pilihan Individual, Di Situ Tidak Akan Ada Politik Yang Dapat Merentangkan Suatu Bangsa. Bahkan Menyatakan Bahwa Republik Indonesia Didirikan Dengan Menggunakan Komunikasi Politik, Yaitu Proklamasi.

Pada Dasarnya, Komunikasi Politik Bukan Sekedar Proses Penyampaian Suatu Pesan Mengenai Politik Oleh Seseorang Kepada Orang Lain. Bukan Pula Pengertian Komunikasi Ditambah Pengertian Politik. Pengertian Komunikasi Politik Harus Dikaji Tidak Secara Otomatis Dengan Memilah-Milah Setiap Komponen Yang Terlibat, Tetapi Harus Ditelaah Secara Holistik Paragmatik, Dengan Melihat Kaitan Antara Komponen Yang Satu Dengan Komponen Yang Lain Di Mana Terdapat Tujuan Yang Jelas Yang Akan Dicapai. Sanders Dan Kaid Dalam Karyanya Berjudul “*Political Communication, Theory And Research An Overview*” Mengatakan Bahwa Komunikasi Politik Harus *Intentionally Persuasive*.<sup>60</sup>

Perdebatan Tentang Komunikasi Politik Telah Menunjukkan Bahwa Komunikasi Serta Politik Saling Melengkapi. Kedua Bidang Kajian Ini Kemudian Menyatu Dalam Subdisiplin Yang Disebut Dengan Komunikasi Politik. Komunikasi Politik Melintasi Berbagai Disiplin Dan Dibesarkan Secara Lintas Disiplin Ilmu. Setiap Disiplin Ilmu Menyumbangkan Fokus Telaah Yang Kemudian Menjadi Pokok Bahasan Komunikasi Politik, Yang Pada Gilirannya Bukan Saja Memperkaya Khazanah Keilmuan Komunikasi Akan Tetapi Mendekatkan Pemahaman Tentang Kedudukan Politik Dan Komunikasi Sehingga Melahirkan Ilmu Komunikasi Politik.

Domain Persoalan Terpenting Komuniksai Politik Di Antaranya Analisis Retorik, Analisis Propoganda, Riset Perubahan Sikap Mental, Studi Pemberian Suara, Studi Hubungan Pemerintah Media Pemberitaan, Analisis Sistem Fungsional, Serta Perubahan Teknologis. Pada Setiap Domain Ini Kerap Kali Terlihat Para Peneliti Dari Berbagai Disiplin Akademis Menggunakan Aneka Teoretis, Metode, Dan Teknik Riset.<sup>61</sup> Memberi Contoh, Antropologi Dan Sosiologi Mendorong Minat Tentang Linguistik Dan Symbolisme Serta Telaah Menumbuhkan Studi-Studi

---

<sup>60</sup> Zulkarnaen Nasution, *Komunikasi Politik* ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) h. 212.

<sup>61</sup> *Ibid.*

Mengenai Bahasa Politik, Psikologi Sosial Membangkitkan Minat Tentang Aspek-Aspek Subjektif Komunikasi, Studi Perubahan Sikap Mental Dan Belajar, Efek Dari Daya Tarik Politik Yang Bermedia, Serta Sosialisasi Politik Sedangkan Komunikasi Telah Menyumbangkan Analisis Historis, Kritis Dan Kuantitatif Mengenai Pesan-Pesan Dan Penerimaannya. Ilmuwan Politik Banyak Melakukan Survey Yang Sejak Lama Membentuk Konsep Mengenai Peranan Komunikasi Dalam Kampanye Pemilihan Umum, Sedangkan Ahli Komunikasi Massa Menyelidiki Dampak Perubahan Teknologi Komunikasi Dalam Kehidupan Sosial Yang Menunjukkan Perhatian Mengenai Peran Komunikasi Massa Dalam Mengubah Sistem Politik. Sibernetik Dan Analisis Sistem Meninjau Kemungkinan-Kemungkinan Memperlakukan Keseluruhan Komunikasi Politik Dalam Pengertian Yang Holistik Sebagai Sistem Komunikasi Belajar Dan Kendali. Dari Filsafat Bergerak Aliran-Aliran Pemikiran Eksistensial, Fenomenologi Yang Menghasilkan Penekanan-Penekanan Pada Teori Kritis Dalam Komunikasi Politik.

Dalam Ilmu Politik, Istilah Komunikasi Politik Masih Relatif Baru. Istilah Tersebut Mulai Banyak Disebut-Sebut Semenjak Terbitnya Tulisan-Tulisan Para Ahli Tentang Politik Dan Komunikasi Politik. Almond Berpendapat Bahwa Komunikasi Politik Adalah Salah Satu Fungsi Yang Selalu Ada Dalam Setiap Sistem Politik Sehingga Terbuka Kemungkinan Bagi Para Ilmuwan Politik Untuk Memperbandingkan Sistem Politik Dengan Latar Budaya Yang Berbeda.<sup>62</sup> Arti Penting Sumbangan Almond Terletak Pada Pandangannya Bahwa Semua Sistem Politik Yang Pernah Ada Di Dunia Ini Telah Ada Sekarang Dan Akan Terus Ada. Komunikasi Dan Politik Mempunyai Persamaan Yang Mendasar, Yaitu Adanya Kesamaan Fungsi Yang Dijalankan Oleh Semua Sistem Politik. Hal Ini Membantah Pandangan Yang Dianut Sejak Lama Bahwa Sistem Politik Yang Satu Sangat Berbeda Dari Sistem Politik Yang Lainnya Karena Adanya Perbedaan Budaya, Pengalaman, Lingkungan, Watak, Dan Lain Sebagainya. Pandangan Almond Seperti Dikutip Rauf (1993), Menyadarkan Para Pembacanya Bahwa Perbedaan-Perbedaan Yang

---

<sup>62</sup> Alex Sobur, *Ensiklopedia Komunikasi* ( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), h. 424.

Terlihat Di Antara Sistem-Sistem Politik Hanya Bersifat *Superficial*, Tidak Bersifat Mendasar. Dalam Pandangannya, Kita Tidak Boleh Tertipu Oleh Struktur Politik Yang Tampak Berbeda Karena Fungsi-Fungsi Yang Dijalankan Oleh Struktur Politik Dalam Setiap Sistem Politik Adalah Sama.

Meskipun Komunikasi Politik Secara Resmi Baru Diakui Pada Dekade 1970-An, Akar-Akarnya Telah Dapat Dilacak Sejak 1922 Ketika Ferdinand Tonnis Mengkaji Sifat Pendapat Umum Dalam Masyarakat Massa Dengan Menerbitkan *Kritik Der Offetische Meinung* (1922) Maupun Ketika Walter Lipmann Menghasilkan Karya *Public Opinion* (1922). Demikian Pula Lasswell, Di Amerika Serikat Yang Meneliti Propaganda Pada Perang Dunia I (1943). Di Eropa Pada Tahun 1960-An Muncul Sejumlah Tokoh Komunikasi Politik, Seperti Adorno, Horkheimer, Serta Habermas, Yang Mengembangkan Teori Media Kritis Dan Mewarnai Kebanyakan Penelitian Komunikasi Di Eropa.

Komunikasi Politik Adalah Salah Satu Dari Fungsi *Input* Sistem Politik. Bagaimana Komunikasi Politik Mempersambungkan Seluruh Bagian Dalam Sistem Politik. Para Pemimpin Organisasi Politik Dan Kelompok Kepentingan Mengkomunikasikan Aspirasi Serta Kepentingan Masyarakat Sebagai Kehendak Mereka Dan Rekomendasi Kebijakan Untuk Memenuhinya. Setelah Menerima Informasi Dari Berbagai Pihak, Mereka Yang Bertugas Melaksanakan Fungsi Legislatif Membuat Undang-Undang Yang Dianggap Perlu Dan Relevan, Yang Kemudian Dikomunikasikan Kepada Yang Berwenang, Eksekutif Beserta Legislatif Harus Sama-Sama Melaksanakan Fungsinya Dengan Baik. Proses Pelaksanaannya Dikomunikasikan Kepada Masyarakat Serta Dinilai Oleh Masyarakat Dan Penilaian Itu Kemudian Dikomunikasikan Lagi, Demikian Seterusnya. Dalam Seluruh Proses Komunikasi Politik Ini, Media Massa, Baik Cetak Maupun Elektronik, Memainkan Peranan Penting, Di Samping Saluran-Saluran Lainnya Seperti Tatap Muka, Surat-Menyurat, Media Tradisional, Organisasi, Keluarga, Dan Pergaulan.

Pada Tiap Bagian Dari Sistem Politik Terjadi Komunikasi Politik, Mulai Dari Proses Penanaman Nilai, Sosialisasi Politik Atau Pendidikan Politik Sampai Pada Pengartikulasian Dan Penghimpunan Aspirasi Serta Pada Proses Pengambilan Keputusan. Tiap-Tiap Bagian Atau Tahapan Itu Disambungkan Oleh Komunikasi Politik. Begitulah Secara Simultan,

Timbal Balik, Vertikal Maupun Horizontal, Verbal Dan Non-Verbal, Dalam Suatu Sistem Politik Yang Handal, Sehat, Dan Demokratis.

Komunikasi Politik Adalah Segala Bentuk Penyampaian Pesan Politik, Baik Berupa Lambang, Kata-Kata Yang Diucapkan Atau Tertulis, Ataupun Melalui Pesan-Pesan Visual, Baik Secara Langsung Ataupun Tidak Kepada Sejumlah Sasarannya. Dalam Pengertian Sempit Setiap Bentuk Penyampaian Pesan Baik Berupa Lambang, Kata-Kata Yang Diucapkan Ataupun Dalam Bentuk Tulisan, Baik Visual Maupun Isyarat Yang Dapat Mempengaruhi Secara Langsung Ataupun Tidak Kedudukan Seseorang Yang Berada Dalam Puncak Suatu Struktur Kekuasaan Tertentu Dan Yang Ada Dalam Suatu Sistem Baik Jabatan Politis Maupun Jabatan Eksekutif. Ada Beberapa Pengertian Komunikasi Politik Yang Di Kemukakan Para Ahli:

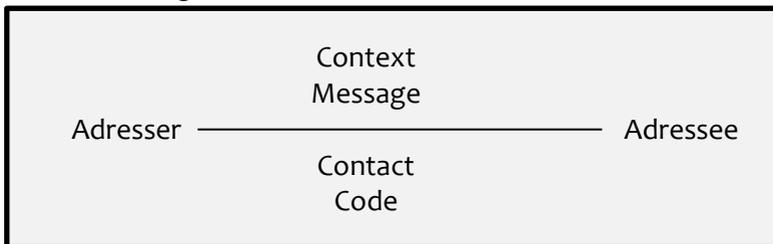
1. Dalam Pandangan Alvian (1991), Pengertian Konsep Komunikasi Politik Telah Mengalami Perkembangan. Gabriel Almond Pernah Mengkategorikannya Sebagai Satu Dari Empat Fungsi *Input* Sistem Politik. Kemudian Mereka Yang Memakai Pendekatan Komunikasi Politik Terhadap Sistem Politik Telah Menjadikan Komunikasi Politik Sebagai Penyebab Bekerjanya Semua Fungsi Dalam Sistem Politik. Sistem Ini Diibaratkan Sebagai Sirkulasi Darah Dalam Tubuh. Bukan Darahnya, Melainkan Apa Yang Terkandung Dalam Darah Itu Yang Menjadikan Sistem Politik Itu Hidup. Komunikasi Politik, Sebagaimana Layaknya Air, Mengalirkan Pesan-Pesan Politik Berupa Tuntutan, Protes, Serta Dukungan, Aspirasi Dan Kepentingan Ke Sentral Informasi Sebagai Proses Akhir Tujuan Sebuah Komunikasi. Dalam Sistem Politik, Air Pada Satu Sisi Bisa Menjadi Sumber Kehidupan Pada Sisi Lain Bisa Menjadi Sumber Kematian. Jika Aliran Air Tidak Dikelola Dengan Baik Dapat Berakibat Buruk, Begitu Juga Halnya Dengan Politik. Politik Harus Dikelola Dengan Baik Supaya Membawa Hasil Yang Maksimal Pada Pemerintahan. Proses Itulah Yang Menjadikan Komunikasi Politik Sebagai Sistem Politik Yang Hidup Dan Dinamis.

2. Komunikasi Politik, Menurut Michael Rush & Philip Althoff (1997), Merupakan Unsur Dinamis Dari Suatu Sistem Politik Serta Proses Sosialisasi Partisipasi, Dan Perekrutan Dan Sebagainya. Komunikasi Dari Pengetahuan, Nilai-Nilai, Dan Sikap-Sikap Adalah Fundamental Bagi Proses Sosialisasi, Partisipasi, Dan Perekrutan Karena Semuanya Menentukan Bentuk Aktivitas Politik Individu Yang Bersangkutan. Maka Dalam Sebuah Komunikasi Politik, Unsur Komunikasi Yang Terdiri Atas Sumber Pesan-Pesan, Penerima Informasi, Dan Umpan Balik. Ketiga Unsur Harus Ada Dalam Sistem Politik. Dalam Menyampaikan Pesan Kepada Khalayak Ramai Atau Kepada Masyarakat Seorang Calon Tentu Menggunakan Media, Baik Media Televisi Surat Kabar Maupun Media Sosial Yang Lagi Membuming Di Tengah-Tengah Masyarakat. Seorang Calon Untuk Pemilihan Umum Jabatan Politik, Pesannya Merupakan Serangkaian Usul Politik, Salurannya Berupa Siaran Televisi, Surat Kabar, Sementara Audiennya Adalah Anggota Kelompok Pemilih Yang Kebetulan Memperhatikan Siaran Dan Umpan Baliknya Dapat Dilihat Dari Hasil Pemilihan Umum Yang Dilaksanakan. Seseorang Jadi Sumber Suatu Pesan Dalam Situasi Yang Lain, Ia Adalah Pendengar, Dan Dalam Peristiwa Lainnya Lagi Ia Mungkin Jadi Komunikator. Dalam Satu Hal Seseorang Pemegang Jabatan Politik Bisa Jadi Sumber Suatu Pesan Dan Satu Sisi Bisa Menjadi Orang Yang Menerima Pesan. Dalam Proses Komunikasi Hal Ini Sering Terjadi, Karena Manusia Saling Berinteraksi Dan Bertukar Informasi.
3. Komunikasi Yang Mempunyai Efek Potensial Atau Langsung Pada Fungsi Suatu Negara Atau Organisasi Politik Lainnya Disebut Komunikasi Politik. (Blake Dan Haroldsen, 1979).
4. Infrastruktur Politik, Yaitu Suatu Gabungan Dari Berbagai Interaksi Sosial Di Mana Informasi Yang Berhubungan Dengan Usaha Bersama Dan Hubungan Kekuasaan Masuk Ke Dalam Peredaran (Galnoor, 1980).
5. Segala Komunikasi Yang Terjadi Dalam Suatu Sistem Politik Yang Melibatkan Pejabat Politik Dan Penguasa Untuk

- Melanggengkan Kekuasaan Disebut Komunikasi Politik, Baik Dilakukan Secara Pribadi Maupun Menggunakan Saluran Komunikasi Massa Maupun Saluran Khusus.
6. Suatu Penyampaian Pesan-Pesan Politik Terutama Pesan-Pesan Yang Dilambangkan Dengan Menggunakan Bahasa Dalam Arti Yang Luas Dari Tujuan Yang Pasti.
  7. Komunikasi Yang Dilakukan Dengan Melibatkan Masalah Politik Dan Memperoleh Hasil Yang Bersifat Politik Dan Pola Sosialisasi Dari Kelas Sosial, Bangsa Dan Negara. (Mueler, 1973).
  8. Komunikasi Bisa Dikategorikan Punya Nilai Politik, Jika Komunikasi Yang Dimaksud Didasarkan Atas Konsekuensi-Konsekuensinya Atau Akibatnya, Baik Secara Aktual Maupun Potensial, Yang Mengatur Perilaku Manusia Di Bawah Kondisi-Kondisi Pertentangan (Nimmo, 1978).
  9. Menurut Astrid S Soesanto, Komunikasi Yang Diarahkan Kepada Pencapaian Suatu Pengaruh Sedemikian Rupa Sehingga Masalah Yang Dibahas Oleh Jenis Kegiatan Komunikasi Ini Dapat Mengikat Semua Warganya Melalui Suatu Sanksi Yang Ditentukan Bersama Oleh Lembaga-Lembaga Politik.
  10. Komunikasi Politik Lebih Lazim Didefinisikan Sebagai Suatu Proses Linier Atau Suatu Sistem. Pendekatan Linier Berorientasi Pada Efek Atau Pengaruh Pesan Politik, Sedangkan Sistem Berorientasi Pada Kestabilan Atau Kesenambungan Suatu Sistem Politik. Kedua Pendekatan Ini Memandang Realitas Komunikasi Politik Sebagai Realitas Yang Teratur Dan Karenanya Mudah Diramalkan, Seperti Realitas Alam Yang Ditandai Dengan Hubungan Sebab-Akibat. Kedua Pendekatan Tersebut Sering Menurut Penelitian Kuantitatif. Dengan Menganggap Komunikasi Politik Sebagai Proses Linier, Peneliti Sering Meneliti Variabel (Terikat) Apa, Sementara Jika Peneliti Mengasumsikannya Sebagai Sebuah Sistem, Peneliti Sering

Meneliti Variabel Mana Berhubungan Dengan Variabel Mana  
Pula Secara Timbal Balik.<sup>63</sup>

Dalam Proses Berlangsungnya Komunikasi Politik, Ada Yang  
Dilakukan Dengan Komunikasi Verbal Dan Non-Verbal Tergantung Dari  
Kondisi Dan Situasi Lapangan Di Mana Komunikasi Politik Berlangsung.  
Ada Pandangan Yang Di Kemukakan Oleh Ahli Tentang Komunikasi Verval  
dan Non-Verbal Sebagai Berikut:



Gambar 2.1  
Model Komunikasi Verbal Jakobson

Model Atau Teori Jakobson Pada Gambar 2 Tersebut  
Dikemukakan Sebelum Semiotik Berkembang. Teori Ini Sangat Berguna  
Dalam Penelitian Pragmatik Dan Tidak Bertentangan Dengan Prinsip  
Semiotik Sehingga Ia Mencoba Menerapkannya Dalam Penelitian  
Kualitatif Dan Kuantitatif Dalam Setiap Bidang Kajian Keilmuwan Sosial.

Jakobson Mengemukakan Bahwa Dalam Komunikasi Terdapat  
Enam Faktor Yang Terlibat, Yaitu Pengirim, Penerima, Hal Yang  
Dibicarakan (Konteks), Pesan, Kode, Dan Kontak. Apa Yang Dikemukakan  
Jakobson Sebenarnya Bukan Hal Baru Tetapi Yang Menarik Adalah  
Jakobson Menekankan Bahwa Dalam Praktik Berkomunikasi, Faktor-  
Faktor Itu Tidak Terlalu Sama Kadar Perannya. Perbedaan Kadar Tersebut  
Terjadi Atas Kehendak Pembicara Dan Situasi Lingkungan. Bila Dikaitkan  
Dengan Komunikasi Politik Bahwa Komunikator, Situasi Dan Budaya  
Pemilih Sangat Berperan Dalam Menentukan Tujuan Akhir Dari Sebuah

<sup>63</sup> Sobur, *Ensiklopedia*, h. 417.

Komunikasi Politik.

Hal Senada Diungkapkan D. Nimmo Dan Keith R. Sander Yang Menyatakan Bahwa Komunikasi Politik Merupakan “*Communication Considered Political By Virtue Of Consequences (Actual Or Potential) Which Regulate Human Conduct under The Condition Of Conflict*”<sup>64</sup> (Politik Merupakan Bagian Aktifitas Komunikasi Yang Di Dalamnya Terdapat Kebaikan Dan Juga Konsekuensi Yang Aktual Serta Berpotensi Di Mana Peraturan Yang Dibuat Oleh Manusia Yang Bearsal Dari Tingkah Laku Dari Kondisi Konflik).

Komunikasi Yang Dilakukan Dalam Sebuah Organisasi Atau Lembaga Yag Berkaitan Dengan Masalah Pengelolaan Kekuasaan Disebut Komunikasi Politik. Dalam Menjalankan Komunikasi Politik Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Sering Muncul Pertentangan Dan Ketegangan Atau Yang Kita Sebut Dengan Konflik. Konflik Didefinisikan Menurut Frost Dan Wilmot Dalam R.Wayne Pace Sebagai Suatu Perjuangan Yang Diekspresikan Antara Sekurang-Kurangnya Dua Pihak Yang Saling Tergantung Yang Mempersepsi Tujuan-Tujuan Yang Tidak Sepadan, Imbalan Yang Langka Dan Gangguan Dari Pihak Lain Yang Mengganggu Pencapaian Tujuan.<sup>65</sup> Perjuangan Yang Dilakukan Untuk Mengurangi Konflik Yang Terjadi Dalam Satu Lembaga Dengan Lembaga Lainnya Dalam Struktur Dan Fungsi Yang Berkaitan Langsung Dilakukan Dengan Proses Komunikasi. Konflik Dinyatakan Dengan Cara-Cara Yang Berbeda, Ada Dengan Bentuk Bahasa Verbal Yang Halus Hingga Pertengkaran Habis-Habisan dan Juga Gerakan Non-Verbal.

Potensi Konflik Dan Disintegrasi Berakar Pada Kecenderungan Elit Politik Di Hampir Semua Tingkat Untuk Memanipulasi Aspirasi Dan Kepentingan Masyarakat. Lebih Jelas Lagi Potensi Disintegrasi Itu Muncul Ketika Elit Politik Dan Birokrasi Memanipulasi Kepentingan Pribadi, Keluarga, Dan Kelompok Sebagai Kepentingan Yang Lebih Utama Dan

---

<sup>64</sup> Subiakto mengutip dari dan Nimmo dan Keith R. Sander, *The Emergence of political Communion as a field*, Nimmo dan Keith R.Sander, ed. *Handbook Of Folitical Communication* (Beverly Hill: Sage 1981), h. 27.

<sup>65</sup> R.wayne Pace dan Don F. Faules terj.Deddy Mulyana et.all , *Komunikasi Organisasi Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 369.

Menyalahgunakan Otoritas Negara Untuk Mempertahankan Dan Melindungi Keutuhan Kelompoknya.

Munculnya Ketegangan Disebabkan Berbedanya Keinginan Satu Lembaga Dengan Lembaga Lainnya. Ingin Melakukan Hal-Hal Yang Berbeda Dan Mereka Menginginkan Hasil Yang Sama. Hal Ini Menunjukkan Bahwa Tujuan Yang Ingin Dicapai Tidak Sepadan Dengan Imbalan Yang Yang Diterima. Tanda-Tanda Awal Konflik Terlihat Dalam Peningkatan Intensitas Ketidaksepakatan Di Antara Anggota Kelompok. Konflik Juga Bisa Dinyatakan Dalam Bentuk Keluh Kesah, Gerakan-Gerakan Kegelisahan Pada Wajah, Ketidak Hadiran, Sikap Tidak Perduhi Pada Keputusan, Sibuk Dengan Media Yang Dimiliki, Dan Munculnya Ungkapan-Ungkapan Yang Tidak Menyenangkan. Konsepsi Ini Erat Kaitannya Dengan Yang Disampaikan Oleh Baxter Bahwa Dalam Berkomunikasi Akan Muncul Pertentangan Dan Ketegangan Karena Tidak Memiliki Kesamaan Tujuan Dan Pemaksaan Keinginan Kepada Orang Lain.

Kombinasi Banyaknya Kepentingan Yang Diinginkan Satu Lembaga Dengan Lembaga Lainnya Untuk Mencapai Tujuan Dan Banyaknya Kepentingan Orang Lain Pada Tujuan Yang Akan Dicapai Seseorang Dapat Memicu Ketidak Harmonisan. Dua Kepentingan Dan Tujuan Yang Saling Tumpang Tindih Ini, Di Satu Sisi Orang Lain Punya Kepentingan Dalam Tujuan Kita, Di Sisi Lain Ada Kepentingan Kita Pada Tujuan Orang Lain. Kepentingan-Kepentingan Itu Dapat Dilukiskan Pada Dua Sumbu Yang Berjalan Dari Kepentingan Yang Paling Rendah Kepada Kepentingan Yang Paling Tinggi. Istilah Gaya Konflik Seperti Ini Dipinjam Dari Tulisan Mouton Dkk, Pada Skema Berikut Ini.



3. *Kompromiser Atau Pendamai Penyiasat*. Orang Yang Menggunakan Gaya Ini Berasumsi Bahwa Setiap Orang Yang Terlibat Dalam Suatu Pertentangan Mampu Menerima Kekalahan, Dan Ia Berusaha Membantu Menemukan Suatu Posisi Yang Dapat Dijalankan Dengan Damai.
4. *Akomodator Atau Penolong Ramah*. Orang Yang Menggunakan Gaya Ini Kurang Tegas Dan Kooperatif, Mengabaikan Kepentingannya Demi Kepentingan Orang Lain. Penolong Yang Ramah Merasa Bahwa Keselarasan Harus Ditegakkan Dan Bahwa Kemarahan Atau Konfrontasi Adalah Buruk. Ketika Suatu Keputusan Dicapai, Akomodator Mungkin Mendukung Keputusan Tersebut Dan Berharap Kelak Ia Telah Menyatakan Beberapa Keberatan.
5. *Penghindar Penurut Impersonal*. Orang Yang Menggunakan Gaya Ini Cenderung Memandang Konflik Sebagai Sesuatu Yang Tidak Produktif Dan Sedikit Menghukum. Maka Penghindar Menjauhi Sesuatu Yang Tidak Nyaman Dan Menolak Untuk Terlibat. Hasilnya Biasanya Suatu Reaksi Impersonal Terhadap Keputusan Dan Sedikit Komitmen Terhadap Tindakan Mendatang.<sup>66</sup>

Gambaran Gaya Mengatasi Konflik Di Atas Selalu Ditemukan Dalam Sebuah Organisasi. Komunikasi Yang Buruk Dan Kegagalan Dalam Pertukaran Informasi Secara Memadai Merupakan Suatu Gejala Yang Akan Memunculkan Ketegangan. Penundaan Dan Kesalahan Juga Sering Menimbulkan Ketegangan Dan Perasaan Negatif. Untuk Mengantisipasi Ketegangan Yang Muncul Dalam Organisasi Maka Dilakukan Dengan Komunikasi. Komunikasi Yang Dilakukan Bisa Dengan Dialog Maupun Transaksional. Kedua Proses Komunikasi Dapat Digunakan Tergantung Dari Pribadi Komunikator Dan Komunikan Yang Melakukan Proses Komunikasi Serta Tujuan Yang Akan Dicapai

Di Bawah Ini Akan Di Jelaskan Dua Pola Pendekatan Komunikasi Dalam Sebuah Organisasi Atau Lembaga:

1. Dialog.

Dialog Berasal Dari Kata “Di” Artinya Dua Lawan Katanya Adalah Monolog. Dari Sudut Pandang Komunikasi Dialog Adalah Proses Di Mana

---

<sup>66</sup> Faules terj. Deddy Mulyana et.all , *Komunikasi Organisasi*, h. 371.

Dua Pihak Atau Lebih Terlibat Secara Mendalam Yang Bermakna. Dialog Tidak Selamanya Bertujuan Untuk Menyelesaikan Pertentangan (Khusus Itu Yang Selalu Menggunakan Mediasi Dan Negosiasi) Tetapi Lebih Bertujuan Untuk Mengembangkan Pemahaman Dua Pihak Terhadap Suatu Isu Atau Topik Tertentu.<sup>67</sup> Dialog Merupakan Salah Satu Bentuk Komunikasi Interpersonal. Dialog Bukanlah Transaksi Tawar Menawar Tentang Sesuatu Untuk Mencapai Kesepakatan. Dialog Juga Bukan Konfrontasi Di Mana Pihak Yang Satu Mempersoalkan Sesuatu Dan Pihak Lain Memberi Pertanggungjawaban. Dialog Juga Bukanlah Adu Pendapat Untuk Mencari Keunggulan Pendapat Sendiri Dan Mengalahkan Pendapat Lain. Dialog Adalah Percakapan Dengan Maksud Untuk Saling Mengerti, Memahami, Menerima Hidup Damai Dan Bekerja Sama Untuk Mencapai Kesejahteraan Bersama.<sup>68</sup>

Dari Gambaran Pengertian Di Atas, Dialog Merupakan Bentuk Komunikasi Yang Terstruktur Yang Mengandalkan Perhatian Penuh, Mendengarkan Secara Aktif Tentang Akar Yang Paling Dalam Dari Perasaan, Keyakinan Dan Pengalaman. Dalam Banyak Kasus Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Dialog Kurang Berpartisipasi Dalam Proses Negoisasi Sebab Mereka Tidak Ingin Melakukan Kompromi Terhadap Nilai-Nilai Yang Paling Mendalam Dari Suatu Topik Milik Masing-Masing Pihak. Karena Itu Maka Pihak-Pihak Ini Lebih Suka Berdialog Di Manan Para Pihak Akan Berpikir Objektif Untuk Lebih Memahami Satu Sama Lain Tanpa Mengubah Pandangan Mereka Masing-Masing. Dialog Difokuskan Pada Percakapan, Yang Mengandalkan Semua Pihak Terlibat Secara Sengaja Untuk Tujuan Meningkatkan Pemahaman Mengenai Masalah Dan Menyatukan Pikiran Dan Mempertanyakan Apa Yang Terjadi Dan Apa Yang Harus Dilakukan Bersama-Sama Untuk Mencapai Tujuan Yang Sudah Dirumuskan Sedemikian Rupa.

Dalam Dialog Peserta Mengeksplorasi Anggapan, Keyakinan Dan Perasaan Yang Membentuk Interaksi Mereka. Mereka Menemukan Nilai-Nilai Dan Niat Tersembunyi Yang Mengontrol Perilaku Mereka Yang

---

<sup>67</sup> Alo Liliweri, *Komunikasi Serba Ada*, h. 397.

<sup>68</sup> Agus M. Hardjana, *Komunikasi Intrapersonal dan Interpersonal* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 123.

Dapat Menyumbang Keberhasilan Melalui Komunikasi Personal. Misalnya Para Pihak Diminta Menjelaskan Mengapa Mereka Menghindari Isu-Isu Tertentu Atau Mengapa Mereka Dapat Terlibat Di Dalamnya, Mengapa Mereka Mempertahankan Posisi Tertentu. Pada Umumnya Semua Peserta Secara Bersama-Sama Mengamati Bagaimanana Perbedaan Budaya Tanpa Membuat Masing-Masing Secara Tidak Sadar Berbenturan Satu Sama Lain. Pengamatan Ini Membantu Peserta Dialog Untuk Menentukan Apa Yang Menghalangi Komunikasi Personal Yang Efektif. Dialog Yang Efektif Dapat Tercapai Manakala Orang Yang Melakukan Dialog Mampu Mendengarkan Satu Sama Lain, Mendengarkan Tanpa Prasangka Dan Tidak Berusaha Mempengaruhi Satu Sama Lain. Karena Tujuan Yang Luas Dari Dialog Adalah Untuk Meningkatkan Pemahaman Tentang Keprihatinan Maing-Masing Pihak Tentang Ketakutan Dan Kecemasan Dan Akibat Yang Timbul Dari Perbedaan Sudut Pandang. Ada Beberapa Bentuk Dialog Yang Dilakukan Baik Pribadi Maupun Lembaga:

**Tabel 2.1**  
**Bentuk Dialog<sup>69</sup>**

<b>Tipe Dialog</b>	<b>Gambaran Situasi</b>	<b>Tujuan Partisipan</b>	<b>Tujuan Dialog</b>
<i>Persuasi</i>	Konflik pendapat	Mempersuasi pihak lain	Memecahkan atau mengklarifikasi isu
<i>Inquiry</i>	Kebutuhan memiliki bukti	Menemukan dan verifikasi bukti	Membuktikan menerima atau menolak hipotesis
<i>Negosiasi</i>	Konflik kepentingan	“Get what You Most Want” (Memberi apa yang Anda inginkan)	Alasan rasional bahwa dua pihak dapat

<sup>69</sup> Liliweri, *Komunikasi Serba Ada*, h. 406.

			hidup dengan atau hidup
<i>Information-seeking</i>	Kebutuhan informasi	Mencari atau menerima informasi	Pertukaran informasi
<i>Deliberation</i>	Dilema, atau pilihan praktis	Koordinasi tujuan dan tindakan	Memisahkan manayang terbaik membimbing tindakan
<i>Eristic</i>	Konflik personal	Melemahkan pihak lawan	Menghalau pikiran yang berbasis konflik

Pertama, Persuasif. Salah Satu Jenis Dialog Persuasif Adalah *Dispute* (Sengketa), Di Mana Masing-Masing Pihak Berada Dalam Suasana Sengketa Tentang Satu Atau Beberapa Kepentingan Tertentu. Masing-Masing Yang Terlibat Dalam Dialog Mengandalkan Segala Macam Cara Untuk Mengajukan Argumen Dan Mempengaruhi Orang Lain Dengan Melakukan Pendekatan Baik Pribadi Maupun Secara Lembaga. Dalam Pelaksanaan Rapat Misalnya Di Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Pihak Eksekutif Hal Ini Sering Terjadi Sengketa Karena Masing-Masing Lembaga Ini Punya Argumen Yang Kuat Untuk Tetap Mempertahankan Apa Yang Menjadi Tujuan Masing-Masing Lembaga Yang Tidak Terlepas Dari Kepentingan Pribadi. Namun Ada Pihak Yang Melakukan Persuasi Terhadap Anggota Dewan Lainnya.

Kedua, *Inquiry*. *Inquiry* Atau Penyelidikan Bertujuan Untuk Mendapatkan Pengetahuan Yang Lebih Lanjut Yang Bersumber Dari Satu Ranah Wilayah Keilmuan Tertentu. Penyelidikan Dimaksudkan Untuk Mencari Bukti Yang Akan Dijadikan Sebagai Dasar Menarik Kesimpulan. Aktivitas Penyelidikan Umumnya Memiliki Hirarki Prosedur Dalam Pencarian Data Dan Informasi Untuk Menjawab Suatu Masalah. Jika Dalam Satu Institusi Terjadi Kebuntuan Dalam Mencapai Kata Sepakat Maka Kedua Belah Pihak Harus Mencari Akar Persoalan Yang Muncul. Misalnya Pada Rapat-Rapat Resmi Yang Dilakukan Di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pimpinan Pada Lembaga Itu Harus Mencari Sebab Kenapa Anggota Dewan Tidak Mau Hadir Pada Rapat Yang Dilaksanakan, Dan Kenapa Anggota Melakukan Interupsi Atau Protes

Atas Kebijakan Yang Dibuat.

Ketiga, *Negosiasi*. *Negosiasi* Adalah Sejenis Penawaran Dari Berbagai Pihak Tentang Topik Tetentu. Tujuan *Negosiasi* Adalah Untuk Mendapatkan Kesepakatan Terbaik. *Negosiasi* Berusaha Menyelesaikan Sengketa Yang Muncul Baik Secara Pribadi Maupun Lembaga.

## 2. Komunikasi Transaksional.

Komunikasi Transaksional Adalah Komunikasi Yang Dilakukan Antar Pribadi, Kelompok Maupun Lembaga Yang Memunculkan Umpan Balik Atau Aksi Dan Reaksi Secara Langsung. Pertukaran Informasi Yang Menuntut Adanya Tindakan Saling Memberi Dan Menerima Di Antara Perilaku Yang Terlibat Dalam Komunikasi Disebut Komunikasi Transaksional.<sup>70</sup>

Model Komunikasi Transaksional Juga Diartikan Sebagai Proses Pengiriman Dan Penerimaan Pesan Yang Berlangsung Secara Terus Menerus Dalam Sebuah Episode Komunikasi. Kata Transaksi Selalu Mengacu Pada Proses Pertukaran Dalam Suatu Hubungan. Dalam Komunikasi Antar Pribadipun Dikenal Transaksi. Yang Dipertukarkan Adalah Pesan-Pesan Baik Verbal Maupun Nonverbal<sup>71</sup>. Model Komunikasi Transaksional Berarti Proses Yang Terjadi Bersifat Kooperatif, Pengirim Dan Penerima Sama-Sama Bertanggung Jawab Atas Dampak Dan Efektivitas Komunikasi Yang Terjadi. Dalam Model Ini Komunikasi Hanya Dapat Dipahami Dalam Konteks Hubungan (*Relationship*) Antara Dua Orang Atau Lebih.

Pandangan Ini Menekankan Bahwa Semua Perilaku Adalah Komunikatif. Tidak Ada Satupun Yang Tidak Dapat Dikomunikasikan. Dalam Model Ini Komunikasi Merupakan Upaya Untuk Mencapai Kesamaan Makna. Model Komunikasi Transaksional Membangun Kesadaran Kita Bahwa Antara Pesan Satu Dengan Pesan Yang Lain Saling Berhubungan, Saling Ketergantungan. Asumsi Model Ini Adalah Ketika Komunikasi Terjadi Terus Menerus, Kita Akan Berurusan Dengan Elemen Verbal Dan Non-Verbal, Artinya Para Komunikator Sedang

---

<sup>70</sup> Fajar, *Komunikasi*, h. 81.

<sup>71</sup> <http://warnakuungu.blogspot.co.id/2010/09/model-komunikasi-transaksional> 22 September 2016.

Menegosiasikan Makna. Ketika Anda Mendengarkan Seseorang Yang Berbicara, Sebenarnya Pada Saat Itu Bisa Saja Anda Pun Mengirimkan Pesan Secara Non-Verbal (Isyarat Tangan, Ekspresi Wajah, Nada Suara, Dan Sebagainya) Kepada Pembicara Tadi. Anda Menafsirkan Bukan Hanya Kata-Kata Pembicara Tadi, Juga Perilaku Non-Verbal.

Dua Orang Atau Beberapa Orang Yang Melakukan Komunikasi, Saling Bertanya, Berkomentar, Menyela, Mengganggu, Menggeleng, Mendehem, Mengangkat Bahu, Memberi Isyarat Dengan Tangan, Tersenyum, Tertawa, Menatap, Dan Sebagainya, Sehingga Proses Penyandian (*Encoding*) Dan Penyandian-Balik (*Decoding*) Bersifat Spontan Dan Simultan Di Antara Orang Orang Yang Terlibat Dalam Komunikasi. Semakin Banyak Orang Yang Berkomunikasi, Semakin Rumit Transaksi Komunikasi Yang Terjadi. Bila Empat Orang Peserta Terlibat Dalam Komunikasi, Akan Terdapat Lebih Banyak Peran, Hubungan Yang Lebih Rumit, Dan Lebih Banyak Pesan Verbal Dan Non-Verbal. Contohnya, Pada Sidang Rapat Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Mana Orang Yang Hadir Bermacam Latar Belakang Partai, Jabatan, Kekayaan, Pengalaman, Dan Keinginan Dikumpulkan Dalam Satu Institusi Untuk Satu Tujuan.

Setiap Orang Akan Berusaha Mempengaruhi Yang Lain Agar Menyetujui Apa Yang Menjadi Keinginannya Begitu Juga Sebaliknya. Dalam Rapat Itu Akan Muncul Sikap Yang Berbeda, Ada Yang Ribut, Interupsi, Mengantuk, Menguap, Keluar Dari Ruangan, Ada Yang Menendang Meja Dan Sebagainya. Itu Merupakan Inflikasi Dari Komunikasi Transaksi Yang Verbal Maupun Non-Verbal. Apa Yang Dimunculkan Pada Rapat Tersebut Merupakan Bukti Adanya Komunikasi Transaksional Baik Yang Verbal Maupun Non-Verbal. Komunikasi Sangat Penting Dilakukan Baik Antar Pribadi, Kelompok Maupun Lembaga Untuk Menyelesaikan Setiap Persoalan Yang Muncul.

Gabriel Almond Dan G. Bingham Powell, JR Melihat Arti Pentingnya Proses Komunikasi Politik Bagi Warga Negara Dengan Alasan Sebagai Berikut: (A) Warga Negara Membutuhkan Fakta Yang Cukup Terhadap Keputusan, Terhadap Berbagai Tindakan Dari Pimpinan Politik Mereka. (B) Warga Negara Lebih Efektif Dalam Melakukan Kontrol

Terhadap Pimpinan Sesuai Dengan Posisi Yang Dipegangnya<sup>72</sup>.

Adapun Komponen Sistem Komunikasi Menurut Pendapat Gurevitch Dan Blumer (1977) Yang Dikutip Dari Zulkarimen Nasution Terdiri Dari: (A) Lembaga-Lembaga Politik Dalam Aspek-Aspek Komunikasinya. (B) Institut-Institut Modern Dalam Aspek Politiknya. (C) Orientasi Khalayak Terhadap Komunikasi Politik, Dan (D) Aspek-Aspek Budaya Politik Yang Relevan Dengan Komunikasi.<sup>73</sup>

Dari Pengertian Di Atas Penulis Memahami Lingkup Kajian Komunikasi Politik Dewasa Ini Meliputi Bahasa Politik, Retorika Politik, Periklanan Politik, Dan Propaganda, Debat Politik, Sosialisasi Politik, Kampanye Pemilihan Umum, Opini Lobi-Lobi Politik, Kebijakan Publik, Pergerakan Politik, Hubungan Pemerintah Dengan Media Pemberitaan, Citra Politik, Symbolisme Politik Dan Negosiasi. Pendekatan Yang Dilakukan Serta Membangun Hubungan Yang Baik Sehingga Timbul Sebuah Pemaknaan Dari Hasil Interaksi Merupakan Cakupan Dan Pembahasan Komunikasi Politik Secara Luas.

Dalam Hal Ini Herbert Blumer Dalam Teori Interaksionalis Simbolik Menegaskan Bahwa Manusia Bertindak Terhadap Sesuatu Berdasarkan Makna Yang Melekat Pada Sesuatu.<sup>74</sup> Jika Dikaitkan Dengan Komunikasi Politik Antara Eksekutif, Legislatif Dan Lembaga Agama, Maka Dipahami Bahwa Hubungan Yang Dibangun Di Antara Ketiga Lembaga Itu Tergantung Dari Mereka Memaknai Tugas Dan Tanggung Jawab Masing Masing, Sehingga Satu Sama Lainnya Tidak Saling Menyalahkan Tapi Bekerja Sama Untuk Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Terutama Dalam Bidang Keagamaan.

Komunikasi Yang Terjadi Antara Elit Politik Dan Elit Birokrat Serta Tokoh Agama Adalah Langkah Awal Yang Baik Menuju Keberhasilan. Jika Komunikasi Politik Yang Dibangun Itu Satu Makna Dan Satu Tujuan Maka Keberhasilan Dalam Pembangunan Akan Tercapai. Ketika Komunikasi Yang Dibangun Itu Berlawanan Arah Terjadi Perbedaan Sudut Pandang,

---

<sup>72</sup>Almond Gobfiel dan G.Bingham Power, *Comparative Politic: A Development Approach* (Boston: Little Brown An Company, 1996), h .29.

<sup>73</sup> Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), h.24.

<sup>74</sup> Mulyana, *Komunikasi*, h.21.

Ini Menjadi Persoalan Yang Rumit Yang Membutuhkan Solusi Yang Bijak Agar Roda Pemerintahan Berjalan Dengan Sebaik-Baiknya.

### **3. Prinsip-Prinsip Komunikasi Politik Islam**

Komunikasi Menyentuh Seluruh Aspek Kehidupan Manusia Mulai Dari Urusan Pribadi, Sosial, Budaya, Politik, Ekonomi Maupun Agama. Baik Menyangkut Kepentingan Pribadi Maupun Kelompok Dan Juga Masyarakat Luas. Maka Sangat Penting Memahami Komunikasi Bukan Hanya Pengertian Secara Umum Tapi Juga Pendekatan Komunikasi Dalam Konsep Al-Quran Dan Hadis. Mengingat Dalam Islam Seluruh Aspek Kehidupan Masyarakat Telah Diatur Sedemikian Rupa, Sehingga Dalam Komunikasi Islam Seorang Komunikator Harus Berkata Benar, Berkata Lemah Lembut, Berkata Dengan Baik Dan Mengamalkan Terlebih Dahulu Apa Yang Disampaikan Kepada Masyarakat.

Komunikasi Merupakan Proses Penyampaian Pesan Dari Komunikator Kepada Komunikan. Penyampaian Pesan Tersebut Dianggap Efektif Manakala Pesan Yang Disampaikan Komunikator Dimaknai Sama Oleh Komunikan Sebagai Penerima Pesan Dan Menimbulkan Perubahan Terhadap Komunikan Baik Aspek Kognitif, Afektif Maupun Juga Aspek Behavioralnya. Dalam Komunikasi Politik Bahwa Tindakan Berbicara, Simbol Dan Dimensi Persuasi Sejalan Dengan Politik Bahasa. Bagaimana Menggunakan Bahasa Bertalian Dengan Bagaimana Membentuk Identitas Komunal Dalam Mempromosikan Dan Membela Aspirasi Rakyat.<sup>75</sup>

Sebagai Sebuah Proses Penyampaian Pesan, Komunikasi Tentunya Memerlukan Prinsip-Prinsip Atau Kaidah-Kaidah Yang Dijadikan Pedoman Dalam Pelaksanaan Komunikasi Tersebut. Dengan Prinsip Atau Kaidah Tersebutlah Proses Komunikasi Dapat Berjalan Secara Efektif Dan Sebaliknya Tanpa Adanya Prinsip-Prinsip Yang Mengatur Proses Pelaksanaan Komunikasi Itu, Maka Hal Tersebut Akan Menghambat Komunikasi Tersebut.

Dalam Melakukan Komunikasi, Baik Komunikator Maupun Juga

---

<sup>75</sup> Dale F.Eickelmen & James Piscatori, *Politik Muslim Wacana Kekuasaan Dan Hegemoni Dalam Masyarakat Muslim* (Yogyakarta: Tiara Wacana 1998), h.11.

Komunikasikan Mesti Berpedoman Dengan Prinsip-Prinsip Atau Kaidah-Kaidah Yang Mengatur Proses Pelaksanaan Komunikasi Tersebut. Begitu Juga Dalam Komunikasi Islam, Baik Komunikator Maupun Komunikan Dalam Berkomunikasi Harus Berpedoman Dengan Prinsip-Prinsip Komunikasi Yang Digambarkan Baik Dalam Al-Quran Maupun Juga Dalam Hadis.

Berikut Ini Merupakan Beberapa Prinsip Dalam Memimpin Menurut Tinjauan Pemerintahan Dan Politik Islam, Yaitu:

a. Berkata Lemah Lembut Dan Bermusyawarah<sup>76</sup>

Anjuran Untuk Menyampaikan Pesan Dengan Lemah Lembut Terdapat Dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran: 159

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لَئِنَّ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka Dengan Rahmat Allahlah Kamu {Muhammad } Berlaku Lemah Lembut Kepada Mereka .Sekiranya Engkau Bersikap Keras Dan Berhati Kasar Tentulah Mereka Menjauhkan Diri Dari Sekitarmu. Karena Itu Maafkanlah Mereka Dan Mohonknlah Ampunan Untuk Mereka Dan Bermusyawarahlah Dengan Mereka Dalam Urusan Itu. Kemudian ,Apabila Engkau Telah Membulatkan Tekad Maka Bertawakkallah Kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mencintai Orang Orang Yang Bertawakkal”. (QS. Ali Imran: 159).

Dalam Kajian Komunikasi Islam Perilaku Lemah Lembut Dimaknai Bukan Hanya Dari Ungkapan Kata. Tetapi Lemah Lembut Juga Dipahami Sebagai Etika Atau Bicara Pengungkapan Bahasa Yang Dilontarkan, Menyesuaikan Pesan Yang Disampaikan Dengan Tempat Berkomunikasi, Gaya Berkomunikasi, Intonasi Kata Yang Diucapkan Serta Menyesuaikan Kadar Kemampuan Audiens Yang Menjadi Sasaran Komunikasi. Dengan Isi Pesan Yang Disampaikan Komunikator, Kata Musyawarah Dalam Ayat Itu Menuntun Para Pemimpin Dalam Mengambil Kebijakan Harus Melalui Proses Musyawarah Dan Dialog. Apabila Hal Itu Tidak Dilaksanakan

---

<sup>76</sup> Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedi Tematis Ayat Alquran & Hadits jilid 7* (Jakarta: Widya Cahaya, 2009), h. 470.

Pimpinan Tetap Pada Sikap Otoriter, Ini Akan Menimbulkan Dampak Yang Kurang Baik Kepada Berjalannya Proses Kepemimpinan.

b. Berbicara Yang Baik

Berbicara Yang Baik Tercermin Dalam QS. Al-Isra': 53

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

Artinya: Dan Katakanlah Kepada Hamba Hambaku Hendaklah Mereka Mengucapkan Perkataan Yang Lebih Baik (Benar). Sungguh Setan Itu Selalu Menimbulkan Perselisihan Diantara Mereka. Sungguh Setan Adalah Musuh Yang Nyata Bagi Manusia. (Al-Isra: 53).

Dalam Melakukan Komunikasi Baik Terhadap Diri Maupun Lingkungan Di Sekitar Kita Haruslah Dengan Berkomunikasi Yang Baik. Baik Dimaksudkan Adalah Menyampaikan Sesuatu Yang Tidak Menyakiti Orang Lain, Berkata Jujur Dan Menyampaikan Hal-Hal Yang Tidak Menyalahi Aturan Agama Dan Memberikan Kebaikan Kepada Orang Lain.

c. Berkomunikasi Secara Bijak Dan Efektif

QS. An-Nahl: 125 Yang Menekankan Pada Berbicara Dengan Menggunakan Hikmah, Nasehat Yang Baik Dan Berdiskusi Dengan Cara Yang Baik, Dan Masih Banyak Lagi Ayat-Ayat Yang Terkait Dengan Prinsip-Prinsip Berkomunikasi Tersebut.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya: “Serulah Manusia Kepada Jalan Tuhanmu Dengan Hikmah Dan Pengajaran Yang Baik Dan Berdebatlah Dengan Mereka Dengan Cara Yang Baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-Lah Yang Lebih Mengetahui Siapa Yang Sesat Dari Jalan-Nya Dan Dia-Lah Yang Lebih Mengetahui Siapa Yang Mendapat Petunjuk. (An-Nahal:125).

## **BAB III**

### **TEORI KOMUNIKASI POLITIK**

#### **A. Teori Dialektika Relasional**

Komunikasi Dan Interaksi Merupakan Kebutuhan Manusia Dalam Kehidupan Sehari-Harinya Baik Di Lembaga Pemerintahan Maupun Di Lembaga Legislatif Dan Juga Lembaga Agama. Para Wakil Rakyat Dan Juga Birokrat Dalam Mengartikulasikan Kepentingan Tertentu Senantiasa Menggunakan Komunikasi, Terutama Dalam Menyampaikan Rekomendasi Terhadap Kebijakan Yang Akan Diterapkan. Begitu Pula Para Penguasa Atau Pemerintah Dalam Menentukan *Publicy Policy* Akan Menganalisis Terlebih Dahulu Berbagai Informasi Yang Berasal Dari Masyarakat, Demikian Juga Para Legislator Dalam Hal Membahas Suatu Produk Hukum Sangat Memerlukan Komunikasi Terlebih Dahulu Dengan Segala Komponen Yang Terkait Dengan Produk Legislatif tersebut.

Singkatnya Komunikasi Mempunyai Peranan Yang Cukup Penting Dalam Proses Politik. Oleh Karena Itu, Tidak Jarang Para Penguasa Berusaha Untuk Mengendalikan Atau Mengawasi “Komunikasi” Agar Mereka Tetap Mendapat Dukungan Untuk Berkuasa Secara Terus Menerus. Seorang Pemimpin Politik Baik Yang Otoriter Maupun Yang Demokrat, Ada Kecenderungan Untuk Membangun Hubungan Dan Komunikasi Dengan Kelompok Lain Agar Tetap Eksis Dalam Berkiprah Untuk Mencapai Tujuan Yang Diinginkan Dan Juga Tetap Menguasai Informasi Agar Bisa Mempertahankan Kekuatan Kelompoknya.

Pada Dasarnya Setiap Orang Berhak Menjadi Komunikator Politik, Hanya Saja Yang Membedakan Adalah Kemampuan Menguasai Sasaran. Ada Dua Kategori Komunikator Politik Menurut Daniel Katz, Yaitu Ada Yang Disebut Dengan Partisipan Dan Juga Ideologi.<sup>77</sup> Partisipan Adalah Mereka Yang Mengidentifikasi Diri Sebagai Wakil Kelompok, Lebih Banyak Melindungi Dan Mengutamakan Kepentingan Kelompok Atau Pribadi. Orang Seperti Ini Juga Mempengaruhi Orang Dengan Cara Menciptakan Situasi Yang Saling Menguntungkan Kedua Belah Pihak

---

<sup>77</sup> Budiardjo, *Dasar-Dasar*, h.24.

Dengan Cara Tawar Menawar Atau Lobi Dengan Cara *Bargaining*. Komunikator Ideologi Adalah Mereka Yang Berorientasi Pada Pengambilan Keputusan Dan Memperjuangkan Nilai-Nilai Ideologinya, Tetap Mempertahankan Pendapatnya.

Ada Beberapa Asumsi Tentang *Relational Dialectics Theory*, Yaitu *Relationships Not Linear, Relational Life Is Characterized By Change, Contradiction Is The Fundamental Fact Relational Life Communication Is Central To Organizing And Negotiating Relational*.<sup>78</sup> Sebuah Teori Komunikasi Yang Berpandangan: Simpul Kontradiksi Dalam Hubungan Pribadi Atau Interaksi Terus Menerus Antara Kebalikan Atau Kecenderungan Untuk Menentang. Teori Ini, Pertama Kali Diusulkan Masing-Masing Oleh Leslie Baxter Dan WK Rawlins Pada Tahun 1988, Mendefinisikan Pola Komunikasi Antara Mitra Hubungan Sebagai Akibat Dari Ketegangan *Dialektis Endemik*. Yang Mengatakan Bahwa Hidup Berhubungan Dicitrakan Oleh Ketegangan-Ketegangan Atau Konflik Antara Individu. Konflik Tersebut Terjadi Ketika Seseorang Mencoba Memaksakan Keinginannya Satu Terhadap Yang Lain.<sup>79</sup>

*Dialektika Relasional* Merupakan Penjabaran Ide Bahwa Hidup Adalah Sebuah Tempat Yang Menangani Pertentangan Dan Tekanan Di Antara Kekuatan Yang Berlawanan Dalam Suatu Sistem.<sup>80</sup> Manusia Mengalami Tabrakan Antara Menentang Keinginan Dan Kebutuhan Dalam Komunikasi Relasional. Baxter Dalam *Teori Dialektis* Yang Mengingatkan Kita Bahwa Hubungan Yang Terus Berubah, Dan Bahwa Hubungan Yang Sukses Dan Memuaskan Membutuhkan Perhatian Konstan. Deskripsi Baxter Dari *Relation Dialectics* Adalah Dalam Kehidupan Berkomunikasi Dengan Orang Lain Baik Pribadi Atau Kelompok Akan Selalu Menghadapi Pertentangan. Pertentangan Dan Perlawanan Muncul Manakala Apa Yang Diinginkan Oleh Satu Orang Atau Banyak Orang Tidak Terpenuhi Oleh Pihak Lain. Sikap Tidak Memahami

---

<sup>78</sup> Richard West, Lynn H. Turner, *Introducing Communication Theory* (Amerika: Mcgraw-Hill, 2007), h. 224.

<sup>79</sup> Elvinaro Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Public Relation* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), h.139.

<sup>80</sup>. Stephen W. Little John dan Karen A. Foss, Penerjemah Muhammad Yusuf Hamdan (Jakarta: Humanika Salemba, 2014), h. 302.

Yang Menjadi Dasar Munculnya Ketidaksamaan Visi Di Dalam Berinteraksi Dalam Kehidupan.

**Ada 4 Asumsi Dalam Teori Dialektika Relasional.**

1. *Relationships Are Not Linear* (Hubungan Tidak Bersifat *Non-Linear*, Yang Dimaksud Di Sini Adalah Yang Terjadi Antara Keinginan Yang Kontradiktif).
2. *Relational Life Is Characterized By Change* (Hidup Berhubungan Ditandai Dengan Adanya Perubahan, Dalam Hal Ini Adalah Tingkat Kedekatan Dalam Hubungan).
3. *Contradiction Is The Fundamental Fact Of Relational Life* (Kontradiksi Merupakan Fakta Fundamental Dalam Hidup Berhubungan. Orang Berupaya Untuk Mengelolah Ketegangan Dalam Hubungan Dengan Cara Yang Berbeda-Beda, Akan Tetapi Hal Ini Selalu Muncul Dalam Suatu Hubungan).
4. *Communication Is Central To Organizing And Negotiating Relation Contradiction.*<sup>81</sup> (Komunikasi Sangat Penting Dalam Mengasosiasikan Kontradiksi-Kontradiksi Dalam Hubungan Dalam Artian Bahwa Komunikasi Sangat Berperan Untuk Memberikan Penyelesaian Atas Suatu Masalah Dalam Hubungan Baik Dengan Dialog, Mediasi Dan Transaksional.

**B. Komunikasi Politik Eksekutif Dan Legislatif Dan Lembaga Agama**

Bila Dikaitkan Dengan Komunikasi Politik Legislatif Dan Eksekutif Serta Lembaga Agama Dalam Hal Ini Bahwa Hubungan Yang Dibangun Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Sering Terjadi Ketegangan Karena Ketidaksesuaian Sudut Pandang Dalam Memahami Suatu Hal, Terutama Berkaitan Dengan Rencana Pembangunan. Eksekutif Memiliki Keinginan Dan Kebutuhan Serta Harapan, Begitu Juga Dengan Legislatif Punya Pandangan Dan Kebijakan Berbeda Dengan Eksekutif Dan Juga Lembaga Agama Yang Memiliki Kepentingan. Untuk Memenuhi Kepentingan Dan Kebutuhan Dari Lembaga Di Atas Maka Harus Dilakukan

---

<sup>81</sup> Richard West dan Lynn H.Turner, *Introduction communication Theory: Analysis and Application* (Singapore: Mc Graw, Hill Education, 2007), h. 224.

Melalui Pendekatan Komunikasi Politik, Pendekatan Yang Dilakukan Dengan Membangun Hubungan Yang Baik, *Sharing* Dan Juga Melakukan Pendekatan-Pendekatan Untuk Mencairkan Ketegangan Yang Terjadi.

Dengan Adanya Hubungan Yang Baik Antara Ketiga Lembaga Itu Dimungkinkan Akan Mempunyai Sudut Pandang Yang Sama Tentang Pentingnya Pembangunan Keagamaan. Bila Dilihat Dari Kondisi Era Globalisasi Saat Ini, Terjadi Krisis Etika, Manusia Makin Jauh Dari Agama, Maka Sudah Sepantasnya Kepentingan Keagamaan Menjadi Prioritas Yang Sama Dengan Lembaga Lainnya Bahkan Harus Lebih Utama.

Memahami Perilaku Komunikasi Lewat Teori-Teori Normatif Semata, Sering Menghasilkan Kekecewaan. Karena Pendekatan-Pendekatan Normatif Lebih Mengarah Kepada Kontruksi Idealistik Yang Bersifat *Das Sollen*, Bukan *Dassein*. Karena Itu, Pendekatan Komunikasi Politik Yang Bersifat Empirik Dengan Melihat Berbagai Permasalahan Di Dalamnya, Terasa Akan Lebih Mendekati Kenyataan Beroperasinya Sebuah Mekanisme Politik.

Mekanisme Politik Akan Mendorong Terciptanya Hubungan Antara Eksekutif Dan Legislatif Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Khususnya Pembangunan Keagamaan. Kedua Lembaga Memiliki Kekuasaan Masing-Masing Yang Merupakan Penentu Berjalan Tidaknya Roda Pemerintahan. Jika Hubungan Keduanya Mengalami Ketegangan Maka Roda Pemerintahan Akan Lumpuh. Kedua Kekuatan Ini Bisa Saja Terjadi Pertentangan Seperti Yang Disampaikan Baxter Dalam Teori Dialetika Di Atas. Pertentangan Yang Muncul Diakibatkan Oleh Tidak Terpenuhinya Keinginan Dan Kebutuhan Di Antara Kedua Lembaga Ini. Disatu Sisi Lembaga Eksekutif Memaksakan Keinginan Agar Lembaga Legislatif Menerima Usulan Pembangunan Yang Dirancang, Di Sisi Lain Legislatif Juga Berkeinginan Agar Apa Yang Menjadi Kebutuhan Konstituen Pemilih Harus Tersahuti Dan Tertulis Dalam Rancangan Anggaran Pembangunan Daerah Khususnya Pembangunan Yang Berkaitan Dengan Keagamaan.

Ketegangan Komunikasi Antara Eksekutif Dan Legislatif Serta Lembaga Agama Akan Terus Berubah Jika Komunikasi Politik Yang Dibangun Itu Berkelanjutan Dan Saling Memahami Antara Satu Dengan

Lainnya. Kehidupan Berkomunikasi Menurut Baxter Dalam Kehidupan Manusia Baik Dengan Pribadi Maupun Kelompok Eksekutif Dan Legislatif, Lembaga Agama Dengan Eksekutif Dan Legislatif Akan Selalu Mengalami Pertentangan. Pertentangan Dan Ketegangan Akan Mengalami Perubahan Seiring Dengan Waktu Dan Tingkat Keseringan Berkomunikasi.

#### **A. Kedudukan Dan Peran DPR Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Umum Secara Langsung.<sup>82</sup> Pemilu Dan Pemilukada Dilaksanakan Secara Langsung Dalam 5 Tahun Sekali, Baik Memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Atau Yang Disebut Legislatif, Presiden, Gubernur Dan Kepala Daerah Tingkat II. DPR Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Yang Disebut Anggota Dewan Yang Berasal Dari Partai Politik Merupakan Hasil Pilihan Rakyat Di Daerah Pemilihan Masing-Masing. Anggota Dewan Adalah Wakil Rakyat Dari Daerahnya Yang Akan Menampung Segala Aspirasi Masyarakat Dari Daerah Pemilihan. Pada Awalnya Partai Politik Dipergunakan Oleh Rakyat Terjajah Sebagai Salah Satu Sarana Untuk Membebaskan Dirinya Dari Belenggu Penjajahan.<sup>83</sup> Akan Tetapi Dalam Perkembangan Berikutnya Seperti Yang Dikatakan Sigmund Neuman Partai Politik Sebagai Organisasi Artikulatif Yang Terdiri Dari Pelaku-Pelaku Politik Yang Aktif Dalam Masyarakat, Yaitu Mereka Yang Memusatkan Perhatiannya Pada Pengendalian Kekuasaan Pemerintahan Dan Bersaing Untuk Memperoleh Dukungan Rakyat.<sup>84</sup>

Sejak Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Indonesia Tidak Lagi Menganut Paham Sentralistik Tetapi Pemerintah Daerah Diberikan Kebebasan Untuk Menentukan Langkahnya. Sistem Itu Dikenal Dengan Otonomi Daerah. Dalam Sistem Otonomi Daerah, DPRD Bersama Eksekutif Menentukan Langkah-Langkah Kebijakan Yang Diambil Untuk Pembangunan Daerah.

---

<sup>82</sup>Muhammad Aspar, *Esai-Esai Seputar Pemilu* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2005), h. 83, dan dapat dilihat pada buku undang-undang pemilu yang diterbitkan oleh KPU pusat.

<sup>83</sup>Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum* (Yogyakarta: Liberty, 1984), h.1.

<sup>84</sup>*Ibid*, h.4-5.

Dalam Hal Ini Ada Beberapa Tugas Dan Tanggung Jawab DPRD Sesuai Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Tugas Dan Tanggung Jawab DPR Adalah: DPRD Memiliki Fungsi Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan.

DPRD Mempunyai Tugas Dan Wewenang: Membentuk Perda Yang Dibahas Dengan Kepala Daerah Untuk Mendapat Persetujuan Bersama, Membahas Dan Menyetujui Rancangan Perda Tentang APBD Bersama Dengan Kepala Daerah, Melaksanakan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Perda Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya, Peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program Pembangunan Daerah, Dan Kerjasama Internasional, Di Daerah Mengusulkan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kepada Presiden Melalui Menteri Dalam Negeri, Bagi DPRD Provinsi Dan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur, Bagi DPRD Kabupaten/Kota: Memilih Wakil Kepala Daerah Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah, Memberikan Pendapat Dan Pertimbangan Kepada Pemerintah Daerah Terhadap Rencana Perjanjian Internasional Di Daerah, Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Internasional Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah, Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah, Melakukan Pengawasan Dan Meminta Laporan KPUD Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Antar Daerah Dan Dengan Pihak Ketiga Yang Membebani Masyarakat Dan Daerah.

Selain Tugas Dan Wewenang Di Atas DPRD Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Lain Yang Diatur Dalam Peraturan Perundang-Undangan. DPRD Juga Mempunyai Hak Dan Kewajiban: Interpelasi, Angket Dan Menyatakan Pendapat. Dalam Menggunakan Hak Angket Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dibentuk Panitia Angket Yang Terdiri Atas Semua Unsur Fraksi, DPRD Yang Bekerja Dalam Waktu Paling Lama 60 (Enam Puluh) Hari Telah Menyampaikan Hasil Kerjanya Kepada DPRD. Menyampaikan Usul Dan Pendapat, Memilih Dan Dipilih, Membela Diri, Imunitas, Protokol, Keuangan Dan Administratif. Kedudukan

Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD Diatur Dalam Peraturan Pemerintah Pasal (45) Anggota DPRD Mempunyai Kewajiban: Mengamalkan Pancasila, Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dan Mentaati Segala Peraturan Perundang-Undangan, Melaksanakan Kehidupan Demokrasi Dalam Penyelenggaraan, Pemerintahan Daerah, Mempertahankan Dan Memelihara Kerukunan Nasional Serta Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Memperjuangkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Di Daerah, Menyerap, Menampung, Menghimpun, Dan Menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, Mendahulukan Kepentingan Negara Di Atas Kepentingan Pribadi, Kelompok, Dan Golongan. Memberikan Pertanggungjawaban Atas Tugas Dan Kinerjanya Selaku Anggota DPRD Sebagai Wujud Tanggungjawab Moral Dan Politis Terhadap Daerah Pemilihannya. Mentaati Peraturan Tata Tertib, Kode Etik, Dan Sumpah/Janji Anggota DPRD, Menjaga Norma Dan Etika Dalam Hubungan Kerja Dengan Lembaga Yang Terkait. Paragraf Kelima Alat Kelengkapan DPRD Pasal 46 (1) Alat Kelengkapan DPRD Terdiri Atas: Pimpinan, Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan Dan Alat Kelengkapan Lain Yang Diperlukan. (2) Pembentukan, Susunan, Tugas, Dan Wewenang Alat Kelengkapan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Diatur Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Dengan Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 47 (1) Badan Kehormatan DPRD Dibentuk Dan Ditetapkan Dengan Keputusan DPRD. (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dipilih Dari Dan Oleh Anggota DPRD Dengan Ketentuan: Untuk DPRD Kabupaten/Kota Yang Beranggotakan Sampai Dengan 34 (Tiga Puluh Empat) Berjumlah 3 (Tiga) Orang, Dan Untuk DPRD Yang Beranggotakan 35 (Tiga Puluh Lima) Sampai Dengan 45 (Empat Puluh Lima) Berjumlah 5 (Lima) Orang. Untuk DPRD Provinsi Yang Beranggotakan Sampai Dengan 74 (Tujuh Puluh Empat) Berjumlah 5 (Lima) Orang, Dan Untuk DPRD Yang Beranggotakan 75 (Tujuh Puluh Lima) Sampai Dengan 100 (Seratus) Berjumlah 7 (Tujuh) Orang. (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Terdiri Atas Seorang Ketua Dan Seorang Wakil Ketua Yang Dipilih Dari Dan Oleh Anggota Badan Kehormatan. (4) Badan Kehormatan

Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dibantu Oleh Sebuah Sekretariat Yang Secara Fungsional Dilaksanakan Oleh Sekretariat DPRD.

Badan Kehormatan Mempunyai Tugas: Mengamati, Mengevaluasi Disiplin, Etika, Dan Moral Para Anggota DPRD Dalam Rangka Menjaga Martabat Dan Kehormatan Sesuai Dengan Kode Etik DPRD, Meneliti Dugaan Pelanggaran Yang Dilakukan Anggota DPRD Terhadap Peraturan Tata Tertib Dan Kode Etik DPRD Serta Sumpah/Janji, Melakukan Penyelidikan, Verifikasi, Dan Klarifikasi Atas Pengaduan Pimpinan DPRD, Masyarakat Dan Atau Pemilih, Menyampaikan Kesimpulan Atas Hasil Penyelidikan, Verifikasi, Dan Klarifikasi Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf C Sebagai Rekomendasi Untuk Ditindaklanjuti Oleh DPRD. Pasal 49 (1) DPRD Wajib Menyusun Kode Etik Untuk Menjaga Martabat Dan Kehormatan Anggota DPRD Dalam Menjalankan Tugas Dan Wewenangnya. (2) Kode Etik Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sekurang-Kurangnya Meliputi: Pengertian Kode Etik, Tujuan Kode Etik, Pengaturan Sikap, Tata Kerja, Dan Tata Hubungan Antar Penyelenggara Pemerintahan Daerah Dan Antara Anggota Serta Antara Anggota DPRD Dan Pihak Lain, Hal Yang Baik Dan Sepantasnya Dilakukan Oleh Anggota DPRD, Etika Dalam Penyampaian Pendapat, Tanggapan, Jawaban, Sanggahan Dan Sanksi Dan Rehabilitasi. Pasal 50 (1) Setiap Anggota DPRD Wajib Berhimpun Dalam Fraksi. (2) Jumlah Anggota Setiap Fraksi Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Sekurang-Kurangnya Sama Dengan Jumlah Komisi Di DPRD. (3) Anggota DPRD Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dari 1 (Satu) Partai Politik Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Membentuk 1 (Satu) Fraksi, Wajib Bergabung Dengan Fraksi Yang Ada Atau Membentuk Fraksi Gabungan. (4) Fraksi Yang Ada Wajib Menerima Anggota DPRD Dari Partai Politik Lain Yang Tidak Memenuhi Syarat Untuk Dapat Membentuk Satu Fraksi. (5) Dalam Hal Fraksi Gabungan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (3) Setelah Dibentuk, Kemudian Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Fraksi Gabungan, Seluruh Anggota Fraksi Gabungan Tersebut Wajib Bergabung Dengan Fraksi Dan Atau Fraksi Gabungan Lain Yang Memenuhi Syarat. (6) Parpol Yang Memenuhi Persyaratan Untuk Membentuk Fraksi Hanya Dapat Membentuk Satu Fraksi. (7) Fraksi Gabungan Dapat Dibentuk Oleh Partai Politik Dengan Syarat Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Dan

Ayat (5). Pasal 51 (1) DPRD Provinsi Yang Beranggotakan 35 (Tiga Puluh Lima) Sampai Dengan 75 (Tujuh Puluh Lima) Orang Membentuk 4 (Empat) Komisi, Yang Beranggotakan Lebih Dari 75 (Tujuh Puluh Lima) Orang Membentuk 5 (Lima) Komisi. (2) DPRD Kabupaten/Kota Yang Beranggotakan 20 (Dua Puluh) Sampai Dengan 35 (Tiga Puluh Lima) Orang Membentuk 3 (Tiga) Komisi, Yang Beranggotakan Lebih Dari 35 (Tiga Puluh Lima) Orang Membentuk 4 (Empat) Komisi.

Pasal 52 (1) Anggota DPRD Tidak Dapat Dituntut Di Hadapan Pengadilan Karena Pernyataan, Pertanyaan Dan Atau Pendapat Yang Dikemukakan Secara Lisan Ataupun Tertulis Dalam Rapat DPRD, Sepanjang Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Tata Tertib Dan Kode Etik DPRD. (2) Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tidak Berlaku Dalam Hal Anggota Yang Bersangkutan Mengumumkan Materi Yang Telah Disepakati Dalam Rapat Tertutup Untuk Dirahasiakan, Atau Hal-Hal Yang Dimaksud Oleh Ketentuan Mengenai Pengumuman Rahasia Negara Dalam Peraturan Perundang-Undangan. (3) Anggota DPRD Tidak Dapat Diganti Antar Waktu Karena Pernyataan, Pertanyaan Dan Atau Pendapat Yang Dikemukakan Dalam Rapat DPRD. Pasal 53 (1) Tindakan Penyidikan Terhadap Anggota DPR Dilaksanakan Setelah Adanya Persetujuan Tertulis Dari Menteri Dalam Negeri Atas Nama Presiden, Bagi Anggota DPRD Provinsi Dari Gubernur Atas Nama Menteri Dalam Negeri, Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota. (2) Dalam Hal Persetujuan Tertulis Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Tidak Diberikan Dalam Waktu Paling Lambat 60 (Enam Puluh) Hari Semenjak Diterimanya Permohonan, Proses Penyidikan Dapat Dilakukan. (3) Tindakan Penyidikan Yang Dilanjutkan Dengan Penahanan Diperlukan Persetujuan Tertulis Dengan Cara Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (2). (4) Hal-Hal Yang Dikecualikan Dari Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Adalah: Tertangkap Tangan Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Atau Disangka Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Yang Diancam Dengan Pidana Mati, Atau Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Setelah Tindakan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Dilakukan, Tindakan Penyidikan Harus Dilaporkan Kepada Pejabat Yang Memberikan Izin Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Paling Lambat 2 (Dua Kali) 24 (Dua Puluh Empat) Jam. Bagian Keenam Larangan Dan

Pemberhentian Anggota DPRD Pasal 54 (1) Anggota DPRD Dilarang Merangkap Jabatan Sebagai: Pejabat Negara Lainnya, Hakim Pada Badan Peradilan, Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI/Polri, Pegawai Pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Atau Badan Lain Yang Anggarannya Bersumber Dari APBN/APBD. (2) Anggota DPRD Dilarang Melakukan Pekerjaan Sebagai Pejabat Struktural Pada Lembaga Pendidikan Swasta, Akuntan Publik, Konsultan, Advokat/Pengacara, Notaris, Dokter Praktek Dan Pekerjaan Lain Yang Ada Hubungannya Dengan Tugas, Wewenang, Dan Hak Sebagai Anggota DPRD. (3) Anggota DPRD Dilarang Melakukan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme. (4) Anggota DPRD Yang Melakukan Pekerjaan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (2) Wajib Melepaskan Pekerjaan tersebut Selama Menjadi Anggota DPRD. (5) Anggota DPRD Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (4) Diberhentikan Oleh Pimpinan Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Pelaksanaan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Dan Ayat (5) Diatur Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Yang Berpedoman Kepada Peraturan Perundang-Undangan. Bagian Ketujuh Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Pasal 55 (1) Anggota DPRD Berhenti Antar Waktu Sebagai Anggota Karena: Meninggal Dunia, Mengundurkan Diri Atas Permintaan Sendiri Secara Tertulis Dan Diusulkan Oleh Partai Politik Yang bersangkutan. (2) Anggota DPRD Diberhentikan Antar Waktu, Karena: Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-turut Selama 6 (Enam) Bulan, Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Anggota DPRD, Dinyatakan Melanggar Sumpah/Janji Jabatan, Dan/Atau Melanggar Kode Etik DPRD, Tidak Melaksanakan Kewajiban Anggota DPRD, Melanggar Larangan Bagi Anggota DPRD, Dinyatakan Bersalah Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Karena Melanggar Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Paling Singkat 5 (Lima) Tahun Penjara Atau Lebih.

Pemberhentian Anggota DPRD Yang Telah Memenuhi Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dan Ayat (2) Disampaikan Oleh Pimpinan DPRD Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Gubernur Bagi Anggota DPRD Provinsi Dan Kepada Gubernur Melalui Bupati/Walikota

Bagi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Diresmikan Pemberhentiannya. Pemberhentian Anggota DPRD Sebagaimana Dimaksud Di Atas Dilaksanakan Setelah Ada Keputusan DPRD Berdasarkan Rekomendasi Dari Badan Kehormatan DPRD. (5) Pelaksanaan Ketentuan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Dan Ayat (4) Diatur Dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Berpedoman Pada Peraturan Perundang-Undangan. Bagian Kedelapan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Paragraf Kesatu Pemilih Pasal 56 (1) Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dipilih Dalam Satu Pasangan Calon Yang Dilaksanakan Secara Demokratis Berdasarkan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Dan Adil.(2).<sup>85</sup>

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Adalah Sebuah Lembaga Yang Menerima Setiap Aspirasi Yang Muncul Dari Masyarakat. Untuk Menyahuti Aspirasi Itu, DPRD Bekerja Sama Dengan Eksekutif Untuk Mencari Solusi Yang Tepat Dalam Mengatasi Persoalan Masyarakat Yang Muncul. Dalam Melaksanakan Tugasnya, DPRD Berhak Meminta Penjelasan Dari Pemerintah Terhadap Permasalahan Yang Muncul. Fungsi Pengawasan Yang Dilakukan DPRD Adalah Untuk Mengontrol Bagaimana Pemerintah Melaksanakan Rencana Anggaran Pembangunan Yang Sudah Ditetapkan Serta Peraturan Daerah Yang Disahkan. Jika Dikaji Lebih Lanjut Tentang Tugas Dan Wewenang Serta Hak-Hak DPRD Sebagaimana Dimaksudkan Di Atas, Maka Dapatlah Dikatakan Bahwa Peranan DPRD Baik DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Adalah Sangat Penting. Dikatakan Penting Karena Tanpa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maka Pihak Eksekutif Baik Gubernur maupun Bupati Tidak Dapat Menggunakan Anggaran Untuk Pembangunan Daerah Karena Dianggap Melanggar Undang-Undang.

Pemisahan Kekuasaan Antara Lembaga Eksekutif Dan Legislatif

---

<sup>85</sup> <http://www.slideshare.net/perencanakota/undangundang-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah?ref=http://ww>, Miriam Budiardjo *Dasar Dasar*, h. 296.

Dipandang Sebagai Kelebihan Sistem Presidensial Dibanding Parleментар. Dipihak Lain Juga Terbuka Peluang Terbentuknya Pemerintahan Yang Terbelah (*Devide Governmen*) Dengan Presiden Dan Parlemen dikuasai Dan dikontrol Oleh Partai Yang Berbeda. Pengalaman Demokrasi Presidential Di Amerika Serikat sendiri memperlihatkan bahwa Lembaga Kepresidenan Dan Senat Pernah dikontrol Dua Partai Yang Berbeda yaitu Partai Republik Dan Partai Demokrat. Begitu juga halnya Di Indonesia, Presiden bukan berasal dari Partai Pemenang Pemilu. Begitu halnya dengan Gubernur terpilih bukanlah dari Partai Pemegang Suara terbanyak.

Seperti dikemukakan diatas Problem Sistem Presidensial pada umumnya terjadi ketika dikombinasikan dengan Sistem Multi Partai, apalagi dengan tingkat fragmentasi dan polarisasi yang relatif tinggi. Presidensial dan Multi Partai bukan merupakan kombinasi yang sulit, melainkan juga membuka peluang terjadinya *Deadlock*. Dalam Relasi Eksekutif-Legislatif yang kemudian berdampak pada instabilitas demokrasi. Dilema Presidensial tersebut makin kompleks jika tidak ada satu partaipun yang menguasai kursi mayoritas di Parlemen. konstelasi politik di Parlemen relatif tidak berubah meskipun telah ada terobosan institusional dengan memberlakukan elektoral threshold yaitu ambang batas prolehan suara 3% untuk suara DPR Pusat.

### **3. Kedudukan Dan Fungsi Badan Eksekutif**

Eksekutif adalah salah satu lembaga negara yang berkuasa dalam pemerintahan. Tugas Eksekutif adalah melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang. Adapun yang menjadi wewenang Eksekutif adalah:

1. Administratif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, Peraturan Negara serta menyelenggarakan Administrasi Negara.
2. Merancang undang-undang dan menyerahkan kepada badan legislatif untuk ditetapkan.
3. Keamanan, mengatur keamanan Negara.

4. Diplomatik, Membangun Hubungan Dengan Dunia Internasional<sup>86</sup>.
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Memberikan Wewenang Sepenuhnya Kepada Daerah Untuk Menentukan Dan Mengambil Kebijakan Sesuai Dengan Kebutuhan Daerah Yang Kita Sebut Dengan Otonomi Daerah. Namun Pelaksanaan Otonomi Daerah Itu Bisa Melahirkan Potensial Problem Yang Kalau Tidak Diantisipasi Dengan Baik Bisa Menciptakan Persoalan-Persoalan Baru Yang Tidak Didinginkan. Ketimpangan Antar Daerah Merupakan Salah Satu Persoalan Yang Akan Muncul Kemudian. Juga Munculnya Politisi Aparatur Daerah Ketika Kontrol Pusat Atas Pengembangan Daerah Menjadi Semakin Terbatas. Pejabat Politis Dan Pejabat Elit Politik Harus Bergandengan Tangan Dalam Menjalankan Roda Pemerintahan Menuju *Good Government*. Perspektif Elitis Menurut Field Dan Higley, Beranggapan Tujuan-Tujuan Sosial Cenderung Dirancang, Diwarnai Dan Senantiasa Dalam Pengawasan Kelompok Elit. Dengan Superioritas Yang Mereka Miliki Mereka Leluasa Memonopoli Kekuasaan Secara Efektif. Dalam Banyak Hal Mereka Sangat Dominan Terutama Dalam Formulasi Kebijaksanaan Dan Memutuskan Persoalan. Mereka Yang Menduduki Posisi Tingkat Atas Dalam Institusi Ekonomi, Militer Dan Politik Membentuk Kurang Lebih Elit Kekuasaan Yang Terintegrasi Dan Terpadu, Yang Keputusan-Keputusan Penting Dihasilkannya Menentukan Struktur Dasar-Dasar Dan Arah Kehidupan Masyarakat.<sup>87</sup>

Dalam Konteks Ini Peran Kelompok Elit Lokal Sangat Berperan Dalam Menentukam Arah Kebijakan. Kelompok Elit Atau Pejabat Di Tempat Pada Posisi Yang Tinggi, Memiliki Kekuasaan, Yang Mengatur Dan Mengendalikan Kehidupan Soisal. Indikator Yang Dapat Digunakan Untuk Melihat Keterlibatan Kaum Elit Dalam Pengambilan Keputusan Adalah:

- a. Frekuensi Pertemuan Yang Dilakukan
- b. Aktivitas Yang Dilakukan Dalam Pertemuan

---

<sup>86</sup>Budiardjo, *Dasar Dasar*, h.189.

<sup>87</sup>Wisnumurti, A. A. G. Oka, *Elit Lokal dalam Pembangunan Pedesaan di Bali Age dan Bali Daratan* (Denpasar: Pusat Penelitian Universitas Mahadewa, 1997), h. 3.

- c. Siapa Yang Berinisiatif Dalam Pertemuan
- d. Kontak Dengan Para Pembuat Kewenangan
- e. Aktivitas Pertemuan Didasarkan Atas Kepentingan Pribadi Atau Seluruh Masyarakat Yang Respek Terhadap Program.
- f. Keputusan Siapa Memberi Inisiatif Dalam Organisasi

Hal-Hal Di Atas Dapat Dijadikan Sebagai Indikator Yang Dapat Digunakan Untuk Mengukur Bagaimana Hubungan Komunikasi Yang Dibangun Antara Lembaga, Institusi Dengan Para Pejabat Lokal Maupun Pusat Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Di Daerah. Oleh Karena Itu Dalam Rangka Peningkatan Pembangunan Harus Membangun Komunikasi Dan Interaksi Dengan Berbagai Pihak Sehingga Dalam Setiap Keputusan Yang Diambil Dapat Menguntungkan Untuk Semua Pihak.

Interaksi Yang Dimaksud Seperti Yang Diungkapkan Sukanto, Sebagai Proses Sosial Dinamis Hasil Resultant Gaya Dan Usaha Pengaruh Mempengaruhi, Melibatkan Sistem Nilai Maupun Sikap Yang Akhirnya Akan Menyebabkan Modifikasi Dari Sikap Maupun Tindakan Dari Masing-Masing Pihak.<sup>88</sup>

Dalam Interaksi Inilah Pola Hubungan Kekuasaan Antar Kelompok Penguasa Dan Masyarakat Akan Terjadi. Unsur Kekuasaan Dalam Hal Ini Sangat Dominan Menentukan Arah Kebijakan Dan Pengambilan Keputusan. Menurut Laswell Dan Kaplan Adalah Suatu Bentuk Hubungan Di Mana Seseorang Dapat Menentukan Tindakan Orang Atau Kelompok Lain Agar Sesuai Dengan Tujuan Pihak Pertama.<sup>89</sup>

Mengefektifkan Lembaga-Lembaga Kenegaraan Dan Kemasyarakatan Serta Hubungan Kerja Di Antara Lembaga Itu Tentulah Dikembangkan Berdasarkan Prinsip-Prinsip Demokrasi Universal, Yaitu Berjalannya Pembagian/Pembatasan Kekuasaan Negara, Yaitu Lembaga-Lembaga Eksekutif, Legislatif Dan Yudikatif Dan Pengakuan Persamaan Kebebasan, Keadilan Dan Hak-Hak Asasi Manusia.

Membahas Peranan Birokrasi, Selalu Memiliki Relevansi Yang Tinggi, Dengan Pencapaian Kinerja Yang Tinggi Sehingga Keberhasilan

---

<sup>88</sup>Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 50.

<sup>89</sup>Oberlin Silalahi, *Beberapa Aspek Kebijakan Negara* (Yogyakarta: Leberty, 1989), h. 95.

Pelayanan Dapat Dicapai Secara Maksimal. Karena Tantangan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Semakin Kompleks Menuntut Antisipasi Oleh Birokrasi Secara Lebih Canggih. Namun Untuk Melaksanakan Pemerintahan Yang Profesional Itu Tidaklah Semudah Membalikkan Telapak Tangan. Banyak Tantangan Yang Dihadapi, Baik Tantangan Institusional Atau Sistem, Maupun Tantangan Yang Datang Dari Aparatur Itu Sendiri.

Keberhasilan Pembangunan Suatu Bangsa Sangat Tergantung Dari Tersedianya Sumber Daya Alam (*Natural Resource*) Maupun Sumber Daya Manusia (*Human Resources*). Kedua Komponen Merupakan Komponen Yang Saling Berkaitan Antara Satu Dengan Lainnya, Walaupun Dalam Prakteknya Antara Satu Lembaga Berbeda Dengan Lainnya, Dimana Satu Lembaga Lebih Mengutamakan Sumber Daya Alam, Disebahagian Lembaga Lebih Mengutamakan Sumber Manusianya.

Pembangunan Yang Mengutamakan Sumber Daya Alam Saja Akan Mengalami Kegagalan, Oleh Karena Itu Strategi Pembangunan Nasional Lebih Diarahkan Pada Pembangunan Sumber Daya Manusia. Strategi Ini Didasari Bahwa Dalam Suatu Organisasi Baik Besar Maupun Kecil, Sumber Daya Manusia Menempati Posisi Strategis. Oleh Karena Itu Pembangunan Aparatur Negara Diarahkan Untuk Meningkatkan Kualitas Aparatur Negara Agar Aparatur Lebih Memiliki Sifat Dan Perilaku Yang Berintikan Pengabdian. Kejujuran, Tanggungjawab, Disiplin, Keadilan Dan Kewibawaan, Sehingga Dapat Memberikan Pelayanan Dan Pengayoman Kepada Masyarakat Sesuai Dengan Tuntutan Hati Nurani Masyarakat.

Mengingat Fungsi Utama Pemerintah Adalah Melayani Masyarakat, Maka Pemerintah Terus Berupaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan. Salah Satu Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Sebagaimana Yang Diamanatkan Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Perlu Ditingkatkan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik Terhadap Masyarakat.

Berbagai Masukan Dan Kritikan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Daerah Yang Masih Dianggap Rendah. Hal Ini Disebabkan Berbagai Faktor Yang Sangat Variatif Baik Itu Yang Berhubungan Dengan Perangkat Hukum, Sumber Daya Manusia,

Fasilitas Dan Sebagainya.

Tantangan Globalisasi Juga Merupakan Tantangan Yang Tidak Boleh Dianggap Remeh. Perubahan Zaman Yang Semakin Canggih Menuntut Penyelenggara Negara Untuk Sigap Tanggap Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Yang Semakin Canggih Atau Yang Kita Sebut Komputerisasi. Sehingga Setiap Aparatur Yang Berhadapan Dengan Rakyat Dapat Memberikan Pelayanan Yang Maksimal Dan Prima Dengan Berprinsip Cepat Dan Tepat Dan Transparansi.

Fenomena Globalisasi Ini Menuntut Perbaikan Terus Menerus, Profesionalisme Dan Keunggulan Bersaing (*Competitive Advantage*) Di Segala Sektor Pembangunan Nasional. Salah Satu Penyebab Mengapa Birokrasi Sering Dituduh Tidak Mampu Menyesuaikan Dengan Perkembangan Atau Pembangunan Adalah Karena Birokrasi Masih Kental Dengan Kebiasaan-Kebiasaan Yang Tidak Produktif.

Menurut Syamsuddin<sup>90</sup> Struktur Birokrasi Kita Masih Statis Mekanistik. Birokrasi Kita Belum Mampu Menyesuaikan Dengan Perubahan-Perubahan Dan Tuntutan Modernitas. Ironisnya, Prestasi Berdemokrasi Ternyata Berbanding Terbalik Dengan Kegagalan Negara Menegakkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Pemerintahan Yang Bersih. Carut Marut Persoalan Politik Hampir Tidak Pernah Berhenti Membayangi Perjalanan Pemerintahan.

Ketika Pemilu Semakin Demokratis Dan Langsung, Kebobrokan Moral Para Penyelenggarapun Sedikit Demi Sedikit Mulai Nampak Ke Permukaan. Sistem Demokrasi Yang Diraih Pasca Orde Baru Semestinya Menjadi Arena Bagi Setiap Warga Negara Untuk Mewujudkan Kedaulatan Mereka Dalam Kehidupan Politik Dan Ekonomi. Namun Telah Selesai Perhelatan Politik Sepenuhnya Dikendalikan Oleh Berbagai Kekuatan Oligarki Terselubung, Partai Politik, Etnik, Daerah, Agama, Dan Golongan. Kekuatan Terselubung Itulah Yang Menikmati Demokrasi.

Sikap Birokrat Kita Masih Banyak Berorientasi Pada Status. Akibat Dari Orientasi Ini Birokrasi Tidak Objektif, Dan Senantiasa Memilih, Memilah Dalam Pelayanan Publik. Dengan Kondisi Ini Maka Timbullah

---

<sup>90</sup> Syamsuddin Haris, *Masalah-Masalah Demokrasi Kebangsaan Era Reformasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 80.

Suatu Anggapan Bahwa Birokrasi Merupakan Komoditas Yang Dapat Diperdagangkan. Kebiasaan Yang Tidak Produktif Dan Mentalitas Tidak Terpuji, Akan Memberikan Pengaruh Langsung Terhadap Persepsi Kita Pada Kinerja Birokrasi. Seperti Dikemukakan Susan Dan Norman Fainstein, Ketika Menganalisa Tidak Efisiennya Birokrasi Pemerintah Di Amerika Serikat, Ketidak Efisienan Itu Disinyalir Berakar Pada Institusi Yang Bersumber Pada Ekonomi Politik Kapitalisme. Karena Ekonomi Kapitalis Merupakan Karakteristik Asli Amerika Serikat, Maka Hal Ini Amat Kental Pengaruhnya Terhadap Birokrasi Di Negeri Itu.

Kalau Akar Dasar Seperti Itu Digunakan Sebagai Dasar Untuk Mencari Penyebab Hambatan Birokrasi Maka Dua Faktor Penyebab Ketidak Efisienan Birokrasi Kita Dapat Dipandang Sebagai Penyebab Dasar Kegagalan Pemerintahan. Bagaimanapun Juga Proses Pembangunan Nasional Maupun Daerah Tetap Memerlukan Peran Pemerintah, Bukan Hanya Sekedar Mengembangkan Segi-Segi Fisik Kehidupan Masyarakat, Tetapi Juga Mampu Mensponsori Tumbuhnya Peran Dan Motivasi Masyarakat. Makin Berkembangnya Partisipasi Masyarakat Berarti Semakin Terwujudnya Prinsip-Prinsip “Kedaulatan Rakyat” Karena Dengan Demikian Setiap Kebijakan Atau Pengaturan Umum Akan Menampakkan Segi-Segi Dan Nuansa Partisipasi Rakyat.

Tindak Pidana Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Tidak Hanya Dilakukan Oleh Penyelenggara Negara Melainkan Juga Penyelenggara Dengan Pihak Lain, Seperti Keluarga, Kroni Dan Para Pengusaha Sehingga Merusak Sendi-Sendi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa Dan Bernegara, Dan Membahayakan Eksistensi Negara. Para Pejabat Eksekutif Maupun Legislatif Daerah Banyak Memiliki Jabatan Ganda, Seperti Memimpin Organisasi Sosial Dan Nirlaba, Seperti Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Dan LSM, Dan Organisasi Ekonomi, Seperti Usaha Dagang, Usaha Kecil, Agen Penyaluran Barang Dan Jasa Serta Sektor Perkreditan. Posisi Pejabat Itu Tampaknya Telah Mempermudah Jangkauan Macam-Macam Fasilitas Dan Layanan Birokrasi. Bila Demikian Halnya, Bagaimana Pelaksanaan Otonom Daerah Dapat Mencerminkan Asas Desentralisasi, Demokrasi Dengan Segala Konsekuensinya? Mencermati Kondisi Ini Tidak Salah Jika Para Birokrat Maupun Anggota Legislatif Belum Bekerja Secara Profesional. Dinamika

Interaksi Antara Segenap Jaringan Komunikasi Yang Meningkatkan Keterlibatan Warga Masyarakat Tentu Akan Dapat Menekan Dan Akhirnya Akan Menghapus Praktek Lama Birokrasi Daerah Yang Berperan Sebagai Perpanjangan Tangan Birokrasi Pusat.

Pola Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Perumusan Peraturan Daerah Sebagai Proses Legislatif Dengan Mengikuti Kelaziman Dengan Teori Ketatanegaraan Pada Umumnya Maka Salah Satu Fungsi DPR Adalah Di Bidang Legislatif. Fungsi Legislatif DPR Tidak Terlepas Dari Konsep “*Trias Politica*” Yang Ditawarkan Oleh Montesquieu. Pendapat Montesquieu Kekuasaan Itu Berada Pada Satu Tangan Maka Kekuasaan Itu Sering Disalah Gunakan. Untuk Mencegah Penyalahgunaan Ataupun Penggunaan Kekuasaan Yang Berlebih-Lebihan Maka Kekuasaan Itu Dipisah-Pisahkan.

Menurut Konsep “*Trias Politica*” Kekuasaan Dalam Negara Dibagai Tiga Yakni, Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif Dan Kekuasaan Yudikatif. Dengan Adanya Sistem Pemisahan Tersebut Maka Di Dalam Konsep “*Trias Politica*” Terdapat Suasana “*Check And Balance*” Karena Masing–Masing Kekuasaan Dapat Saling Mengawasi, Menguji Sehingga Tidak Mungkin Organg-Orang Kekuasaan Itu Melampaui Kekuasaan Yang Telah Ditentukan. Dengan Demikian Akan Terdapat Pertimbangan Kekuasaan Antara Lembaga-Lembaga Tersebut. Konsep “*Trias Politica*” Tersebut Diadakan Modifikasi Dalam Sistem Pemerintahan Negara-Negara Barat. Sedangkan Landasan Proses Kekuasaan Legislatif Di Indonesia Secara Garis Besar Dilakukan Oleh Pihak Legislatif Dan Eksekutif Pada Tataran DPR Dan Presiden Juga Dilakukan Oleh DPRD Dan Pemerintah Daerah. Lembaga Legislatif Kita Bukanlah Konsep Barat. Sebagaimana Diketahui Undang-Undang 1945 Berfungsi Membuat Undang-Undang Yang Lazim Disebut Fungsi Legislatif Bukanlah Semata-Mata Dilakukan Oleh DPR. Jelasnya Fungsi Legislatif Dan Ketatanegaraan Dilaksanakan Secara Bersama-Sama Oleh Presiden Dan DPR, Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945. Jadi Adalah Keliru Kalau Ada Sementara Orang Yang Beranggapan Itu Adalah Mutlak Pada DPR. Apabila Kita Tinjau Dari Sudut Pandang UUD 1945 Maka Pasal 5 Ayat (1) UUD 1945 Menentukan Bahwa Presiden Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang Dengan Persetujuan DPR. Dari Rumusan

Pasal 5 Ayat (1) Secara Tegas Tanpa Ragu-Ragu Dinyatakan Bahwa:

1. Presiden Memegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang.
2. Bahwa Undang-Undang Yang Dibentuk Presiden Harus Mendapat Persetujuan DPR.

Adanya Hubungan Antara Presiden Dan DPR Dalam Pembuatan Undang-Undang Maka Presiden Tidak Bisa Membuat Peraturan Perundang-Undangan Dengan Sewenang-Wenang Karena DPR Akan Membatasinya Dengan Mengemukakan Kepentingan Rakyat Yang Diwakilinya. Dengan Demikian Terdapat Perimbangan Kekuatan Antara Presiden Dengan DPR. Dengan Adanya Reformasi Di Bidang Politik, Hukum, Dan Perundang-Undangan Maka Kedudukan DPRD Dan Pemerintah Daerah Saat Ini Mengalami Perubahan Yang Mendasar Dengan Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Menjelaskan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintahan Daerah Yang Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Menurut Asas Otonomi Dan Tugas Pembantuan, Diarahkan Untuk Mempercepat Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan, Pelayanan, Pemberdayaan, Dan Peran Serta Masyarakat, Serta Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Memperhatikan Prinsip Demokrasi, Pemerataan, Keadilan, Keistimewaan Dan Kekhususan Suatu Daerah Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesi. Efisiensi Dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perlu Ditingkatkan Dengan Lebih Memperhatikan Aspek-Aspek Hubungan Antar Susunan Pemerintahan Dan Antar Pemerintahan Daerah, Potensi Dan Keanekaragaman Daerah, Peluang Dan Tantangan Persaingan Global Dengan Memberikan Kewenangan Yang Seluas-Luasnya Kepada Daerah Disertai Dengan Pemberian Hak Dan Kewajiban Menyelenggarakan Otonomi Daerah Dalam Kesatuan Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan<sup>91</sup>. Pemerintahan Yang Dimaksudkan

---

<sup>91</sup><http://www.slideshare.net/perencanakota/undangundang-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah?ref=http://www.sanitasi.net/undang-undang-no-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah.html>, diakses tanggal 10 Desember 2016.

Adalah Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Pemerintahan Pusat Adalah Presiden Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintahan Daerah Adalah Gubernur, Bupati, Walikota Dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Sama-Sama Bekerja Dan Bekerjasama Untuk Menjalankan Roda Pemerintahan Dan Mengawasi Pelaksanaan Otonomi Daerah Sesuai Dengan Kepentingan Masyarakat.

Dalam Operasionalnya Semua Pelaksanaan Teknis Strategis Pemerintah Daerah Harus Mengacu Pada Makna Dan Prinsip Pelaksanaan Otonomi Daerah Yang Telah Ditetapkan. Ini Sesuai Dengan Pendapat Ansor Harahap. Menurut Ansor Untuk Mencapai Pemerintahan Yang Baik Yang Dilakukan Adalah, Pertama Menyusun Formasi Atau Struktur Pemerintahan Dan Penataan Kelembagaan Harus Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kondisi Objektif Daerah.<sup>92</sup> Istilah Yang Biasa Digunakan Untuk Ungkapan Ini *The Right Man On The Right Place* (Orang Yang Benar Berada Pada Tempat Yang Benar, Penempatan Seseorang Sesuai Dengan Kemampuannya). Ketatalembagaan Harus Mengedepankan Proporsional, Efisiensi Dan Efektifitas Dan Tetap Mempertimbangkan Potensi Dan Prospek Daerah. Kedua, Pemetaan Tentang Permasalahan Dan Kebutuhan Masyarakat Serta Langkah Prioritas Yang Harus Dilakukan Oleh Pemerintah Agar Pembangunan Tepat Sasaran. Ketiga, Skema Otonomi Daerah Benar-Benar Diturunkan Dalam Rumusan Kebijakan Baik Melalui Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) Dan Program Kerja Pemerintah Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrebang). Keempat, Membangun Suasana Yang Benar-Benar Kondusif Untuk Melaksanakan Pembangunan Dalam Berbagai Bentuk Harus Dicermati Pemerintah Sehingga Tidak Menjadi Hambatan Dalam Melaksanakan Agenda Pembangunan.

---

<sup>92</sup> Ansor Harahap, *Melawan Tirani Lokal* editor Yulhasni et.all (Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2011), h. 41.

Konsepsi Ini Menunjukkan Bahwa Otonomi Daerah Merupakan Pintu Strategis Untuk Meletakkan Pondasi Awal Institusional Yang Bersih Dan Berwibawa. Otonomi Daerah Juga Menjadi Ruang Dan Tempat Menyelenggarakan Nilai-Nilai Demokrasi Di Tingkat Lokal Yang Tentunya Menjadi Miniatur Pelaksanaan Demokrasi Di Tingkat Nasional. Meskipun Kearifan Lokal, Adat Istiadat, Atau Problematika Daerah Sering Menjadi Penghambat Jalannya Demokrasi Di Tingkat Lokal Tapi Jika Dikelola Dengan Baik Dapat Dijadikan Sebagai Pendukung Pembangunan Di Daerah. Disinilah Perlunya Peran Pemerintah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Untuk Benar-Benar Menampung Aspirasi Rakyat Tanpa Membedakan Suku, Agama Dan Daerah. Namun Pada Kenyataannya Antara Kepentingan Rakyat Dan Kepentingan Golongan Dan Partai Politik Menjadi Dilema Di Kalangan Eksekutif Dan DPRD Karena Masing-Masing Dari Keduanya Adalah Dipilih Oleh Rakyat Melalui Proses Demokrasi Atau Yang Kita Sebut PEMILU. Tentu Keduanya Akan Terus Berjuang Untuk Kepentingan Konstituen Terutama Untuk Masa Yang Akan Datang.

Untuk Mengatasi Persoalan Di Atas Bisa Dilakukan Dengan Membangun Komunikasi Politik Antar Eksekutif Dan Legislatif Atau Sebaliknya Walaupun Itu Membutuhkan Pengorbanan Dan Perjuangan Yang Berat. Dengan Membangun Komunikasi Politik Antar Lembaga Eksekutif Dan Legislatif Dengan Tetap Melibatkan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Lembaga Agama, Organisasi Kemasyarakatan Dan Ahli-Ahli Lainnya Agar Punya Visi Dan Misi Yang Sama Tentang Pembangunan Di Daerah. Prinsip Keadilan Dan Transparansi Memiliki Standar Yang Jelas. Studi Kelayakan Harus Menjadi Prioritas Dalam Tata Kelola Pemerintah Yang Dilakukan Diyakinkan Akan Menimbulkan Efek Yang Baik Baik Pada Pembangunan Di Daerah.

## BAB IV

# CONTOH ARTIKEL KOMUNIKASI POLITIK BEREPUTASI INTERNATIONAL DAN NASIONAL

Komunikasi Politik Gerakan *#2019GantiPresiden*

Anang

Sujoko1

anangsujoko

@ub.ac.id

**Abstract:** In the 2019 general election, social media became an important part in building a political image as well as a channel for political communication. One of the opposition movements against the incumbent was the *#2019GantiPresiden* movement. The movement was a channel of political communication for people who personally wanted to have a new president. This study aimed to reveal how the *#2019GantiPresiden* political communication movement during 2018 and the repressive treatment experienced by them. This study used a qualitative research method of text analysis of several online media such as Twitter and micro-blogging. The results showed that the *#2019GantiPresiden* movement was an organic and voluntary based political communication movement. The spread of this movement was increasingly massive with the support of social media in the form of Twitter in building mass political support.

**Abstrak:** Pada pemilihan umum 2019, media sosial menjadi bagian penting dalam membangun citra politik sekaligus sebagai saluran komunikasi politik. Salah satu gerakan oposisi terhadap kubu incumbent, Presiden Jokowi, adalah gerakan *#2019GantiPresiden*. Gerakan tersebut merupakan saluran komunikasi politik orang-orang yang secara pribadi ingin memiliki presiden baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana gerakan komunikasi politik *#2019GantiPresiden* selama 2018 dan perlakuan represif yang dialami. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif analisis teks beberapa media

online dan microblogging media Twitter. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan komunikasi politik organik yang berbasis individual dan secara sukarela. Penyebaran gerakan ini semakin massif dengan dukungan media sosial berupa twitter dalam membangun dukungan massa politik.

Kata Kunci: Komunikasi politik, media social, Pilpres 2019.

1 Dosen Universitas Brawijaya Malang

Jurnal Komunikasi Islam | ISBN 2088-6314 | Terakreditasi Menristekdikti SK. NO. 2/E/KPT/2015 | Volume 09, Nomor 01, Juni 2019 Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

(UIN) Sunan Ampel Surabaya - Asosiasi Profesi Dakwah Islam Indonesia

## **Pendahuluan**

Pembelahan masyarakat menjadi dua kelompok besar menjelang Pilpres 2019 semakin menguat. Satu kelompok berusaha menyuarakan dukungan ke Jokowi untuk dua periode dan kubu lain menilai Jokowi tidak layak untuk dipilih kembali. Hadirnya kelompok yang berseberangan dengan petahana ternyata ditanggapi negatif oleh tokoh-tokoh elit politik dan bahkan Jokowi sebagai presiden.

Meski demikian, gerakan masyarakat yang tidak setuju terhadap pencalonan kembali Jokowi menemukan saluran bersama. Saluran tersebut bernama #2019GantiPresiden yang bermuara di media maya dan gerakan kerakyatan. Hadirnya #2019GantiPresiden di media social Twitter, Facebook dan Instagram ternyata terus memasuki ranah empiris berupa deklarasi dan munculnya penguatan gerakan melalui simbol-simbol di kaos. Gerakan hashtag tersebut merupakan bentuk komunikasi politik dari pihak yang merasa dipinggirkan oleh saluran media arus utama. Sebagaimana diungkapkan oleh Gun Gun Heryanto (2018, hlm.17) bahwa salah satu faktor penting dan fundamental dalam mengelola kehidupan politik adalah komunikasi politik (Heryanto, 2018, hlm.17).

Tulisan ini berusaha menjelaskan sejumlah bentuk komunikasi politik represif terhadap gerakan organik #2019GantiPresiden. Komunikasi politik represif ini muncul sebagai akibat dari dinamika politik di era

demokrasi Indonesia dan era media baru. Di kedua era ini, politik tidak hanya menjadi konsumsi para elite politik, tapi juga telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat secara luas. Media dalam hal ini memiliki peran besar dalam memengaruhi dan mempermudah masyarakat dalam mendapat informasi-informasi politik.

Kemunculan #2019GantiPresiden di jagat media pada dasarnya merupakan respon dari sejumlah pihak dari situasi politik Indonesia saat ini. Pencalonan kembali Joko Widodo sebagai calon presiden di tahun 2019 yang akan datang menjadi pemicu awal bagi sejumlah pihak untuk memberikan respon terhadap pencalonan tersebut. Respon dalam hal ini bisa dimaknai sebagai bentuk protes, kritik, penolakan, dan ketidaksepakatan dengan pencalonan kembali Presiden Joko Widodo. Dalam dunia perpolitikan, kondisi seperti itu merupakan hal yang dianggap wajar selama tidak bertentangan dengan peraturan dan mengganggu ketertiban masyarakat.

Jika ditelisik di awal kemunculannya, #2019GantiPresiden pertama kali dilontarkan oleh Mardani Ali Sera, yang merupakan aktivis PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Tulisan #2019GantiPresiden bahkan telah menjadi sebuah judul buku yang ditulisnya. Dalam perkembangannya, tagar ini menjadi gerakan massa yang bukan hanya mampu menggalang massa berbasis media sosial dan instant messaging seperti Twitter, tapi juga #2019GantiPresiden telah menjadi simbol gerakan politik yang disalurkan melalui kaos, gelang karet, dan pin. Selain itu, #2019GantiPresiden menjadi gerakan organis hingga muncul lagu khusus yang merepresentasikan suara dari gerakan ini.

Kemunculan tagar ini tidak hanya menjadi variabel yang berdiri bebas dari kepentingan politik, tapi menjadi sebuah gelombang gerakan besar yang sarat dengan kepentingan politik. Ditandai dengan adanya deklarasi #2019GantiPresiden, kemudian muncul berbagai respon baik di media sosial maupun di kalangan masyarakat akar rumput. Gerakan deklarasi inilah yang akhirnya memunculkan sejumlah reaksi dan perlawanan dari organisasi masyarakat seperti Banser, kelompok pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dan bahkan aparat kepolisian dan BIN yang seharusnya berposisi netral.

Fenomena politik media ini tentunya tidak lepas dari perkembangan demokrasi dan kemajuan teknologi media. Paska runtuhnya rezim Orde Baru, terjadi berbagai perubahan drastis yang mengubah konstalasi politik Indonesia, seperti, massifnya instalasi instrumen demokrasi, terjadi liberalisasi politik, dan dispersi kekuasaan hingga ke skala lokal melalui kebijakan desentralisasi (Lay, 2012). Perubahan politik ini telah berdampak besar dalam berbagai kehidupan politik masyarakat Indonesia, khususnya dengan adanya liberalisasi politik. Perubahan ini (liberalisasi politik) telah menandai adanya kebebasan pers dan dijaminnya hak-hak politik dan sipil masyarakat dalam menyuarakan pendapatnya.

Konsekuensinya, perkembangan media baik cetak maupun online mengalami perkembangan yang sangat pesat. Media diproyeksikan sebagai sarana komunikasi bagi kepentingan publik. Namun demikian, dalam perkembangannya, media mengalami perubahan peran karena banyak tautan kepentingan di dalamnya.

Setidaknya terdapat dua kepentingan utama dibalik media, yaitu kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan yang membentuk isi media, informasi yang disajikan dan makna yang tawarkannya, sehingga kepentingan publik justru terabaikan (Piliang 2005:213). Kemunculan #2019Ganti- Presiden menjadi salah satu contoh yang menjelaskan bagaimana media berada dalam dilema peran antara kepentingan publik dan kepentingan kekuasaan. Kecondongan pada kepentingan kekuasaan berkonsekuensi pada muncul bentuk-bentuk komunikasi politik yang represif.

Dalam kehidupan politik modern, media memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang demokratis. Keberpihakan media kepada kepentingan publik menjadi simbol dari objektivitas peran media itu sendiri. Sebagai sarana komunikasi politik, media menyediakan ruang komunikasi yang efektif dalam mengelola kehidupan politik, yang meliputi agregasi politik, artikulasi politik, sosialisasi, pembuatan aturan dan hal lainnya. Namun di sisi lain, media juga berperan besar bagi terjadinya kemunduran

demokrasi sebuah negara sebagai konsekuensi dari perkembangan media baru (new media) dan kebebasan ekspresi yang berlebihan.

Dalam sejumlah literatur, setidaknya peran media tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tapi juga sebagai sarana gerakan sosial politik yang memicu lahirnya sebuah perubahan politik. Dalam proses terjadinya gelombang demokrasi yang terjadi di negara-negara Timur Tengah seperti Tunisia, Mesir, Libya, Syria, Yaman dan Arab Saudi, yang dikenal dengan Arab Spring, media berperan sebagai aktor atau insitutisi yang penting yang menggerakkan proses perubahan politik negara (Khondker, 2011; Wolfsfeld, Segev, and Sheaffer, 2013; Howard and Hussain, 2013).

Media, khususnya media digital seperti Facebook dan Twitter telah memainkan peran signifikan dalam memobilisasi masyarakat untuk melakukan sejumlah tuntutan bagi terjadi perubahan politik yang lebih demokratis. Beberapa keberhasilan media dalam proses politik tersebut terlihat dari runtuhnya rezim diktator seperti Zine al- Abidine Ben Ali di Tunisia, Hosni Mubarak di Mesir, dan Muhammar Qadhafi di Libya. Kehadiran media baru seperti Facebook dan Twitter ini menjadi gerakan alternatif baru yang menjadi saluran aspirasi dan agregasi bagi kepentingan publik. Pada titik ini, media menjadi saluran alternatif bagi kelompok-kelompok minoritas untuk menyuarakan dan melakukan tuntutan yang selama ini dibungkam oleh rezim kekuasaan. Menurut Ms. Sherwin, media memiliki dua fungsi vital dalam demokrasi (dikutip dari Exoo, 2009:199-200); pertama, as watchdog of people (anjing penjaga bagi rakyat), yaitu media menjadi anjing penjaga atau pengawas yang digunakan oleh rakyat untuk mengawasi dan mengontrol jalannya roda kekuasaan. Dengan kata lain, media menjembatani keterlibatan masyarakat terkait dengan urusan-urusan publik dan kekuasaan pemerintahan. Kedua, asmarketplace of idea (sebagai pasar ide), yaitu media membantu untuk mendiseminasikan informasi kepada publik. Media dalam pemaknaan terakhir ini berarti bahwa media dipahami sebagai ruang publik yang bertugas menginformasikan (to inform) dan mendidik (to educated) bagi publik.

Namun di sisi lain, keberadaan media terkait erat dengan kepentingan ekonomi dan kepentingan kekuasaan. Kepemilikan sejumlah media massa telah mempengaruhi peran media sebagai sarana ke- pentingan

publik, bahkan kerap media dimonopoli oleh kelompok kapitalis dan oligarki yang dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok atau pribadi (Haryanto, 2011; Tapsell, 2017; Lim, 2011). Media massa bukan sebagai institusi ideal, tapi juga menjadi mesin kapitalis yang menerapkan logika M-C-M (money-commodity-more money) (Heryanto, 2018, hlm.390-391). pada titik ini, media tidak lebih dari the extension of men, yaitu media merupakan representasi dari pemiliknya (McLuhan and Lapham, 1994).

Sejumlah kritik terhadap media kontemporer menjelaskan bahwa di dalam media terdapat sebuah elemen self-delusion, yaitu elemen yang menghadirkan politik sebagai permainan klinis dan politisinya sebagai manipulator yang harus diekspos, media telah terlibat dalam proses yang merusak institusi demokrasi dan merusak bekerjanya representasi politik (Barnett, 2002, hlm.400). Begitu pun dengan Jay Blumler (1983b, hlm.67), media telah dituduh merusak arena politik ketimbang melayani dan menghidupkan demokrasi, serta mendorong opini dan manipulasi serta melemahkan partisipasi (Blumler and Fox 1983, hlm.67). Skandal data Facebook, yang dikenal sebagai Cambridge Analytica menjadi salah satu contoh konsekuensi buruk dari perkembangan media tersebut. Kebocoran informasi pribadi pengguna media sosial Facebook yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi perpolitikan Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.

Selain itu, media juga menjadi propaganda bagi kelompok teroris untuk melancarkan aksi-aksi teror mereka, menciptakan rasa takut dan masa depan yang tidak pasti (Altheide, 1997; Weimann and Winn, 1994). Pada titik ini, media yang seharusnya berperan sebagai watchdog pemerintahan dan sarana komunikasi publik mengalami penyusutan peran karena adanya kepentingan ekonomi dan kekuasaan yang bermain dibalik media. Dengan demikian, media sangat dekat dengan tindakan kriminal maupun persekusi jika tidak digunakan dengan baik. Peran media dalam hal ini ditentukan oleh mereka yang memiliki akses lebih terhadap media itu sendiri dan keberadaannya rentan untuk dipolitisasi.

Di Indonesia, media dalam perkembangan demokrasi Indonesia juga memiliki peran penting dalam mendorong terjadi perubahan

demokrasi. Di masa Orde Baru, Media massa sebelum era Orde Baru digunakan sebagai forum untuk mengekspresikan aspirasi nasionalisme dan agitasi politik (Hill, 2011). Media di masa Ode Baru digunakan untuk melayani kepentingan penguasa negara. Rezim otoritarianime telah memaksa media untuk memberitakan sejauh pemberitaan tersebut sejalan dengan kepentingan Rezim Orde Baru. Situasi tersebut tidak jauh berbeda dengan rezim Orde Lama di mana media dibatasi dengan alasan keamanan (security).

Situasi berbeda ketika rezim Orde Baru runtuh. Perkembangan media terjadi secara massif, baik elektornik maupun cetak. Adanya liberalisasi politik di era reformasi dimana terdapat berbagai regulasi yang memberikan jaminan akan kebebasan pers berdampak pada semakin banyaknya jumlah media.

Namun demikian, perkembangan media baru dan me- dia digital tersebut secara langsung berdampak pada situasi sosial dan politik bangsa Indonesia. Sejumlah kekerasan, in- timidasi, propaganda, dan pemberitaan yang salah menjadi konsekuensi negatif yang mengiringi perkembangan media tersebut. Di Indonesia, kasus terlihat terlihat pada kasus Sara- cen dan Muslim Cyber Army (MCA) yang melakukan propa- ganda lewat media sosial. Menurut Richard Fox, media di Indonesia pada dasarnya masih lemah dalam memberikan in- formasi yang baik bagi publik (Fox, 2006). Salah satu dari konsekuensi tersebut terlihat dari munculnya #2019Ganti- Presiden di sejumlah media massa secara massif.

Kehadiran berbagai model ekspresi kebebasan melalui sosial media pada dasarnya menjadi cerminan bagaimana eli- te-elite politik di level atas dan masyarakat pada umumnya di level akar rumput dalam menyikapi dan menggunakan media sebagai sarana komunikasi politik mereka. Dalam berbagai ekspresi tersebut, tulisan ini secara spesifik fokus pada pelaca- kan kemunculan #2019GantiPresiden sebagai sebuah bentuk gerakan sosial-politik dan konsekuensi-konsekuensinya pada level kehidupan real masyarakat Indonesia.

Politisasi Media Menjelang Pemilihan Presiden 2019

Di tahun 2019, Indonesia telah menyelenggarakan dua pemilihan umum, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara nasional. Kedua

peristiwa politik tersebut menjadi arena pertarungan yang menentukan bagi setiap calon untuk meraih tampuk kekuasaan, begitu pun dengan partai-partai politik bertarung untuk mendapatkan posisi kekuasaan. Keriuhan politik dalam menghadapi moment politik tersebut tidak hanya terjadi dalam lingkaran elite kekuasaan saja yang berkompetisi, tetapi juga di dalam media massa dan masyarakat pada level akar rumput. Politik dengan kata lain telah menjadi “barang publik” yang bisa dinikmati oleh semua orang, dan media massa memiliki andil besar bagi penyebaran informasi politik tersebut.

Dalam pemilihan umum, media menjadi rentan untuk dipolitisasi. Politisasi media terjadi ketika media lebih didominasi oleh kepentingan ekonomis dan kepentingan kekuasaan ketimbang kepentingan publik. Keberadaan media di Indonesia tidak lepas dari berbagai kedua kepentingan tersebut, yang di dalamnya terdapat ideologi yang berusaha diperkenalkan untuk melanggengkan kedua kepentingan tersebut. Di Indonesia, keberadaan media mayoritas dimiliki oleh para konglomerat yang menguasai mayoritas media sosial dan media massa. Sepanjang 15 tahun terakhir, terjadi pembiaran dominasi pemberitaan komersial dan kewenangan setengah hati dari pemerintah sebagai regulator dalam pemberitaan (Masduki, 2017). Berikut tabel yang menunjukkan kepemilikan media tersebut.

Tabel 1 ‘Kepemilikan media di Indonesia’

Media Group	Group Leader	TV stations		Radio stations	Print		Online media
		National	Other		Newspapers	Magazines/ Tableids	
Media Nusantara Citra (MNC) Group	Hary Tanoesudibjo	RCTI, Global TV, MNCTV (ex TPI)	Indovision, Sky Vision, SunTV Network (13 local stations)	Trijaya FM, Radio Damai, ARI Global Radio	Sepuluh Indonesia (Koran Sindo)	High End magz, Genie, Mom & Kiddie tableids	Okezone
Mahaka Media Group	Erick Tohir	TVOne	Jak TV, Alif TV	Radio JakFM	Republika, Harian Indonesia (in Mandarin)	Parenta Indonesia, A. Golf Digest, Awa, majalah net	Republika Online
Kompas Cramefia Group	Jakob Oetama, Agung Adiprasetyo	—	Currently build Kompas TV network	Senera Radio & Otomotion Radio	Kompas, Jakarta Post, Warta Kota, + other 11 local papers	Indoari + 43 magazines & tableids, 5 book publishers	Kompas Cyber Media
Jawa Pos Group	Dahlan Iskan	—	JTV, Ratan TV, Rina TV, Fajar TV + others (total: 12)	Fajar FM (Makassar)	Jawa Pos, Indo Pos Rakyat Merdeka, Radar + others (total: 151)	Montari, Liberty magazines + 11 tableids	Jawa Pos Digital Edition
Media Bali Post Group (RMB)	Satria Narada	—	Bali TV + other local stations (total: 9)	Global Kini Jami, Genta FM + others (total: 7)	Bali Post, Rintis Bali, Suluh Indonesia, Harian Denpasar, & Suara NTB	Tohoh, Lintang, & Wiyata Mandiri tableids	Bali Post, Rintis Bali
Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Group	Eddy Koesandi Sarjanamajaja	SCTV, Indostar	O'Channel, EShinta TV	Elobhita FM	—	Elobhita, Gaul, Story, Klor, Momomama	—
Lippo Group	James Riady	—	First Media	—	Jakarta Globe, Investor Daily, Suara Pembinaan	Investor, Globe Asia, & Campus Asia magazines	Jakarta Globe Online
Bakrie & Brothers	Anindya Bakrie	antv, TVOne	Channel [V]	—	—	—	VIVAnews
Femina Group	Pia Aiyahbana, Mira Kartohadiorodjo	—	—	U-FM Jakarta & Bandung	—	Femina, Gadis, Dewt, Ayokhunda + others (total: 15)	Femina, Gita, Linta, Ayokhunda, Gadis, Parentine Online
Media Group	Surya Paloh	Metro TV	—	—	Media Indonesia, Lampung Post, BorneoNews	—	Media Indonesia
Magi Reka Aditama (MRA) Group	Dhan Muljani Soedarjo	—	—	Cosmopolitan FM, Haris Rock FM, I-Radio, Trax FM	—	Cosmopolitan, Cosmoair, Fitness + others (total: 16)	—
Trans Corpora (Para Group)	Chairal Tanjung	Trans TV, Trans 7	—	—	—	—	Detik Online

Sumber: *Democratization and Corporatization of Media In Indonesia (Lim, 2011, hlm.11)*

Dari tabel di atas, beberapa pemilik media berita online maupun cetak dikenal sebagai politisi maupun pengusaha, seperti Erick Tohir sebagai ketua Tim Sukses Kemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin; Surya Paloh merupakan ketua partai politik Nasdem yang juga sebagai salah satu partai pendukung pasangan calon presiden nomor urut 1 (Jokowi-Ma'ruf Amin). Pula Hary Tanoesudibjo yang merupakan ketua Perindo yang juga merupakan salah satu partai pendukung pasangan calon nomor urut 1.

Dengan demikian, keberadaan media sangat rentan dengan berbagai kepentingan ekonomi maupun kepentingan kekuasaan. Kondisi seperti ini dikenal sebagai hiperealitas media dimana objektivikasi kebenaran dan kejujuran sebagai kepentingan publik digantikan oleh subjektivitas, permainan bahasa, kepalsuan, dan kesemuan (Piliang 2005, hlm. 215). Hal ini didukung oleh perkembangan teknologi dan informasi

yang semakin canggih dan adanya liberalisasi politik di era pasca runtuhnya rezim Orde Baru. Kelimpahan informasi (information abundance) dan dukung kecanggihan teknologi informasi membawa kesulitan bagi pemerintahan untuk mengatur dan mengendalikan informasi (Heryanto 2018b, hlm. 366-367). Kondisi ini pada akhirnya membawa konsekuensi-konsekuensi negatif terhadap masyarakat pada umumnya.

Dalam pemilihan Presiden 2019, tampil dua kandidat yang siap bertarung untuk memperebutkan kursi presiden dan wakil presiden. Pertarungan kedua kandidat ini merupakan pertarungan kembali (re-match) karena kedua kandidat presiden ini, yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto merupakan aktor yang sama yang pernah bertarung pada pemilihan presiden di tahun 2013 lalu. Perbedaannya terletak pada wakil presiden dan konfigurasi partai politik yang mendukung masing-masing kedua pasangan tersebut. Berikut adalah tabel 1.2 yang menampilkan pasangan calon presiden-wakil dan partai politik yang mengusungnya.

Tabel 2 ‘Pasangan calon presiden dan partai pengusung’

No	Calon Presiden dan Wakil	Partai Politik Pengusung
1.	Joko Widodo-Ma'ruf Amin	PDIP, Golkar, PKB, PPP, Nasdem, PSI, Perindo, PKPI, Hanura
2.	Prabowo Subianto-Sandiaga Uno	PAN, PKS, Demokrat Gerindra

Kontekstasi elektoral di tahun 2019 tentunya akan memperlihatkan beragam manuver yang dilakukan oleh para pendukung masing-masing pasangan kandidat. Peran tim sukses, relawan, tim siber, dan partai politik memainkan peran penting untuk merebut suara para pemilih. Dalam upaya tersebut, media menjadi saluran efektif untuk mengkampanyekan para kandidat beserta program-programnya kepada para khalayak (Wijayanto, 2010; Anshari, 2013). Setidaknya, melalui media, biaya kampanye lebih sedikit, efektif dalam waktu dan

pengerjaan. Tingginya biaya kampanye telah mendorong para tim sukses maupun relawan untuk memanfaatkan media massa sebagai media kampanye. Tentunya, dalam proses tersebut, informasi provokatif, hoax, dan sisi lemah lawan menjadi senjata untuk memperkuat kandidatnya dan menjatuhkan lawan. Pada titik ini, kepentingan publik diabaikan dan peran media sebagai watchdog dan market of idea terkikis demi kekuasaan politik.

Menurut Heryanto (2018, hlm. 294-295), dalam kompetisi elektoral, setidaknya terdapat beberapa hal yang diperhatikan untuk menjaga demokrasi Indonesia, yaitu; pertama, agenda kontestasi elektoral yang kerap melahirkan wajah ganda, di satu sisi penuh harapan dan di sisi lainnya penuh kegaudahan dan sisi gelap kekuasaan. Kedua, fenomena media massa dan media sosial ruang sering kali turut memanaskan situasi, memprovokasi, menstimulasi konflik, dan memperbesar area potensi konflik warga melalui bingkai yang dikonsumsi, direproduksi, dan didistribusikan ke khalayak luas (one-to-many atau many-to-many communication). Ketiga, kepentingan para penunggang kuda, baik karena motif ekonomi maupun bisnis, kerap mengelola situasi tidak nyaman dan tidak pasti. Keempat, kepentingan pragmatis dan transaksional para elite yang biasanya mengendalikan akses kekuasaan baik di partai politik, birokrasi, dan korporasi.

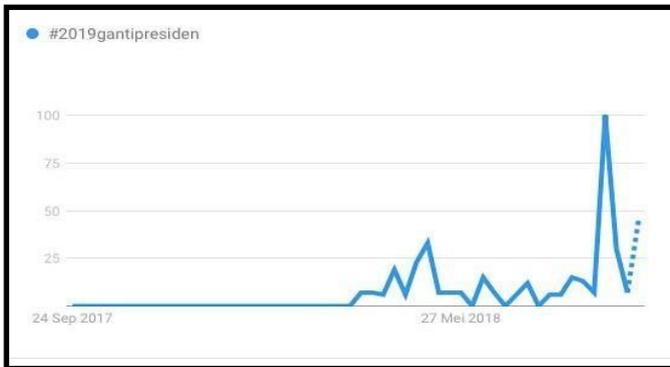
#### Tagar (#) sebagai Gerakan Sosial Baru

Komunikasi politik yang terbangun di media sosial dan media massa menjelang pemilu presiden di tahun 2019 memunculkan sebuah gerakan sosial politik yang berlangsung secara massif di media sosial dan media massa. Kemunculan #2019GantiPresiden yang tersebar baik di media sosial dan media massamerupakan sebuah bentuk gerakan sosial-politik yang hadir sebagai respon dari situasi politik yang sedang terjadi. Di abad ke-21, gerakan sosial politik muncul dalam beragam bentuk dan bervariasi. Dalam perkembangan tersebut, media memainkan peran penting dalam memicu terjadinya gerakan sosial-politik di berbagai belahan dunia. Menurut Dylan Taylor, di abad ke-21, kemunculan gerakan sosial politik khususnya negara demokrasi berkembang disebabkan karena terjadinya

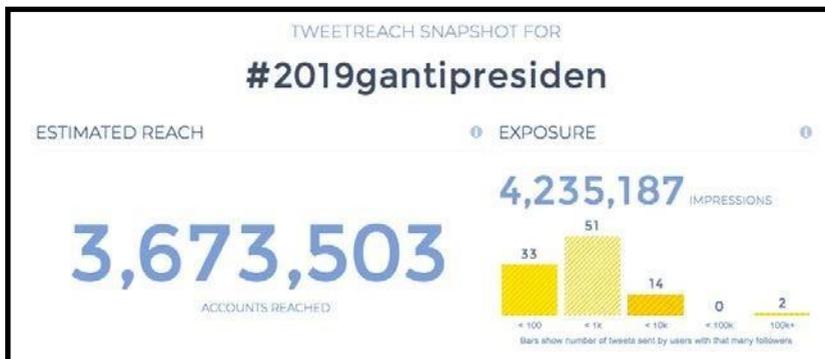
krisis demokrasi (*crisis of democracy*) dan media memiliki peran besar dalam menggelorakan kondisi tersebut melalui media-media mainstream yang lebih dikendalikan oleh kepentingan kapital dari pada etos demokrasi (Taylor 2017, hlm.1-4). Krisis tersebut meliputi krisis partisipasi, representasi, dan otomisasi sosial yang meningkat.

Tagar (#2019GantiPresiden) ini telah menjadi gerakan yang kini terus berkembang baik dalam media sosia maupun media massa. Berikut adalah grafik yang menunjukkan gerakan organik #2019GantiPresiden di dalam media sosial.

Gambar 1.1 ‘Trend #2019GantiPresiden Berdasarkan Pewartaan’



Gambar 1.2 ‘Jumlah Tweets yang dikirim oleh Pengguna dan followers’



Sumber: Diolah dari Google Trends

Grafik pada gambar 1.1 di atas menjelaskan dari trends dari #2019GantiPresiden dalam perwartaan di media digital dalam rentang 12 bulan terakhir. Dari grafik tersebut tampak isu mengenai tagar tersebut ada sejak kisaran September 2017 dan mengalami peningkatan yang fluktuatif pada awal tahun 2018 hingga akhir Juli 2018. Di bulan Agustus 2018, trend isu terkait dengan tagar tersebut mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai 100% dan kemudian turun, lalu naik menanjak sejak awal bulan September 2019. Dari grafik tersebut kita bisa melihat bagaimana #2019GantiPresiden menjadi pemberitaan yang dominan dalam media digital. Sedangkan pada gambar 1.2 menunjukkan respon dari pengguna dan followersnya terkait dengan tagar tersebut. Kedua gambar tersebut menjelaskan massifnya gerakan tagar tersebut terutama dalam media sosial. Moment politik 2019 khususnya penyelenggaraan pemilihan presiden menjadi daya penggerak yang begitu besar bagi massifnya #2019GantiPresiden di berbagai media sosial, pakaian, pamflet dan pin. Tagar #2019GantiPresiden telah memicu lahirnya gerakan sosial-politik yang secara organik berkembang terus menerus melalui jejaring media sosial. Sejumlah deklarasi yang terjadi di beberapa daerah seperti Riau, Surabaya, dan Makassar menjadi bukti dari kekuatan media sebagai pemicu gerakan sosial-politik. Respon dan Pembingkaihan Isu Kemunculan dan deklarasi #2019GantiPresiden yang kian massif memunculkan sejumlah respon dari sejumlah elite, pemikir, penegak hukum, organisasi masyarakat, dan aparaturnya pemerintahan. Terdapat banyak ragam pendapat yang pro maupun kontra terkait

dengan ke- munculan dan deklarasi #2019GantiPresiden. Berikut ini sejumlah respon dari beberapa tokoh terkait dengan tagar yang diambil dari sejumlah media.

Tabel 1.3 ‘Sejumlah Respon terhadap Gerakan #2019GantiPresiden’

No	Nama	Pendapat
1.	Muhtar Paboninggi (Peneliti LIPI)	Inkonstitusional karena melawan hukum, merupakan tindakan makar
2.	Mahfud MD (Pakar hukum)	Konstitusional sepanjang tidak melakukan tindakan anarkis
3.	Ketua GP Ansor	Merupakan gerakan banci
4.	Andre Rosiade (politisi Gerindra)	Gerakan demokrasi
5.	Ngabalin (Politisi Demokrat)	Gerakan pengacau keamanan
6.	Mardani Ali Sera (Politisi PKS dan Pencetus #2019gantipresiden)	Dijamin oleh demokrasi, kebebasan berekspresi
7.	Prof Dr Jimly Asshiddiqie (pakar hukum)	gerakan politik ini adalah gerakan 'menyebarkan kebencian terhadap presiden yang masih menjabat
8.	kepolisian	Kampanye di luar jadwal
9.	Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)	tidak termasuk dalam tindakan kampanye karena tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017

Sumber: Diolah dari berbagai sumber media

Dari sejumlah perdebatan pada tabel di atas, terdapat beragam pendapat yang secara umum bisa dibagi ke dalam dua kutub, yaitu mereka yang mengatakan gerakan tersebut tidak bertentangan dengan demokrasi dan melanggar hukum, dan mereka yang mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan tindakan inkonstitusional, makar, dan penyebar kebencian. Kedua kutub pendapat tersebut pada dasarnya merepresentasikan posisi politik para aktor-aktor tersebut dalam pemilihan presiden 2019 nanti.

Pembelahan ke dalam dua kutub ini juga berlangsung hingga pada level masyarakat, yang pada akhirnya terbagi kepada kelompok yang pro pada gerakan tagar tersebut dan kelompok yang kontra. Meski demikian, gerakan tagar ini tidak bisa dikatakan sebagai gerakan moral masyarakat yang berasal dari murni kesadaran empatif dan kritis masyarakat, tapi lebih sebagai gerakan politis karena digawangi para politisi yang berada di belakang layar dari terjadinya gerakan deklarasi tersebut. Mardani Ali Sera (politisi PKS) dan Andre Rosiade (Politisi Gerindra) adalah tokoh utama yang menggerakkan gerakan deklarasi tegas tersebut.

#### Eskalasi Isu dan Mobilisasi Massa Ke dalam Masyarakat

Gelombang gerakan #2019GantiPresiden semakin populer di media sosial maupun di kalangan masyarakat. Saat ini popularitas #2019GantiPresiden lebih tinggi dibandingkan dengan #Jokowi2Periode. Tingkat popularitas ini menunjukkan bahwa gerakan #2019GantiPresiden ini telah mengalami eskalasi yang cukup besar baik di media sosial. Di Twitter telah terdapat 3.673.503 pengguna dan followers yang mengtwitt #2019GantiPresiden. Banyaknya massa aksi dalam deklarasi di Monas pada 6 Mei 2018, di Makassar pada 12 Agustus 2018, di Riau dan Surabaya pada tanggal 26 Agustus telah menunjukkan adanya mobilisasi dan eskalasi gelombang gerakan yang semakin meluas dan massif dari gerakan #2019GantiPresiden.

Perkembangan eskalasi gerakan tersebut, tentunya ditopang oleh beberapa hal, yaitu pertama, adanya dukungan politik pada level elite untuk menggerakkan dan menggiring #2019GantiPresiden sebagai wacana tandingan dari #Jokowi2Periode. Kedua, perkembangan tekno-

logi informasi seperti media massa dan media sosial yang pesat. Menurut Heryanto (2018, hlm.295), media massa dan media sosial ruang seringkali turut memanaskan situasi, memprovokasi, menstimulasi konflik, dan memperbesar area potensi konflik warga melalui bingkai yang dikonsumsi, direproduksi, dan didistribusikan ke khalayak luas (*one-to-many atau many-to-many communication*).

Ketiga, jaringan kepartaian. Meluasnya eskalasi gerakan #2019-GantiPresiden terjadi karena dukungan jaringan partai dari level nasional hingga level daerah. Hal ini bisa terlihat dari beberapa elite politik seperti Mardani Ali Sera yang merupakan anggota DPP Partai Keadilan Sejahtera dan Andre Rosiade yang merupakan politisi partai Gerindra yang terlibat langsung ke dalam gerakan tersebut. Jejaring partai dimanfaatkan untuk menggerakkan dan memobilisasi massa pada level nasional dan lokal.

Keempat, memanfaatkan popularitas artis. Kehadiran sosok artis Ahmad Dani yang merupakan artis dari Grup band Dewa dan Neno Warisman yang merupakan artis penyanyi, merupakan tokoh sentral dari gerakan #2019GantiPresiden yang memberikan daya tarik bagi masyarakat untuk ikut dalam gerakan deklarasi #2019GantiPresiden tersebut. Kedua sosok artis tersebut merupakan figur terkenal yang selama ini telah menghiasi jagat media sosial dan media massa Indonesia. Terakhir, kelima, liberalisasi politik. Perubahan politik yang ditandai dengan runtuhnya rezim otoritarian Orde Baru telah membuka keran demokratis bagi media dan setiap orang untuk berekspresi dan menyatakan pendapat di depan umum. Adanya liberalisasi politik di era reformasi ini secara eksplisit negara memberikan jaminan bagi setiap orang untuk menggunakan hak politik dan sipilnya. Dengan terbukanya keran demokratis tersebut menjadi dasar legitimasi yang bisa membenarkan pelaksanaan gerakan #2019GantiPresiden ini.

Kelima faktor tersebut merupakan penjelas dari meluasnya eskalasi gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah. Begitupun dengan adanya mobilisasi masyarakat dari pemuda, emak-emak serta anak-anak yang ikut menggunakan berbagai atribut dalam gerakan #2019GantiPresiden. Berikut ini adalah beberapa pamflet yang mendesiminasikan informasi gerakan #2019GantiPresiden melalui me- dia

sosial maupun media massa.

Gambar. 1.2 ‘Pamflet Deklarasi #2019GantiPresiden’ di Sejumlah Daerah’



Sumber: <http://makassar.tribunnews.com>

Sumber:<http://radarpekanbaru.com>



Sumber: <http://surabaya.tribunnews.com>

Politik Represi: Dampak Polarisasi Isu Dua Kubu Politik

Dalam deklarasi #2019GantiPresiden yang terjadi di Riau dan Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2019 secara bersamaan dihiasi dengan sejumlah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Deklarasi politik yang melibatkan sejumlah orang-orang terkenal seperti Ahmad Dani dan Neno Warisman dan dibarengi oleh sejumlah politisi partai politik seperti Mardani dan Andre Rosiade menjelaskan bahwa gerakan ini merepresentasikan keberpihakan dari salah satu pasangan Capres dan Cawapres, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Atas dasar tersebut muncul sejumlah respon dari kelompok lawan untuk melakukan sejumlah maneuver politik. Pertentangan yang semakin meninggi berdampak pada semakin terfragmentasinya masyarakat pada level bawah. Elite-elite pada level atas dan bawah semakin menjauh atau terpolarisasi ke dalam kutub yang saling berjauhan. Pada kondisi ini, konflik dan kekerasan sangat mudah untuk dipicu dan masyarakat mudah terprovokasi.

Di Surabaya, deklarasi ##2019GantiPresiden diwarnai dengan tindakan represisi yang dilakukan oleh sejumlah pihak seperti Banser dan aparat kepolisian. Perlakuan polisi terhadap emak-emak yang akan menghadiri deklarasi tagar tersebut di Surabaya, bahkan membiarkan kelompok orang penentang gerakan #2019GantiPresiden berlaku intimidatif terhadap Ahmad Dani yang akan mengikuti deklarasi ini. Begitu pun dengan Banser yang melakukan sweeping terhadap peserta gerakan ini untuk keluar dari masjid ketika mereka hendak menunggu untuk sholat Dhuhur (Jawa Pos, 2018). Selain itu, dalam deklarasi di Surabaya, perlakuan represif terlihat ketika sekelompok kecil orang yang memaksa orang-orang yang berpakaian kaos #2019GantiPresiden untuk melepaskannya.

Gambar 1.3 'Pemukulan dalam Deklarasi di Surabaya'



Sumber: cnn.com

Di Riau, tindakan represi terlihat dari perlakuan aparat (Polisi dan BIN) yang membiarkan kelompok penentang menghalangi Neno Warisman ketika hendak mendeklarasikan #2019GantiPresiden. Pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan BIN ini dipandang sebagai bentuk represi karena membiarkan kelompok lain dari pendukung Jokowi melakukan penghadangan terhadap Neno Warisman. Begitupun dengan tidak mengeluarkan izin untuk deklarasi, juga bisa dilihat sebagai bentuk keberpihakan apratur negara dalam kontestasi pemilihan presiden 2019.

Dari dua kasus deklarasi yang terjadi di Surabaya dan Riau tersebut, kekerasan bisa dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan fisik dan kekerasan simbolik. Kekerasan fisik terlihat dari tindakan represi dari pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin, Banser, dan Aparat Kepolisian terhadap massa aksi. Sedangkan kekerasan simbolik terlihat dari pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap kelompok pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dalam melakukan penghadangan terhadap Neno Warisman maupun Ahmad Dani.

Dengan menggunakan instrumen negara dan tekanan massa lewat ormas (Banser) pihak pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin sedang memainkan manuver politik untuk merespon manuver yang dilakukan oleh kelompok pendukung Prabowo-Sandiaga. Secara garis besar, pihak pendukung Prabowo-Sandiaga menggunakan realionalitas demokrasi

dan kebebasan berpendapat sebagai basis legitimasi tindakan untuk melakukan gerakan #2019GantiPresiden di beberapa daerah, sedangkan pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin menggunakan rasionalitas legal-formal dari kekuasaan Negara untuk melegitimasi tindakan dengan menganggap gerakan #2019GantiPresiden sebagai bentuk makar yang mengancam pemerintahan yang sedang berjalan. Atas dasar kedua rasionalitas yang berbeda tersebut, tindakan dari kedua belah pihak pendukung selalu berada dalam ketegangan (*contention*).

## Simpulan

Kemunculan gerakan #2019GantiPresiden pada dasarnya merupakan sebuah contoh gerakan komunikasi politik organik yang terbangun dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Gerakan #2019GantiPresiden tersebut menjadi simbol yang menjelaskan bagaimana pertautan antara kondisi politik, media sosial, dan khalayak dalam perpolitikan Indonesia. Kemunculan gerakan tersebut terkait erat dengan momentum pemilihan presiden 2019, yang menghadirkan dua pasang calon, yaitu Joko Widodo – Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno sebagai kontestan dalam hajatan besar tersebut. Perkembangan gerakan #2019GantiPresiden ini menjadi gerakan organik yang mengalami eskalasi secara luas terjadi karena beberapa hal, yaitu; adanya dukung politik pada level elite, perkembangan teknologi informasi seperti media massa dan media sosial yang pesat, jaringan kepartaian, memanfaatkan popularitas artis, dan liberalisasi politik.

Adapun konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti perkembangan gerakan #2019GantiPresiden ini adalah adanya tindakan represif yang dilakukan oleh sejumlah pihak. Dalam deklarasi di Surabaya dan di Riau, terjadi kekerasan fisik berupa intimidasi, penghadangan, dan persekusi oleh Banser dan simpatisan pendukung pasangan Jokowi- Ma'ruf Amin, dan juga terjadi kekerasan simbolik yang berupa pembiaran oleh aparat kepolisian dan BIN terhadap simpatisan yang melakukan penghadangan sweeping terhadap masa aksi. Tindakan represif ini merupakan bentuk nyata dari buruknya komunikasi politik yang terbangun menjelang pilpres 2019. Selain itu, gerakan tersebut

berdampak pada semakin terpolarisasinya elite dan terfragmentasinya masyarakat ke dalam dua kutub masing-masing pasangan. Baik tim sukses, relawan, tim siber, dan partai politik maupun khalayak terpilah ke dalam dua kubu yang berada dalam ketegangan satu sama lainnya. Dalam situasi tersebut, media tidak hanya sebagai watchdog bagi pemerintah, tetapi juga telah menjadi sarana propaganda politik.

## Referensi

- Altheide, David L. (1997). The News Media, the Problem Frame, and the Production of Fear. *The Sociological Quarterly* 38 (4). Taylor & Francis: 647–68.
- Anshari, Faridhian. (2013). Komunikasi Politik Di Era Media Sosial. *Jurnal Komunikasi* 8 (1): 91–101.
- Barnett, Steven. (2002). Will a Crisis in Journalism Provoke a Crisis in Democracy?. *The Political Quarterly* 73 (4). Wiley Online Library: 400–408.
- Blumler, Jay G, and Anthony D Fox. (1983). *Communicating to Voters: Television in the First European Parliamentary Elections*. Sage Publications (CA).
- Elza Astari Retaduari, E, A. (2018). PSI: #2019GantiPresiden sebar kebencian Kepresiden. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/4183920/psi-2019gantipresiden-sebar-kebencian-ke-presiden>
- Exoo, Calvin F. (2009). *The Pen and the Sword: Press, War, and Terror in the 21st Century*. Sage Publications.
- Forum Detik. (2018). Fakta media sosial. Diakses dari <http://forum.detik.com/fakta-media-sosial-wow-2019gantipresiden-kalahkan-jokowizperiode-secara-telak-t1696495.html>
- Fox, Richard. (2006). Strong and Weak Media? On the Representation of ‘Terorisme’ in Contemporary Indonesia. *Modern Asian Studies* 40 (4). Cambridge University Press: 993–1052.
- Haryanto, Ignatius. (2011). Media Ownership and Its Implications for Journalists and Journalism in Indonesia. *Politics and the Media*

- in *Twenty-First Century Indonesia: Decade of Democracy*. Routledge London, UK, 104–18.
- (2018b). *Problematika Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Howard, Philip N, and Muzammil, M H. (2013). *Democracy's Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring*. Oxford University Press.
- Khondker, Habibul Haque. (2011). Role of the New Media in the Arab Spring. *Globalizations* 8 (5). Taylor & Francis:675–79.
- Lay, Cornelis. (2012). Democratic Transition in Local Indonesia: An Overview of Ten Years Democracy. *JSP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik)* 15 (3):207–19.
- Lim, Merlyna. (2011). Democratization & Corporatization of Media in Indonesia. *Arizona (Br): Arizona State University*.
- Masduki, Masduki. (2017). Media and Politics: Re-Thinking the Indonesian Broadcasting System. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 21 (1). Gadjah Mada University:14–27.
- McLuhan, Marshall, and Lewis H Lapham. (1994). *Understanding Media: The Extensions of Man*. MIT press.
- Piliang, Yasraf Amir. (2005). *Transpolitika: Dinamika Politik Di Dalam Era Virtualitas*.  
Jalasutra.
- Saldy. (2018). Deklarasi 2019 ganti presiden di makassar bakal dikawal polda sulsel.  
Diakses dari <http://makassar.tribunnews.com/2018/08/08/deklarasi-2019-ganti-presiden-di-makassar-bakal-dikawal-polda-sulsel> Tapsell, Ross. (2017). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield International, Limited.
- Taylor, Dylan. (2017). *Social Movements and Democracy in the*

- 21st Century. Springer. Weimann, Gabriel, and Conrad Winn. (1994). *The Theater of Terror: Mass Media and International Terrorism*. Longman New York
- Wijayanto, Andi. (2010). Social Networking Sites, Komunikasi Politik Dan Akurasi Prediksi Dalam Pemilihan Presiden Di Indonesia.” In *Majalah Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial FORUM*, 38:24–30. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Wolfsfeld, Gadi, Elad Segev, and Tamir Sheafer. (2013). Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First. *The International Journal of Press/Politics* 18 (2). Sage Publications Sage CA: Los Angeles, CA:115–37.

# KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL

**Nurul Hasfi**

Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Diponegoro

*nurul.hasfi@live.undip.ac.id*

## ABSTRACT

In the last two decades Internet has influenced aspects of human life including democracy. In Indonesian context, since the arrival of Internet in the last 1990s, it was creating new phenomenon known as online political communication. It has dramatically changed the practice of traditional political communication mediated by conventional media. This article tries to provide discussion practical and theoretical discussion related to the issue. Theoretically it explores of how internet has modified classical political communication theory; how new character of Internet has potential effect for producing better quality and quantity of political communication as well as how it has arisen problematic issues on the process. Furthermore, this discussion briefly concludes that political communication in the future might never separate from this new medium. It may become most intriguing 'live laboratory' for researcher of the potential roles of the Internet in the political communication process.

**Keywords:** Online Political Communication; Internet; Social Media

## Pendahuluan

Media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan kemungkinan interaksi antara elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi negara yang disebut sebagai elit dan warga negara atau non-elit. Hal tersebut dilandasi oleh karakter baru Internet yang tidak dimiliki media massa tradisional yakni interaktif, aktif dan kreatif, langsung, menjamin kesetaraan dan berjejaring (Dijk, 2013). Mendukung pernyataan tersebut, Tsagarousianou (1999) membuat 3 klaim positif tentang peran Internet selama 25 tahun terakhir dalam proses demokrasi yakni

membuka ruang pertukaran dan konfirmasi informasi, mendorong debat publik dan formasi deliberasi serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan politik.

Merujuk pada pandangan Tsagarousianou tersebut, komunikasi politik merupakan bagian penting dari proses demokrasi. Dalam konteks diskusi tentang internet dan demokrasi, Dahlberg & Siepera (2007,7) membawa ide besar tentang demokrasi radikal (radical democracy) yakni demokrasi yang berfokus pada upaya mengkonseptualisasikan proses demokrasi dalam perspektif demokrasi klasik yakni persamaan (equality) dan kebebasan (liberty) yang dimungkinkan bisa difasilitasi Internet. Disini komunikasi politik sebagai salah satu hal krusial dalam proses demokrasi juga mengalami transformasi. Internet sebagai media baru memunculkan konsekuensi praktik diskusi politik yang tidak hanya berlangsung di ruang nyata (real) namun juga komunikasi yang dimediasi ruang maya. Misalnya aktivitas politik yang kini dimediasi internet atau yang disebut politik siber (cyber politic) diantaranya e voting, e petition, email, e polls (Dahlberg & Siepera, 2007, 4) dan e participation (Dijk, 2013). Dengan internet, demonstrasi dengan mengerahkan massa di jalanan diganti dengan e petition, pemungutan suara langsung dilakukan dengan e polls dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan dapat dilakukan dengan e participation. Komunikasi politik yang semula berupa pidato atau orasi calon pemimpin, kini tidak hanya dilakukan di lapangan terbuka, namun dimediasi Internet melalui media sosial seperti Facebook, Twitter dan YouTube dalam bentuk kampanye di dunia maya (cyber-campaign).

Internet yang memfasilitasi proses komunikasi politik telah banyak terjadi di berbagai negara di dunia. Salah satu contoh yakni 'kebangkitan Dunia Arab' atau yang lebih dikenal dengan Arab Spring tahun 2010. Dalam peristiwa itu, Internet terutama media sosial terbukti memfasilitasi mobilisasi massa untuk menumbangkan rezim

otoriter di Tunisia, Mesir, Bahrain, Turki, dan lain sebagainya (Khamis, 2013). Selain itu, gerakan Occupy Wall Street tahun 2011 di New York yang diikuti gerakan serupa di berbagai negara di dunia, sukses dilakukan para aktivis pejuang kesetaraan ekonomi dan sosial (Tremayne, 2014). Di Asia, salah satu contoh kesuksesan media sosial dalam memfasilitasi gerakan kolektif di antaranya terjadi di Hongkong. Gerakan sosial yang disebut Gerakan Payung (Umbrella Movement) dilakukan setengah juta pelajar menuntut demokrasi di Hongkong kepada Beijing (Druzin & Jessica Li, 2015). Sementara itu, di Amerika Serikat, kemenangan Obama 2007-2008 membuktikan efektifitas Internet dalam memfasilitasi komunikasi politik antara elite dengan sipil yang salah satunya menjadi penentu kemenangan calon presiden dari ras marginal di Amerika yakni kulit hitam (Edge, 2010).

Dalam konteks Indonesia Internet juga telah banyak berkontribusi dalam proses komunikasi politik online sejak Internet masuk tahun 1990-an. Di awal keberadaannya, secara ekonomi dan politik Internet menjadi medium

alternatif yang lepas dari kontrol rezim Soeharto. Namun demikian, sebagaimana dikemukakan (Lim, 2003, 274-85; Hill & Sen, 2005) internet memang bukan penentu tumbanganya Orde Baru karena saat itu akses Internet hanya menjangkau satu persen masyarakat Indonesia. Meski demikian, Internet berperan krusial dalam memberikan alternatif informasi yang saat itu 'belum bisa' disediakan media tradisional (televisi, radio, surat kabar, majalah)

– yang notabene berada di bawah kontrol rezim Soeharto. Contohnya, artikel berjudul 'Daftar Kekayaan Soeharto' yang ditulis Aditjondro, seorang pengajar di University of New Castle Australia disebar di mailing list Apakabar tanggal 1 Februari 1998. Informasi tersebut dianggap 'berharga' dan menjadi salah satu pemicu gerakan reformasi 1998. Dalam konteks teori komunikasi politik, fenomena tersebut menjadi penting untuk dilihat karena channel dalam hal ini internet

merupakan elemen penting dalam proses ini dipastikan merupah pola komunikasi politik konvensional. Saat ini peran Internet semakin krusial dalam dunia politik di Indonesia, baik secara positif maupun negatif. Dalam konteks diskusi komunikasi politik di Indonesia kedepan dipastikan akan selalu bersinggungan dengan teori komunikasi politik online. Hal ini dilandasi beberapa argumen; pertama, Internet di Indonesia terus berkembang baik dari sisi jumlah pengguna maupun teknologinya. Mulai dengan menjangkau satu persen dari total penduduk di tahun 1998 (Lim, 2003, 275) kini penetrasi Internet di Indonesia sudah diatas 50 persen dari total penduduk Indonesia (APJII, 2016). Tingginya tingkat pengguna Internet di Indonesia telah memberikan dampak terhadap maraknya aktifitas yang lebih dikenal sebagai politik siber (cyber politic) yakni penggunaan media online sebagai sarana berkomunikasi politik. Pemilihan umum 2014 merupakan salah satu contohnya penggunaan Internet terutama sosial media dalam proses komunikasi politik.

Kedua, terkait dengan publik sebagai elemen komunikasi politik penting, memposisikan internet sebagai harapan baru masyarakat Indonesia ditengah menipisnya kepercayaan masyarakat terhadap media/ pers tradisional yang kini lebih dikontrol kekuasaan pasar dan politik (Nugroho, 2012; Patria, 2013). Sebagaimana diketahui, Era Reformasi berhasil mengesahkan UU No 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers yang membuka ruang luas pada masyarakat Indonesia untuk mendirikan media massa. Pasca Reformasi, media massa di Indonesia mengalami apa yang disebut euforia karena selama puluhan tahun media dibungkam Soeharto. Namun demikian, sekitar 10 tahun pasca Era Reformasi ini, media massa menemukan tantangan baru. Kontrol atas media massa/ pers tetap terjadi hanya berbeda aktor pengontrolnya saja. Jika di Era Orde Baru kontrol dilakukan negara di Era Reformasi media dikontrol oleh kepentingan ekonomi dan politik. Dengan sistem media massa yang demikian, alih-

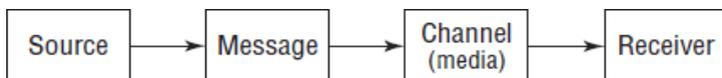
alih memberikan ruang yang memadai bagi warga sipil untuk berekspresi, media massa/ pers justru memberikan ruang pada kekuasaan politik untuk para elite.

Dari sinilah, peran Internet terutama dalam menyediakan ruang alternatif berdemokrasi menjadi krusial untuk dilihat lebih lanjut. Artikel ini secara khusus akan mendiskusikan literatur mutakhir terkait teori dan literature tentang komunikasi politik di era Internet yang diharapkan dapat membantu para peneliti dalam mengkaji komunikasi politik online.

## **Pembahasan**

Artikel ini secara khusus membahas tentang dua hal, pertama bagaimana komunikasi politik klasik berbeda dengan komunikasi politik online; kedua bagaimana perbedaan pola komunikasi politik yang menggunakan dua medium yang berbeda tersebut memberikan ruang baru dalam penelitian komunikasi politik di era Internet. Untuk membahas tentang definisi komunikasi politik klasik, artikel ini terutama merujuk pada setidaknya tiga ahli yakni Lasswell (1927); McNair (1995) dan Lelliker (2006). Sementara untuk melihat karakter baru komunikasi politik online penulis merujuk pada pandangan yang dibangun oleh Holmes (2005); Vedel (2003) dan Habermas (2006). Pandangan tentang komunikasi politik online dari ketiga ahli tersebut akan memberikan gambaran dimana celah penelitian yang bisa dipakai untuk meneliti komunikasi politik online.

Penulis mengidentifikasi banyak pengertian dan definisi tentang komunikasi politik klasik. Namun pada dasarnya teori-teori tersebut berakar dari padangan yang dikembangkan oleh Lasswell (1927) dalam disertasinya yang mempelajari tentang propaganda. Ia mendefinisikan komunikasi politik dengan pertanyaan mendasar tentang who- says what- to whom - via which channels - with what



effects sebagaimana terlihat pada figure 1 dibawah ini.

Figure 1 Model Figure 1 Model Komunikasi Politik Klasik (Lelliker, 2006; 17)

Pandangan Denton dan Woodward (dalam McNair, 1995; 4) dapat menjelaskan lebih lanjut tentang teori umum tersebut. Mereka mendefinisikan komunikasi politik secara singkat sebagai komunikasi yang memiliki tujuan politis, meliputi; 1) semua bentuk komunikasi yang dilakukan oleh politisi dan aktor politik lain untuk tujuan khusus; 2) komunikasi yang ditujukan kepada para aktor politik oleh aktor-aktor non politis seperti pemilih (voters) dan kolumnis; dan 3) komunikasi terkait dengan aktor-aktor politik dan aktifitasnya yang diliput media, dibahas dieditorial dan diperbincangkan dalam berbagai format diskusi di media. Model komunikasi politik sebagaimana disampaikan Denton dan Woodward merupakan merupakan komunikasi politik termediasi oleh media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar atau majalah. Komunikasi politik ini memiliki pola komunikasi politik berlangsung searah (one way communication), tersentralisasi dan memposisikan publik sebagai penerima pesan pasif.

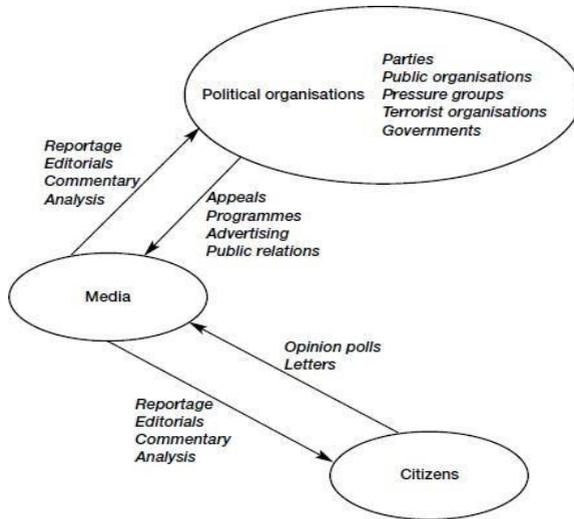


Figure 2 Komunikasi Politik termediasi Media Tradisional (McNair, 1995; 6)

Figure 2 menggambarkan bagaimana elemen-elemen dalam proses komunikasi politik berinteraksi satu sama lain. Elite yang terdiri dari organisasi politik seperti partai, organisasi publik, pemerintah menggunakan media sebagai alat untuk menyampaikan program-program politiknya untuk disampaikan kepada pemilih (voters) yakni warga negara (citizen). Pesan tersebut biasanya dikemas oleh media tradisional dalam bentuk liputan, editorial, komentar dan analisis berita untuk disampaikan kepada publik. Disisi lain media juga memfasilitasi warga (citizen) untuk menyampaikan opini mereka untuk kepada elite.

Dalam praktiknya komunikasi politik yang dimediasi media tradisional ini memungkinkan terjadinya hambatan (barrier) berupa praktik kekuasaan yang dilakukan elemen komunikasi politik. Elemen-elemen komunikasi politik yakni media, elite dan publik tidak berada dalam ruang vakum. Masing-masing elemen memiliki fungsi kontrol yang akan mempengaruhi efek pesan yang dibangun dalam komunikasi

politik. Mereka yang mengontrol adalah kelompok yang paling banyak menguasai sumber daya terutama medium (channel). Sebagai contoh dalam konteks Indonesia, media dalam proses komunikasi politik seringkali diharapkan menjadi ruang publik yang memberikan ruang bebas kepada publik untuk menyampaikan opininya. Namun pada kenyataannya harapan tersebut tidak terpenuhi karena penguasaan elite atas media massa di Indonesia.

Pada akhirnya terjadi pelemahan peran media sebagai ruang partisipasi publik karena media lebih dipakai sebagai alat elite untuk mencapai kekuasaannya. Media tidak lagi memediasi publik untuk menyampaikan opininya kepada elite, sebaliknya media menjadi ruang yang dikuasai elite untuk mengontrol publik.

Terkait dengan problematika proses komunikasi politik termediasi media tradisional ini menjadi penting untuk melihat alternatif channel yang dapat memfasilitasi proses komunikasi politik dengan kualitas yang lebih baik yakni Internet. Dalam proses komunikasi, komunikasi politik online masuk dalam pembahasan Computer Mediated Communication (CMC). Internet menawarkan berkarakter dan pola baru dalam berkomunikasi yakni langsung, terdesentralisasi, dua arah, interaktif dan berjaringan (networking). Dengan penggunaan internet ini, maka figure 2 dapat dimodifikasi menjadi figure 3 dibawah ini.

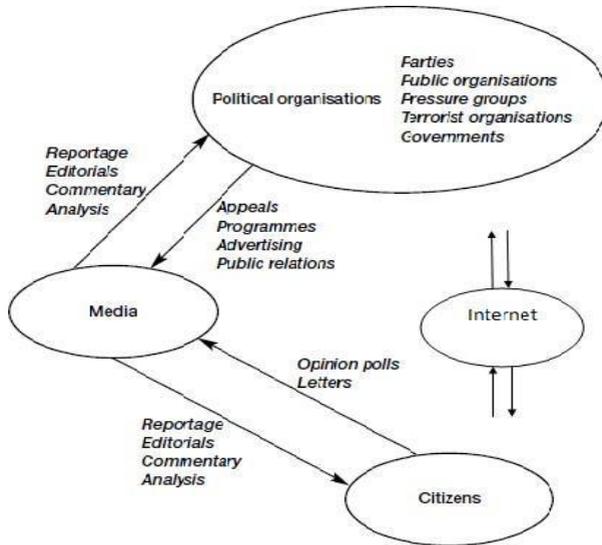


Figure 3 Komunikasi Politik di Era Internet (dimodifikasi dari McNair, 1995; 6)

Internet membuka kanal komunikasi langsung antara publik (citizen) dengan elite yang semula harus dimediasi oleh institusi pers. Internet yang dalam artikel ini difokuskan pada media sosial berkarakter interaktif karena telah berbasis Web 2.0 (Tim O'Reilly, 2005). Karakter tersebut berbeda dengan media tradisional (print, elektronik, online) sebagaimana dikemukakan oleh Holmes (2005) yang mengurai perbedaan karakter internet dengan televisi yang dalam hal ini dapat mewakili media tradisional. Pertama, internet memiliki karakter terdesentralisasi (decentralized) sementara televisi tersentralisasi (centered). Karakter ini merubah proses komunikasi politik yang sebelumnya dari satu orang ke banyak orang (one to many) kini menjadi dari banyak orang ke banyak orang (many to many). Karakter ini mengurangi kekuasaan elite yang semula menjadi komunikan aktif, dan mengemansipasi publik yang kini menjadi publik aktif. Publik yang bisa menggalang kekuatan bersama menggunakan

Internet untuk memperjuangkan kepentingannya. Warga (citizen) bisa membentuk jaringan sosial yang memungkinkan mereka berkoodinasi, membuka ruang debat politik, membangun ruang publik yang interaktif, memobilisasi hingga mengkoordinasi aksi kolektif. Kedua, internet membuka komunikasi dua arah (two way of communication) sementara televisi hanya satu arah (one way komunikasi). Media sosial misalnya, merupakan ruang yang memungkinkan para aktor demokrasi dapat berkomunikasi langsung dua arah yang sebelumnya tidak dilakukan di televisi.

Bahkan saat ini publik bisa berbicara langsung dengan presiden melalui akun media sosial. Ketiga, internet memiliki kemampuan menghindari kontrol kekuatan tertentu, sementara televisi mudah dikontrol. Casstell (2009) menyebut bahwa masyarakat yang ada di internet masyarakat jaringan (network society) yang membangun jaringan antar tak terbatas yang tidak dapat disensor dengan mudah. Jaringan itu bisa berupa jaringan informasi, jaringan warga sipil, jaringan perusahaan, dll. Sementara televisi merupakan media elektronik yang masih mudah dikontrol oleh segelintir orang saja, misalnya dalam kasus Indonesia yakni konglomerat yang memiliki media.

Vedel (2003) menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Information Communication Technology (ICTs) dalam hal ini Internet memberikan efek pada komunikasi politik. Pada beberapa memiliki kesamaan isu dengan Homles (2005) terkait dengan kelebihan dari Internet, namun ia juga menyediakan asumsi-asumsi tentang problematika yang menyertainya (lihat Tabel 1).

Tabel 1 Dampak ICT dalam proses Komunikasi Politik

<i>Perangkat ICT</i>	<i>Keuntungan Potensial</i>	<i>Permasalahan</i>
Murah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mudah memproduksi pesan</li> <li>• Pesan tidak terbatas untuk publik (citizen)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlalu banyak informasi</li> </ul>
Langsung (sender receiver)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Komunikasi langsung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riskan terjadinya propaganda</li> <li>• Kurangnya mediator yang bisa memainkan peran penting</li> </ul>
Penerima	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bisa menarget</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isu privasi</li> </ul>

Sumber: Vedel (2003, 42)

Tabel 1 memperlihatkan pandangan Vedel tentang karakter Internet memiliki kesamaan dengan Holmes (2005) seperti langsung, interaktif dan terdesentralisasi. Namun Vedel menyediakan pandangan baru seperti karakter yang murah, menjangkau publik, terseleksi, dan global. Pada bagian ini penulis akan menjabarkan satu persatu karakter media baru dalam memfasilitasi proses komunikasi politik, sekaligus memberikan berbagai penelitian yang telah membahas potensi dan kelemahan internet dalam memfasilitasi komunikasi politik. Pandangan Vedel bisa menjadi titik awal para peneliti untuk melihat proses komunikasi politik dari berbagai sudut pandang.

Pertama, Internet memungkinkan aktor-aktor demokrasi mengurangi biaya produksi kampanye politik. Hanya dengan membuat akun media sosial dan website misalnya seorang politisi dapat menjangkau publiknya dengantidak terbatas. Menurut Vedel pola ini mungkin merubah proses komunikasi politik secara dramatis karena sebelumnya harus dimediasi pers. Namun demikian, menurutnya karakter internet ini dapat memunculkan berbagai problematika seperti banjir informasi yang menyebabkan pesan kepada audience tidak efektif. Publik tidak terkonsentrasi pada isu-isu yang seharusnya penting malah mungkin justru sebaliknya memberikan perhatian-perhatian pada perbincangan politik yang tidak penting. Problematika lain yakni algoritma sosial media yang mengarahkan audience pada satu isu yang mereka sukai saja.

Salah satu penelitian terkait dengan permasalahan ini misalnya yang dilakukan Grömping (2014). Ia meneliti tentang proess komunikasi politik yang dimediasi oleh Facebook dengan cara mengeksplorasi bagaimana kelompok partisan selama pemilihan umum Thailand tahun 2014 berkomunikasi. Ia menggunakan beberapa metode penelitian diantaranya analisis isi terhadap pesan-pesan yang di-posting di Facebook, analisis jaringan dan visualisasi interaksi antar kelompok partisan di halaman facebook. Hasil penelitian memperlihatkan

bagaimana Social Networking Sites (SNSs) tidak membuat diskusi politik online menjadi lebih deliberatif karena pesan yang tidak fokus. Sebaliknya, media sosial mendorong berkembangnya kantong-kantong pemikiran kelompok yang bersifat eksklusif yang terisolasi dengan kelompok lain atau yang kemudian ia sebut sebagai enclave group. Wacana politik yang terjadi di kantong-kantong tersebut ditandai dengan munculnya informasi yang tidak konsisten dan mengandung kekeliruan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial merupakan ‘ruang gema’ (echo chamber) yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan refleksi kritis karena peserta tidak sedang dalam proses mencari informasi yang bertentangan dengan yang dimilikinya namun segala informasi yang mendukung pendapat mereka.

Echo chamber dapat muncul di media sosial atau saat kita berselancar mencari berita di sebuah media online. Facebook menyeret pengguna masuk dalam ruang gema karena sosial media ini menerapkan algoritma penyeleksian konten di beranda Facebook sedemikian rupa sehingga yang muncul pertama di newsfeed adalah postingan yang disesuaikan dengan minat pengguna. Minat tersebut didasarkan pada riwayat klik, like, share, komentar pengguna di beranda Facebooknya. Dalam algoritma seperti ini maka dipastikan seorang pengguna Facebook misalnya hanya akan menerima informasi tentang isu tertentu dari satu sudut pandang. Pada akhirnya dalam konteks komunikasi politik misalnya seorang pengguna Facebook yang meninggalkan jejak digital berupa konsumsi terhadap informasi yang kontra terhadap calon pemimpin tertentu maka cenderung akan mendapatkan informasi yang negatif tentang calon pemimpin tersebut, dan sebaliknya. Demikian juga saat netizen mengkonsumsi media online, maka algoritma akan mengkaitkan segala informasi yang relevan dengan yang sedang dicarinya daripada menyediakan informasi yang memiliki sudut pandang beragam. Disatu sisi karakter

algoritmayang mencoba memberikan informasi komprehensif tentang suatu kasus namun punya kelemahan yakni menyediakan informasi dari satu sudut pandang sehingga menghambat diskusi kritis.

Dalam konteks komunikasi politik online di Indonesia, belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan konsep ruang gema (echo chamber) dalam melihat problematika komunikasi politik online di Indonesia. Namun dalam penelitiannya terbaru yang berfokus pada hubungan antara sosial media dan politik, Lim (2017) menawarkan ide terkait dengan problematika ruang gema di media sosial. Ia menegaskan dibalik semangat kebebasan berekspresi yang menjadi latar sebuah partisipasi politik online, media sosial juga dipakai sebagai sarana kebebasan untuk membenci (freedom to hate) sekaligus membungkam orang lain. Terkait dengan ruang gema yang disampaikan Grömping (2014), Lim lebih menggunakan istilah 'algorithmic enclaves' yang menurutnya memproduksi bentuk-bentuk nasionalisme tribal. Lim menegaskan dalam ruang seperti itu pengguna sosial media akan mengklaim dan melegitimasi nasionalisme versi mereka dengan tidak mengindahkan kesamaan dan keadilan bagi kelompok lain.

Penulis melihat ada banyak isu yang dapat dilihat dengan berlatar konsep echo chamber, terutama untuk melihat problematika komunikasi politik online di Indonesia saat ini seperti penyebaran berita bohong (hoax) dan berita palsu (fakenews) yang salah satunya disumbang oleh adanya karakter algoritma internet. Penelitian bisa berfokus pada upaya mendeskripsikan bagaimana pola-pola yang dipakai netizen dalam mengkonsumsi hoax dan fakenews. Sementara itu, penelitian juga bisa berfokus pada diskusi teoritis untuk mengkonfirmasi berbagai teori tentang audience aktif internet yang selama ini dipakai sebagai landasan teori penelitian-penelitian audience internet. Misalnya selama ini teori uses and gratification Herta Herzog (1944) dipakai untuk menjustifikasi karakter audience Internet yang

dianggap aktif. Konsep ruang gema jelas telah memposisikan pengguna internet termasuk sosial media sebagai khalayak yang seolah-olah aktif memilih informasi yang dibutuhkannya namun pada dasarnya ia sedang dalam kekuasaan teknologi algoritma.

Kedua, karakter langsung antara komunikan dan komunikator sebagaimana disebut sebelumnya telah membuka kemungkinan komunikasi yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dengan mudah publik dapat berkomunikasi langsung bahkan dengan calon presiden, presiden, menteri dan anggota dewan yang sama-sama memiliki akun media sosial di Internet. Tim kampanye politik dapat dengan mudah masuk ke ruang-ruang pribadi calon pemilih (voter) dan mendistribusikan pesan secara langsung. Namun karakter ini menurut Vadel dapat membuka ruang propaganda yang dilakukan pihak-pihak berkepentingan politis terhadap publik. Propaganda dapat dengan mudah terjadi di internet karena tidak adanya mediator dari pesan yang biasanya diperankan oleh mainstream media sebagai gatekeeper atau aktor yang berperan menyeleksi informasi untuk menjamin faktualitas dan kebenarannya. Di Internet publik dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi manipulatif, salah satu contohnya fenomena fakenews dan hoax yang akhir-akhir ini mewarnai proses komunikasi politik di Indonesia.

Terkait dengan isu tentang propaganda online, Hasfi (2017a) meneliti tentang peran media sosial dalam pemilihan presiden 2014 mengidentifikasi berbagai pola hoax dan fakenews yang dipakai untuk memobilisasi massa politiknya. Permasalahannya, hoax dan fakenews tersebut tidak sekedar berisikan informasi yang tidak benar dan palsu namun juga memuat isu-isu primordialisme yang membahayakan prinsip pluralisme masyarakat Indonesia.

Wacana primordialisme terutama berjalan dengan mekanisme propaganda dan kampanye hitam yang disebar luaskan melalui Twitter dan dapat diakses setiap pemilik akun. Hasfi (2017b) juga mendeteksi

proses komunikasi politik di media sosial berlangsung secara ideologis dengan melibatkan praktik-praktik kekuasaan seperti politik etnis dan politik agama yang membahayakan kehidupan demokrasi. Hal ini disebabkan karena politik etnis dan agama sama-sama berangkat dari nilai partikular yang bersumber dari kelompok tertentu saja, padahal demokrasi menuntut nilai universal yang bisa diterima semua kelompok. Dalam sudut pandang Vedel, penelitian yang dilakukan Hasfi ini berangkat dari problematika dari karakter media sosial yang langsung tanpa adanya mediasi.

Selain temuan diatas, peneliti melihat bahwa penggunaan internet dalam aktivitas politik di Indonesia akhir-akhir ini lebih berangkat dari pandangan pesimisme terhadap internet (Lim, 2017). Hal ini memposisikan tesis tentang komunikasi langsung sebagai keunggulan komunikasi politik online hanya sebatas mitos semata. Dari sini peneliti melihat perlu adanya upaya dari peneliti komunikasi media online untuk mencoba melihat fenomena- fenomena mikro yang terjadi di ruang maya yang memperlihatkan potensi Internet dalam menjembatani komunikasi online. Misalnya saja berfokus pada analisis bagaimana akun sosial media milik elite berinteraksi dengan para pengikutnya dalam hal ini warga sipil.

Ketiga, media sosial memiliki karakter penerima terseleksi yang dalam proses komunikasi politik memungkinkan aktor demokrasi membangun komunikasi dengan kelompok kepentingan mereka. Elite politik misalnya dapat membangun ruang diskusi tertutup yang hanya berisikan publik khusus yang menjadi target. Dengan demikian para elite diharapkan dapat lebih efektif menyampaikan pesan-pesan khusus mereka kepada kelompok tersebut. Sebaliknya, publik juga memiliki kesempatan membangun forum diskusi kelompok untuk membicarakan isu-isu yang menjadi kepentingan mereka untuk selanjutnya dapat melakukan gerakan politik (social movement), membuat keputusan (decision making) dan membangun opini publik

(public opinion). Dari konsep ketiga ini, kebanyakan peneliti yang telah dilakukan lebih pada peran positif Internet dalam proses komunikasi politik misalnya yang dilakukan oleh Postmes (2002) yang melihat bagaimana Internet (web) dapat merubah tindakan kolektif (collective action) mulai dari persuasif menjadi konfrontatif dan dari individu menjadi kolektif. Penelitian dengan metode survey ini memperlihatkan bahwa menurut kalangan aktivis dan non-aktivis tindakan online (online action) dianggap sebagai alternatif tindakan yang setara dengan tindakan nyata (offline).

Dalam konteks Indonesia, penelitian terkait online social movement telah banyak dilakukan di Indonesia. Lim menjadi salah satu peneliti yang paling komprehensif dalam melihat fenomena ini sejak kemunculan internet di Indonesia. Lim (2005) mengeksplorasi peran internet dalam aktivitas politik (political activism) di masa transisi Orde Baru ke Reformasi. Lim melihat bagaimana internet saling terlibat dalam memperjuangkan kekuasaan dan bagaimana identitas menjadi bagian penting dalam proses ini. Lim meneliti dua isu besar yaitu (1) bagaimana internet menjadi alat yang memfasilitasi reformasi 98 untuk memproduksi debat politik dan menyebarkan informasi (2) penggunaan internet oleh Laskar Jihad (Jihad Troopers) yang terlibat dalam konflik Maluku, dimana internet dipakai sebagai alat untuk menghidupkan kembali isu primordialisme, isu SARA dan identitas komunal yang menggerakkan aksi kekerasan kolektif. Selanjutnya, Lim (2013a) mengidentifikasi bagaimana gerakan sosial media ini sukses mendorong terjadinya political activism. Menurutnya sebuah gerakan di sosial media akan sukses memobilisasi massa apabila memiliki narasi sederhana; beresiko kecil; searah dengan meta narasi seperti nasionalisme dan keagamaan. Sebaliknya sebuah gerakan sosial media akan gagal manakala narasi yang dibangun berseberangan dengan kepentingan narasi mainstream media. Penulis mengidentifikasi bahwa penelitian terkait karakter ketiga dari Internet berdasarkan pandangan

Vedel ini masih lebih banyak berfokus pada isu tentang internet baik itu tentang potensi internet dalam proses komunikasi politik maupun sebaliknya bagaimana internet justru menghambat kualitas komunikasi politik. Penulis melihat problematika berupa isu privasi dalam komunikasi politik online belum banyak dibahas para peneliti sehingga bisa menjadi celah bagi penelitian.

Belum dibahasnya isu privasi ini salah satunya disebabkan karena masih rendahnya literasi digital di Indonesia sehingga isu privasi di Internet belum dilihat sebagai permasalahan serius. Di negara Barat, isu privasi di mediaonline – termasuk untuk kepentingan komunikasi politik – dianggap sebagai sebuah masalah serius. Pelanggaran privasi yang dimaksud dalam komunikasi politik online yakni aktifitas memonitor jejak digital calon pemilih di internet kemudian memanfaatkannya untuk menetapkan strategi kampanye. Ayn Rand (1943) menyebut tindakan semacam itu merupakan pelanggaran etika ruang privat yang dilandasi pemahaman bahwa peradaban sipil merupakan sebuah masyarakat yang memiliki hak dan ruang pribadi. Belum dilihatnya isu privasi sebagai isu pelanggaran hak privasi, menyebabkan permasalahan ini masih jarang menjadi perhatian peneliti komunikasi politik online di Indonesia. Dalam hal ini signifikansi sosial dalam penelitian menjadi penting karena dapat digunakan sebagai bahan literasi internet terutama dalam usaha membangun pemahaman kritis tentang pentingnya menjaga privasi di Internet agar terbebas dari penyalahgunaan data privasi untuk kepentingan ekonomi dan politik.

Keempat, karakter yang secara drastis merubah pola komunikasi politik menurut Vedel yakni kemampuan Internet dalam meng-update pesan secara cepat, frekuentatif dan menjangkau luas khalayak yang menjadi sasaran. Di media sosial pesan-pesan yang tersebar luas dan cepat atau biasa disebut viral merupakan pesan yang mendapat perhatian publik. Vedel menjabarkan ICT dapat mendorong proses komunikasi politik dari elite ke publik karena ICT memungkinkannya

para aktor politik mengembangkan strategi komunikasi politiknya karena dengan internet mereka lebih mudah terhubung dengan publik. ICT dapat memangkas biaya produksi dan menyebarkan informasi. Vedel menegaskan dalam rangka memaksimalkan jangkauan mereka untuk mendapatkan perhatian dari mainstream media para politisi akan mengembangkan teknik media manajemen seperti press release dan membuka akses terbuka pada jurnalis melalui saluran Internet.

Namun demikian dari karakter ini muncul permasalahan yang disebut Vedel push button decision making. Pengambilan keputusan hanya dilandasi oleh pertimbangan dangkal yakni sekedar memencet tombol di keyboard komputer tanpa melalui proses diskusi deliberatif sebagaimana diharapkan dalam proses komunikasi politik yang berkualitas. Berbagai penelitian terkait dengan dampak karakter internet berupa kecepatan terhadap proses komunikasi politik telah banyak dilakukan. Dalam konteks Indonesia, penelitian terkait dengan aktivitas yang dimaksud Vedel tersebut pernah diteliti oleh Lim (2013b, 2) yang mengidentifikasi trend aktifitas di dunia maya di Indonesia yang kemudian ia sebut sebagai slacktivism atau lazy activism, clicktivism (clickactivism), armchair activism dan keyboard activism. Berbagai istilah itu menggambarkan aktivitas di dunia maya yang tidak efektif menghasilkan gerakan nyata di ranah offline, namun hanya gerakan yang berhenti di ruang

maya saja. Hal sama diteliti oleh Gladwell, 2010 dan Morozov, 2009 (dalam Lowe, 2016) yang menyebut bahwa Facebook lebih banyak dipakai sebagai sarana perdebatan berkarakter slacktivism and clicktivism yang berlawanan dengan semangat demokrasi.

Berbagai penelitian terbaru terkait dengan potensi karakter keempat Internet yang menyediakan ruang tak terbatas oleh waktu cenderung banyak dilihat dari sudut pandang pesimis. Hal ini dimungkinkan karena seiring semakin luasnya penggunaan Internet, karakter andalan media baru ini mulai memunculkan problematika.

Bahkan bisa dikatakan saat ini tesis tentang efektifitas komunikasi yang bersumber dari kecepatan informasi sedang menjadi kontroversi karena landasan argumen berupa kualitas komunikasi dianggap lebih penting. Namun demikian, peneliti melihat bahwa masih banyak isu tentang karakter ini yang bisa dikembangkan sebagai bahan diskusi tentang optimisme terhadap internet. Misalnya, Internet yang memfasilitasi partisipasi politik Kawal Pemilu 2014 melalui web dan sosial media. Gerakan ini mendigitalisasikan formulir C1 dari web KPU sehingga memungkinkan perhitungan suara secara real. Internet juga menghubungkan 700.000 relawan dari seluruh propinsi di Indonesia yang bertugas memastikan hasil perhitungan suara tidak mengalami kecurangan. Isu-isu emansipatif tentang potensi Internet diharapkan tetap mendapatkan perhatian peneliti untuk memperkaya diskusi potensi Internet dalam komunikasi politik online ini.

Kelima, karakter interaktifitas menjadi kelebihan utama yang dimiliki internet dibandingkan dengan media konvensional. Interaktifitas ini memungkinkan komunikasi bottom up atau dari bawah keatas, berbeda dengan komunikasi politik termediasi media konvensional yang berpola top- down atau dari atas ke bawah. Timbal balik secara langsung menjadi penting karena kini publik tidak perlu lagi menggunakan media yang sulit dan mahal untuk bisa berkomunikasi dengan calon presiden misalnya. Berbagai penelitian terkait dengan penelitian ini biasanya berfokus pada bagaimana kualitas komunikasi politik yang dihasilkan dengan ruang interaksi di dunia maya ini. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Zheng (2005) yang mempertanyakan dua hal utama yakni apakah benar internet membawa fungsi sebagai alat interaksi antara negara dengan masyarakat? Apakah internet dapat mendorong transisi demokratik dari sistem politik otoritarian? Penelitian ini menjawab dua pertanyaan ini dengan studi empiris yang berlangsung di China. Ia mengeksplorasi implikasi demokratis dari internet dalam konteks hubungan

saling mempengaruhi antara negara dengan masyarakat dengan menggunakan tiga lapisan analisis yakni internet sebagai alat komunikasi, internet sebagai public space dan internet sebagai alat untuk aksi kolektif (collective action). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di China dampak internet dalam proses transisi demokrasi berbeda pada tiap lapisan analisis tergantung pada strategi interaksi antara negara dan masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh Karlsem (2015) yang berfokus pada bagaimana peran opinion leader dalam aliran komunikasi (flow of communication) di media sosial. Karlsem menginvestigasi sejauh mana para opinion leader yang menjadi pengikut (follower) akun media sosial milik partai dan politisi dan bagaimana tingkat keaktifan interaksi mereka baik online maupun offline. Ia mensurvey 5700 responden dan menemukan bahwa sebagian besar pengikut (follower) akun partai dan politisi Facebook merupakan opinion leader yang aktif dalam jaringan online dan offline. Temuan ini meningkatkan hubungan signifikan antara jejaring sosial dengan peran opinion leader dalam arus komunikasi politik (flow of political communication) di masyarakat.

Dalam konteks pengguna Internet di Indonesia penelitian tentang interaktifitas internet dalam lima tahun terakhir cenderung memunculkan pandang pesimisme (Lim, 2017; Lim, 2013a; Hasfi, 2017a) meskipun ada juga yang mencoba melihat potensi Internet sebagai counter public sphere (Priyadharma, 2017) untuk melawan hegemoni ruang publik yakni media mainstream. Nuansa pesimisme atas peran internet dalam komunikasi politik online ini dimungkinkan karena fokus studi internet yang masih berfokus pada peran internet dalam dunia politik yang berkarakter kontestatif. Untuk itu perlu adanya perluasan studi tentang komunikasi politik online yang mengeksplorasi potensi interaktifitas internet dalam selain isu politik seperti isu kesehatan, lingkungan, kesenian, pendidikan dan lain sebagainya.

Keenam, karakter terdesentralisasi yang disebut-sebut

memungkinkan Internet untuk menciptakan sistem komunikasi baru diluar komunikasi mainstream. Namun disisi lain isu ini juga memunculkan problematika seperti terciptanya ruang publik yang terfragmentasi dan regulasi yang sulit. Pendapat Vedel tentang ruang publik yang terfragmentasi menarik untuk dilihat lebih lanjut karena ia sependapat dengan Habermas, salah satu pencetus konsep ruang publik. Pernyataan tersebut dikemukakan Habermas pada tahun 2006, dalam seminar internasional di German oleh International Communication

Association (ICA) yang mendapatkan kritik keras dari para Habermasian yang memiliki pandangan optimis terhadap Internet. Berikut pernyataan Habermas:

The Internet has certainly reactivated the grassroots of an egalitarian public of writers and readers. However, computer-mediated communication in the web can claim unequivocal democratic merits only for a special context: It can undermine the censorship of authoritarian regimes that try to control and repress public opinion. In the context of liberal regimes, the rise of millions of fragmented chat rooms across the world tend instead to lead to the fragmentation of large but politically focused mass audiences into a huge number of isolated issue publics. Within established national public spheres, the online debates of web users only promote political communication, when news groups crystallize around the focal points of the quality press, for example, national newspapers and political magazines. (Habermas, 2006, p. 423)

Habermas mempercayai bahwa Internet hanya dapat mendorong proses demokrasi dalam konteks-konteks tertentu saja misalnya meruntuhkan rezim otoriter yang menindas publik. Namun demikian, ia meyakini bahwa dalam sebuah ruang liberal peran internet dalam demokrasi menemui tantangan yang bersumber dari munculnya jutaan chat room yang terfragmentasi. Menurutnya ruang-ruang itu

cenderung memunculkan fragmentasi yang secara politik justru mengisolasi pengguna Internet pada isu publik yang jumlahnya tidak terbatas. Ia juga menegaskan kembali bahwa komunikasi politik di Internet dapat terbentuk manakala melibatkan pers berkualitas, sebagai contoh, surat kabar nasional dan majalah politik. Menarik untuk mengetahui bahwa Habermas ternyata lebih optimist pada peran media konvensional dibandingkan dengan media baru yakni Internet. Alasan utamanya yakni ketiadaan gatekeeper di media baru yang menurutnya memegang peran penting sebagai pengontrol proses diskusi deliberatif sebagaimana yang dimiliki oleh media konvensional.

Perdebatan tentang pesimisme dan optimisme Internet dalam menyediakan ruang publik sebagai ruang komunikasi politik ini sendiri hingga saat ini masih terus berlangsung. Bahkan para Habermasian sendiri banyak yang menolak pesimisme Habermas tersebut karena meyakini bahwa Internet telah memberikan ruang yang lebih luas kepada publik untuk berekspresi. Perdebatan antara Habermas dan Habermas ini bisa menjadi titik tolak para peneliti komunikasi politik online untuk melihat kembali peran internet dalam proses komunikasi politik.

### **Penutup**

Diskusi teoritis tentang komunikasi politik klasik dan komunikasi politik online memperlihatkan bahwa komunikasi politik di era Internet akan mengalami dinamika perubahan yang menarik untuk terus dikaji peneliti komunikasi politik saat ini dan dimasa depan. Ada beberapa hal yang dianggap penting untuk menjadi penekanan dalam setiap diskusi diantaranya; pertama, karakter media baru dalam hal ini internet yang menentukan perubahan pola komunikasi politik diantaranya langsung (direct), murah (low cost), kecepatan (speed), interaktif, desentralisasi yang mendekonstruksi komunikasi politik yang semula satu arah menjadi dua arah, top down menjadi bottom up

dan elitis menjadi non-elitis; kedua, karakter baru internet tersebut membawa perubahan positif terhadap proses komunikasi politik dan menjadi alternatif media bagi publik dalam menyampaikan opini publiknya secara lebih terbuka dan bebas. Namun pada kenyataannya berbagai penelitian telah membuktikan bahwa komunikasi politik online juga menghadirkan problematika yang menjadi hambatan (barrier) baru yang tidak ditemukan dalam proses komunikasi politik klasik; ketiga, dengan adanya potensi sekaligus problematika komunikasi politik online menghasilkan berbagai pandangan optimis dan pesimis terhadap Internet yang siap untuk dijadikan sebagai ruang laboratorium para peneliti komunikasi politik, terutama untuk menyumbangkan pemikiran teoritis baru dan solusi atas berbagai problematika komunikasi politik di era Internet.

### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih rekan kerja penulis di Departemen Komunikasi Universitas Diponegoro yang menjadi partner diskusi selama ini.

### **Pendanaan**

Penulis tidak menerima bantuan pembiayaan untuk penelitian, kepenulisan (authorship), dan publikasi dari pihak manapun.

### **Daftar Pustaka**

- Agus Sudibyo & Nezar Patria. The Television Industry in Post-authoritarian Indonesia, *Journal of Contemporary Asia*, 43:2, 257-275, 2013. DOI: 10.1080/00472336.2012.757434
- APJII & Puskakom UI. Profil Pengguna Internet Indonesia. Jakarta: PuskakomUI&APJII, 2016.
- Castells, Manuel. (2009). *Communication Power*. New York: Oxford University Press.
- Dijk, Jan A.G.M. *Digital Democracy: Vision and Reality* dalam I. Snellen & W. van

- de Donk 'Public Administration in the Information Age: Revisited', IOS- Press, 2013.
- Dahlberg & Siapera. *Radical Democracy and the Internet Interrogating Theory and Practice*. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
- Druzin & Jessica Li. *The Power of The Key Stroke: Is Social Media the Radical Democratizing Force We Have Been Led to Believe It Is?* Harvard Human Right Journal, February (2015).
- Edge, Thomas. *Conservatives, White Voters, and the Election of Barack Obama*.  
Journal of Black Studies. Volume 40 Number 3 January 2010 426-444 Grömping, Max. (2014). *Echo Chambers' Partisan Facebook Groups during the 2014 Thai Election*. Asia Pacific Media Educator. SAGE Publications Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC DOI: 10.1177/1326365X14539185 <http://ame.sagepub.com>
- Hasfi, Nurul. *Primordialism through Hoax and Fake News during the 2014 Presidential Election of Indonesia*. Presented at ICISPE International Conference. 2017a
- Hasfi, Nurul. *Politik Keshalehan Personal dalam Pemilihan Presiden 2014 dalam Media Sosial Twitter* Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 4 No.2 Agustus, 2017b.
- Habermas, J. *Political Communication in Media Society: Does Democracy Still Enjoy angnovis 10.1 – Fall 2009 Epistemic Dimension? The Impact of Normative Theory on Empirical Research*. *Communication Theory*, 16(4), 411-426. 2006. doi: 10.1111/j.1468-2885.2006.00280.x.
- Hill, David T & Krisna Sen.(2005). *The Internet in Indonesia's new democracy*.  
Oxon, England: RoutledgeCurzon
- Holmes, David. *Communication Theory: Media, Technology and Society*. London: Sage Publication, 2005

- Karlsen, Rune. Followers are opinion leaders: The role of people in the flow of political communication on and beyond social networking Sites. *European Journal of Communication* 1 – 18.2015. DOI: 10.1177/0267323115577305
- Khamis, Sahar. “Cyberactivism” in the Arab Spring: What Social Media Can and Can Not Do. *International Affairs Forum*. Vol 4, Issue 1, (2013).
- Laswell, H.H. *Propaganda Techniques in the World War*. New York: Knopf, 1927.
- Lilleker, Darren G. *Key Concepts in Political Communication*. Sage Publication: London, Thousand Oak, New Delhi, 2016.
- Lim, Merlyna. *The Internet, Social Network and Reform in Indonesia*. Di N. Couldry and J. Curran. *Contesting Media Power: Alternative Media in A Networked World*. Rowan & Littlefield. 2013
- Lim, Merlyna. *@crossroads: Democratization & Corporatization of Media in Indonesia*. USA: Participatory Media Lab & Ford Foundation, 2011
- McNair, Brian. *An Introduction to Political Communication*. London & New York: Routledge, 1995.
- Nugroho, Yanuar, dkk. *Mapping The Landscape of The Media Industry in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Centre for Innovation Policy and Governance, 2012.
- O’Reilly T. (2005). *What is Web 2.0 : Design patterns and business models for the next generation of software*. Available at: <http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>
- Tsagarousianou, R. *Electronic democracy: Rhetoric and reality*. *Communications: The European Journal of Communication Research*, 24 (2). (1999). pp. 189–208.
- Vedel, Thierry. *Political Communication in New Era: Political Communication in The Edge of Internet (Chapter 3)*. London & New York: Routledge, 2003.

Zheng, Yongnian & Guoguang wu. Information Technology, Public Space, and Collective Action in China. *Comparative Political Studies*, vol. 38 no. 5, june 2005 507-536

**Tentang Penulis**

Nurul Hasfi adalah Dosen Departemen Komunikasi,  
UniversitasDiponegoro.

# DAPATKAH WARGA ARGENTINA MENJADI PEMILIH PROGRAM? MENILAI PENGARUH PREFERENSI KEBIJAKAN DI KONDISI ARGENTINA MENGUNAKAN KECENDERUNGAN MEMILIH 1

MARIANA SENDRA •

PABLO ORTIZ

## RESUMEN

*Artikel ini diperiksa di mana media pemilihan untuk prinsipal partidos argentinos diorientasikan oleh preferensi program. A partir de una encuesta original online, use la 'propensión de voto' and realizamos a restrukturisasi de la matriz de datos en una matriz de datos 'apilada', según el método propuesto por van der Brug, van der Eijk y Franklin (2007). Centrándonos en la actual building coalicional del sistem partidos, integrada por dos bloques polarizados, de centro-izquierda y centro derecha, los análisis revelan que las preferencias programáticas contribuyen efectivamente al apoyo elektoral di Argentina. Menghadapibahwa dimensi ekonomi sangat penting untuk Frente de Todos, sementara yang meminta Juntos untuk Cambio parece adalah arus masuk untuk walikota yang berbeda dimensi. Di tengah-tengah koalisi ini, apoyo hacia el PJ y el PRO adalah prinsip utama panduan untuk motivasi ekonomi, sementara sosial kecil Anda menghasilkan lebih banyak periféricos dalam dimensi ini.*

**Klave palabras:** Argentina; Pilih program; Politik preferensi; Coaliciones

## PENDAHULUAN

Meskipun pertimbangan ekonomi umum dan khusus menjadi pengaruh kritis pada pemungutan suara Argentina

(Ratto 2013; Gervasoni & Tagina 2019), penelitian sebelumnya telah mengungkapkan pentingnya preferensi sosial ekonomi dan sosial budaya dalam menyusun kompetensi politik dan pembagian antara pendukung kekuatan politik utama di Argentina (Catterberg & Braun 1989; Alessandro 2009; Ostiguy 1997, 2009; Mora y Araujo 2011; Sendra 2022). Memang, penulis lain telah menunjukkan 'kesesuaian elit-massa', yang berarti korelasi kuat antara pendapat kebijakan rata-rata partisan massadan elit partisan di Argentina, Cile, dan Uruguay (Luna dan Zechmeister 2005), dan kiri-kanan orientasi secara khusus dapat mengkondisikan harapan kebijakan para pemilih partai konservatif di Argentina (Calvo & Murillo 2013).

Argentina adalah studi kasus yang menarik tentang pemungutan suara terprogram. Terlepas dari proses disartikulasi sistem partainya yang parah dari tahun 1990-an hingga 2001 (Roberts 2013), hubungan antara pemilih dan kekuatan politik tampaknya belum sepenuhnya terurai. Terutama sejak tahun 2015 dan seterusnya, mereka tampaknya semakin mengkristal di sekitar dua sistem utama representasi sosial dan politik, yang diekspresikan ke dalam dua koalisi elektoral yang terpolarisasi, satu kiri tengah dan satu kanan tengah, Frente de Todos (FdT) dan Juntos por el Cambio (JxC). Pada saat yang sama, keduakoalisi tersebut terdiri dari kekuatan politik dengan pandangan dan suara berbeda yang tidak selalu sejalan dengan isu sentral agenda publik.

Dalam hal ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sejauh mana dukungan elektoral untuk partai-partai utama Argentina didorong oleh preferensi kebijakan. Menggunakan data dari survei online asli, yang dilakukan di Argentina selama September 2020, kami berfokus pada apa yang disebut 'kecenderungan memilih' dan preferensi kebijakan

pemilih Argentina. Kami melakukan restrukturisasi matriks data asli menjadi matriks data 'tertumpuk', sesuai dengan metode yang diusulkan oleh vander Brug, van der Eijk dan Franklin (2007). Pendekatan metodologis ini memiliki beberapa manfaat dan memungkinkan untuk perbandingan sistematis. Selain itu, kami mengukur jarak programatik dan ideologis antara preferensi isu berbasis massa dan posisi partai, dengan mengandalkan Survei Perwakilan, Eksekutif, dan Partai Politik (PREPPS) (Wiesehomeier et al. 2021).

Hasil kami menyoroti peran pemungutan suara terprogram dalam ruang politik Argentina. Secara umum, jarak partai-pemilih relevan di hampir semua dimensi yang dipertimbangkan, kecuali kebijakan sosial dan transfer. Meskipun demikian, perbedaan penting muncul ketika melihat secara khusus pada partai dan koalisi.

Kami menemukan bahwa lingkungan ekonomi (deregulasi dan redistribusi) sangat penting untuk orientasi terhadap FdT, sementara dukungan untuk koalisi kanan-tengah, JxC, tampaknya dipengaruhi oleh sifat dimensi kebijakan yang lebih beragam. Terakhir, analisis intra-koalisi mengungkapkan perbedaan penting mengenai intensitas dimensi kebijakan di antara kekuatan politik. Di dalam Frente de Todos, kebebasan individu dan transfer lebih penting bagi Frente Renovador daripada Partido Justicialista. Di sisi lain, di Juntos por el Cambio, dimensi ekonomi kurang penting bagi pemilih UCR dibandingkan anggota koalisi lainnya.

Artikel ini disusun sebagai berikut. Setelah pengantar ini, kami menyajikan dan mengembangkan tinjauan teoretis dan argumen yang mendukung alasan mengapa penataan kembali terakhir dari sistem partai mungkin berkorelasi dalam hubungan partai-strukturasi programatik. Hipotesis juga dirumuskan dalam bagian ini. Pada bagian ketiga, kami menyediakan pemilihan kasus, variabel, dan model untuk menguji hipotesis ini. Kami kemudian menyajikan analisis multivariat, dan,

akhirnya, kami menyimpulkan dengan membahas implikasi dari temuan kami.

## **MENGAPA PENDUKUNG PIHAK ARGENTINA BISA PEMILIHPROGRAM**

Dalam paradigma pilihan rasional, pemungutan suara terprogram mengasumsikan bahwa atas dasar pasokan paket kebijakan partai, warga menghadiahi mereka dengan suara mereka. Menurut Kitschelt et al. (2010), akan ada pemungutan suara terprogram jika preferensi kebijakan pemilih serupa dengan yang diadvokasi oleh partai.

Literatur yang luas menjelaskan pemungutan suara dengan mempertimbangkan posisi partai dan preferensi individu (Downs 1957; Rabinowitz & Macdonald 1989; Merrill dan Grofman 1999). Sebagian besar penulis mengikuti, secara eksplisit atau implisit, teori pemungutan suara spasial Downs (1957) dan apa yang disebutnya 'model kedekatan', yang menurutnya individu lebih memilih partai yang lebih dekat dengan preferensi politik mereka sendiri. Hal ini biasanya dipelajari dengan mengidentifikasi, pada tingkat individu pada dimensi kiri-kanan, jarak ideologis antara penentuan posisi pemilih pada suatu isu (atau isu- isu) yang relevan dengan kampanye pemilihan dan posisi yang diperhitungkan oleh pemilih pada kandidat. pada masalah yang sama (Green & Hobolt 2008). Harapan teoretisnya adalah bahwa kemungkinan seorang pemilih akan mendukung seorang kandidat secara alami berkurang dengan adanya jarak ideologis di antara mereka. Dengan demikian, pemungutan suara terprogram terjadi ketika seorang pemilih memilih kandidat yang platform yang diumumkan secara publik paling mendekati preferensi kebijakan pemilih itu sendiri.

Meskipun banyak literatur telah mempertimbangkan

pemungutan suara preferensi kebijakan sejak studi mani dari Downs (1957), penelitian tentang Argentina belum cukup peka terhadap pendekatan ini, kecuali untuk beberapa karya lintas negara terkenal yang terutama berfokus pada kongruensi politik Amerika Latin. yang mencakup kasus Argentina (Luna & Zechmeister 2005; Herrera & Morales 2018) atau studi yang menganalisis sifat dimensi sikap warga dan pilihan partai untuk pemilu tertentu (Alessandro 2009; Cataife 2011; Schiumerini 2019; Sendra 2022). Schiumerini (2019) menunjukkan bahwa dalam kasus di mana pemilih sangat setuju dengan parameter rezim kebijakan, pemungutan suara berdasarkan penilaian kinerja menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada masalah valensi dan ketergantungan yang lebih tinggi pada masalah posisi.

Dalam kajian keselarasan politik, penelitian sebelumnya mengungkapkan tingkat 'kesesuaian kebijakan elit-massa' yang kuat di Argentina (Lupu dan Warner 2017, Herrera dan Morales 2018). Herrera dan Morales (2018) menemukan bahwa, meskipun memiliki sistem kepartaian yang kurang terlembaga, Argentina memiliki tingkat kesesuaian program yang lebih tinggi daripada Chile dan Uruguay, setidaknya dalam dua dimensi kebijakan yang menyusun kompetensi politik. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Argentina memiliki sistem pemilihan proporsional yang, dari perspektif kelembagaan, menghasilkan insentif untuk fragmentasi dan pencarian ruang programatik oleh para pemimpin dan partai (Herrera & Morales 2018).

Ketergantungan jalur hubungan partisan di Argentina juga dapat dijelaskan dengan lintasan panjang sistem partai. Menurut Bornschier (2019), sistem kepartaian di Amerika Latin yang menunjukkan

keselarasan pada tahun 1990-an adalah sistem di mana partai yang menantang telah mulai mempolarisasi sistem kepartaian beberapa dekade sebelumnya. Mengikuti lintasan inklusi dan polarisasi berkelanjutan, konflik di sepanjang dimensi negara-pasar disalurkan ke persaingan partai di negara-negara seperti Uruguay, Chile, dan Argentina, dan tertanam dalam identitas politik yang langgeng dan loyalitas partisan. Di Argentina, antagonisme Peronis/anti-Peronis sebenarnya mewakili perpecahan sektoral: Peronisme bersekutu dengan kelas pekerja perkotaan dan kelompok sosial lainnya, yang menarik segmen elit pedesaan yang melindungi ke arah anti-Peronisme (Bornschieer 2019).

Terlepas dari gerakan Peronis ke kanan dalam mengejar reformasi pasar di bawah Menem pada 1990-an dalam gerakan yang disebut Stokes (2001) sebagai 'alih kebijakan', hal ini tidak terlalu merusak perwakilannya dalam jangka pendek (Bornschieer 2019).

Ada konsensus luas bahwa (meningkatnya) ketergantungan Peronis pada strategi mobilisasi klien telah menghambat representasi dalam jangka panjang. Seperti yang ditunjukkan Calvo dan Murillo (2014, 2019), jaringan politik memainkan peran besar dalam menentukan ekspektasi distributif pemilih Argentina terkait PJ dan UCR. Selain itu, studi yang ada di Argentina tentang hubungan antara klientelisme politik dan pemungutan suara menunjukkan bahwa keterkaitannya lebih kompleks dari yang diharapkan. Dengan menggunakan data ekologis di tingkat kota, Nazareno, Stokes, dan Brusco (2006) menemukan bahwa distribusi barang yang bersifat klientelistik menegaskan kembali kesetiaan para pemilih yang setia; namun, itu tidak mempengaruhi suara lawan, dan mendorong pemilih marjinal untuk memilih menentang.

Menggunakan data tingkat individu, Lodola (2013) menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan dari pasokan barang dan penerimaan universal tunjangan anak terhadap probabilitas pemilihan Peronisme pada pemilihan presiden 2011.

Selain itu, sejak tahun 2003 ketika Peronisme kembali ke kiri di bawah kepemimpinan Néstor dan Cristina Kirchner, perbedaan

ideologis meningkat pada pemilu berikutnya, sementara hingga saat itu, Argentina memiliki tingkat polarisasi yang rendah (Singer 2016). Seperti yang ditunjukkan oleh D'Alessandro (2013), pada awalnya Peronisme memiliki sikap yang sangat mengatur ekonomi, yang berubah pada tahun 1989 selama hampir dua dekade, untuk kembali ke posisi yang lebih intervensionis dalam kampanye Cristina Fernández.

Munculnya partai Propuesta Republicana (PRO) pada periode yang sama tercapai, dalam aliansi dengan UCR dan Coalición Cívica (CC), sebuah alternatif kanan-tengah dengan pengembalian elektoral (Alessandro 2009). Menurut Anria & Roberts (2019), kemenangan koalisi yang dipimpin oleh Mauricio Macri dalam pemilihan presiden 2015 berarti penguatan penataan program persaingan politik kiri-kanan pasca-neoliberal. Memang, telah ditemukan bahwa identifikasi pada spektrum kiri-kanan telah menguat di Argentina sejak 2015, karena tren penurunan jumlah non-respons terhadap lokasi self-right-right (Lupu, Oliveros, & Schiumerini 2021). Ini bahkan lebih jelas dalam pemilu 2019, ketika ruang politik disejajarkan di sekitar poros persaingan dari kiri ke kanan, dengan dua koalisi antagonis (Frente de Todos dan Juntos por el Cambio) yang menyusun pasokan pemilu dengan cara yang jauh lebih jelas daripada di bawah sistem dua partai klasik Peronisme/ Unión Cívica Radical.

Strukturasi ini didasarkan pada faktor ideologis, adanya penyelarasan kembali sistem politik sepanjang sumbu kiri/kanan, dan faktor sosiologis, adanya basis sosial yang berbeda dalam hal sektor sosial ekonomi dan identitas kolektif (Anria dan Vommaro 2020). Bentuk sistem kepartaian ini, menurut kami, mungkin berkorelasi dalam hubungan partai yang terprogram. Berdasarkan asumsi bahwa pendukung partai politik Argentina dapat menjadi konsumen rasional di pasar pemilu, yang memandu keputusan pemungutan suara mereka berdasarkan preferensi kebijakan dan tanpa menyangkal pentingnya penjelasan alternatif, kami berharap bahwa 'voting kebijakan' dapat menjelaskan, ke sebagian besar, preferensi elektoral untuk partai politik Argentina (H1), sejalan dengan temuan sebelumnya (Alessandro 2009; Cataife 2011; D'Alessandro 2013; Sendra 2022).

Namun, dimensi kebijakan utama yang menyusun sistem partai dan masyarakat Argentina perlu dipertimbangkan. Studi tentang konflik distributif ekonomi di Amerika Latin telah menunjukkan bahwa, pada akhir abad ke-20, di negara-negara seperti Argentina, yang mengadopsi kebijakan kesejahteraan sosial yang relatif komprehensif selama periode ISI (Industri Substitusi Impor), para pemilih mampu mengkristalkan preferensi seputar pencapaian politik-ekonomi tertentu hal; oleh karena itu, ada persaingan terprogram yang sebagian besar tetapi tidak secara eksklusif terstruktur oleh preferensi saingan terhadap kebijakan ekonomi dan redistributif (Kitschelt et al. 2010). D'Alessandro (2013) menunjukkan bahwa ada konsensus tingkat tinggi di antara kelas politik Argentina tentang pentingnya masalah ekonomi, serta yang terkait dengan penyediaan layanan sosial oleh negara.

Meskipun dalam dekade terakhir, kepentingan baru dari

wacana politik yang sejalan dengan perdebatan moral dan hukum dan ketertiban dikonfirmasi (Cataife 2011; Tagina & Varet hingga 2013), kami berharap bahwa masalah kebijakan ini akan berada di bawah dimensi ekonomi. Singkatnya, kami ingin menguji ekspektasi bahwa dimensi kebijakan ekonomi (redistribusi, deregulasi, dan transfer, yang akan diperlakukan secara terpisah) memiliki kekuatan penjas yang lebih besar daripada dimensi kebijakan lainnya dalam menjelaskan dukungan elektoral untuk penawaran partai di Argentina (H<sub>2</sub>).

Bergerak lebih dalam ke analisis antar partai, kami berpendapat bahwa mungkin ada beberapa dimensi yang lebih menonjol bagi pemilih partai dengan rasionalitas terbatas daripada yang lain. Dengan demikian, kami juga mengharapkan beberapa perbedaan antara dua koalisi politik utama partai mengenai dampak dari dimensi kebijakan tertentu. Seperti yang telah kami sebutkan, pergeseran Peronisme ke kiri dengan posisi yang lebih statis membawa agenda sayap kiri dalam istilah sosiokultural juga. Isu-isu moral baru muncul dalam debat publik sebagai hasil dari serangkaian kebijakan yang dipromosikan oleh Peronisme untuk memperluas hak-hak minoritas<sup>1</sup>. Selain itu, sejak tahun 2003 dan seterusnya, masalah non-ekonomi lainnya dengan hasil pemilu mulai menjadi pusat perhatian: kejahatan atau ketidakamanan (Tagina & Varetto 2013). Cataife (2011) menemukan bukti kuat bahwa kebijakan kejahatan merupakan faktor yang signifikan secara statistik dalam pemilihan suara di seluruh kelompok pemilih di Argentina. Topik ini dibawa ke agenda terutama oleh PRO, yang sama seperti partai-partai kanan-tengah Amerika Latin lainnya saat ini (misalnya RN dan UDI di Chili), menjalani moderasi programatik dalam hal sosio-ekonomi, menerima bagian dari kebijakan distributif yang ditampilkan. selama beberapa tahun

terakhir, tetapi pada saat yang sama, menemukan alasan untuk memasang agenda konservatif yang lebih disukai dalam topik yang ditinggalkan oleh kaum kiri, terutama dalam masalah ketidakamanan (Monestier & Vommaro 2021; Luna & Rovira-Kaltwas ser2021). Dalam pengertian ini, PRO mengambil diskusi tentang cara pemerintah memerangi kejahatan lebih dekat ke posisi *mano dura* bahkan ketika ini bisa berarti mempengaruhi kebebasan individu. Pandangan berbeda tentang masalah migrasi juga terkait dengan kejahatan. Kanan-tengah berpendapat bahwa kedatangan imigran ilegal adalah salah satu faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan kejahatan atau konflik situasi sosial, seperti pendudukan tanah untuk menuntut perumahan (Vommaro et al. 2015; Vommaro 2019).

Mempertimbangkan hal di atas, yaitu keanggotaan isu yang ditekankan oleh masing-masing kekuatan politik, kami berharap dimensi kebebasan individu memiliki kekuatan penjelas yang lebih besar untuk partai kanan-tengah (PRO, UCR, dan CC) daripada untuk partai-partai kanan-tengah (PRO, UCR, dan CC).

Pada 2010, pernikahan sesama jenis disahkan; pada tahun 2012, undang-undang identitas gender disetujui, dan kemungkinan dekriminialisasi penanaman ganja di rumah juga diperdebatkan dengan hangat. Pada tahun 2021, Frente de Todos mendorong kongres nasional untuk mendekriminalisasi proyek aborsi, dan menyetujui pemberian identifikasi khusus kepada orang-orang non-biner. partai kiri-tengah (PJ dan FR) (H3). Di sisi lain, preferensi partai kiri-tengah (PJ dan FR) diperkirakan akan lebih kuat dipengaruhi oleh dimensi kebijakan sosial dibandingkan dengan partai kanan-tengah (PRO, UCR, dan CC) (H4).

Terakhir, kita harus mempertimbangkan bahwa,

mengingat fragmentasi sistem partai dan teritorialisasi pemungutan suara (Calvo 2005; Calvo & Escolar 2005), pemerintah koalisi menjadi fitur inheren sistem politik Argentina sejak tahun 2001 dan seterusnya (Tcach 2011; Clerici 2018). Dalam pemilu 2019 terbaru, terlihat jelas bahwa persaingan politik terus terstruktur dalam hal koalisi elektoral, melalui semacam 'koalisi bipartisan' atau 'bicoalitionism' (Sendra 2020; C2rou2z1).

Oleh karena itu, menarik juga untuk membedakan kepentingan relatif dari dimensi kebijakan dalam analisis intra-koalisi. Kedua koalisi yang saat ini memimpin kancah politik cukup heterogen dan mewakili suara politik yang berbeda. Sementara Frente de Todos dibentuk oleh gerakan Peronisme, yang meliputi Partido Justicialista, Kirchnerisme, Frente Renovador, dan sektor minoritas progresif lainnya, Juntos por el Cambio diintegrasikan oleh partai yang relatif lebih baru, PRO, partai seratus tahun UCR, dan CC (Coalición Cívica), perpecahan politik UCR yang dibuat pada tahun 2002. Apakah kita memahami koalisi tidak hanya sebagai instrumen pemilu dan pemerintah tetapi juga, dari perspektif sosiologis, sebagai konvergensi atau penggabungan antara aktor-aktor politik (Dini & Taenllaad1a9n9y9a), seperti paedraanpgakt abtephreafrearpenksoalisi alternatif bagi partai-partai individual yang membentuknya. Oleh karena itu, kami ingin menguji ekspektasi umum bahwa peran dan intensitas dimensi kebijakan bervariasi di antara partai-partai dalam setiap koalisi (H5), meskipun kami tidak dapat memprediksi ke arah mana variasi intensitas ini akan terjadi.

## **DESAIN DAN METODOLOGI**

Studi ini bertujuan untuk mengkaji ruang politik Argentina

dari sudut pandang orientasi pemilihan pemilih. Kami fokus pada dukungan pemilih kepada partai politik utama Argentina. Tabel 1 menunjukkan enam partai terpilih, yang semuanya saat ini terwakili di parlemen nasional. Semuanya adalah partai mapan yang memainkan peran kunci dalam sistem politik dan mencerminkan kepekaan ideologis utama di Argentina kontemporer. Selain itu, tabel ini menunjukkan koalisi elektoral tertentu, yang diperlukan untuk memahami peta politik Argentina dan temuan penelitian kami. Selain itu, persentase suara yang diperoleh untuk setiap koalisi pada pemilu 2019 lalu ditambahkan, menunjukkan bahwa Frente de Todos dan Juntos por el Cambio mengumpulkan hampir 90% pemilih. Terakhir, perlu disebutkan bahwa ini adalah koalisi yang telah disepakati sebelumnya, yang dipilih oleh warga negara dalam pemilihan. Namun, partai-partai seringkali mempertahankan kelompok parlemen mereka sendiri. Itulah alasan mengapa penting untuk menganalisis tidak hanya koalisi, tetapi juga partai.

Para Pihak	Koalisi dan suara (%) diperoleh pada tahun 2019
<i>Partido Justicialista (PJ)</i>	<i>Frente de Todos (FdT)</i>
<i>Frente Renovasi (FR)</i>	48.10
<i>Union Cívica Radical (UCR)</i>	<i>Juntos por el Cambio (JxC)</i>
<i>Propuesta Republicana (PRO)</i>	40.37
<i>Coalición Cívica (CC)</i>	<i>Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT)</i>
	2,16%

Sumber: elaborasi sendiri.

Data kami sebagian besar berasal dari survei asli Universitas Salamanca (Plaza Colodro et al. 2021) yang dilaksanakan secara online oleh perusahaan Netquest. Survei dilakukan selama September 2020 di Argentina dan mencakup berbagai variabel sosiodemografi dan sikap, biasanya digunakan untuk mempelajari perilaku pemilu. Memiliki N = 1003. Untuk menghindari bias dalam distribusi usia, jenis kelamin, pendidikan, dan distribusi wilayah responden, maka 1003 responden dipilih dengan menggunakan quota sampling (lihat detail di Lampiran Online).

Kami juga menggunakan Survei Perwakilan, Partai, dan Presiden Politik (PREPPS) (Wiesehomeier et al. 2021). PREPPS merupakan survei pakar yang memberikan informasi tentang posisi kebijakan 156 partai politik di 19 negara Amerika Latin periode 2018–2019.

Variabel dependen penelitian dioperasionalkan melalui apa yang disebut 'kecenderungan untuk memilih' (PTV). Dalam pertanyaan PTV, responden diminta untuk menunjukkan seberapa besar kemungkinan mereka akan memilih setiap partai politik dalam skala 0–10 (0 mewakili 'sama sekali tidak mungkin' dan 10 'sangat mungkin'). PTV semakin populer dalam Ilmu Politik, diterima sebagai indikator preferensi elektoral yang sangat baik karena manfaatnya (Paparo, De Sio, & Brady 2020).

Pada dasarnya, PTV memungkinkan untuk memaksimalkan N yang tersedia, karena hampir semua responden mengungkapkan pendapatnya untuk hampir semua pihak. Dengan demikian, pemilih yang sama secara bersamaan dapat memiliki probabilitas yang tinggi untuk memilih dua partai yang berbeda. Ini adalah keuntungan besar dibandingkan dengan

variabel 'voting recall' kualitatif tradisional, di mana partai-partai kecil memiliki N yang sangat kecil. Dalam pengertian ini, langkah-langkah PTV bukanlah pilihan elektoral, melainkan preferensi atau orientasi terhadap partai politik, yaitu, daya tarik elektoral bagi masing-masing partai. Selain itu, PTV memungkinkan untuk melakukan model regresi linier yang memiliki keunggulan analitis dibandingkan dengan model pilihan diskrit, terutama, logit dan multinomial logit model, secara tradisional diasosiasikan dengan pertanyaan 'voting recall' (van der Eijk et al. 2006).

Namun, pertanyaan PTV mentah (skala 0–10) dan matriks data itu sendiri mengalami transformasi. Secara khusus, kami melakukan metode yang kemudian diterapkan oleh beberapa penelitian (van der Eijk & Franklin 1996; van Der Brug et al. 2000; van der Brug & Fennema 2003, 2009; van der Brug et al. 2007; Ortiz et al. 2021) yang terdiri dari menumpuk matriks data. Dalam matriks 'tumpukan' baru ini, setiap kasus diwakili oleh kombinasi setiap responden dan jawaban atas pertanyaan PTV untuk masing-masing pihak (responden x PTVn...). Ketika matriks data ditumpuk sehingga setiap pemilih muncul sebanyak partai yang probabilitasnya telah diukur, pertanyaan yang dapat diajukan adalah 'apayang membuat suara sebuah partai menarik bagi pemilih? (Van der Brug & Fennema 2009). Untuk melakukan transformasi ini, kami menggunakan paket Stat PTVTOOLS (De Sio & Franklin 2011) (Lihat detail lebih lanjut tentang matriks data bertumpuk di Lampiran Online).

Kemudian, dengan menyusun matriks baru, kami fokus pada beberapa pernyataan item dari survei kami. Dalam pertanyaan-pertanyaan ini, responden harus menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan mereka terhadap isu-isu kebijakan tertentu

(skala 1– 5, di mana 1 = sangat setuju; 5 = sangat tidak setuju). Secara khusus, kami memilih enam item mengenai dimensi kebijakan yang berbeda. Tiga di antaranya terkait dengan isu ekonomi-distributif dan intervensi negara yang sangat penting dalam konteks Argentina: redistribusi (sikap terhadap kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dengan mendistribusikan kembali kekayaan), deregulasi (sikap terhadap intervensi negara dengan melindungi industri dalam negeri dan membebaskan pajak ekspor ke sektor pertanian), dan transfer (sikap terhadap bantuan negara untuk kelompok rentan sosial-pekerja). Kemudian, kami memasukkan dimensi kebijakan sosial, dengan sikap terhadap hak LGTB, aborsi, dan legalisasi narkoba), imigrasi (sikap terhadap dampak imigrasi di masyarakat); kebebasan individu, yang memanfaatkan sikap terhadap tindakan keras, termasuk rezim otoriter, untuk memerangi kejahatan. Untuk membangun enam dimensi kebijakan, yang kepentingannya telah diulas di bagian 2, kami menjalankan analisis faktorial eksplorasi dengan menggunakan serangkaian pernyataan. Kami menemukan bahwa semua item dimuat dalam faktor yang sama, dengan alfa Cronbach  $>0,4$ .

Secara paralel, kami mengekstraksi posisi enam partai politik utama Argentina (PJ, FR, UCR, PRO, CC, dan FIT) dalam enam dimensi kebijakan yang sama yang dijelaskan di atas menurut data dari PREPPS (Lihat susunan kata dan pencocokan pertanyaan pada Tabel OA.2). Setelah melakukan standarisasi skala respon untuk masing-masing dimensi pada kedua dataset (pemilih dan partai), kami menghitung jarak antara posisi responden dan partai politik pada masing-masing dimensi.

Seseorang dapat berargumen bahwa opsi terbaik untuk menguji model pemilihan kebijakan adalah dengan menghitung

jarak antara posisi responden dan persepsi mereka tentang posisi partai-partai dalam isu-isu spesifik.

Kami sepenuhnya setuju dengan poin ini. Namun, dalam penelitian kami hal ini tidak dimungkinkan karena keterbatasan data (survei tidak memiliki persepsi responden terhadap posisi para pihak). Seperti yang disarankan oleh sebelumnya.

Menurut penjelasan kebijakan pemungutan suara, semakin kecil jarak (atau, dengan kata lain, semakin besar kesepakatan antara pemilih dan partai), semakin tinggi kemungkinan untuk mendukung suatu partai. Benar bahwa penelitian sebelumnya berfokus pada keselarasan ideologis dan tematik antara pemilih dan partai (Luna & Zechmeister 2005; Otero Felipe 2017; Herrera & Morales 2018)<sup>4</sup>. Namun, memberikan gambaran yang kaya tentang pemungutan suara terprogram dengan membedakan dimensi kebijakan tertentu, selain menganalisis apakah posisi partai dan pemilih selaras, merupakan nilai tambah dari artikel ini. Kesimpulannya, jarak antara posisi responden dan posisi partai pada dimensi kebijakan merupakan variabel independen utama penelitian ini.

Selain jarak yang disebutkan di atas pada enam dimensi kebijakan, variabel dependen lainnya ditambahkan sebagai kontrol. Di satu sisi, kami menggunakan pertanyaan tentang penilaian umum situasi ekonomi (1 Sangat baik hingga 5 Sangat buruk), untuk mengoperasionalkan penjelasan 'pemilihan ekonomi'. Seperti yang diperdebatkan sebelumnya, kami memperkirakan bahwa pemilihan ekonomi mungkin memiliki efek kuat pada preferensi elektoral di Argentina sejalan dengan penelitian sebelumnya. Di sisi lain, kami mengoperasionalkan penjelasan 'pemilihan kelas' melalui tiga pertanyaan: pendapatan bulanan bersih (1 Tidak ada pendapatan hingga 11 Lebih dari

\$62.000), persepsi diri terhadap kelas sosial (mulai dari 1 kelas atas hingga 5 kelas bawah). kelas) dan pendidikan (1 sekolah dasar dan menengah/2 studi universitas). Kami selanjutnya mengontrol jenis hubungan massa partai lainnya dengan mempertimbangkan jarak antara pemilih dan partai pada dimensi yang berpusat pada rakyat. Variabel ini mengukur sikap yang mengacu pada persepsi orang sebagai entitas berbudi luhur yang memiliki karakteristik kunci dan memiliki keinginan rakyat yang jelas. Kami perlu menyertakan indikator ini karena wacana dan gagasan populis telah memainkan peran penting dalam pembentukan politik massa Argentina, dan fakta bahwa gagasan populis berhasil dalam konteks di mana perbedaan ideologis tidak ada dan partai tidak memiliki hubungan yang kuat dengan konstituen yang berpikiran sama (Bornschieer 2018).

Akhirnya, variabel sosiodemografis biasa pada jenis kelamin dan usia ditambahkan. Mengenai variabel independen yang jaraknya tidak dapat dihitung (yakni, semua kecuali enam yang mengacu pada dimensi kebijakan), kami mengikuti prosedur yang disarankan oleh van der Brug et al. (2007: 43-45). Kami melakukan transformasi linear dari variabel asli dengan menjalankan serangkaian regresi bivariat untuk memprediksi pertanyaan PTV untuk setiap variabel independen. Nilai prediksi regresi ini, dikenal sebagai *y-hats*, digunakan sebagai variabel independen baru. studi (Bakker, Jolly & Polk 2020; Cohen 2020), menggunakan ukuran eksternal posisi partai bisa menjadi alternatif yang valid. Juga, mengingat bahwa langkah-langkah berbasis ahli dan warga sangat berkorelasi (Bakker et al. 2015; Rohrschneider dan Whitefield 2012). Untuk menghitung jarak antara responden dan pihak, skor dibakukan.

Penelitian sebelumnya terutama mempelajari keselarasan

ideologis yang berfokus pada dimensi kiri-kanan. Dimensi kiri-kanan umum dapat dianggap sebagai dimensi super, yang berkorelasi dengan rangkaian masalah yang berbeda.

Dalam kasus kami, kami berpendapat bahwa membedakan isu kebijakan tertentu, alih-alih hanya berfokus pada kiri-kanan, merupakan nilai tambah dari artikel tersebut.

## HASIL

Tabel 2 menyajikan model regresi OLS<sup>5</sup> yang berbeda di mana PTV diprediksi oleh variabel independen yang dijelaskan di atas. Boneka untuk 24 provinsi Argentina telah ditambahkan untuk mengontrol perbedaan regional dan berpotensi menghilangkan variabel, sehingga menghilangkan penjelasan istimewa dari model. Kami juga memperkirakan model ini tanpa boneka provinsi, dan temuannya pada dasarnya sama (lihat model dengan koefisien boneka di Tabel OA.3). Koefisien beta standar digunakan untuk memungkinkan perbandingan langsung dari kekuatan variabel independen. Koefisien ini berkisar dari -1 hingga 1 dan menunjukkan efek dari variabel tertentu ketika sisanya tetap konstan.

Secara khusus, model 1 memperkirakan PTV untuk gabungan enam partai politik Argentina, sementara model 2 hingga 7 memperkirakan hal yang sama untuk partai secara terpisah (Lihat model tambahan untuk koalisi yang dipisahkan di Tabel OA.4). Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa variabel independen diciptakan secara induktif melalui transformasi linier. Variabel ini adalah variabel yang tidak mungkin atau tidak masuk akal untuk menghitung jarak antara responden dan pihak: evaluasi ekonomi, pendapatan, pendidikan, jenis kelamin, dan usia. Sebagai hasil dari transformasi ini, koefisien standar umumnya positif. Singkatnya,

tidak ada kesimpulan yang dapat diambil tentang arah tetapi hanya tentang intensitas efek.

Sementara beberapa orang mungkin berpendapat bahwa ini adalah batasan, ini memungkinkan kami untuk menguji hipotesis yang diajukan dengan benar dari sudut pandang desain penelitian kami. Selain itu, kesesuaian model secara umum cukup dapat diterima, menjelaskan antara 10% dan 20% varian variabel dependen.

Pertama, memeriksa model 1, kami mengamati bahwa pemilihan kebijakan secara efektif menyusun preferensi partai untuk enam partai utama Argentina. Dengan kata lain, dimensi kebijakan seperti imigrasi, redistribusi, kebebasan individu, dan deregulasi menjelaskan orientasi elektoral dalam sistem partai Argentina (saat mengendalikan variabel lain dari faktor sosiodemografi, evaluasi ekonomi, kelas sosial, dan sentrisme orang). Seperti yang diharapkan, semakin pendek jarak antara posisi responden dan posisi partai, semakin menarik partai tersebut. Untuk alasan ini, koefisien standar adalah negatif. Dengan demikian, model 1 sejalan dengan H1 yang menyatakan explanatory power of policy voting. Selain itu, usia dan evaluasi ekonomi adalah faktor dengan prediksi kekuatan preferensi partai terbaik dalam sistem partai Argentina (koefisien masing-masing 0,125 dan 0,164, signifikan pada tingkat  $<0,001$ ).

Selain hal di atas, H1 juga didukung oleh fakta bahwa dalam model terpisah untuk masing-masing pihak (model 2 sampai 7), pemungutan suara kebijakan tampaknya penting. Bagi semua pihak kecuali FR, setidaknya satu dimensi kebijakan adalah statisti Estimasi varian yang kuat dan opsi 'cluster' digunakan untuk menyesuaikan ketergantungan di antara observasi untuk responden yang sama. Dengan

demikian, setiap responden didefinisikan sebagai cluster yang terpisah. Secara signifikan. Singkatnya, hasil umumnya menunjukkan kekuatan penjelas dari model pemungutan suara kebijakan untuk menjelaskan preferensi partai di Argentina. Variabel lain (suara sosiodemografi atau ekonomi) juga signifikan dalam beberapa kasus. Tentunya, voting kebijakan tidak memainkan peran sendiri, tetapi bersama dengan determinan lainnya. Apa yang ingin kami gambarkan di sini adalah kekuatan penjelas dari pendekatan pemungutan suara kebijakan untuk memahami lingkup kompleks dari perilaku pemungutan suara (dan mengingat bahwa pendekatan ini belum diberikan perhatian yang cukup dalam kasus Argentina dan Amerika Latin dan, khususnya, menggunakan PTV sebagai variabel dependen).

Sekarang, kita beralih untuk meninjau sisa hipotesis mengenai peran spesifik dari dimensi kebijakan. Di satu sisi, H<sub>2</sub> menyatakan keunggulan dimensi ekonomi dibandingkan dengan dimensi kebijakan lainnya. Pertama, perlu dicatat bahwa posisi pada dimensi transfer tidak menjelaskan pemungutan suara dalam model mana pun, sementara redistribusi dan deregulasi jelas penting untuk keseluruhan sistem partai dan partai-partai secara terpisah. Sementara hipotesis ini memiliki dukungan empiris untuk redistribusi dan deregulasi dalam kasus PJ, PRO, CC, dan FIT, tidak memiliki dukungan untuk UCR dan FR.

Melihat secara terpisah pada partai politik yang berbeda, hasilnya menunjukkan dukungan parsial untuk hipotesis ini. Di sisi lain, dimensi kebebasan individu secara statistik signifikan untuk PRO dan CC, tetapi tidak untuk UCR. Sementara itu, seperti yang diharapkan, tidak ada signifikansi baik untuk PJ maupun FR. Hal ini konsisten dengan ekspektasi awal yang dibuat di H<sub>3</sub> mengenai relevansi yang lebih besar dari dimensi kebijakan ini untuk

memprediksi preferensi untuk kanan-tengah daripada kiri-tengah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang teoritis, literatur sebelumnya telah menunjukkan pentingnya dimensi kebebasan individu bagi hak ideologis baik pada sisi penawaran maupun sisi permintaan. Selain itu, dimensi kebebasan individu tampaknya signifikan dalam model 7, yaitu FIT kiri radikal, tetapi dengan besaran dan signifikansi yang lebih rendah. Semua ini menunjukkan bahwa dimensi ini penting untuk mengarahkan preferensi partai ke kanan-tengah dan kiri radikal. Posisi ideologis pemilih potensial untuk partai-partai ini berada diantipode ideologis. Namun, fokus penelitian kami bukan pada posisi 'mentah', melainkan pada jarak antara pemilih dan partai. Oleh karena itu, kami tidak memeriksa orientasi tetapi intensitas preferensi partai.

Selain itu, harapan yang dibuat di H4 tidak memiliki dukungan empiris, karena dimensi kebijakan sosial tidak lebih penting bagi partai kiri-tengah daripada partai kanan-tengah. Memang, dimensi ini tidak signifikan baik untuk PJ, FR, maupun koalisi sayap kiri FdT. Anehnya, dimensi kebijakan sosial memprediksi preferensi partai untuk CC (model 5). Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, model pada Tabel 2 menyajikan hasil yang memungkinkan perbandingan ad okulum dari perbedaan koefisien efek. Sifat bertumpuk dari matriks data kami memungkinkan kami untuk melangkah lebih jauh dan melakukan perbandingan yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan intra-koalisi.

Untuk tujuan ini, kami menjalankan empat model regresi termasuk beberapa istilah interaksi antara masing-masing pihak dan dimensi kebijakan, membandingkannya dengan efek utama koalisi (Tabel 3). Artinya, jika suatu dimensi kebijakan memiliki

efek yang berbeda untuk satu pihak dibandingkan dengan semua pihak lain yang mengintegrasikan koalisi, model regresi akan memuat interaksi antara masing-masing pihak, di satu sisi, dan variabel ini, di sisi lain. lainnya (van der Brug & Fennema 2003). Dengan kata lain, pada Tabel 2 kita hanya dapat mengetahui apakah “dimensi kebijakan X signifikan bagi pihak X”, sedangkan interaksi (Tabel 3) menunjukkan kepada kita apakah perbedaan antar pihak (efek yang lebih tinggi atau lebih kecil dari suatu dimensi kebijakan untuk suatu pihak mengenai seluruh koalisi) adalah signifikan. Model ini juga mengandung variabel independen lain yang disajikan dalam analisis sebelumnya (lihat Tabel 2), tetapi tidak ditampilkan di sini, karena kami hanya tertarik pada istilah interaksi. Model 8 mengacu pada koalisi FdT (diintegrasikan oleh PJ dan FR) dan menunjukkan interaksi antara FR dan dimensi kebijakan yang berbeda, serta efek utama. Untuk menginterpretasikan arti dari istilah interaksi, efek utama harus dipertimbangkan.

Sebagai contoh, efek utama koalisi mengenai dimensi redistribusi adalah  $-0,635$  (signifikan pada tingkat  $<0,001$ ), yang menunjukkan bahwa, seperti yang diharapkan, semakin kecil jarak dalam dimensi ini, semakin menarik pihak-pihak tersebut. Efek interaksi positif menunjukkan bahwa pemungutan suara kebijakan agak lebih lemah dalam dimensi ini untuk FR daripada PJ: efek tidak standar untuk FR adalah  $0,027(-0,608 + 0,635)$ . Selain itu, tanda-tanda negatif dari ketentuan interaksi mengenai kebebasan individu dan transfer mengindikasikan efek yang lebih kuat dari pemilihan kebijakan untuk FR dibandingkan dengan PJ. Kesimpulannya, model 8 mengilustrasikan perbedaan intra-koalisi yang ada dari preferensi pemilih partai.

Selain itu, sisa model pada Tabel 3 fokus pada intra-perbedaan koalisi JxC (diintegrasikan oleh UCR, PRO dan CC).

Koefisien signifikan negatif dari istilah interaksi UCR dan imigrasi terlihat (Model 9), karena menunjukkan pentingnya pemungutan suara kebijakan dalam dimensi ini untuk partai ini, daripada untuk koalisi lainnya. Dalam dimensi lainnya (kebijakan sosial, redistribusi, dan deregulasi), pemungutan suara kebijakan tampaknya lebih lemah untuk UCR daripada mitra koalisi lainnya (yaitu, koefisiennya positif). Selain itu, model 10 dan 11 memungkinkan kami mengamati perbedaan antara PRO dan CC dibandingkan dengan koalisi lainnya. Dalam hal ini, pemungutan suara kebijakan lebih lemah untuk PRO terkait kebijakan sosial dan imigrasi, sementara CC lebih kuat terkait kebijakan sosial. Hasil di sana menunjukkan fakta bahwa preferensi partai untuk UCR tampaknya lebih istimewa terkait dengan orientasi elektoralnya, karena ini adalah partai yang dapat ditemukan perbedaan yang lebih signifikan.

Singkatnya, pemeriksaan sistematis terhadap istilah-istilah interaksi telah menunjukkan sifat heterogen preferensi partai terhadap partai-partai yang berbeda dalam setiap koalisi. Seperti yang kita harapkan di H5, beberapa kesamaan dan perbedaan yang relevan dapat ditemukan di koalisi intra-tingkat. Dua koalisi utama Argentina menangkap kepekaan yang berbeda dalam hal sifat dan kekuatan pemungutan suara kebijakan.

Tabel 2. Regresi OLS yang menjelaskan preferensi partai untuk semuapihak (1) dan masing-masing pihak (2-7)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Semua pihak	PJ	UCR	PRO	CC	FR	BUGAR
Kebijakan sosial	0,002 (0,0449)	0,050 (0,187)	0,017 (0,172)	-0,014 (0,164)	- 0,111* *	0,012 (0,129)	-0,073 (0,101)
Imigrasi	- 0,056* *	- 0,033	- 0,186** *	0,025 (0,134)	-0,044 (0,164)	0,042 (0,126)	- 0,048 (0,110)
Redistribusi	- 0,049* *	- 0,124 **	0,068 (0,208)	- 0,198 ***	-0,050 (0,192)	0,010 (0,160)	-0,057 (0,107)
Kebebasan individu -0,042*		0,092 *	-0,048 (0,208)	- 0,129* *	-0,082 (0,192)	-0,059 (0,160)	-0,113* (0,107)
Deregulasi	- 0,095* **	- 0,103 **	-0,048 (0,185)	- 0,317* **	- 0,149 ***	-0,082 (0,117)	- 0,099 *
Transfer	- 0,106** *	- 0,144 ***	0,008 (0,209)	-0,043 (0,169)	0,021 (0,158)	-0,026 (0,150)	0,099 * (0,100)
	(0,0457)	(0,201)	(0,174)	(0,135)	(0,151)	(0,132)	(0,107)

People-centrism	0,095* **	0,185 ***	-0,053	0,020	-0,031	0,133**	0,021
	(0,0461 )	(0,131 )	(0,121)	(0,151)	(0,161)	(0,105)	(0,130 )
Kelas sosial	0,074** *	0,009	0,094*	0,061	0,138* **	0,121**	0,107 *
	(0,168)	(10.5 9)	(0,423)	(0,296 )	(0,237)	(2.108)	(1.366 )
Evaluasi ekonomi	0,164** *	0,291 ***	0,060	-0,016	0,056	0,220* **	0,095 *
	(0,0862 )	(0,123 )	(0,535)	(0,354 )	(0,603 )	(0,170)	(0,276 )
Pendapatan	0,027* *	0,039	0,003	0,019	-0,021	-0,012	0,076 *
	(0,365)	(0,46 3)	(1.880)	(1.145)	(1,754)	(4.122)	(0,728 )
Pendidikan	0,054** *	0,033	0,030	0,033	0,040	0,078	- 0,103*
	(0,225)	(6.89 6)	(0,897)	(0,372)	(0,416)	(0,940)	(26.8 6)
Perempuan	0,031* *	0,011	0,059	0,016	0,041	-0,037	0,031
	(0,268)	(1,435 )	(0,585)	(0,780 )	(0,470 )	(8,036)	(0,65 9)
Usia	0,125** **	0,046	0,162** **	0,024	0,152* **	0,021	0,168* **

Koefisien beta standar; Kesalahan standar yang kuat dalam tanda kurung

\*  $p < 0,05$ , \*\*  $p < 0,01$ , \*\*\*  $p < 0,001$

Tabel 3. Istilah interaksi untuk koalisi dan dimensi kebijakan. regresiOLS6.

	Mode	Kebijakan Redistribusi Imigrasi	Kebebasan individu	Transfer Deregulasi
Koalis	-	-	-	0,794**
<i>Frente de</i>			0,456	
Model <i>Efek utama -</i>	0,09	-	-	-0,669***
<i>Juntos</i>	0,352***	0,2518	0,9UCR X	

### KESIMPULAN

Artikel ini membahas sejauh mana pilihan partai mungkin didorong oleh 'preferensi kebijakan' dalam sistem partai Argentina. Literatur sebelumnya memberikan bukti yang mendukung pentingnya dimensi kebijakan untuk pilihan partai di Argentina tetapi terutama berfokus pada super-dimensi Peronisme/anti-Peronisme (Ostiguy 2009) atau menunjukkan dimensi yang relevan dalam pilihan partai dan strukturasi program kompetensi politik dalam beberapa tahun terakhir (Alessandro 2009; Cataife 2011; Luna & Rovira Kaltwasser 2021; Monestier & Vommaro 2021; Sendra 2022). Namun, studi-studi ini tidak membongkar efek pemungutan suara terprogram, karena mereka tidak melihat posisi partai politik dalam dimensi yang sama di mana preferensi pemilih diukur. Sebaliknya, dalam penelitian ini kami mempertimbangkan sikap pemilih dan partai politik yang mereka dukung dalam sejumlah dimensi dan menguji apakah jarak di antara mereka memengaruhi daya tarik elektoral mereka.

Dengan cara ini, kami benar-benar menilai apakah ada

hubungan programatik di Argentina antara pemilih dan partai yang berpotensi dipilih oleh pemilih tersebut. Singkatnya, dalam kendala yang ditimbulkan oleh data survei kami yang tersedia, hasilnya umumnya menunjukkan kekuatan penjelas model pemungutan suara kebijakan untuk menjelaskan preferensi partai di Argentina, bersama dan sesuai dengan penentu suara lainnya. Meskipun kita tidak dapat menyangkal pentingnya persepsi kinerja ekonomi dan kelas sosial dalam pemungutan suara, sangat mungkin untuk menganggap pemilih Argentina sebagai konsumen rasional di pasar elektoral yang memandu keputusan pemilihan mereka melalui mekanisme kognitif rasional.

Dalam model 8 kami membandingkan perbedaan di dalam Frente de Todos. Karena hanya ada dua partai yang membentuk koalisi ini, perbandingannya sebenarnya antara FR dan PJ (Partido Justicialista), meski nama PJ tidak muncul. Koalisi Juntos por el Cambio memiliki lebih dari dua partai, sehingga dalam hal ini setiap partai muncul sebanyak jumlah partai yang ada (model baru 9, 10 dan 11). Berfokus pada model partai secara keseluruhan, kami melihat bahwa jarak partai-pemilih relevan di hampir semua dimensi yang dipertimbangkan, kecuali kebijakan sosial dan transfer, yang menunjukkan bahwa pasokan politik mungkin tidak menghasilkan pesan yang berbeda pada tema-tema inidan, oleh karena itu, jangan menimbulkan efek terprogram yang akan menghubungkan mereka dengan preferensi pemilih.

Kami juga menunjukkan bahwa strukturasi sistem kepartaian berkorelasi secara programatik. Dua koalisi utama, kiri-tengah (FdT) dan kanan-tengah (JxC), menghadirkan pola hubungan perwakilan yang berbeda. Kami menemukan bahwa meskipun Peronisme (FdT) mempromosikan LGTB atau kebijakan aborsi, ia tidak mengaktifkan pemungutan suara terprogram dalam isu-isu ini, tetapi hubungannya dengan pemilih hanya

terfokus pada dimensi ekonomi (deregulasi dan redistribusi). Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa gerakan Peronisme ke kiri pada dimensi sosial budaya mungkin merupakan gerakan dari elit, yang tidak serta merta dibarengi dengan pergeseran pemilih ke arah penekanan pada isu-isu tersebut. Dari agensi, partai tersebut memutuskan untuk meningkatkan arti-penting pada tuntutan ini, tetapi di tingkat massa, hal ini tampaknya tidak ditiru. Dukungan untuk koalisi kanan-tengah, *Juntos por el Cambio*, tampaknya dipengaruhi oleh sifat dimensi kebijakan yang lebih beragam. Dalam pengertian ini, *JxC* akan lebih mirip dengan hak baru Amerika Latin yang berupaya menjangkau pemilih yang lebih luas, dengan mengaktifkan tidak hanya konflik distribusi tetapi juga bertujuan untuk memobilisasi masalah sosial budaya dan hukum dan ketertiban (Roberts 2014; Luna dan Ro vira Kaltawasser 2021). Untuk waktu yang lama, interpretasi persaingan politik di Argentina mengidentifikasi Peronisme sebagai kekuatan hegemonik yang dapat beradaptasi dengan berbagai platform ideologis yang menutupi kemungkinan strukturasi partisan-programatik di antara partai-partai. Namun demikian, munculnya tren Peronis sayap kiri, Kirchnerisme dan, setelah itu, pembentukan kekuatan kanan-tengah (PRO) dengan hubungan massa elektoral yang kuat adalah sesuatu yang baru dalam kasus Argentina, setelah memperkuat strukturasi programatik partai. - hubungan programatik massal antara dua koalisi utama yang memisahkan bidang politik antara kiri-tengah dan kanan- tengah.

Terakhir, analisis intra-koalisi mengungkapkan perbedaan penting mengenai peran dan intensitas dimensi kebijakan di antara mitra politik masing-masing koalisi. Wawasan *Frente de Todos* menunjukkan bahwa *Frente Renovador*, ruang perpecahan moderat dari Peronisme pada 2013, tampaknya aktif dalam

pemungutan suara terprogram dalam istilah yang sama dengan kanan-tengah. Kebebasan individu dan transfer lebih penting untuk Frente Renovador daripada untuk PJ, sedangkan redistribusi lebih penting untuk PJ daripada untuk FR. Di sisi lain, di Juntos por el Cambio, kami menemukan bahwa partai bersejarah, Unión Cívica Radical, adalah partai yang menunjukkan lebih banyak perbedaan dalam hal suara terprogram terkait sisa koalisi. Pemilih UCR tidak mendukung partai karena posisi programatiknya dalam konflik persaingan politik yang paling penting, yaitu konflik distribusi ekonomi. Peran ini tampaknya diduduki oleh PRO, mitra dengan bobot kepemimpinan terbesar dalam koalisi. Demikian pula, temuan bahwa UCR mengartikulasikan pemungutan suara terprogram tentang imigrasi benar-benar baru dan mungkin menunjukkan bahwa partai memosisikan dirinya dalam dimensi yang kepemilikannya kosong dan di mana calon pemilihnya menerima mereka.

Singkatnya, perbedaan-perbedaan intra-koalisi ini dapat menyiratkan bahwa jika partai-partai menanggapi preferensi pemilih mereka dengan serius, pembangunan konsensus dapat menjadi tugas yang sulit dan, dengan demikian, membahayakan kohesi koalisi. Dengan kata lain, perbedaan intra-koalisi memunculkan pertanyaan apakah perbedaan basis elektoral mitra koalisi berdampak pada hubungan politik di antara mereka. Utamanya, apakah meski berbeda-beda, partai-partai tersebut memutuskan untuk tetap bersatu agar mampu menang secara elektoral melawan koalisi lain, meski harus menghadapi dilema internal untuk menawarkan paket kebijakan yang berbeda kepada para pendukungnya. Ringkasnya, kami membuktikan bahwa dukungan elektoral di Argentina dapat dipandu oleh preferensi kebijakan, dengan dimensi ekonomi memainkan peran utama untuk seluruh pasokan partai seperti

yang telah ditunjukkan oleh literatur sebelumnya. Namun, dalam dua koalisi utama, pemilih PJ dan PRO sebagian besar didorong oleh motivasi terprogram dalam isu distribusi ekonomi, sementara mitra minoritas mereka lebih terpinggirkan dalam dimensi kebijakan ini.

Selain itu, kami menambahkan bahwa dimensi program sosiokultural penting bagi pemilih ruang politik kanan-tengah baru di Argentina, tetapi tidak bagi pemilih Peronis. Seperti yang telah kami sebutkan, kesimpulan ini memiliki keterbatasan. Mengingat sifat data yang ditumpuk dan transformasi linier dari variabel independen, efek arah tidak dapat disimpulkan. Namun, ini merupakan defisit implisit dari desain penelitian dan tidak menghalangi pencapaian tujuan awal.

Temuan kami memiliki beberapa implikasi dan menyarankan pertanyaan baru untuk penelitian masa depan. Akan sangat relevan untuk memasukkan kasus-kasus yang memungkinkan untuk menjelaskan apakah 'pemungutan suara kebijakan' juga unggul dalam kasus-kasus Amerika Latin lainnya. Secara keseluruhan, temuan kami menyarankan beberapa kunci metodologis dan teoritis untuk meningkatkan pemeriksaan mereka, seperti penggunaan kecenderungan untuk memilih. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengetahui seberapa besar kemungkinan responden mempertimbangkan untuk memilih partaitertentu, terlepas dari niat memilih mereka yang berbeda. Fokus komparatif ini akan memungkinkan penegasan kesamaan dan perbedaan lintas negara terkait peran dan intensitas pemungutan suara kebijakan di Amerika Latin.

## REFERENSI

- Alessandro, Martin. 2009. "Clivajes sociales, estrategias de los actores y systema de partidos: la competence política en la Ciudad de Buenos Aires (1995-2005)." *Revista SAAP* 3(4): 581–614.
- Anria, Santiago & Roberts, Kenneth M. 2019, 9 Oktober "Kiri Amerika Latin belum mati". Diperoleh dari Percakapan. [https://theconversation.com/the-latin-ameri-can-left- isnt- dead-yet-124385](https://theconversation.com/the-latin-american-left-isnt-dead-yet-124385)
- Anria, Santiago & Vommaro, Gabriel. 2020. "Di Argentina, sebuah "giro a la derecha" que no fue y el improbable regreso del peronismo de centro- izquierda". *Lebih Banyak Lokal* 40: 6–10.
- Bakker, Ryan, de Vries, Catherine, Edwards, Erica, Hooghe, Liesbet, Jolly, Seth, Marks, Gary, ... Vachudova, Milada A. 2015. "Mengukur posisi partai di Eropa: File tren survei pakar Chapel Hill, 1999– 2010." *Politik Partai* 21(1): 143–152. <https://doi.org/10.1177/1354068812462931>
- Bakker, Ryan, Jolly, Seth, & Polk, Jonathan. 2020. "Ketidaksesuaian multidimensi, ketidakpuasan politik, dan dukungan untuk partai-partai anti kemapanan." *Jurnal Kebijakan Publik Eropa* 27(2): 292–309. <https://doi.org/10.1080/13501763.2019.170153>
- Bornschieer, Simon. 2018. "Keberhasilan populis di Amerika Latin dan Eropa Barat: Penjelasan Ideasional dan berpusat pada sistem partai." Dalam *Pendekatan Ideasional terhadap Populisme*, diedit oleh Kirk A. Hawkins & Cristobal R. Kaltwasser. Routledge, 202–237. <https://doi.org/10.4324/9781315196923-10>
- Bornschieer, Simon. 2019. "Polarisasi dan Representasi Historis dalam Sistem Partai Amerika Selatan, 1900–1990." *Jurnal Ilmu Politik Inggris* 49(1): 153–179. <https://doi.org/10.1017/S0007123416000387>
- Calvo, Ernesto. 2005. "Argentina, pemilihan legislatif 2005: konsolidasi

- institucional kirchnerismo y territorialización del voto.”  
 Revista de Ciencia Política (Santiago) 25(2): 153–160.  
<https://doi.org/10.4067/S0718-090X2005000200007>
- Calvo, Ernesto & Escolar, Marcelo. 2005. *La Nueva Política de Partidos en Argentina*. Buenos Aires: Prometeo.
- Calvo, Ernesto & Murillo, Victoria. 2013. “Cuando los partidos políticos se encuentran con sus votantes: Un análisis de los vínculos políticos a través de las redes partidarias y las expectativas distributivas en Argentina y Chile.” *América Latina Hoy* 65: 15–44. <https://doi.org/10.14201/alh2013651544>
- Calvo, Ernesto & Murillo, Victoria. 2014. “Keterkaitan Partisan dan Pelaksanaan Kebijakan Sosial di Argentina dan Chile.” Dalam *Klientalisme, Kebijakan Sosial, dan Kualitas Demokrasi*, diedit oleh Diego A. Brun & Larry Diamond. John Hopkins University Press Baltimore, MA, 17–38.
- Calvo, Ernesto & Murillo, Victoria. 2019. *Politik Non-Kebijakan: Pemilihan Lebih Kaya, Pemilihan Lebih Miskin, dan Diversifikasi Strategi Pemilu*. Pers Universitas Cambridge.
- Cataife, Guido. 2011. “Model Pemilihan Suara Terintegrasi di Argentina, 2009.” *Politik dan Masyarakat Amerika Latin* 53(3): 115–140. <https://doi.org/10.1111/j.1548-2456.2011.00127.x>
- Catterberg, Edgardo & Braun, María. 1989. “¿Izquierda y derecha en la opinión pública argentina?”. *Kritik dan Utopia* 18: 1–11. Diambil dari <http://biblioteca.clacso.org.ar/ar/libros/critica/nro18/CATTER.pdf>
- Clerici, Paula. 2018. “Pengaruh dari dikotomi oficialismo/oposición sobre la congruencia de las coaliciones electores en Argentina.” *POSTData: Revista de Reflexión y Análisis Político* 23(1): 121–149.
- Cohen, Denis. 2020. “Antara strategi dan protes: Bagaimana tuntutan kebijakan, ketidakpuasan politik, dan insentif

- strategis penting bagi pemungutan suara sayap kanan.”  
 Penelitian dan Metode Ilmu Politik 8(4): 662–676.  
<https://doi.org/10.1017/psrm.2019.21>
- Cruz, Facundo. 2021. “Desequilibrada al bicoalicionismo de la fragmentacion regional. Penataan ulang sistem partisi argentino setelah terremoto.” Di Después del terremoto. Sistem politik argentino selama 20 tahun krisis tahun 2001, diedit oleh F. Cruz & G. Pérez Alfaro. CABA: Editor Cina, 70–96.
- D'Alessandro, Martin. 2013. “Platform partai di Argentina modern.” *América Latina Hoy* 65(65): 107–139.  
<https://doi.org/10.14201/alh201365107139>
- De Sio, Lorenzo & Franklin, Mark. 2011. PTVTOOLS: Modul Stata yang berisi berbagai alat untuk analisis PTV. Departemen Ekonomi Universitas Boston. Diambil dari <https://econpapers.repec.org/software/bocbocode/s457290.htm>
- Di Tella, Torcuato S. 1999. Aktor dan koalisi: elemen untuk una teoría de la acción política. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella- PNUD.
- Downs, A. (1957). Teori Ekonomi Demokrasi. New York: Harper dan Row.
- Gervasoni, Carlos & Tagina, M.Laura. 2019. “Menjelaskan Dukungan terhadap Petahana di Pilpres.” Dalam Kampanye dan Pemilihan dalam Demokrasi Berkembang: Argentina dalam Perspektif Komparatif, diedit oleh Noam Lupu, Virginia Oliveros, & Luis Schiumerini. Ann Arbor: University of Michigan Press, 114–135.
- Green, Jane & Hobolt, Sara B. 2008. “Memiliki agenda isu: Strategi partai dan pilihan suara dalam pemilu Inggris.” *Studi Pemilu* 27(3): 460–476. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2008.02.003>
- Herrera, Mario & Morales, Mauricio. 2018. “Congruencia programática en el Cono Sur. Argentina, Chile y Uruguay en perspectiva comparada.” *Opinión Pública* 24(2): 405–426.  
<https://doi.org/10.1590/1807-01912018242405>
- Kitschelt, Herbert, Hawkins, Kirk A., Luna, Juan P., Rosas, Guillermo, & Zechmeister, Eliza beth. J. 2010. "Sistem Partai

- Amerika Latin". Cambridge University Press Lodola, German & Seligson, Mitchell A. 2013. *Cultura política de la democracia en Argentina y en las Américas*, 2012: Hacia la igualdad de oportunidades. Buenos Aires: Universitas Cippec-Vanderbilt- Lapop.
- Luna, Juan P. & Zechmeister, Elizabeth. J. 2005. "Representasi politik di Amerika Latin studi tentang kongruensi elit-massa di sembilan negara." *Studi Politik Komparatif*, 388– 416. <https://doi.org/10.1177/0010414004273205>
- Luna, Juan P. & Rovira Kaltwasser, C. 2021. "Castigo a los oficialismos y ciclo político de derecha en América Latina." *Revista Uruguaya de Ciencias Políticas* 30(1): 135–156. <https://doi.org/10.26851/RUCP.30.1.6>
- Lupu, Noam, Oliveros, Virginia & Schiumerini, Luis. 2019. *Kampanye dan Pemilihan dalam Demokrasi Berkembang: Argentina dalam Perspektif Komparatif*. Pers Universitas Michigan.
- Lupu, Noam & Warner, Zach. 2017. *Kesesuaian dan representasi elit massa di Argentina*. Dalam *Malaise in Representation in Latin American Countries*, diedit oleh Alfredo Joignant et al. Springer, 281–302.
- Merril, Samuel & Grofman, Bernard. 1999. *Teori pemungutan suara terpadu: Arah dan kedekatan model spasial*. Pers Universitas Cambridge.
- Monestier, Felipe & Vommaro, Gabriel. 2021. "Los partidos de la derecha en América Latina tras el giro a la izquierda. Apuntes untuk agenda investigasi. Introducción al numero temático." *Revista Uruguaya de Ciencia Política* 30(1): 7–22.
- Mora y Araujo, Manuel. 2011. *Bipolar Argentina: Los vaivenes de la opinión pública(1983-2011)*. Buenos Aires: Sudamericana.
- Nazareno, Marcelo, Stokes, Susan & Brusco, Valeria. 2006. "Reditos y peligros elektorales del gasto público en la Argentina." *Desarrollo Economico* 46(181): 63–88. <https://doi.org/10.2307/4151101>
- Ortiz, Pablo, Ruiz, Antonia M. & González-Fernández, Manuel T. 2021. "Pemungutan

- suara ideologis untuk partai kanan radikal di Eropa.” *Acta Politik*. <https://doi.org/10.1057/s41269-021-00213-8>
- Ostiguy, Pierre. 1997. “Peronismo y antiperonismo : bases socioculturales de la identidad política en la Argentina.” *Revista de Ciencias Sociales* 6. Diperoleh dari <http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/1451>
- Ostiguy, Pierre. 2009. Tinggi rendahnya politik: ruang politik dua dimensi bagi perusahaan analisis ratif dan studi elektoral (no. 360).
- Otero Felipe, Patricia. 2017. “Congruencia ideológica en América Latina desde una perspectiva dinámica ¿continuidad o cambio?” Dalam *Percepciones y actores de la representación política en América Latina*, diedit oleh Leticia M. Ruiz Rodríguez. Barcelona: Huygens, 81–106.
- Paparo, Aldo, De Sio, Lorenzo & Brady, David. W. 2020. “Kesenjangan PTV: Ukuran baru identifikasi partai yang menghasilkan sikap partisan yang monoton dan mendukung analisis komparatif.” *Studi Pemilihan* 63. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2019.102092>
- Plaza C. Carolina, Wiesehomeier, Nina, Boscán, Guillermo, García D. Fátima, Sanz, M. Dolores, Gómez-Reino, Margarita, ... Felipe O. Patricia. 2021. Sikap populis dan preferensi politik. *Dataverse Harvard*. <https://doi.org/doi/10.7910/DVN/PNPYA7>
- Rabinowitz, George & Macdonald, Stuart E. 1989. “Teori arah pemilihan masalah.” *Ulasan Ilmu Politik Amerika* 83(1): 93–121.
- Ratto, M. Celeste. 30 tahun. *Revista SAAP* 7(2): 365–377.
- Roberts, Kenneth M. 2013. "Reformasi Pasar, Penyelarasan Programatis (De), dan Stabilitas Sistem Partai di Amerika Latin." *Studi Politik Komparatif* 46(11): 1422–1452. <https://doi.org/10.1177/0010414012453449>
- Roberts, Kenneth M. 2014. “Demokrasi, Pasar Bebas, dan Dilema Kanan di Amerika Latin”. Dalam *The Resilience of the Latin*

- American Right, diedit oleh Juan P. Luna & C. Rovira Kaltwasser. Baltimore: Johns Hopkins University Press Baltimore, MD, 25–47.
- Rohrschneider, Robert & Whitefield, Stephen. 2012. *Ketegangan Representasi: Bagaimana Partai Mewakili Pemilih yang Beragam di Eropa Barat dan Timur*. Oxford: Oxford University Press.
- Schiumerini, Luis. 2019. “Mandat Macri: Reformasi Struktural atau Kinerja Lebih Baik?” Dalam *Kampanye dan Pemilih dalam Demokrasi Berkembang: Argentina dalam Perspektif Komparatif*, diedit oleh Noam Lupu, Virginia Oliveros & Luis Schiumerini. Ann Arbor: University of Michigan Press, 136–161.
- Sendra, Mariana. 2020. “Elecciones 2019 en Argentina: ¿Hacia un bipartidismo de coaliciones entre peronismo y anti-peronismo?” Dalam *América Latina Vota (2017-2019)*, diedit oleh Manuel Alcántara S. Madrid: Tecnos, 25–61.
- Sendra, Mariana. 2022. “La naturaleza dimensional del voto en las elecciones argentinas de 2015.” *Estudios Sociológicos de El Colegio de México* 40(118): 7–46.  
<https://doi.org/doi:>  
<http://dx.doi.org/10.24201/es.2022v40n118.2102>
- Penyanyi, Matthew. 2016. “Polarisasi elit dan dampak elektoral dari penempatan kiri-kanan: Bukti dari Amerika Latin, 1995-2009.” *Kajian Penelitian Amerika Latin* 51(2): 174–194.  
<https://doi.org/10.1353/lar.2016.0022>
- Stokes, Susan. 2001. *Mandat dan Demokrasi: Neoliberalisme dengan Kejutan di Amerika Latin*. Kamera menjembatani University Press. Tagina, M. Laura, & Varetto, Carlos A. 2013. “Argentina: del apogeo elektoral a la inminencia dela crisis sucesoria.” *Revista de Ciencia Política (Santiago)* 33(1): 3–34.  
<https://doi.org/10.4067/S0718-090X2013000100001>
- Tcach, Cesar. 2011. “Pensar las coaliciones en la Argentina contemporánea.” *Tema dan Debat* 21: 43–52.
- van der Eijk, Cees, & Franklin, Mark. 1996. *Memilih Eropa? Para pemilih*

- Eropa dan nasional politik akhir dalam menghadapi persatuan. Ann Arbor: University of Michigan Press. Van Der Brug, Wouter, Fennema, Meindert & Tillie, Jean. 2000. "Partai anti-imigran di Eropa: Pemilihan ideologi atau protes?" *Jurnal Penelitian Politik Eropa* 37(1): 77– 102. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00505> van der Brug, Wouter, & Fennema, Meindert. 2003. "Protes atau arus utama? Bagaimana partai anti-imigran kacang euro berkembang menjadi dua kelompok terpisah pada tahun 1999."
- Jurnal Penelitian Politik Eropa* 42(1): 55–76. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.00074> van der Eijk, Cees, van der Brug, Wouter, Kroh, Martin & Franklin, Mark. 2006. "Memikirkan kembali raja variabel dependen dalam perilaku pemilih: Pada pengukuran dan analisis utilitas elektoral." *Studi Pemilu* 25(3): 424–447. <https://doi.org/10.1016/j.memilih.tud.2005.06.012>
- van der Brug, Wouter, van der Eijk, Cees & Franklin, Mark. 2007. *Perekonomian dan Kondisi Perekonomian Pemilu dan Perekonomian Pemilu di Lima Belas Negara*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Van der Brug, Wouter & Fennema, Meindert. 2009. "Basis dukungan partai kanan radikal di Uni Eropa yang diperbesar." *Jurnal Integrasi Eropa* 31(5): 589– 608. <https://doi.org/10.1080/07036330903145930>
- Vommaro, Gabriel. 2019. "De la construcción partidaria al gobierno: PRO- Cambios y los límites del "giro a la derecha" di Argentina." *Kolombia Internacional* 99: 91–120. <https://doi.org/10.7440/COLOMBIAINT99.2019.04>
- Vommaro, Gabriel, Morresi, Sergio & Belloti, Alejandro. 2015. *Mundo Pro. Anatomía de partido fabricado untuk ganar*. Buenos Aires: Planeta.
- Wiesehomeier, Nina, Penyani, Matthew & Ruth-Lovell, Saskia. 2021. *Survei Representasi Politik, Eksekutif, dan Partai*

Politik: Data dari Survei Pakar di  
18 Negara Amerika Latin, 2018-2019. PREPPS Latam V2.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.7910/DVN/JLOYIJ>

## **DUKUNGAN DARI POLITISI REPUBLIK DAPAT MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PADA PEMILU AS**

**Katherine Clayton<sup>1</sup> dan Robb Willer<sup>2</sup>**

### **Abstrak**

Sejak pemilihan presiden AS tahun 2020, persepsi tentang validitas hasil dan kepercayaan yang lebih luas pada proses pemilihan Amerika telah mencapai tingkat yang rendah secara historis di kalangan Partai Republik. Meskipun tren ini memiliki potensi konsekuensi yang berbahaya bagi stabilitas demokrasi, hanya ada sedikit penelitian tentang bagaimana keyakinan bahwa pemilu itu adil—dan kepercayaan pada proses pemilu secara lebih umum—dapat dipulihkan. Dalam eksperimen survei pradaftar ( $n = 2101$ ), kami menemukan bahwa melihat pesan nyata dari politisi Republik yang mempertahankan legitimasi pemilu 2020 meningkatkan kepercayaan pada hasil pemilu dan proses pemilu yang lebih luas di antara pemilih Republik, dibandingkan dengan kondisi kontrol netral atau pesan serupa dari politisi Demokrat. Efek ini secara statistik dimediasi oleh pergeseran persepsi pemilih terhadap opini elit Republik tentang pemilu 2020, yang menyoroti intervensi yang berpotensi berguna untuk upaya memulihkan kepercayaan pada pemilu di masa mendatang. Khususnya, paparan pesan dari politisi Republik yang menegaskan legitimasi pemilu tidak secara signifikan mengurangi dukungan untuk Partai Republik, yang menunjukkan bahwa politisi Republik yang mendukung hasil pemilu 2020 mungkin tidak akan mendapat reaksi balik dari para pemilih.

### **Kata kunci**

Isyarat elit, legitimasi pemilu, polarisasi

### **Pengantar**

Kelangsungan hidup sistem demokrasi pemerintahan bertumpu pada transfer kekuasaan secara damai, dengan pihak yang kalah dalam pemilu mengakui kekalahan kepada pihak yang menang (Levitsky dan Ziblatt, 2018). Ketika kepercayaan pada pemilu dan rasa hormat terhadap hasilnya terguncang, sistem demokrasi melemah dan mungkin mundur menuju pemerintahan otoriter atau otoriter (Anderson et al., 2005). Di Amerika Serikat, kepercayaan dan keyakinan pada pemilu berada pada titik terendah sepanjang masa di kalangan pemilih Republik, Meskipun bukti tidak mendukung tuduhan Donald Trump tentang penipuan pemilih (Eggers et al., 2021), kampanyenya selama berbulan-bulan untuk merusak kepercayaan pada penghitungan suara tahun 2020 telah mendorong ketidakpercayaan yang meluas pada hasil pemilu, salah persepsi yang luas tentang prevalensi penipuan di proses pemilu Amerika, dan berkurangnya rasa hormat terhadap norma-norma demokrasi terkait pemilu di antara para pendukungnya (Clayton et al., 2021; Pennycook dan Rand, 2021).

Menurunnya kepercayaan pada pemilu di kalangan pendukung kandidat yang kalah terdokumentasi dengan baik di AS (Sances dan Stewart, 2015), tetapi kesenjangan antara persepsi Partai Republik dan Demokrat bahwa pemilu 2020 adil adalah rekor tertinggi, dan penolakan luas untuk menerima Joe Biden sebagai pemenang yang sah bertahan lebih lama dari biasanya (Griffin dan Quasem, 2021). Apa yang dapat mengembalikan kepercayaan pada sistem pemilu Amerika? Di sini, kami menyajikan hasil dari uji eksperimental pertama dari sebuah intervensi yang dirancang untuk meningkatkan kepercayaan pada legitimasi pemilu 2020 di kalangan Partai Republik. Buah literatur yang luas menunjukkan bahwa isyarat dari partisan elit dapat

membentuk opini tentang kebijakan public.

	Republican Cue	Democrat Cue
Video screenshot		
	<b>Pat Toomey (Republican–Pennsylvania) Senator</b>	<b>Bernie Sanders (Democrat–Vermont) Senator</b>
Example text	"Counting absentee ballots, and counting mail-in ballots, is not fraud." –Senator Rick Santorum (Republican–Pennsylvania)	"The 2020 election was 'the most secure in American history.'" –Senator Amy Klobuchar (Democrat–Minnesota)
	Republican leaders are speaking up. Only legally cast votes were counted.  "There is simply no evidence of any kind of widespread fraud." –Senator Pat Toomey (Republican–Pennsylvania)	Democratic leaders are speaking up. Only legally cast votes were counted.  "How do you deal with a massive effort to undermine American democracy?" –Senator Bernie Sanders (Democrat–Vermont)

*Gambar 1. Kutipan dari rangsangan eksperimental. Responden secara acak ditugaskan kesalah satu kondisi perawatan di bawah ini atau kondisi kontrol. Video dan teks lengkap disertakan dalam SI.*

Di sini, kami mengeksplorasi apakah isyarat elit juga dapat membentuk kepercayaan warga negara terhadap institusi demokrasi—sebuah sentimen subyektif tentang keandalan dan kepercayaan aparat pemilu negara dan individu yang mengarahkannya. Norma demokrasi di AS secara tradisional mengatasi kepentingan partisan yang dapat memotivasi elit untuk menolak kekalahan pemilu. Pemilu 2020, bagaimanapun, mengungkapkan bahwa norma-norma ini rapuh ketika beberapa elit di partai yang kalah menarik kepatuhan teHrhaadsailpnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah elit lain selanjutnya dapat menyelamatkan kepercayaan pemilu dengan dukungan mereka sendiri. Kami berhipotesis bahwa paparan isyarat elit partisan yang

menegaskan legitimasi pemilu 2020 akan meningkatkan persepsi Partai Republik tentang legitimasi pemilu (Hipotesis 1), dan kepercayaan mereka pada proses pemilu Amerika secara lebih umum (Hipotesis 2), relatif terhadap baik kondisi kontrol netral atau kondisi isyarat elit out-partisan.

### **Rancangan studi**

Dalam eksperimen survei pradaftar,<sup>1</sup> sampel 2101 peserta Partai Republik secara acak ditugaskan untuk melihat video pendek dan bagian teks yang berisi pernyataan nyata dari politisi Republik yang menegaskan hasil pemilu 2020 (lihat Gambar 1; video lengkap dan teks disertakan dalam Tambahan Informasi (SI)), konten serupa dari politisi Demokrat, atau kondisi kontrol netral.<sup>2,3,4</sup> Kami kemudian mengajukan tiga pertanyaan tentang persepsi mereka tentang legitimasi pemilu 2020 (misalnya, Seberapa yakin Anda bahwa suara secara nasional dihitung dengan benar dalam pemilu 2020?) dan tiga pertanyaan tentang kepercayaan mereka terhadap proses pemilu Amerika secara lebih umum (misalnya, Sejauh mana Anda memercayai pemilu di negara ini?), masing-masing diukur pada skala 9 poin, yang kami rata-ratakan untuk membuat skala komposit untuk setiap hasil setelah memastikan bahwa skala tersebut diskalakan bersama melalui analisis faktor (lihat SI untuk detailnya).

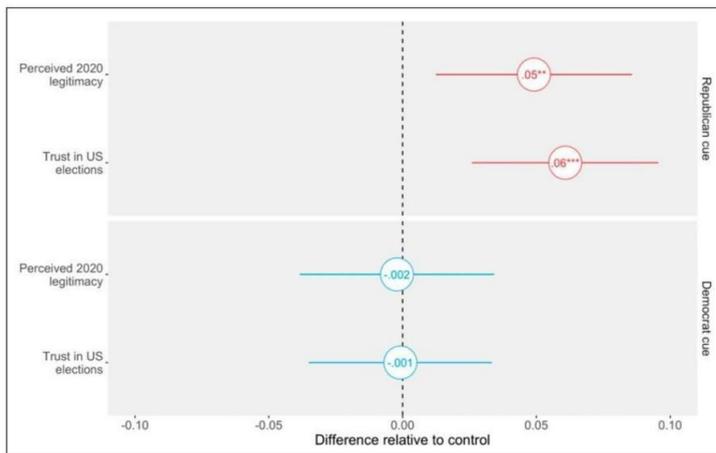
### **HASIL**

Kami menguji hipotesis utama kami menggunakan regresi OLS yang telah didaftarkan sebelumnya dengan kesalahan standar HC<sub>2</sub> yang kuat (heteroskedastisitas-konsisten), yang sesuai untuk percobaan acak. Kami menggunakan kondisi kontrol netral sebagai garis dasar dan menyertakan kontrol demografis dasar (usia, jenis kelamin, ras, pendidikan, dan pendapatan) dalam model kami. Kami juga menghitung efek marjinal untuk menguji perbedaan antara kondisi isyarat Republik dan Demokrat.

Hasil utama kami ditampilkan pada Gambar 2. Konsisten dengan hipotesis kami yang telah didaftarkan sebelumnya, isyarat Republik dalam peningkatan legitimasi yang dirasakan dari pemilu 2020 relatif terhadap kedua isyarat Demokrat ( $b = 0,051$  pada skala 0–1,  $SE = 0,019$ ,  $t = 2,77$ ,  $p = .006$ ) dan kondisi kontrol netral ( $b = 0.049$ ,  $SE = 0.019$ ,  $t =$

2.63,  $p = .009$ ). Isyarat Republik juga meningkatkan kepercayaan dalam proses pemilu Amerika relatif terhadap isyarat Demokrat ( $b = 0,062$ ,  $SE = 0,018$ ,  $t = 3,47$ ,  $p < .001$ ) dan kontrol ( $b = 0,061$ ,  $SE = 0,018$ ,  $t = 3,42$ ,  $p < .001$ ).

Khususnya, kami tidak menemukan bukti bahwa pemaparan isyarat Demokrat menyebabkan serangan balik (yaitu, penurunan kepercayaan pada pemilu), menguatkan penelitian yang menunjukkan bahwa reaksi mungkin lebih jarang dari yang diperkirakan (Guess and Coppock, 2018).



Gambar 2. Efek perlakuan rata-rata dari isyarat elit Republik terhadap kepercayaan pada pemilu.

Perkiraan yang ditampilkan di dalam lingkaran adalah koefisien regresi OLS yang diukur pada skala 0–1; garis di kedua sisi adalah 95% CI. Panel atas menunjukkan perkiraan efek isyarat Republik pada kedua hasil; panel bawah menunjukkan perkiraan efek isyarat Demokrat. Kondisi kontrol netral adalah baseline. Model mencakup kontrol demografis. Pada kelompok kontrol netral, legitimasi rata-rata yang dirasakan pada tahun 2020 adalah 0,33 dan kepercayaan pada pemilu AS adalah 0,30 (lihat SI untuk tabel

regresi penuh).

Kami selanjutnya memeriksa mekanisme kausal di balik hasil kami. Setelah treatment, kami meminta peserta untuk melaporkan persepsi mereka tentang persentase politisi Republik yang percaya pemilu 2020 dilakukan secara adil. Sehubungan dengan kontrol, isyarat Republik meningkatkan persepsi ini ( $b = 12,18$  pada skala 0-100,  $SE = 1,40$ ,  $t = 8,73$ ,  $p < .001$ ). Memang, persepsi pendapat elit Republik tentang pemilu sepenuhnya memediasi pengaruh isyarat Republik pada kedua hasil tersebut. Rata-rata efek mediasi kausal (yaitu, efek tidak langsung dari mediator) bahkan lebih besar daripada efek langsung, pada 0,09 [0,07, 0,11] untuk persepsi legitimasi dan 0,08 [0,06, 0,10] untuk kepercayaan, dengan kedua estimasi tersebut sangat signifikan secara statistik. ( $p < 0,001$ ; lihat SI untuk diskusi tentang asumsi ketidaktahuan berurutan dalam desain kami dan analisis sensitivitas).

Hasil ini menunjukkan bahwa efek pengobatan kemungkinan besar didorong oleh pergeseran pandangan peserta terhadap opini elit Republik, dengan peserta percaya bahwa persentase yang lebih tinggi dari elit Republik mendukung hasil pemilihan sebagai hasil dari intervensi. Kami melakukan serangkaian analisis eksplorasi untuk memeriksa apakah hasil kami dimoderasi oleh langkah-langkah pra-perlakuan dari kesukaan Trump, identifikasi sosial sebagai seorang Republikan (Huddy et al., 2015), atau kekuatan keberpihakan dan tidak menemukan bukti sistematis tentang efek moderasi di mana pun. case (semua  $p > 0,18$ )—hasil yang patut diperhatikan, diberikan perbedaan mendasar pendapat antara koalisi pemilih Republik (Peters, 2021). Hasil kami menunjukkan bahwa isyarat elit

Republik bisa mempengaruhi sikap di antara berbagai kelompok Republik.

Terakhir, kami melakukan analisis eksplorasi tambahan untuk melihat apakah isyarat Republik berdampak pada kesukaan terhadap Partai Republik. Kami menemukan sedikit bukti bahwa itu menurunkan dukungan partai yang lebih luas relatif terhadap kontrol netral ( $b = 0,005, SE = 0,012, t = 0,40, p = 0,69$ ) atau isyarat Demokrat ( $b = 0,021, SE = 0,012, t = 1,75, p = 0,08$ ). Perhatikan bahwa isyarat Republik versus kontras kontrol yang kami perkirakan kira-kira setengah poin persentase dan secara statistik tidak signifikan — bisa dibilang merupakan perbandingan yang lebih bermakna secara substantif di sini karena pemungut cukai Re memiliki sedikit pengaruh atas isyarat terkait pemilu dari Demokrat dan karena elit Demokrat kemungkinan besar untuk mempromosikan pesan-pesan yang menegaskan pemilu terlepas dari apa yang dikatakan Partai Republik tentang pemilu. Kami melakukan serangkaian uji ekuivalensi eksplorasi (Lakens, 2017) untuk  $p < 0,05$  dengan asumsi varian yang tidak sama untuk menguji ketepatan efek nol ini. Berdasarkan pengujian ini, kami dapat mengatakan dengan keyakinan 95% bahwa dalam sampel kami, isyarat Partai Republik tidak akan menurunkan kesukaan terhadap Partai Republik lebih dari 2,6 poin persentase relatif terhadap kontrol  $[0,026, 0,012]$  atau 3,8 poin persentase relatif terhadap kontrol. Isyarat Demokrat  $[0,038, 0,002]$ . Secara umum, ini memberikan bukti awal bahwa Partai Republik tidak akan kehilangan dukungan signifikan jika politisi Republik secara terbuka menegaskan pemilihan tersebut. Legitimasi, meskipun kami mencatat bahwa bahkan penurunan dukungan yang sangat kecil pun dapat memengaruhi hasil pemilu yang ketat. Analisis eksplorasi efek pada hasil lainnya termasuk kesukaan Trump dan

identifikasi sosial sebagai seorang Republikan sama-sama nihil.

### **Diskusi**

Hasil ini memiliki beberapa implikasi penting. Pertama, kami menyajikan intervensi pertama yang kami sadari yang secara efektif meningkatkan kepercayaan pada hasil pemilu 2020 di kalangan pemilih Republik, yang menunjukkan bahwa politisi Republik memiliki kekuatan untuk memengaruhi kepercayaan pendukung mereka pada pemilu. Namun, dengan tidak adanya dukungan semacam itu, hasil kami menyiratkan bahwa kampanye advokasi yang menyoroti dukungan elit Republik yang ada terhadap hasil pemilu dapat membantu memulihkan kepercayaan pemilu. Temuan kami juga mengundang penelitian di masa depan untuk memeriksa apakah jenis dukungan lain termasuk pesan dari Demokrat yang lebih moderat daripada yang ditampilkan dalam eksperimen kami, seruan bipartisan, atau dukungan dari sumber nonpolitik—dapat juga meningkatkan kepercayaan pada pemilu.

Kami juga menunjukkan bahwa isyarat elit Republik meningkatkan kepercayaan pada pemilu dengan memperbarui persepsi pemilih tentang pendapat elit Republik tentang masalah tersebut. Ini penting karena menunjukkan bahwa skeptisisme tentang validitas penghitungan suara mungkin kurang berakar pada keyakinan yang dipegang teguh dan tak tergoyahkan tentang administrasi pemilu daripada mengikuti isyarat dari para pemimpin Republik terkemuka. Tentu saja, temuan ini juga meningkatkan kemungkinan bahwa keyakinan integritas pemilu cukup cair sehingga pemaparan berturut-turut ke lingkungan informasi nyata yang saat ini cenderung menyertakan isyarat yang melemahkan legitimasi pemilu dapat mengurangi efek isyarat penegasan pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa elit dalam

politik dan media yang berusaha untuk memperkuat demokrasi harus menyoroti para pemimpin Republik yang telah memilih untuk berdiri untuk menegaskan hasil pemilu, dan isyarat tersebut mungkin perlu disampaikan dengan dosis tinggi dan/atau sering dari waktu ke waktu. untuk menjadi efektif. Penelitian tambahan harus mengeksplorasi hipotesis ini.

Terakhir, kami menawarkan bukti bahwa paparan sederhana terhadap pesan dari para pemimpin Republik yang menegaskan hasil pemilu tidak menurunkan dukungan untuk Partai Republik, yang menunjukkan bahwa politisi Republik mungkin tidak menghadapi biaya pemilu yang signifikan jika mereka memilih untuk secara vokal menyetujui hasil pemilu 2020.

Meskipun demikian, kami tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa serangan langsung terhadap kandidat dari Partai Republik yang menegaskan legitimasi pemilu dari elit terkemuka lainnya yang terus merusak hasilnya akan berdampak pada dukungan publik. Misalnya, Anggota Kongres dari Partai Republik Liz Cheney menghadapi reaksi yang signifikan dari Partai Republik setelah dia secara terbuka menolak klaim Donald Trump tentang pemilihan tersebut. Selain itu, kami tidak mengukur hasil yang berhubungan langsung dengan pemilihan kembali, yang dapat memotivasi Partai Republik lebih dari peringkat kesukaan partai (misalnya, Arceneaux dan Truex, 2022). Efek dari retorika penegasan pemilu pada dukungan publik untuk partai dan calon kandidat merupakan jalan penting untuk penelitian tambahan.

Secara keseluruhan, hasil kami menyiratkan bahwa elit Republik memiliki kekuatan untuk membantu memulihkan persepsi legitimasi elektoral di antara pendukung mereka. Tanpa intervensi

semacam itu, persepsi ini dapat bertahan atau bahkan memburuk di antara orang Amerika, khususnya Republikan. Ketidakpercayaan yang berkelanjutan terhadap pemilu berisiko menimbulkan kecurigaan terhadap hasil pemilu di masa depan—sebuah dasar bagi para pemimpin untuk menolak hasil pemilu, yang membahayakan stabilitas sistem demokrasi Amerika.

### **Terima kasih**

Kami berterima kasih kepada Sophia Pink, Joe Mernyk, Brendan Nyhan, dan Ethan Porter atas umpan balik yang bermanfaat. Kami juga berterima kasih kepada Chrystal Redekopp dan asisten peneliti sarjana di Lab Polarisasi dan Perubahan Sosial Universitas Stanford atas dukungan mereka yang membantu penelitian ini. Pernyataan kepentingan yang bertentangan Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

### **Pendanaan**

Penulis mengungkapkan penerimaan dukungan keuangan berikutnya untuk penelitian, kepenulisan, dan/atau publikasi artikel ini: Kami berterima kasih kepada Pusat Filantropi dan Masyarakat Sipil Stanford atas pendanaan penelitian ini.

### **Bahan Tambahan**

Tambahan untuk artikel ini tersedia online. Catatan

1. Kami melakukan *praregistrasi eksperimen survei* kami di *Open Science Framework* pada 21/9/21 (<https://osf.io/4t2sq/>) dan menerima persetujuan dari *Stanford University Research Compliance Office* (Protokol #32506). Studi ini dilakukan dari 9/21/21 hingga 9/28/21, dengan peserta Partai Republik direkrut secara bersamaan dari *CloudResearch* dan dari panel *Amazon Mechanical Turk* yang sebelumnya direkrut oleh

- penulis dengan beberapa pemeriksaan untuk kualitas dan perhatian peserta (lihat SI untuk perincian) .
2. Kami tidak menemukan bukti gesekan diferensial dengan eksperimen kondisi; lihat SI untuk detailnya.
  3. Responden dalam kondisi kontrol netral diberikan video plasebo atau kontrol tanpa informasi. Berdasarkan prapendaftaran kami, kami tidak menemukan perbedaan antara kedua ketentuan tersebut dan membuat grup netral/ kontrol gabungan untuk digunakan sebagai ketentuan dasar kami.
  4. Kami memilih rangsangan Partai Republik berdasarkan ketersediaan, mengingat dukungan elit Partai Republik terhadap hasil pemilu 2020 relatif jarang. Untuk Demokrat, kami berusaha menemukan pernyataan nyata yang cocok dengan pernyataan dari Partai Republik dalam hal nada dan panjangnya (lihat SI untuk detail lebih lanjut tentang proses pemilihan perawatan kami). Namun, kami tidak dapat memastikan bahwa individu atau pesan tertentu yang digunakan dalam penelitian kami tidak mendorong hasil kami. Kami mendorong penelitian yang mengacu pada isyarat partai elit lainnya bahkan mungkin hipotetis untuk memeriksa kemampuan generalisasi dari temuan kami.
  5. Kami juga menyajikan hasil eksplorasi pada individu, hasil yang tidak diskalakan dalam SI, yang secara substantif identik dengan hasil yang menggunakan skala komposit. Kami berterima kasih kepada penampil ulang anonim atas saran ini.

## Referensi

- Anderson CJ, Blais A, Bowler S, dkk. (2005) *Persetujuan Pecundang: Pemilu dan Legitimasi Demokratis*. New York, NY: Oxford University Press.
- Arceneaux K dan Truex R (2022) Donald Trump dan kebohongan.
- Pennycook G dan Rand DG (2021) Meneliti keyakinan salah tentang Akan Datang, Perspektif

Politik.

Bisgaard M and Slothuus R (2018) Elit partisan sebagai pelakunya? Bagaimana isyarat partai membentuk kesenjangan persepsi partisan. *Jurnal Ilmu Politik Amerika* 62(2): 456–469.

Clayton K, Davis NT, Nyhan B, dkk. (2021) Retorika elit dapat merusak norma- norma demokrasi. *Prosiding National Academy of Sciences* 118(23):e202412511.

Druckman JN, Peterson E and Slothuus R (2013) Bagaimana polarisasi partisan elit mempengaruhi pembentukan opini publik.

*Ulasan Ilmu Politik Amerika* 107(1): 57–79.

Eggers AC, Garro H and Grimmer J (2021) Tidak ada bukti penipuan pemilih sistematis: panduan klaim statistik tentang pemilu 2020. *Prosiding National Academy of Sciences* 118(45): e2103619118.

Griffin R dan Quasem M (2021) Crisis of Confidence: Perbedaan Pemilu 2020. *Kelompok Studi Pemilih*. Tersedia di: <https://www.voterstudygroup.org/publication/crisis-of-confidence> (terakhir diakses 27 Desember 2022).

Tebak A dan Coppock A (2018) Apakah informasi kontra-sikap menyebabkan serangan balik? Hasil dari tiga percobaan survei besar.

*Jurnal Ilmu Politik Inggris* 50: 1497–1515.

Huddy L, Mason L and Aaroe L (2015) Keberpihakan ekspresif: keterlibatan kampanye, emosi politik, dan identitas partisan. *Ulasan Ilmu Politik Amerika* 109(1): 1–17.

Lakens D (2017) Tes kesetaraan: primer praktis untuk uji-t, korelasi, dan meta- analisis. *Ilmu Psikologi Sosial dan Kepribadian* 8(4): 355–362.

Levitsky S dan Ziblatt D (2018) Bagaimana Demokrasi Mati. New York, NY: Mahkota. penipuan pemilih setelah pemilihan presiden 2020. *Tinjauan Misinformasi Harvard Kennedy School* 2(1): 1–19.

Peters JW (2021, 21 Januari) Tiga tipe Partai Republik yang diciptakan Donald Trump. The New York Times. Tersedia di: <https://www.nytimes.com/2021/01/21/us/politics/trumprepublican-party.html> Sances MW and Stewart C III (2015) Keberpihakan dan kepercayaan dalam penghitungan suara: bukti dari pemilu nasional AS sejak 2000. Studi Pemilu 40: 176–188.

# Pengaruh identifikasi partai dan isyarat partai terhadap sikappopulis

Diogo Ferrarij

## Abstrak

Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang pemimpin populis telah muncul di banyak negara demokratis, termasuk Amerika Serikat. Studi sebelumnya berpendapat bahwa retorika populis penting untuk dukungan elektoral pemimpin karena publik memiliki sikap populis, yang diaktifkan dalam konteks kegagalan pemerintahan demokratis atau krisis ekonomi. Makalah ini menyelidiki arah kausal yang berlawanan dan berpendapat bahwa dukungan rakyat terhadap ide-ide populis dapat menjadi efek daripada penyebab dukungan elektoral pemimpin. Orang-orang yang mendukung kandidat karena afiliasi partai kandidat atau posisi kebijakan cenderung mendukung atau menentang pesan populis atau anti- populis jika mereka mengetahui bahwa kandidat dari partai yang mereka identifikasi mendukung pesan tersebut. Makalah ini menyelidiki argumen dengan eksperimen yang secara acak memberikan pesan (anti-)populis dan isyarat tentang kandidat yang mendukung pesan tersebut. Eksperimen menunjukkan bahwa identifikasi partai pemilih sangat memengaruhi dukungan untuk pesan populis dan antipopulis.

Kata kunci:

*Populisme, sikap populis, perilaku politik, identifikasi partai, desain eksperimental*

**Pengantar**

Makalah ini menyelidiki apakah isyarat partisan mempengaruhi dukungan pemilih untuk pesan populis. Ia bertanya: Apakah dukungan pemilih untuk retorika anti-kemapanan dan orang-sentris populis merupakan efek dari sikap terhadap pemberi pesan? Pertanyaan ini penting karena gelombang pemimpin populis mendapatkan tempat di banyak negara demokratis dalam beberapa dekade terakhir, dan dukungan elektoral mereka tumbuh di banyak negara (Rooduijn et al., 2019), termasuk Italia (Erisen et al., 2021), Spanyol (Marcos-Marne 2020), Austria (Müller 2004), Jerman (Weisskircher 2020), dan negara-negara lain di Eropa, Asia, dan Amerika Latin (Albertazzi dan McDonnell 2007; Hawkins dan Rovira Kaltwasser 2017). Di Brasil, kandidat populis konservatif sayap kanan Jair Bolsonaro memenangkan pemilihan presiden 2018 setelah menerima lebih dari 50 juta suara. Di Amerika Serikat, Donald Trump memenangkan pemilihan presiden 2016 setelah kampanye yang dipenuhi elemen populis (Oliver dan Rahn 2016; Norris dan Inglehart 2019; Hawkins dan Littvay 2019). Media berita menyebut fenomena ini sebagai “badai populisme” (Legorano dan Mesco 2017), dan keilmuan tentang politik populis telah tumbuh secara eksponensial dalam beberapa tahun terakhir (Hunger dan Paxton 2021). Keilmuan itu termasuk perdebatan tentang apakah kebangkitan pemimpin populis, terutama yang terkait dengan ideologi sayap kanan, ke posisi kekuasaan dalam pemerintahan merupakan ancaman bagi demokrasi liberal karena retorika anti-elit, eksklusif, dan seringkali otoriter pemimpin populis. (Rodrik 2018; Mansbridge dan Macedo 2019). Karena pemimpin populis menggunakan pemilihan untuk naik ke posisi pemerintahan, pertanyaan yang mendesak adalah apakah pemilih mendukung pemimpin ini karena retorika populis pemimpin atau, sebaliknya,

jika dukungan untuk fitur non populis dari pemimpin ini misalnya, karena loyalitas partai pemilih—membuat orang bersimpat dengan ide-ide populis yang mereka sebar. Studi ini berfokus pada pertanyaan terakhir.

Masalah dengan arah kausal menjadi jelas ketika kita mempertimbangkan definisi populisme modern dalam literatur. Mudde (2017) mendefinisikan populisme sebagai ideologi “berpusat tipis”. Definisi ideasional tersebut menangkap beberapa aspek inti dari manifestasi modern populisme, yang menyatakan bahwa populisme terdiri dari tiga elemen: sentrisme rakyat, anti-elitisme, dan pandangan Manichean. People centrism adalah gagasan bahwa “rakyat”, yang secara samar-samar didefinisikan dalam retorika populis, adalah berbudi luhur dan satu-satunya sumber kekuatan yang sah, dan pemimpin populis mengklaim sebagai perwujudan dari kehendak “rakyat” itu. Anti-elitisme adalah anggapan bahwa elit politik, ekonomi, dan intelektual korup dan mementingkan diri sendiri.

Akhirnya, kedua elemen ini digabungkan dengan pandangan Manichean tentang masyarakat, yang menambahkan muatan moral pada konflik “rakyat versus elit” dan menggambarkan politik sebagai perjuangan antara orang-orang baik yang berbudi luhur melawan elit korup yang mementingkan diri sendiri. Berdasarkan definisi tersebut, seorang pemimpin politik dianggap populis jika retorikanya mengandung ketiga unsur tersebut (people-centrism, political Manichaeism, dan anti-elitism), terlepas dari posisi kebijakannya (misalnya anti-imigrasi, nasionalisme, konservatisme, atau liberalisme ekonomi) atau keanggotaan dukungan publik untuk pemimpin Pemisahan konseptual antara ciri-ciri populis “inti” (sentrisme rakyat, anti-elitisme, dan pandangan Manichean) dan gagasan klasik tentang

posisi ideologi atau kebijakan (misalnya, anti-imigrasi dan konservatisme) merupakan kontribusi penting dari literatur terkini, dan juga hadir dalam definisi alternatif populisme (Ostiguy 2017; Mansbridge dan Macedo 2019; Weyland 2021). Para sarjana telah

menunjukkan bahwa partai dan pemimpin dari berbagai orientasi ideologi dari paling kiri ke tengah (populis valensi) dan paling kanan telah mengadopsi elemen populis dalam retorika mereka (Maret 2017; Ivaldi et al. 2017; Zulianello 2020). Di AS, ini telah digunakan oleh Demokrat dan Republik sepanjang sejarah pemilu AS. Pada beberapa tahun pemilu, unsur populis dalam pidato kandidat presiden tampak dominan di kalangan kandidat Demokrat, sementara di tahun-tahun lainnya, kandidat dari Partai Republiklah yang paling banyak menggunakan elemen populis dalam pidatonya (Bonikowski dan Gidron 2016).

Konsep populisme modern dan pemisahan analitisnya antara populisme dan gagasan klasik ideologi (kiri-kanan, konservatisme- liberalisme) memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang dukungan populis. Jika seseorang menerima pemisahan itu, ditangkap oleh definisi ideasional, maka orang harus menyimpulkan bahwa populisme penting untuk dukungan elektoral para pemimpin sejauh orang mendukung ide-ide yang berpusat pada rakyat, anti-elitis, dan Manichean dalam retorika populis.

Banyak penelitian mengikuti pemahaman dan penekanan mengapa elemen populis dari retorika pemimpin, lebih tepatnya, populis. Studi terbaru mencakup bukti dari negara-negara Eropa (Akkerman et al. 2017; Geurkink et al., 2020; Loew and Faas 2019; Marcos-Marne et al., 2020), AS (Hawkins dan Littvay 2019), dan negara-negara demokrasi lainnya di sekitar dunia (Hieda et al.

2021). Beberapa studi ini berpendapat bahwa sikap populis memoderasi pengaruh posisi isu pada perilaku memilih dan menarik pemilih ke pemimpin populis bahkan jika yang pertama tidak setuju dengan beberapa posisi kebijakan yang terakhir. Artinya, “beberapa pemilih yang jauh dari posisi isu partai populis mungkin masih tertarik dengan partai-partai ini jika mereka memiliki sikap populis yang kuat” (Van Hauwaert dan Van Kessel 2018, hlm.86).

Menurut literatur tersebut, sikap populis diaktifkan dalam konteks kegagalan pemerintahan demokratis yang dikaitkan dengan kolusi elit pemerintahan (yang mementingkan diri sendiri) (Hawkins et al. 2020). Ini termasuk kasus krisis ekonomi dan korupsi pemerintah (Hawkins et al. 2020). Secara garis besar, perspektif ini mengatakan bahwa orang mendukung pemimpin populis karena orang itu sendiri begitu sikap populis mereka diaktifkan oleh konteks populis, dan bahwa pemimpin populis berhasil secara elektoral karena mereka mengeksplorasi kecenderungan populis ini di kalangan publik dengan mengadopsi retorika populis. Salah satu batasan dari argumen ini adalah bahwa mereka tidak mempertimbangkan beberapa aspek penting dari pembentukan sikap publik yang ditekankan oleh literatur perilaku politik, termasuk identifikasi partai. Seperti Campbell et al. (1960, p.133) menyatakan mengenai pemilih AS, “identifikasi dengan partai memunculkan layar persepsi yang melaluinya individu cenderung melihat apa yang menguntungkan bagi orientasi partisannya.” Khususnya dalam konteks AS, telah ditunjukkan bahwa identifikasi partai memengaruhi sikap orang-orang di berbagai ranah, termasuk sikap terhadap berbagai isu kebijakan (Barber dan Pope 2019). Seperti yang ditunjukkan oleh

Bartels (2002) , “bias partisan dalam persepsi politik memainkan peran penting dalam melanggengkan dan memperkuat perbedaan pendapat yang tajam antara Demokrat dan Republik.”

Berdasarkan literatur bias partisan, saya mengusulkan penjelasan alternatif untuk asal mula dukungan publik terhadap ide-ide populis, dan saya mempertimbangkan dua perangkat sikap publik. Yang pertama adalah dukungan publik terhadap pesan populis. Argumennya adalah bahwa orang-orang, khususnya di AS, cenderung setuju dengan ide-ide populis karena pemimpin yang mereka sukai atau partai yang mereka kenal mengadopsi retorika populis. Lebih tepatnya, dukungan terhadap pesan-pesan kerakyatan adalah akibat dari dukungan masyarakat terhadap suatu partai atau tokoh politik, bukan penyebabnya. Argumen ini mengarah pada hipotesis isyarat partisan berikut: H1: Pemilih yang mengidentifikasi diri sebagai Republik (Demokrat) lebih cenderung setuju dengan pesan populis atau anti-populis ketika pesan tersebut berasal dari kandidat Partai Republik (Demokrat). H2:Efek itu lebih kuat di antara partisan yang kuat.

Argumen intinya adalah bahwa pemilih mendukung atau menentang ide-ide tertentu ke arah identifikasi partai mereka, dan berdasarkan isyarat partisan yang diterima pemilih tentang dukungan pemimpin partai untuk ide-ide tersebut (Barber dan Pope 2019; Bartels 2002). Argumen tersebut memperkirakan bahwa seorang pemilih Republik (Demokrat) menentang pesan populis atau anti-populis jika itu berasal dari seorang pemimpin Demokrat (Republik), tetapi mendukung pesan yang sama jika diberitahu bahwa itu didukung oleh seorang pemimpin Republik (Demokrat).

Kita dapat berhipotesis bahwa bias partisan semacam itu

dapat memengaruhi tidak hanya dukungan untuk pesan (anti) populis tertentu, tetapi juga sikap populis pemilih secara lebih umum. Oleh karena itu, saya juga mengevaluasi hipotesis di atas dengan menggunakan sikap populis sebagai variabel dependen, bukan pesan populis. Artinya, keberpihakan mengarah pada sikap anti populis atau populis jika kandidat partai yang disukai pemilih mendukung ide anti populis atau populis. Argumen ini mengarah pada dua hipotesis: H3: Pemilih menunjukkan sikap populis atau anti-populis untuk setuju dengan posisi partai yang mereka identifikasi.

H4 : Pemilih menunjukkan sikap populis atau anti populis untuk tidak setuju dengan posisi partai yang ditentanginya.

Perhatikan bahwa ini pada dasarnya berbeda dari argumen literatur sebelumnya, yang menyatakan bahwa sikap populis diaktifkan oleh fitur kontekstual aktual, seperti representasi (Mair 2002; Kriesi 2014), ekonomi, atau krisis korupsi (Hawkins et al. 2020). Alternatifnya, argumen di sini adalah bahwa sikap populis publik dapat muncul bahkan jika ekonomi sedang meningkat, korupsi tidak menonjol, atau krisis representasi partai tradisional tidak ada, seperti yang terjadi pada

pemilihan Trump tahun 2016. Saya berpendapat bahwa orang-orang yang mendukung kandidat karena alasan yang bukan terutama retorika populis kandidat, seperti afiliasi partai kandidat, atau posisi kebijakan mereka tentang imigrasi atau konservatisme sosial, dapat cenderung bersimpati dengan retorika populis kandidat.

Jika hipotesis ini benar, mereka memiliki implikasi penting bagi politik populisme. Mereka mempertanyakan apakah sikap populis merupakan faktor yang relevan di balik keberhasilan pemilihan pemimpin populis baru-baru ini (Hawkins et al. 2020;

Van Hauwaert et al.,2018). Jika ada bukti bahwa sikap populis adalah efek dari dukungan terhadap pemimpin populis, dan yang terakhir dijelaskan oleh preferensi ideologi pemilih atau identifikasi partai, maka hal itu menimbulkan pertanyaan tentang kepentingan relatif sikap populis untuk menjelaskan hasil paling penting yang bisa dibilang tidak diragukan lagi. memotivasi pengembangan konsep itu, yang merupakan keberhasilan pemilihan pemimpin populis baru-baru ini. Namun, perhatikan bahwa fokus artikel ini adalah pada efek keberpihakan, tetapi meskipun ada efek kuat dari isyarat partisan, bukan berarti populisme tidak berpengaruh. Artinya, ini tidak berarti bahwa sentimenpopulis, setelah dipicu oleh keberpihakan atau faktor lain, tidak dapat lebih meningkatkan dukungan elektoral pemimpin populis atau bahwa mekanisme ini tidak dapat beroperasi secara bersamaan atau dalam urutan terbalik.

### **Desain penelitian**

Saya menguji hipotesis menggunakan eksperimen survei yang memanipulasi jenis pesan yang diterima responden (populis versus anti- populis) dan isyarat tentang pendukung pesan tersebut. Pesan populis dan antipopulis yang digunakan dalam eksperimen ini didasarkan pada penelitian ilmiah tentang isi retorika pemimpin

populis di Eropa dan AS (Hawkins 2009; Hawkins dan Littvay 2019; Hawkins et al., 2019). Responden ditugaskan secara acak untuk menerima salah satu pesan berikut:

### **Pesan populis**

Rakyat tahu apa yang terbaik untuk negeri ini. Pemerintah harus melakukan apapun untuk menjadi suara rakyat, dan menyingkirkan elit korup yang mendominasi pemerintahan kita.

### **Pesan “Anti-populis”**

Seorang presiden yang baik harus bergabung dengan perwakilan lainnya, mendengarkan spesialis, dan berkompromi untuk melakukan yang terbaik bagi negara ini, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan rakyat.

Selain pesan, responden ditugaskan secara acak untuk menerima isyarat partisan. Sementara satu kelompok perawatan diberi tahu bahwa Trump mendukung pesan tersebut, yang lain diberi tahu bahwa Biden melakukannya. Kelompok kontrol menerima

pesan tetapi tidak ada isyarat partisan tentang pendukung pesan apa pun. Untuk menguji H1 dan H2, survei kemudian menanyakan apakah responden mendukung atau menentang gagasan dalam pesan tersebut. Harapan teoretisnya adalah pemilih Demokrat akan mendukung pesan populis atau anti-populis ketika mereka menerima isyarat bahwa Biden mendukung pernyataan tersebut, tetapi menentang pesan tersebut ketika Trump mendukung pernyataan tersebut. Dengan kata lain, sikap terhadap pesan (populis atau anti-populis) harus bergerak berdasarkan

identifikasi partai pemilih dan isyarat partisan yang mereka terima, bukan konten populis dari pesan tersebut. Tabel 1 merangkum kelompok perlakuan dan ekspektasi teoretis. Uraian lengkap soal ada di Materi Pelengkap.

Tabel 1. Kelompok perlakuan dengan pengacakan isyarat partisan dan pesan (anti)populis serta ekspektasi teoretis terhadap tanggapan pemilih Demokrat dan Republik.

Isyarat partisan	Pesan	Ekspektasi Teoretis	
		pemilih Demokrat	Pemilih Republik
Tidur	Pernyataan populis	Sikap anti-populis	Sikap populis
	Pernyataan anti-populis	Sikap populis	Sikap anti-populis
	Pernyataan populis	Sikap anti-populis	Sikap anti-populis

Tabel 1. Kelompok perlakuan dengan pengacakan isyarat partisan dan pesan (anti)populis serta ekspektasi teoretis terhadap tanggapan pemilih Demokrat dan Republik.

Variabel dependen utama dalam penelitian ini adalah apakah pemilih mendukung atau menentang pesan populis atau antipopulis tergantung pada isyarat partisan yang mereka terima. Selain itu, untuk pemeriksaan kekokohan dan perbandingan dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada penyebab sikap populis (Hawkins dan Rovira Kaltwasser 2017) atau pengaruhnya terhadap dukungan pemimpin populis (Hawkins et al. 2017; Geurkink et al., 2020; Akkerman et al. 2014; Hunger and Paxton 2021), analisis diulangi dengan menggunakan sikap populis sebagai variabel dependen.

Ukuran sikap kerakyatan mengikuti rekomendasi dalam Silva et al. (2018), Castanho Silva dkk. (2020), Akkerman dkk. (2014), dan Wuttke et al. (2020). Subdimensi dari konsep ideasional populisme rakyat-sentrisme, anti-elitisme, dan pandangan Mani chean—diukur menggunakan tiga pertanyaan masing-masing pada skala Likert lima poin. Tiga pertanyaan yang mengukur people-centrism adalah: “Politikus harus selalu mendengarkan dengan seksama masalah rakyat” (ppl1); “Politisi tidak harus menghabiskan waktu di antara orang biasa untuk melakukan pekerjaan dengan baik” (ppl2), dan; “Kehendak rakyat harus menjadi prinsip tertinggi dalam politik negara ini”

(hal.3). Untuk anti-elitisme, pernyataannya adalah: “Pemerintah dijalankan oleh beberapa kepentingan besar yang menjaga diri mereka sendiri” (ant1); “Pejabat pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk berusaha memperbaiki kehidupan masyarakat,” (ant2), dan; “Cukup banyak orang yang menjalankan pemerintahan yang bengkok” (ant3). Untuk mengukur pandangan Manichean responden, survei tersebut menyatakan: “Anda dapat mengetahui apakah seseorang itu baik atau

buruk jika Anda mengetahui politik mereka” (pria1); “Orang-orang yang saya tidak setuju secara politik tidak jahat” (man2), dan; “Orang-orang yang saya tidak setuju secara politik salah informasi” (man3). Item kedua dari setiap grup (ppl2, ant2, dan man2) diberi kode terbalik.

Studi menunjukkan bahwa skala sikap populis yang dibangun dari item-item ini setidaknya sama baiknya atau lebih baik daripada instrumen alternatif (Castanho Silva et al., 2020). Details of scale construction are in supplementary material.

Survei tersebut mengukur identitas partai responden mengikuti format ANES. Responden yang mengidentifikasi dengan partai Demokrat atau Republik ditanya apakah mereka merasa kuat atau tidak tentang identifikasi partai mereka dalam pertanyaan lanjutan. Mereka yang menjawab tidak mengidentifikasi diri dengan partai mana pun (Independen) langsung ditanya apakah merasa lebih dekat dengan Partai Demokrat, Partai Republik, atau tidak keduanya. Variabel pengukur derajat identifikasi partai dibuat dengan memberikan nilai 3 untuk Demokrat kuat, 2 untuk Demokrat yang tidak merasa kuat identitasnya (Demokrat lemah), 1 untuk Independen yang merasa dekat dengan partai Demokrat, 0 untuk Independen

murni yang tidak merasa dekat dengan partai mana pun, 1 untuk In tanggungan condong ke Partai Republik, 2 untuk Republik lemah, dan 3 untuk Republik kuat. Analisis menggunakan variabel kategori identifikasi partai dan ukuran kekuatan identifikasi ordinal untuk menguji hipotesis.

Akhirnya, penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa jenis kelamin, pendidikan, ras, pendapatan, dan usia berhubungan dengan sikap populis dan dukungan untuk partai populis (Golder 2003; Givens 2004; Arzheimer dan Carter 2006; Arzheimer 2009; Lucassen dan Lubbers 2012; Tsatsanis et al. 2018; Rico dan Anduiza 2019; Erisen et al., 2021), sehingga survei juga mengukur faktor-faktor tersebut.

Sampel 1712 warga negara kelahiran AS dikumpulkan melalui Lucid antara Juli dan Agustus 2022. Rencana pra-analisis menjelaskan keputusan tentang ukuran sampel (tersedia di [https://osf.io/79w5k?view\\_only=25f37005f7d7418c9c9695e25c53a6c6](https://osf.io/79w5k?view_only=25f37005f7d7418c9c9695e25c53a6c6) ).

Sampel menggunakan kuota untuk pendidikan, usia, pendapatan, ras, dan kelompok gender dan mencocokkan proporsi sensus 2020 dengan faktor-faktor tersebut. Survei tersebut juga mencakup serangkaian pemeriksaan perhatian dan manipulasi faktual (Kane dan Barabas 2019) untuk memastikan kualitas jawaban. Rincian demografi dalam sampel, perbandingan antara sampel dan proporsi populasi di setiap kelompok demografis, serta informasi tentang kepatuhan terhadap prinsip-prinsip penelitian etis, kata-kata pertanyaan, dan pemeriksaan perhatian yang digunakan dalam survei, dapat ditemukan di bagian materi tambahan.

Parameter yang menarik adalah efek kausal rata-rata (ACE) dari isyarat partisan pada dukungan pesan di antara

partisan. Hal ini tergambar dari perbedaan proporsi dukungan terhadap pesan populis atau antipopulis antar kelompok yang menerima atau tidak menerima isyarat partisan, untuk setiap subkelompok partisan dan jenis pesan. Misalnya, kita dapat menghitung perbedaan proporsi dukungan untuk pesan populis (p) di antara pemilih Demokrat (d) yang menerima isyarat bahwa Biden (b) mendukung pesan tersebut, dibandingkan dengan Demokrat yang menerima pesan yang sama tetapi tidak 't menerima isyarat (n) apa pun tentang pendukung pesan. Secara formal, biarkan D menunjukkan pemilih Demokrat dan P pesan populis:

$$\frac{1}{4} E \frac{1}{2} Y_i \delta_{bP} Y_i \delta_{nP} \text{ Pty: Id: } \frac{1}{4} D, \text{ Pesan } \frac{1}{4} P \text{ yb, d, p}$$

Ini memberikan delapan parameter kausal dengan memvariasikan isyarat (Trump versus Biden), identifikasi partai (Demokrat versus Republik), dan jenis pesan (populis versus anti-populis). Estimasi non-parametrik dari parameter kausal dan uji hipotesis efek nol dapat dicapai dengan menggunakan regresi logistik dari hasil pada kondisi perlakuan tanpa menggunakan isyarat partisan (kelompok kontrol) sebagai kategori referensi, untuk setiap subset data dengan identifikasi pihak dan jenis pesan secara terpisah.

Diketahui bahwa menggunakan variabel penyesuaian pra-perawatan meningkatkan ketepatan perkiraan ketika variabel penyesuaian pra-perawatan dikaitkan dengan hasil (Imbens dan Rubin 2015). Oleh karena itu, selain estimasi efek kausal tanpa memasukkan kovariat pra-perawatan, saya mengulangi tes di atas menggunakan model regresi untuk setiap subkelompok setelah memasukkan pendidikan, pendapatan, usia, jenis

kelamin, dan ras sebagai variabel penyesuaian.

### **Analisis empiris**

Tabel regresi lengkap untuk semua hasil yang disajikan di bagian ini ada di materi tambahan. Gambar 1 menunjukkan proporsi dukungan (sumbu y) untuk pesan populis (panel kanan) dan antipopulis (panel kiri) menurut kelompok perlakuan (sumbu x) di antara pemilih Demokrat dan Republik. Ukuran sampel di setiap kelompok disajikan di atas setiap batang, dan interval kepercayaan disajikan di bagian atas batang.

Pertimbangkan pertama panel kiri Gambar 1, yang menunjukkan dukungan publik untuk pesan anti-populis, "Presiden yang baik harus bergabung dengan perwakilan lainnya, mendengarkan para spesialis, dan membuat kompromi untuk melakukan yang terbaik bagi negara ini, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan rakyat." Sekitar 55% pemilih di kelompok kontrol mendukung pesan tersebut, terlepas dari identifikasi partai mereka.

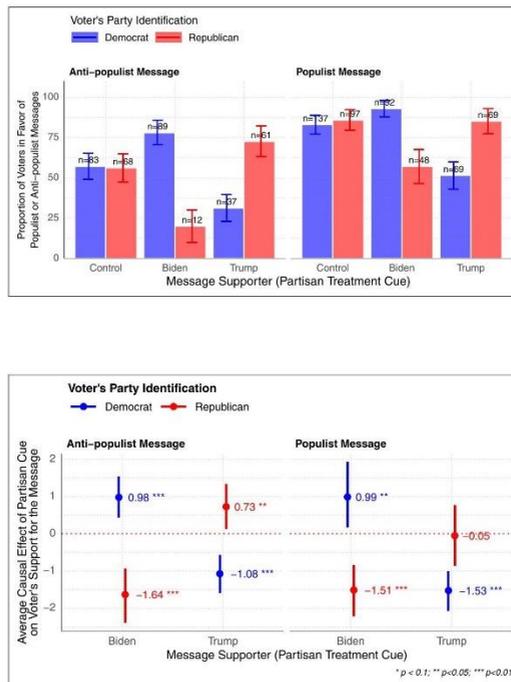
Dukungan itu berubah secara drastis ketika isyarat partisan diberikan di samping pesan tersebut. Lebih dari 78% Demokrat mendukung pesan tersebut ketika mereka diberi tahu bahwa Biden

mendukungnya, tetapi kurang dari 32% melakukannya ketika mereka diberi tahu bahwa Trump mendukung pesan tersebut, yang mewakili pengurangan 46 poin persentase untuk mendukung anti-populis. ide. Reaksi pemilih Republik terhadap isyarat partisan serupa. Rata-rata hanya 20% yang mendukung posisi anti-populis ketika diberi tahu bahwa Biden mendukungnya, tetapi 73% melakukannya ketika diberi tahu bahwa Trump mendukung posisi itu. Pola yang sama muncul dengan pesan populis (panel kanan Gambar 1).

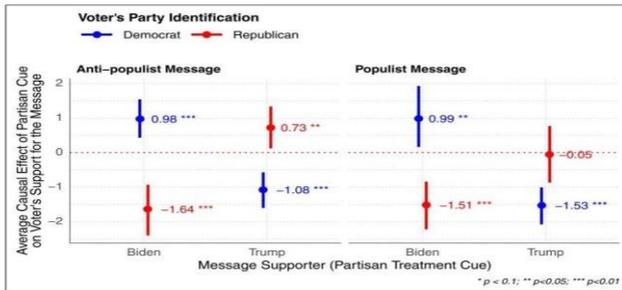
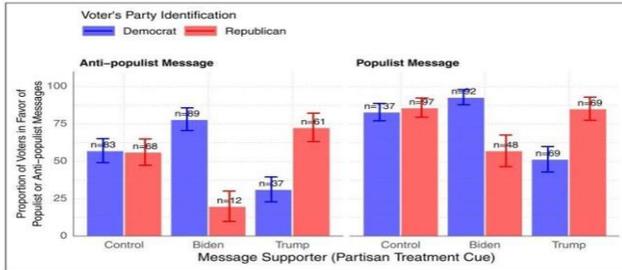
Mari kita beralih ke hipotesis pertama. Tes disajikan pada Gambar 2. Titik-titik pada gambar menunjukkan perkiraan ACE, dan batang menunjukkan interval kepercayaan 95%. Mereka mewakili perbedaan proporsi pendukung pesan populis (panel kanan) dan anti-populis (panel kiri) untuk setiap kelompok perlakuan (sumbu x) di antara pemilih Demokrat dan Republik. Angka- angka mewakili perkiraan dalam log odds yang diperoleh dari empat regresi logistik dukungan untuk pesan pada isyarat partisan untuk setiap subset pemilih (Demokrat atau Republik) dan pesan yang mereka terima (populis atau anti-populis).

Kelompok kontrol dalam setiap kasus (tidak ada isyarat partisan) digunakan sebagai garis dasar untuk menghitung efeknya. Nilai positif (negatif) berarti proporsi pendukung pesan lebih besar (lebih kecil) pada kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol. Gambar 2 menunjukkan bukti kuat yang mendukung hipotesis pertama. Pemilih Demokrat 2,7 kali lebih mungkin setuju dengan pesan populis atau anti-populis jika mereka tahu bahwa Biden mendukung posisi itu daripada pemilih Demokrat yang tidak menerima isyarat Biden. Hal sebaliknya terjadi jika para pemilih ini menerima isyarat bahwa Trump mendukung pesan tersebut. Mengubah isyarat partisan dan memberi tahu pemilih Demokrat bahwa Trump mendukung pesan tersebut menyebabkan penurunan 78% dalam kemungkinan mendukung pesan populis dan pengurangan 65% dalam kemungkinan mendukung posisi anti-populis. Hasil untuk pemilih Republik analog dalam hal arah dan besarnya. Pemilih Republik yang menerima isyarat bahwa Trump (Biden) mendukung pesan tersebut lebih (kurang) cenderung mendukung pesan populis atau anti-populis daripada pemilih Republik yang tidak menerima isyarat partisan. Efeknya sangat

besar dan signifikan dalam semua kasus, kecuali pesan populis ketika Partai Republik diberitahu bahwa Trump mendukungnya. Mungkin mengejutkan, tidak ada perbedaan antara kontrol (tidak ada isyarat partisan) dan kelompok perlakuan dalam kasus tersebut. Salah satu alasan yang mungkin adalah sudah ada dukungan besar untuk populis.



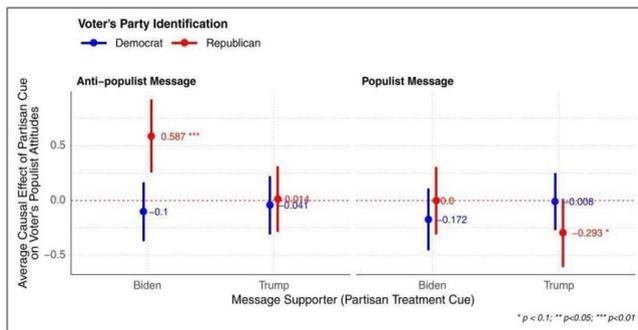
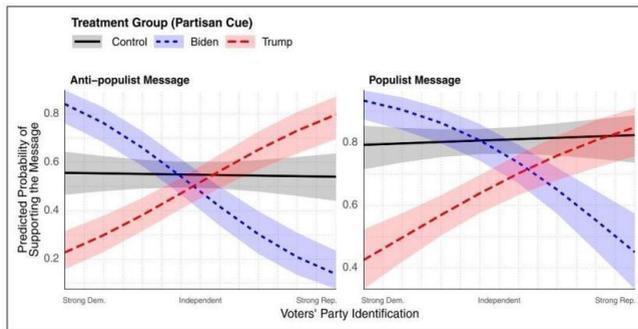
Gambar 1. Proporsi dukungan (sumbu y) untuk pesan populis (panel kanan) dan anti-populis (panel kiri) menurut kelompok perlakuan (sumbu x) di antara Demokrat dan Republik. Interval kepercayaan 95% diwakili oleh ujung atas batang



Gambar 2. Estimasi poin dan interval kepercayaan 95% dari efek kausal rata-rata isyarat partisan (sumbu x) pada dukungan untuk pesan populis (panel kanan) dan anti-populis (panel kiri) di antara pemilih Demokrat dan Republik. Variabel terikatnya adalah rata-rata dukungan pemilih terhadap pesan tersebut. Perkiraan mewakili koefisien regresi logistik. Angka-angka tersebut berada dalam log odds, dan bintang menunjukkan level nilai-p.

Pesan di antara Partai Republik dalam kelompok kontrol, mungkin sebagai efek pra-paparan terhadap retorika Trump atau kecenderungan pemilih Republik yang lebih tinggi untuk mendukung posisi populis. Gambar 3 mendukung interpretasi ini. Ini menunjukkan kecenderungan yang sedikit meningkat dalam

peluang mendukung pesan populis di kelompok kontrol (no isyarat partisan) saat kita beralih dari Demokrat yang kuat ke Republik yang kuat. Bagaimanapun, ada penurunan 78% di antara Partai Republik dalam kemungkinan mendukung pesan populis jika para pemilih ini diberi tahu bahwa Biden mendukungnya. Sekarang mari kita pertimbangkan hipotesis kedua. Gambar 3 menunjukkan probabilitas yang diprediksi mendukung anti Ferreri.



Gambar 3. Probabilitas prediksi dukungan untuk pesan anti-populis (panel kiri) atau populis (panel kanan) sebagai fungsi dari kekuatan identifikasi partai (sumbu x) untuk

kelompok perlakuan yang berbeda

Gambar 4. Estimasi poin dan interval kepercayaan 95% dari efek kausal rata-rata isyarat partisan (sumbu x) tentang dukungan untuk pesan populis (panel kanan) atau anti-populis (panel kiri) di antara pemilih Demokrat dan Republik. Variabel terikatnya adalah sikap populis pemilih. Perkiraan mewakili koefisien regresi linier. Bintang-bintang menunjukkan tingkat nilai-p.

Pesan populis (panel kiri) atau populis (panel kanan) sebagai fungsi dari kekuatan identifikasi partai (sumbu x) untuk kelompok perlakuan yang berbeda (kode warna). Sekali lagi, efek isyarat partisan jelas. Pemilih Demokrat yang kuat memiliki lebih dari 88%

peluang untuk mendukung pesan populis ketika isyarat partisan diberikan yang mengatakan bahwa Biden mendukung pesankaituus.al rata-rata isyarat partisan (sumbu x) di antara pemilih Dukungan itu turun menjadi 40% ketika isyarat partisan mengatakan bahwa Trump mendukung pesan tersebut, bukan Biden. Efek bagi pemilih Republik yang menerima isyarat partisan Trump (atau Biden) analog dengan efek Demokrat yang menerima isyarat partisan Biden (atau Trump): Pemilih secara substansial mendukung (menentang) pesan tersebut, baik populis atau anti-populis satu, jika berasal dari partai yang didukung oplemh idliuhkungan partai terhadap gagasan populis, meskipun dukungan pemilih (menolak). Efek dari isyarat partisan antara Demokrat dan Republik berfungsi sebagai cermin terbalik satu sama lain. Semakin kuat identifikasi partai pemilih, semakin kuat efeknya.

Akhirnya, pertimbangkan Gambar 4. Ini menunjukkan efek Demokrat dan Republik pada sikap populis pemilih. Ini

memberikan tes untuk hipotesis H3 dan H4. Secara umum, nilai-nilai dalam skala sikap kerakyatan tidak terpengaruh oleh isyarat partisan, dan hanya terdapat satu hasil yang signifikan pada tingkat signifikansi 0,05. Salah satu interpretasi yang mungkin dari hasil ini adalah bahwa sikap populis tidak mudah dimanipulasi (anti-) pesan populis adalah. Kemungkinan lain adalah keterbatasan desain penelitian. Sikap populis ditangkap oleh skala yang dibangun dari banyak subitem. Hubungan antara isyarat partisan dan setiap subitem skala mungkin tidak sejelas hubungan antara isyarat dan pesan (anti-)populis bagi responden. Eksperimen di masa depan dapat menyelidiki kemungkinan ini dengan mengubah subdimensi skala populis dan isyarat partisan.

Meskipun demikian, mendukung H4, pemilih Republik menunjukkan tingkat sikap populis yang lebih tinggi ketika mereka menerima isyarat bahwa Biden mendukung pesan anti-populis. Artinya, posisi anti populis yang eksplisit di kalangan pemimpin Demokrat bisa memperkuat sikap populis di kalangan pemilih Republik.

### **Kesimpulan**

Artikel ini menyelidiki pengaruh isyarat partisan terhadap dukungan pesan populis dan anti-populis di kalangan pemilih Demokrat dan Republik. Pemilih secara acak ditugaskan untuk menerima isyarat bahwa Biden atau Trump mendukung pesan tersebut. Grup kontrol menerima pesan yang sama tetapi tidak menerima isyarat partisan apa pun. Artikel tersebut menunjukkan bahwa dukungan atau penentangan pemilih terhadap pesan-pesan populis atau anti-populis sangat dipengaruhi oleh identifikasi partai pemilih dan isyarat partisan yang mereka terima.

Pemilih Demokrat lebih cenderung mendukung

(menentang) pesan tersebut, baik populis atau anti-populis, jika mereka menerima isyarat bahwa Biden (Trump) mendukung pesan tersebut. yang kuat (misalnya, anti-imigrasi). Masuk akal bahwa dalam Demikian pula, pemilih Republik lebih cenderung mendukung (menentang) pesan ketika diberi tahu bahwa Trump (Biden) mendukungnya.

Hasil yang disajikan di sini memiliki implikasi penting bagi pemahaman kita tentang peran populisme modern dalam politik elektoral. Para pemimpin populis memperoleh dasar pemilihan yang signifikan di berbagai negara demokrasi di seluruh dunia, dan literatur ilmiah telah menyempurnakan konsep populisme untuk menjelaskan fenomena itu dengan lebih baik. Salah satu kontribusi utama ke arah itu mendefinisikan populisme sebagai ideologi “berpusat pada orang kurus” yang isinya menggambarkan politisi populis sebagai pemimpin anti kemapanan dan anti elitis yang memproklamirkan diri untuk mewujudkan keinginan “orang baik” yang didefinisikan secara longgar. dan berjanji untuk menjalankan kekuasaan atas nama kehendak itu, meskipun itu berarti dis mengenai prosedur demokrasi yang dimediasi secara institusional (Mudde dan Rovira Kaltwasser, 2017; Mansbridge dan Macedo 2019). Para pemimpin ini sering didefinisikan berbeda dengan perwakilan yang menerima sifat pluralistik politik modern dan berkomitmen untuk akuntabilitas, membuat kompromi, dan proses pengambilan keputusan yang dimediasi oleh institusi dan partai (Caramani 2017). Mengingat

keberhasilan elektoral para pemimpin populis, literatur berhipotesis bahwa pemilih mendukung para pemimpin ini karena para pemilih mendukung ide-ide populis (anti-elitisme, people-centrism) yang dimiliki para pemimpin tersebut

menyebarkan. Makalah ini menunjukkan bukti kuat bahwa panah sebab-akibat berjalan ke arah yang berlawanan. Pemilih lebih cenderung mendukung (menentang) baik pesan populis atau anti- populis setiap kali mereka mengetahui bahwa pesan semacam itu didukung oleh partai yang mereka sukai (lawan).

Selain itu, makalah ini menyelidiki efek dari isyarat partisan pada sikap populis pemilih. Namun, dalam kasus ini, efek isyarat partisan sebagian besar nihil. Studi selanjutnya dapat mengeksplorasi mengapa isyarat partisan memengaruhi dukungan untuk pesan (anti)populis tetapi, tampaknya, tidak memengaruhi sikap populis. Penting juga untuk dicatat bahwa hasil dalam artikel ini tidak mengecualikan arah kausal alternatif, yaitu kemungkinan sikap populis pemilih memengaruhi dukungan mereka terhadap pemimpin populis, atau bahwa kedua mekanisme tersebut bekerja secara bersamaan.

Ada kemungkinan bahwa dalam konteks identifikasi partai yang lemah dan krisis ekonomi atau politik yang kuat, gagasan populis memengaruhi identifikasi partai dan perilaku elektoral. Penelitian dari perspektif komparatif dapat menginvestigasi kemungkinan tersebut, mengikuti jalur yang telah diprakarsai oleh sarjana lain (Hawkins dan Littvay 2019).

Bagaimanapun, hasil dalam artikel ini menimbulkan pertanyaan apakah dan kapan ide-ide populis yang “berpusat tipis” “terlalu tipis” untuk menggerakkan pemilihan dan bersaing dengan motivasi pemilih yang lebih dalam, yang sering dinyatakan sebagai partai lama. identifikasi atau preferensi untuk ideologi "tebal" tertentu (misalnya,

konservatisme sosial) atau posisi kebijakan konteks lain, posisi ideologi pemilih yang “tebal”, seperti konservatisme sosial mereka, memainkan peran yang serupa dengan isyarat partisan dan identifikasi partai yang dibahas di sini. Misalnya, pemilih dapat

mendukung seorang pemimpin karena posisi anti-imigran yang kuat dari pemimpin tersebut dan mungkin cenderung setuju dengan ide-ide (anti-) populis jika pemimpin tersebut mengadopsi ide-ide ini dalam retorikanya di samping posisi anti-imigrasinya. Jika demikian, seperti argumen yang dibahas dalam artikel ini, dukungan pemilih untuk pesan-pesan populis mungkin sebagian merupakan efek daripada penyebab dukungan electoral Deklarasi kepentingan yang bertentangan. Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

#### **Pendanaan**

Penulis tidak menerima dukungan keuangan untuk penelitian, penulisan, dan/atau publikasi artikel ini.

#### **Referensi**

- Akkerman A, Mudde C and Zaslove A (2014) Seberapa populis masyarakatnya? Mengukur sikap populis pada pemilih. *Studi Politik Komparatif* 47(9): 1324–1353.
- Akkerman A, Zaslove A and Spruyt B (2017) 'We the people' or 'we the people'? Perbandingan dukungan untuk populis radikal kanan dan populis radikal kiri di Belanda. *Ulasan Ilmu Politik Swiss* 23(4): 377–403.
- Albertazzi D dan McDonnell D (2007) *Populisme Abad Dua Puluh Satu: Momok Demokrasi Eropa Barat*. Peloncat.
- Arzheimer K (2009) Faktor kontekstual dan suara ekstrem kanan di Eropa Barat, 1980-2002. *Jurnal Ilmu Politik Amerika* 53(2): 259–275.

- Arzheimer K dan Carter. E (2006) Struktur peluang politik dan kesuksesan partai ekstremis sayap kanan. *Jurnal Penelitian Politik Eropa* 45(3): 419–443.
- Barber M and Pope JC (2019) Apakah partai mengalahkan ideologi? Dis melibatkan partai dan ideologi di Amerika. *Ulasan Ilmu Politik Amerika* 113: 1–17.
- Bartels LM (2002) Di luar penghitungan berjalan: Bias partisan dalam persepsi politik. *Perilaku Politik* 24(2): 117–150.
- Bonikowski B dan Gidron N (2016) Gaya populis dalam politik Amerika: Wacana kampanye kepresidenan, 1952-1996. *Kekuatan Sosial* 94(4): 1593–1621.
- Campbell A, Converse PE, Miller WE, dkk. (1960) *Pemilih Amerika*. Chicago: Universitas Chicago Press.
- Caramani D (2017) Will vs. Reason: Bentuk representasi politik populis dan teknokratis dan kritik mereka terhadap pemerintahan partai. *Ulasan Ilmu Politik Amerika* 111(1): 54–67.
- Castanho Silva B, Jungkunz S, Helbling M, dkk. (2020) Perbandingan empiris tujuh skala sikap populis. *Triwulanan Penelitian Politik* 73(2): 409– 424.
- Erisen C, Guidi M, Martini S, dkk. (2021) Korelasi Psikologis Sikap Kerakyatan. *Psikologi Politik* 42: 149–171.
- Marcos-Marne H, Plaza-Colodro C and Freyburg T (2020) Siapa yang memilih partai baru? Pemungutan suara ekonomi, ideologi politik dan sikap populis Mudde, Cas. 2017.” *Populisme: pendekatan ideasional*. Di dalam: *The Oxford Handbook of Populism* Cristobal Rovira Kaltwasser, Paul A. Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy. *Politik Eropa Barat* Oxford University Press, Vol 43, hlm. 1– 21.
- Geurkink B, Zaslove A, Sluiter R, dkk. (2020) Sikap populis, kepercayaan politik, dan kemanjuran politik eksternal: Anggur lama dalam botol baru? *Ilmu Politik* 68(1): 247–267.

- Givens TE (2004) Kesenjangan gender kanan yang radikal. *Komparatif Ilmu Politik* 37(1): 30–54.
- Golder M (2003) Menjelaskan variasi keberhasilan partai ekstrim kanan di Eropa Barat. *Studi Politik Komparatif* 36(4): 432–466.
- Hawkins KA (2009) Apakah Chavez merakyat? Mengukur wacana populis dalam perspektif komparatif. *Studi Politik Komparatif* 42(8): 1040–1067.
- Hawkins KA dan Rovira Kaltwasser C (2017) Pendekatan ideasional terhadap populisme. *Tinjauan Penelitian Amerika Latin* 52(4): 513–528.
- Hawkins K dan Littvay L (2019) *Populisme AS Kontemporer dalam Perspektif Komparatif*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hawkins KA, Scott R dan Mudde C. 2012. “Mengukur populis sikap.” Hawkins K, Baca M dan Pauwels T (2017) “Populisme dan penyebabnya.” Di dalam: *Oxford Handbook of populism* Cristóbal Rovira Kaltwasser, Paul A Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy. Oxford, Inggris: Oxford University Press, hlm. 267–286.
- Hawkins KA, Aguilar R, BrunoSilva C, wasser Cristóbal Rovira Kalt, dkk. (2019) Mengukur Wacana Populis: Basis Data Populisme Global. Dalam: Dipresentasikan pada Konferensi Tahunan EPSA 2019 di Belfast. Reino UnidoJuni.
- Hawkins KA, Rovira Kaltwasser C and Andreadis I (2020) Aktivasi Sikap Kerakyatan. *Pemerintah dan Oposisi* 55(2): 283–307.
- Hieda T, Zenkyo M and Nishikawa M (2021) Apakah populis mendukung populisme? Pemeriksaan melalui survei online setelah pemilihan Tokyo Metropolitan Assembly 2017. *Politik Partai* 27(2): 317–328.
- Hunger S dan Paxton F (2021) Apa kata kuncinya? Tinjauan tematis tentang keadaan penelitian populisme dalam ilmu politik. *Penelitian dan Metode Ilmu Politik* 10: 1–17.

- Imbens Guido W dan Rubin DB (2015) *Inferensi Kausal dalam Ilmu Statistik, Sosial, dan Biomedis: Sebuah Pengantar*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ivaldi G, Lanzone ME and Woods D (2017) Varietas Populisme dalam spektrum kiri-kanan: Kasus front nasional, liga utara, podemos, dan pergerakan bintang lima. *Ulasan Ilmu Politik Swiss* 23(4): 354–376.
- Kane JV and Barabas J (2019) Tidak ada salahnya memeriksa: menggunakan pemeriksaan manipulasi faktual untuk menilai perhatian dalam eksperimen. *Jurnal Ilmu Politik Amerika* 63(1): 234–249.
- Kriesi H (2014) Tantangan Kerakyatan. *Politik Eropa Barat* 37(2): 361–378. Legorano G dan Mesco M (2017) “Badai Populis Mengaduk di Italia.” *Wall Street Journal* (12 Mei 2017). <https://www.wsj.com/articles/a-populisstorm-stirs-in-italy-1494596762>. (Diakses 27 Januari 2022).
- Loew N and Faas T (2019) Antara ideologi tipis dan tuan rumah: bagaimana sikap populis berinteraksi dengan preferensi kebijakan dalam membentuk perilaku pemilih. *Representasi* 55(4): 493–511.
- Lucassen G dan Lubbers M (2012) Siapa takut apa? Menjelaskan preferensi sayap kanan jauh di Eropa dengan membedakan persepsi budaya dan ancaman etnis ekonomi. *Studi Politik Komparatif* 45(5): 547–574.
- Mair P (2002) *Demokrasi Kerakyatan vs Demokrasi Partai*. Dalam: *De mocracies dan Tantangan Kerakyatan*. London, Inggris, Inggris: Palgrave Macmillan, hlm. 81–98. (diakses 19 Februari 2022)
- Mansbridge J dan Macedo S (2019) *Populisme dan teori demokrasi*. *Tinjauan Tahunan Hukum dan Ilmu Sosial* 15: 59–77.
- Maret L (2017) *Populisme kiri dan kanan dibandingkan: Kasus Inggris*.

- Jurnal Politik dan Hubungan Internasional Inggris 19(2): 282– 303.
- Marcos-Marne H (2020) Kisah populisme? Penentu pemungutan suara untuk partai populis sayap kiri di Spanyol. *Ilmu Politik* 69(4): 1053–1071.
- Mudde C (2017) Populisme: Pendekatan ideasional. Di dalam: Kaltwasser CR, Taggart PA, Espejo PO, dkk. (eds) Bab. 2 dalam Buku Pegangan Populisme Oxford.
- Mudde C dan Rovira Kaltwasser C (2017) Populisme: Pengantar yang Sangat Singkat. Oxford: Oxford University Press.
- Müller WC (2004) Pemilihan parlementer di Austria. *Studi Pemilu* 23(2): 346– 353.  
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261379403000817>
- Norris P dan Inglehart R (2019) Reaksi Budaya: Trump, Brexit, dan Populisme Otoritarian. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oliver JE and Rahn WM (2016) Bangkitnya trumpenvolk: Populisme dalam pemilu 2016. *ANNALS Akademi Ilmu Politik dan Sosial Amerika* 667(1): 189–6206.
- Ostiguy P (2017) Populisme: pendekatan sosial budaya. Dalam: *The Oxford Handbook of Populism* Cristobal Rovira Kaltwasser, Paul
- A. Taggart, Paulina Ochoa Espejo, and Pierre Ostiguy. Cambridge: Oxford University Press.
- Rico G dan Anduiza E (2019) Korelasi ekonomi sikap populis: analisis sembilan negara Eropa setelah resesi besar. *Acta Politica* 54(3): 371– 397.
- Rodrik D (2018) Populisme dan ekonomi globalisasi. *Jurnal kebijakan bisnis internasional* 1(1–2): 12–33.
- Rooduijn M, Van Kessel S, Froio C, dkk. (2019) The PopuList: Tinjauan Partai Populis, Kanan Jauh, Kiri Jauh, dan Eurosceptic di Eropa. [www.popu-list.org](http://www.popu-list.org) Silva BC,

- Andreadis I, Anduiza E, dkk. (2018) Survei opini publik: skala baru. Dalam: KA Hawkins dan RE Carlin (eds), Pendekatan Ideasional terhadap Populisme. Routledge, hlm. 150–177. Levente Littvay, dan Cristóbal Rovira Kaltwasser.
- Silva C, Bruno, Jungkunz S, dkk. (2020) Perbandingan empiris tujuh skala sikap populis. *Kuartal Riset Politik* 73(2): 409–424.
- Tsatsanis E, Andreadis I and Teperoglou E (2018) Populisme dari bawah: korelasi sosioekonomi dan ideologis dari sikap massa di Yunani. *Masyarakat dan Politik Eropa Selatan* 23(4): 429–450.
- Van Hauwaert, Steven M and Van Kessel S (2018) Melampaui protes dan ketidakpuasan: analisis lintas negara tentang pengaruh sikap populis dan posisi isu terhadap dukungan partai populis. *Jurnal Penelitian Politik Eropa* 57(1): 68–92.
- Weisskircher M<sup>es</sup> (2020) Kekuatan AfD sayap kanan di Jerman timur: Perpecahan timur-barat dan banyak penyebab berada di belakang ”Populisme. *Kuartalan Politik* 91(3): 614–622.
- Weyland K (2021) Populisme sebagai strategi Politik: keunggulan pendekatan yang bertahan lama dan meningkat. *Ilmu Politik* 69(2): 185–189.
- Wuttke A, Schimpf C and Schoen H (2020) Ketika keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya: pada konseptualisasi dan pengukuran sikap populis dan konstruksi multidimensi lainnya. *Ulasan Ilmu Politik Amerika* 114(2): 356–374.
- Zulianello M (2020) Varietas partai populis dan sistem kepartaian di Eropa: dari yang canggih hingga penerapan skema klasifikasi baru hingga 66 partai di 33 negara. *Pemerintah dan Oposisi* 55(2): 327–347.



